PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021-2026

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 – 2026.

BAB I
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5(lima) tahunan.

4. Rencana

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
7. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

18. Rencana

18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatifuntuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
21. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
22. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
23. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara
24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen kebijakan pemerintahan yang menjadi kompas penunjuk arah sekaligus sebagai bingkai bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan semua Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pembangunan.
(2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan pada periode sebelumnya sekaligus memproyeksikan kebijakan pembangunan dan rencana capaian untuk 5 (lima) tahun kedepan;
    b. menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, KUA dan PPAS serta RAPBD;

c. menjadi

c. menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan dalam periode menengah yangbersangkutan; dan
d. sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

BAB II
ISI DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD meliputi:
a. Bab I pendahuluan;
b. Bab II gambaran umum kondisi Daerah;
c. Bab III gambaran keuangan Daerah;
d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkatdaerah;
h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
i. Bab IX penutup.

(2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN
EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(3) Hasil .

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu pada
tanggal 23 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 03/2021

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 - 2026

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan peraturan yang ditetapkan karena perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, yakni ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah ...

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021–2026 terdiri dari 5 (lima) BAB dan 8 (delapan) Pasal serta lampiran Rencana Pembangunan yang memuat: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi Daerah; Bab III gambaran keuangan; Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;dan Bab IX penutup.

II. PASAL DEMI
PASALPasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 124.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang berlimpah sepatutnya kita Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas Berkat dan Kehendak-Nya semata maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD merupakan dokumen yang menjadi pedoman pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan yang mencakup penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, Penjabaran visi dan misi, Perumusan Tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program prioritas pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah dan kajian terhadap lingkungan hidup strategis dengan mempedomani RPJMN, RPJMD Provinsi NTT dan RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005- 2025. RPJMD memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

Spirit Paradigma ***"DESA SEJAHTERA"*** membingkai arah pembangunan daerah tahun 2021-2026. Muara pembangunan tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu Serambi Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen ini hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna bila tidak ada komitmen bersama dari semua pihak dalam implementasinya. Karena itu dengan semangat ***Nekaf Mese Ansaof Mese*** (Sehati Sejiwa) dan dengan penuh kerendahan hati saya mengharapkan dukungan dari semua Pemangku Kepentingan yang berada di wilayah ***Salu Miomaffo Kuluan Maubes,*** Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Timor Tengah Utara yang Sejahtera.

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

DRS. JUANDI DAVID

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI I

DAFTAR GAMBAR V

DAFTAR TABEL IX

BAB I. PENDAHULUAN I.1

1.1. Latar Belakang I.1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan I.4

1.3. Hubungan Antar Dokumen I.11

1.3.1. Hubungan antara RPJMD dan RPJMN I.11

1.3.2. Hubungan antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ..... I. 11

1.3.3. Hubungan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara I.11

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW I.12

1.3.5. Hubungan antara RPJMD dan RKPD I.12

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah I.12

1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya. I.13

1.4. Maksud dan Tujuan I.14

1.4.1. Maksud I.14

1.4.2. Tujuan I.14

1.5. Sistematika Penulisan I.14

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1

2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1

2.1.1. Geografis dan Wilayah Administrasi II.1

2.1.2. Kependudukan-Demografi II.20
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah II.22
2.1.3.1. Kawasan Lindung II.22
2.1.3.2. Kawasan Budidaya II.24
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana II.30
2.1.4.1. Banjir II.30
2.1.4.2. Tanah Longsor II.30
2.1.4.3. Angin Taufan II.31
2.1.4.4. Kekeringan, Kebakaran dan Hama Belalang II.31
2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Dalam Pembangunan Daerah II.31
2.1.5.1. Daya Dukung Air II.32
2.1.5.1. Daya Dukung P II.35
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.36
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.36
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II.42
2.2.2.1. Pendidikan II.42
2.2.2.2. Kesehatan II.46
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga II.47
2.3. Aspek Pelayanan Umum II.49
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar II.49
2.3.1.1. Pendidikan II.49
2.3.1.2. Kesehatan II.56
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II.130
2.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah Sampai Dengan Tahun 2020 ..... II.135
2.6. Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II.154

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III.1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III.2

3.1.1.1.Kinerja Pendapatan Daerah III.3
3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah III.15
3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah III.18
3.1.2 Neraca Daerah III.20
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.30
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III.30
3.2.2. Analisis Pembiayaan III.36
3.3. Kerangka Pendanaan III.39
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III.39
3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah III.39
3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah III.45
3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah III.49
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan III.52

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH IV.1

4.1. Permasalahan Pembangunan IV.1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah IV.6
4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah IV.7
4.2. Isu Strategis IV.17
4.2.1. Penelaahan Isu Internasional IV.17
4.2.2. Penelaahan Isu Strategis RPJMN Tahun 2020-2024 ..... IV.21
4.2.3. Penelaahan Isu Strategis RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 ..... IV.25
4.2.4. Penelaahan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 ..... IV.30
4.2.5. Penelaahan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tetangga (Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang) IV.32
4.2.6. Penelaahan Isu Strategis RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005-2025 ..... IV.50
4.2.7. Isu Strategis RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021– 2026 ..... IV.58
4.2.8. Isu-isu strategis kewilayahan IV.67
4.2.8.1. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara IV.67
4.2.8.1. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara IV.67
4.2.8.2. Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Timor Tengah Utara IV.68

4.2.8.3. Indikator TPB yang Membutuhkan Upaya Tambahan IV.68

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN **V.1**

5.1 Visi.....V.1

5.2 Misi.....V.2

5.3 Tujuan dan Sasaran V.3

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH **VI.1**

6.1. Strategi.....VI.1

6.2. Arah Kebijakan VI.9

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah VI.12

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis VI.82

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH **VII.1**

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **VIII.1**

8.1. Indikator Kinerja Utama VIII.1

8.2. Indikator Kinerja Daerah VIII.5

BAB IX. PENUTUP.....**IX.1**

9.1. Pedoman Transisi.....IX.1

9.2. Kaidah Pelaksanaan.....IX.2

9.3. Perubahan RPJMD.....IX.3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten TTU II.3
Gambar 2.2. Peta Bentang Alam Kabupaten TTU II.4
Gambar 2.3. Peta CAT Pulau Timor II.11
Gambar 2.4. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih II.12
Gambar 2.5. Diagram Klasifikasi Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten TTU II.12
Gambar 2.6. Diagram Indeks Jasa Ekosistem Air Bersih II.15
Gambar 2.7. Laju serapan CO2 beberapa jenis pohon II.17
Gambar 2.8. Persentase Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten TTU II.18
Gambar 2.9. Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim II.20
Gambar 2.10. Pertumbuhan PDRB Tahun 2016–2020 ..... II.37
Gambar 2.11. Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Tahun 2016- 2020 ..... II.38
Gambar 2.12. PDRB Per KapitaTahun 2014 -2018 ..... II.39
Gambar 2.13. Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 ..... II.41
Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. TTU Tahun 2016 – 2020 ..... II.45
Gambar 2.15. Realisasi APM PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.51
Gambar 2.16. Realisasi Angka Melek Huruf Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 ..... II.52
Gambar 2.17. Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.53
Gambar 2.18. Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.54
Gambar 2.19. Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara dan dari jenjang SMP/MTs/Setara ke jenjang SMA/SMK/Setara di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 ..... II.55
Gambar 2.20. Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara dan dari jenjang SMP/MTs/Setara ke jenjang SMA/SMK/Setara di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 ..... II.56
Gambar 2.21. Realisasi AKI /100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 ..... II.57
Gambar 2.22. Realisasi AKB/1000 Kh Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.58

Gambar 2.23. Realisasi Panjang Jalan Kabupaten yang di bangun dan direahbilitasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.66

Gambar 2.24. Realisasi jaringan irigasi yang dibangun di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.67

Gambar 2.25. Realisasi capaian Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020.....II.69

Gambar 2.26. Capaian Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 .....II.70

Gambar 2.27. Realisasi Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosisl di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020.....II.74

Gambar 2.28. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kabupaten TTU Tahun 2017 – 2020 .....II.74

Gambar 2.29. Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020.....II.76

Gambar 2.30. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.77

Gambar 2.31. Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2017-2020.....II.78

Gambar 2.32. Capaian ketersediaan pangan di Kabupaten TTU pada tahun 2017 – 2020.....II.81

Gambar 2.33. Persentase Penduduk Ber KTP Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.85

Gambar 2.34. Rasio Penduduk Berakta Kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.86

Gambar 2.35 Rasio Penduduk Berakta Nikah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.87

Gambar 2.36. Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.88

Gambar 2.37. Persentase PKK Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ....II.89

Gambar 2.38. Jumlah BUMDes Terbentuk di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.90

Gambar 2.39. Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.91

Gambar 2.40. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020.....II.92

Gambar 2.40. Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 .....II.93

Gambar 2.41. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.94

Gambar 2.42. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.96

Gambar 2.43. Jumlah Koperasi Aktif di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ... II.98

Gambar 2.44. jumlah UKM yang dibina di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.99

Gambar 2.45. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.100

Gambar 2.46. Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 ..... II.101

Gambar 2.47. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.102

Gambar 2.48. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan bidang Persandian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.104

Gambar 2.49. Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.105

Gambar 2.50. Jumlah Desa yang memiliki Perpustakaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.106

Gambar 2.51. Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.107

Gambar 2.52. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.108

Gambar 2.53. Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata Kabupaten Timor Tengah UtaraTahun 2017 – 2020 ..... II.109

Gambar 2.54. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang PertanianKabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.112

Gambar 2.55. Jumlah Populasi Sapi Bali dan Jumlah ternak hasil IB di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.112

Gambar 2.56. Luas Areal Pakan Ternak (Ha) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.113

Gambar 2.57. Cakupan Bina Kelompok Petani Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.113

Gambar 2.58. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020 ..... II.117

Gambar 2.59. Jumlah IKM Terbina Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.118

Gambar 2.60. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.119

Gambar 2.61. Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan terbantu dan Jumlah Kelompok Nelayan Terbina Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.120

Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 ..... III.3

Gambar 3.2. Perkembangan Realisasi Pandapatan Daerah Kabupaten TTU Tahun 2016 – 2020 ..... III.4

Gambar 3.3. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020 ..... III.5

Gambar 3.4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020..... III.6

Gambar 3.5. Perkembangan Dana Transfer/Perimbangan Kabupaten TTU Tahun 2016 – 2020 ..... III.7

Gambar 3.6. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten TTU Tahun 2016-2020..... III.8

Gambar 3.7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 ..... III.15

Gambar 3.8. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Kabupaten TTU Tahun 2016-2020..... III.16

Gambar 3.9. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020..... III.18

Gambar 3.10. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2019..... III.19

Gambar 3.11. Perkembangan SiLPA Kabupaten TTU tahun 2016-2020..... III.20

Gambar 3.12. Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2020 ..... III.32

Gambar 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... IV.35

Gambar 6.1. Arah Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah provinsi NTT dan Arah Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026..... VI.10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Profil Bentang Alam di Wilayah Kabupaten TTU II.5

Tabel 2.2. Profil Sebaran Bentang Alam di 24 Kecamatan Kabupaten TTU II.6

Tabel 2.3. Nama dan Panjang Sungai Utama Menurut Kecamatan II.9

Tabel 2.4. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih II.13

Tabel 2.5. Distribusi Luasan Jasa Ekositem Pengaturan Iklim Kab. TTU Per Kecamatan (Ha) . II.13

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten TTU Keadaan Tahun 2020 ..... II.21

Tabel 2.7. Kondisi Daya Dukung Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara II.33

Tabel 2.8. Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 ..... II.35

Tabel 2.9. Patokan Nilai Koefisien Gini II.40

Tabel 2.10. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2019-2020 ..... II.43

Tabel. 2.11. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020..... II.46

Tabel 2.12. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020. II.47

Tabel 2.13. Jumlah Regu dan Peserta Napaktilas dan Karnaval Budaya Tahun 2015 – 2019.. II.48

Tabel 2.14. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2020. II.59

Tabel 2.15. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2020 II.60

Tabel 2.16. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.61

Tabel 2.17. Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020..... II.64

Tabel 2.18. Penetapan Lokasi Lingkungan perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK Bupati Nomor 352 Tahun 2014 ..... II.71

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020..... II.72

Tabel 2.20. Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020 ..... II.84

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.103

Tabel 2.22. Nama Obyek Wisata, Lokasi dan Jarak Tempuh dari Kefamenanu II.110

Tabel 2.23. Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan Tahun 2017 – 2019 ..... II.115

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.122

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.123

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.124

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pengawasan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.125

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sekretariat Dewan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.126

Tabel 2.29. Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020 ..... II.131

Tabel 2.30. Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2017-2020 ..... II.132

Tabel 2.31. Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 ..... II.133

Tabel 2.32. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2018 ..... II.134

Tabel 2.33. Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2017-2020 ..... II.135

Tabel 2.34. Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020 ..... II.136

Tabel 2.35. Jumlah Kategori Capaian Indikator Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II.156

Tabel 3.1 Perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah dan perbandingannya dengan target pendapatan daerah III.9

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2016-2020 ..... III.11

Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020 ..... III.14

Tabel 3.4 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020 ..... III.14

Tabel.3.5 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun 2016 - 2020 ..... III.17

Tabel 3.6 Neraca Kabupaten TTU Tahun 2016-2019 ..... III.21

Tabel 3.7 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2019 ..... III.26

Table 3.8 Kinerja Belanja Daerah 2016–2020 ..... III.33

Tabel 3.9 Rata–Rata Proporsi Belanja Daerah 2016 -2020 ..... III.34

Tabel3.10 Rata–Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2016 –2020 ..... III.35

Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur III.36

Tabel 3.12 Defisit Riil Anggaran Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 ..... III.37

Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 III.38

Tabel 3.14.Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026 ..... III.41

Tabel 3.15 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026... III.47

Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026 ..... III.50

Tabel.3.17 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 ..... III.53

Tabel 3.18.Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026 ..... III.55

Tabel.4.1. Faktor-Faktor Analisis SWOT IV.2

Tabel 4.2. Analisis SWOT dalam Indentifikasi Permasalahan Pembangunan di Kabupaten TTU IV.3

Tabel 4.3. Identifikasi keterkaitan permasalahan daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah untuk penentuan program pembangunan daerah Kabupaten TTU Tahun 2021 – 2026 ..... IV.6

Tabel 4.4. Isu-isu Strategis KLHS RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026 ..... IV.31

Tabel 4.5. Target Pencapaian Indikator TPB Kab. TTU Tahun 2021-2026 ..... IV.70

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ..... V.6

Tabel 5.2. Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ..... V.13

Tabel 6.1. visi, misi, tujuan , sasaran dan Stragegi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ..... VI.3

Tabel 6.2. Arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan 2021-2026 ..... VI.11

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ..... VI.13

Tabel 7.1. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026 Kabupaten Timor Tengah Utara.....VII.2

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026.....VII.6

Tabel. 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 .....VIII.2

Tabel 8.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 .....VIII.6

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan dilakukan berbasis potensi daerah, memperhatikan permasalahan yang ada serta mempertimbangkan tantangan dan isu-isu strategis yang sedang berkembang. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pembangunan yang SMART (*specific*/khusus, *measurable*/ dapat diukur, *attainable*/dapat dicapai, *realistic*/realistis, *timebound*/ memiliki batas waktu untuk mencapai target). Seiring dengan tujuan tersebut, maka sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia", sehingga perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pengertian Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi. Hal ini tertuang pula didalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 26 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD memberikan arah bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi sumber daya daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Optimalisasi potensi daerah tersebut diarahkan pada pencapaian visi dan misi yang dicanangkan oleh **Bupati Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. Eusabius Binsasi** yang dilantik pada tanggal **26 Februari 2021** sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten pada Nusa Tenggara Timur. Secara teknis dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini harus berpedoman dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Proses penyusunan RPJMD harus tetap memperhatikan pendekatan-pendekatan sebagai berikut : Pertama adalah Pendekatan Teknokratik, perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis dan diskusi dengan tenaga ahli sesuai dengan substansi. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga sebelumnya telah disusun RPJMD Teknokratik. Kedua adalah Pendekatan Partisipatif, perencanaan dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta

dapat menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu dalam proses penyusunan ini nanti akan diselenggarakan forum konsultasi publik dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Ketiga adalah Pendekatan Politik, perencanaan yang disusun dalam RPJMD merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara dan merupakan perwujudan dari visi dan misi Kepala dan wakil Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan pendanaan pembangunan lima tahunan beserta indikator dan target pencapaian kinerjanya. Hasil Rancangan RPJMD ini harus dibahas dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mendapatkan kesepakatan Awal dan Persetujuan Akhir

Keempat adalah Pendekatan *Top Down* dan *Bottom Up.* Perencanaan secara *top down* dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mandat maupun intruksi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara, dan menggali aspirasi dari seluruh Perangkat Daerah serta Desa dalam rangka menyusun strategi dan kebijakan untuk mensukseskan visi misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Kedudukan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahapan periode keempat dari pentahapan pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, kondisi lingkungan hidup strategis daerah, isu strategis internasional, nasional Maupun lokal serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya (2016-2021). Tujuan akhir pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005-2025 adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan disegala bidang serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional dan terpercaya, mempertahankan keseimbangan antar wilayah, memantapkan kapasitas pelayanan infrastruktur yang berkualitas serta meningkatkan daya saing daerah. Sejauh ini berbagai capaian pembangunan sebagaimana tampak pada sejumlah indicator kunci pembangunan seperti kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih

menempatkan Kabupaten TTU dibawah rata-rata capaian secara Provinsi NTT. Oleh karena itu dalam pembangunan lima tahun periode terakhir RPJPD kabupaten TTU Tahun 2005-2025 harus diupayakan akselerasi atau percepatan pembangunan agar terjadi perubahan atau kemajuan yang signifikan. RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 disusun pada era pandemic *Covid-19* belum berakhir. Dampak pandemic ini tidak hanya menyasar permasalahan dibidang kesehatan namun juga berpengaruh buruk terhadap sector-sektor lain seperti ekonomi dan pendidikan. Salah satu indicator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka -0,55. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemic ke hampir semua lapangan usaha. Oleh karena itu RPJMD ini mendapatkan tantangan yang cukup besar untuk dapat membuat scenario-skenario pembangunan yang dapat secara bertahap membangkitkan kembali perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara. Gambaran-ganbaran visioner atas kondisi diakhir periode RPJMD atau ditahun 2026 nanti (sebagaimana dapat dilihat pada Bab V) menjadi salah satu pemacu agar upaya yang akan dilakukan dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara dapat terarah dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Selanjutnya keterkaitan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya. RPJMD diterjemahkan dalam perencanaan tahunan yang disebut dengan RKPD. RPJMD juga diterjemahkan oleh masing-masing perangkat daerah kedalam dokumen lima tahunannya yang disebut Renstra-PD. RJPMD juga menjadi acuan dalam membuat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dengan demikian diharapkan RPJMD terintegrasi sampai dengan dokumen ditingkat Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021- 2026 disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya

meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
34. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
35. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010–2030 (Lembaran Daerah Propinsi NTT Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 45);
44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
45. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008–2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.1. Hubungan antara RPJMD dan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu- isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD KabupatenTimor Tengah UtaraTahun2021-2026.

1.3.2. Hubungan antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selain RPJMN,penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3.3. Hubungan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari tahap ke empat RPJPD KabupatenTimor Tengah Utara Tahun 2005-2025 dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaen Timor Tengah Utara adalah Terwujudnya Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Serambi Depan NKRI yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan periode keempat untuk perencanaan Tahun 2021–

2025 terutama diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar mampu mengikuti perkembangan disegala bidang serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang professional dan terpercaya, mempertahankan keseimbangan antar wilayah, memantapkan kapasitas pelayanan infrastruktur yang berkualitas serta meningkatkan daya saing daerah.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan berdasarkan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah

1.3.5. Hubungan antara RPJMD dan RKPD

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra - PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 1 angka 29 mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

1.3.7. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya.

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) *Sustainable Development Goals* (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

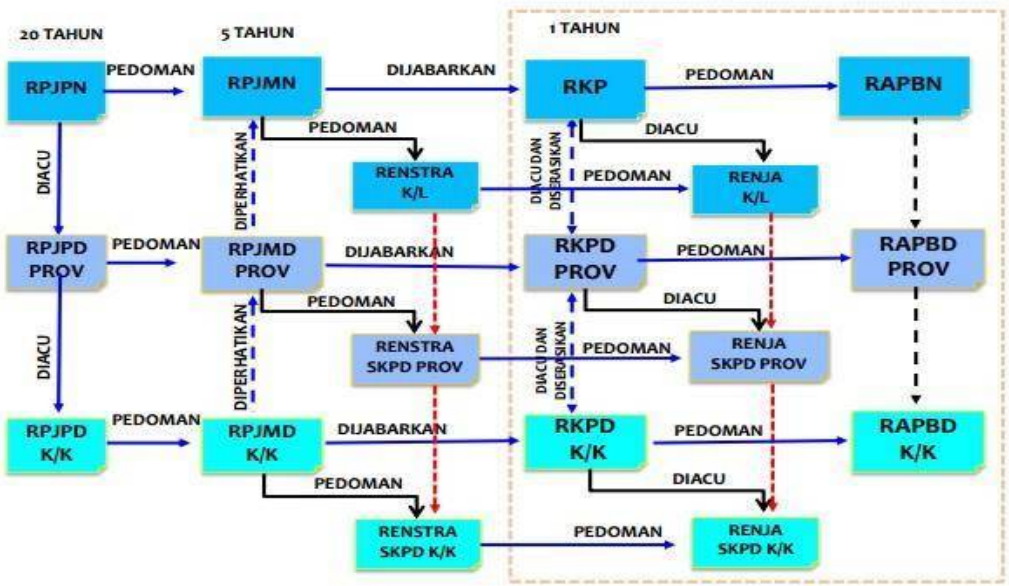

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen kebijakan pemerintahan yang menjadi kompas penunjuk arah sekaligus sebagai bingkai bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan semua Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan pembangunan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan pada periode sebelumnya sekaligus memproyeksikan kebijakan pembangunan dan rencana capaian untuk 5 (lima) tahun kedepan.
b. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, KUA dan PPAS serta RAPBD
c. Menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan dalam periode menengah yang bersangkutan.
d. Sebagai instrument untuk menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan RPJMD. Penyusunan RPJMD ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa telah menjadi sebuah keharusan bagi Bupati/Wakil Bupati

terpilih untuk menetapkan idenya membangun daerah dalam bentuk dokumen resmi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerahdan undang-undang tentang system perencanaan pembangunan nasional. RPJMD selain disusun secara teknokratis, politis dan partisipatif juga harus sinkron dan sinergi dengan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN, selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RTRW, serta menjadi rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan dalam periode yang bersangkutan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah yang dipaparkan pada bab ini mencakup 4 (empat) aspek yakni : 1) Aspek geografis dan demografis; 2) Aspek pelayanan umum; 3)Aspek kesejahteraan masyarakat, dan 4) Aspek daya saing daerah. Terhadap keempat aspek ini tidak hanya disajikan data pokok selama periode 2016-2021 tetapi juga diikuti dengan analisa mengenai trend perkembangan setiap item dengan tujuan untuk memperoleh sebuah gambaran secara garis besar tentang potret Kabupaten TTU. Dengan paparan data dan hasil analisis tersebut akan diketahui problema pembangunan dan potensi daerah yang dapat digali melalui suatu kemasan program yang tersusun secara sistematis.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini ada 3 (tiga) frame besar yang digambarkan yakni kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah. Kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah pada periode sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) guna memberikan gambaran tentang kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan selama kurun waktu 2016-2020 disajikan sebagai gambaran untuk mengetahui perbandingan proporsi anggaran antara belanja aparatur dengan belanja pembangunan serta pendapatan dan pengeluaran yang bersumber dari pembiayaan. Sementara kerangka pendanaaan merupakan alat teropong

untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah serta proyeksi pendapatan dan pendanaan belanja daerah untuk periode berikutnya.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni uraian tentang permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik yang bersifat internasional, nasional, regional maupun isu local. Permasalahan dan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil analisis pada bab 2 dan menjadi dasar bagi penyusunan prioritas pembangunan daerah yang diramu dalam visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021-2026

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mencerminkan cakupannya yakni uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah 2021-2026 sebagai tindak lanjut dari visi,-misi calon Bupati/Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada masa kampanye pemilukada tahun 2020 yang lalu. Paparan ini diikuti dengan penjelasan arah dan kata-kata kunci visi, penjelasan pernaytaan misi, pernyataan tujuan, pernayataan sasaran yang diikuti dengan indicator dan rencana target sasaran serta sebuah matriks keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Strategi, Arah Kebijakan dan program Pembangunan Daerah. Strategi disusun sebagai jalan atau cara untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bab 5, sedangkan arah kebijakan menguraikan secara detail arah atau cara dimaksud pada setiap tahun dalam periode 2021-2026 sedangkan program pembangunan merupakan program prioritas yang dipilih berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dianalisis.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat 2 (dua) hal pokok yakni indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Program prioritas yang dimaksudkan disini adalah program-program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program-program prioritas OPD yang dilengkapi dengan rencana target capaian setiap tahun dari setiap program dimaksud. Program-program ini kemudian ditargetkan alokasi pendanaannya sesuai skala prioritas daerah.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan indicator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum maupun daya saing daerah untuk mengukur pencapaian program berdasarkan ketiga aspek dimaksud pada akhir periode.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari RPJMD yang meliputi 2 (dua) hal yakni pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kevakuman pedoman dalam penyusunan RKPD pada akhir masa jabatan (RKPD 2027), sementara kaidah pelaksanaan dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan public ini dimana semua orang dan semua pemangku kepentingan wajib mentaatinya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.Geografis dan Wilayah Administrasi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten TTU terletak di Pulau Timor – salah satu pulau besar di antara gugusan pulau dalam wilayah Provinsi NTT.Kabupaten TTU merupakan daerah daratan dengan luas 2.669,70 km^{2}atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi NTT. Bagian utara wilayah TTU yang berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura), memiliki luas lautan ± 950 km^2 dengan panjang garis pantai ±50 km.

Kabupaten TTU adalah salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tanggara Timur (NTT) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Pemerintahan Kabupaten TTU terdistribusi dalam 24 Kecamatan dan 194 kelurahan/desa (11 kelurahan dan 183 desa).Seluruh Ibu Kota Kecamatan dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dan tersulit dari Kota Kefamenanu adalah Kecamatan Mutis dan Kecamatan Biboki Feotleu.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten TTU terletak diantara 9° 02' 48" dan 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" dan 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (183 Desa) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % meliputi areal seluas 2.065,19 km^2 atau 77,36 % dari luas wilayah TTU; sedangkan sisanya 604,51 km^2 atau 22,64 % mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1.676,51 km^2 atau 62,80 %. Berdasarkan data Lembaga Penelitian Tanah (LPT) Bogor (1974) memperlihatkan bahwa di Kabupaten TTU ditemukan 3 (tiga) jenis tanah yaitu : Tanah Litosol seluas 1.666,96 km^2 atau 62,44 %, Tanah Kompleks seluas 479,48 km^2 atau 17,96 % dan Tanah Glumosal 523,26 km^2 atau 19,60 %.

Hasil survei penyusunan rencana umum tata ruang wilayah memperlihatkan bahwa dari aspek kedalaman efektif tanah komposisi arealnya sebagai berikut: tanah dengan kedalaman efektif kurang dari 30 cm seluas 35.316 ha (13,2%); kedalaman 30-60 cm seluas 73.201 ha (27,4%); 60-90 cm seluas 16.354 ha (6,1%) dan kedalaman efektif diatas 90 cm dengan luas 142.099 ha (53,2 %). Kemampuan dan daya tahan tanah yang rawan erosi seluas 105.226 hektar (39,4%), dan sisanya 161.744 hektar (60,6%) merupakan tanah dengan struktur yang relatif stabil. Secara parsial tanah labil yang rawan erosi terdapat pada tiga wilayah kecamatan yakni Miomaffo Barat 37.921 hektar, Biboki Selatan 28.538 hektar, dan Biboki Utara 28.538 hektar.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten TTU termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan negara RDTL

dari 5 (lima) kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administratif Kabupaten TTU

c. Topografi

Dilihat dari aspek topografi, wilayah Kabupaten TTU pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian yang bervariasi yaitu: 177,06 km^2 (6,63 %) memiliki ketinggian < 100 m dpl; 1.499,45 km2 (56,17 %) memiliki ketinggian 100-500 m dpl dan 993,19 km2 (37,20 %) memiliki ketinggian > 500 m dpl. Secara detail kondisi topografi dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:

a. Daerah dengan ketinggian 0-25 m dpl : 6.519,69 Ha
b. Daerah dengan ketinggian 26-100 m dpl : 11.186,000 Ha
c. Daerah dengan ketinggian 101–500 m dpl : 149.944,935 Ha
d. Daerah dengan ketinggian 501-1000 m dpl : 88.908,875 Ha
e. Daerah dengan ketinggian diatas 1000 m dpl : 10.410,500 Ha

Ditinjau dari bentangan alam, di Kabupaten TTU terbagi atas 7 (tujuh) bentangan alam yaitu Dataran, Dataran Aluvial, Lembah Aluvial, Pantai, Pegunungan, Perbukitan dan Teras. Peta bentang alam Kabupaten TTU ditunjukkan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2.

Peta Bentang Alam Kabupaten TTU

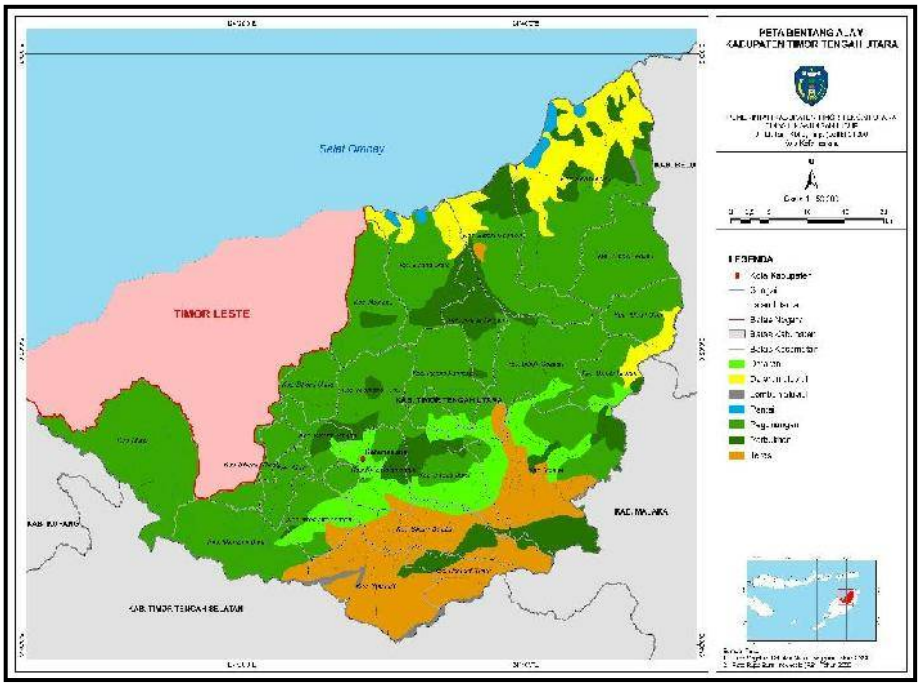

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Adapun sebaran jenis bentang alam dan luasannya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sedangkan sebaran Bentang Alam di 24 Kecamatan Kab. TTU ditunjukkan pada Tabel 2.2

Tabel.2.1

Profil Bentang Alam di Wilayah Kabupaten TTU

No	Jenis Bentang Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pegunungan	155,914.13	58.40
2	Teras	36,224.36	13.57
3	Perbukitan	31,686.72	11.87
4	Dataran	20,694.17	7.75
5	Dataran Aluvial	19,155.04	7.17
6	Pantai	1,800.49	0.67
7	Lembah Aluvial	1,495.09	0.56
	Jumlah	266,970.00	100.00

Sumber : *Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026*

Tabel 2.2

Profil Sebaran Bentang Alam di 24 Kecamatan Kabupaten TTU

No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)										
		Biboki Anleu	Biboki Feotleu	Biboki Moenleu	Biboki Selatan	Biboki Tanpah	Biboki Utara	Bikomi Nilulat	Bikomi Selatan	Bikomi Tengah	Bikomi Utara	Insana
1.	Dataran	0	0	0	666	737	0	0	1892	307	0	5118
2.	Dataran Aluvial	11698	0	1983	0	1123	1267	0	0	0	0	0
3.	Lembah Aluvial	177	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
4.	Pantai	1326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pegunungan	10269	11481	9534	13067	3944	5131	4005	1011	2921	4917	6781
6.	Perbukitan	5433	0	2977	326	242	0	0	1807	1252	0	5814
7.	Teras	0	0	279	6	0	0	0	8776	0	0	7535
	Jumlah	**28902**	**11481**	**14774**	**14065**	**6046**	**6398**	**4005**	**13520**	**4481**	**4917**	**25248**

No	Jenis Bentang Alam	Kecamatan (Ha)									
		Insana Tengah	Insana Utara	Miomaffo Barat	Miomaffo Tengah	Miomaffo Timur	Musi	Mutis	Naibenu	Noemuti	Noemuti Timur
1.	Dataran	1680	0	182	2521	0	0	0	0	6	0
2.	Dataran Aluvial	19	2882	0	0	0	0	0	183	0	0
3.	Lembah Aluvial	0	0	127	0	0	0	46	0	948	161
4.	Pantai	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pegunungan	5075	7661	10751	2593	7156	4044	18520	8871	26	0
6.	Perbukitan	4488	2548	68	74	1169	0	0	738	328	964
7.	Teras	700	0	625	750	0	0	0	0	12099	4160
	Jumlah	**11961**	**13566**	**11753**	**5938**	**8325**	**4044**	**18566**	**9793**	**13408**	**5286**

Sumber : *Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026*

Pegunungan merupakan bentang alam dominan yang menempati area seluas 155.914,13 Ha atau 58,40% dari luas Kabupaten TTU. Bentang alam pegunungan tersebar di 23 wilayah kecamatan. Sedangkan jenis bentang alam dengan luas terkecil adalah lembah alluvial yang memiliki luas 1.495,09 Ha atau 0,56% dari luas Kabupaten TTU. Lembah alluvial terdapat di 6 kecamatan yaitu Kec. Biboki Anleu, Kec. Bikomi Selatan, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Mutis, Kec. Noemuti dan Kec. Noemuti Timur.

d. Geologi

Secara umum pulau Timor dan kepulauan Nusa Tenggara lainnya terletak pada wilayah *Ring Api Pasifik Seismik* yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurosia,tepatnya pada busur Sunda-Banda bagian luar atau busur *geantiklin* yang dimulai dari Timur ke Barat sebelah Selatan yang tidak bergunung api atau merupakan rona gempa dangkal. Pulau Timor termasuk kedalam tipe pegunungan kelopak dimana intensitas tektoniknya cukup aktif dengan sesar sungkup yang cukup banyak ditemukan di bagian selatan, hal ini menyebabkan litologi yang menyusun daerah ini cukup rumit dan sering mengalami perulangan (Rosidi, Suwitodirdjo dan Tjokrosapoetro, 1974/1975).

Berdasarkan peta geologi Lembar Kupang-Atambua, Timor skala 1:250.000, (Suwitodirjo dan Tjokrosapoetro,1996), Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi, pergerakan tektonik di pulau Timor yang berlangsung sejak Kapur hingga akhir Eosen akibat pergerakan benua Australia ke utara dengan zona penunjaman condong ke utara. Akibat pergerakan tersebut terjadi benturan busur kepulauan "Paleo Timor" dengan kerak samudera Hindia. Pada waktu proses perbenturan inilah, sehingga terjadi pembentukan batuan campur aduk, pengendapan formasi Noni, Haulasi dan formasi Ofu, penempatan batuan-batuan basa dan ultrabasa serta peralihan pada formasi Maubisse, Ailieu dan komplek Mutis.

Secara umum stratigrafi geologi di daerah ini diklasifikasikan kedalam empat unit yaitu unit batu karang, liat, batu gamping dan aluvial. Di daerah batu karang

umumnya mempunyai bentuk lahan yang relatif datar sampai berombak, tetapi dominan ditutupi oleh batuan induk dan batuan lepas dalam luasan yang cukup besar. Unit liat umumnya dicirikan dengan topografi yang sangat curam dengan erosi parit yang hebat serta potensi longsor yang besar.Unit batu gamping mempunyai bentuk permukaan yang relatif lebih landai akibat peresapan *(infiltrasi*) air yang lebih baik dari liat. Sedangkan unit aluvial umumnya mempunyai bentuk permukaan yang datar yang terbentuk di pinggiran sungai atau endapan pada muara sungai.

e. Hidrologi

Secara umum Kabupaten TTU memiliki kondisi hidrologi yang cukup baik karena ketersediaan air tanah dan air permukaan hampir tersebar diseluruh wilayahbaik sungai, mata air maupun sumur gali. Sungai-sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 30-50 km sebagaimana termuat dalam Tabel 2.1. Terdapat 8 (delapan) sungai utama yang mengalir sepanjang tahun yaitu: Noetoko, Noebesi, Taisola, Noemuti-Haekto, Naen, Maubesi, Mena-Kaubele dan Ponu serta 97 anak sungai dengan membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*.

Tabel 2.3

Nama dan Panjang Sungai Utama Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Miomaffo Barat	Noetoko	40
		Noebesi	50
2	Miomaffo Timur	Taisona	40
3	Noemuti	Noemuti	30
4	Noemuti Timur	Haekto	30
5	Kota Kefamenanu	Naen	30
6	Insana Tengah	Maubesi	40
7	Biboki Moenleu	Mena-Kaubele	40
8	Biboki Anleu	Ponu	40

Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2020

Sumber mata air di Kabupaten TTU termasuk tipe air tanah yang diremajakan yaitu air yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan maupun oleh sebab-sebab lain dan kembali ke daur lagi dengan proses-proses metamorfis. Jumlah ketersediaan sumber mata air sebanyak 1.704.Dari jumlah tersebut terdapat 635 sumber mata air dapat mengeluarkan air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh curah hujan *(perenial springs)* dengan kondisi ketersediaan air cukup baik*;* sebanyak 826 sumber mata air bersifat musiman karena mengeluarkan air hanya pada musim tertentu dan tergantung pada curah hujan *(intermitent springs)* dengan kondisi ketersediaan air sedikit serta 243 sumber mata air yang kering di musim kemarau serta dapat mengeluarkan air pada periode tertentu saja *(periodic springs)*.

Ketersediaan mata air hampir tersebar di seluruh desa dengan rata-rata 3-5 sumber mata air yang tidak kering pada musim kemarau. Dari kondisi hidrologi ini sebagian besar (78%) telah digunakan untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan debit rata-rata 5-300 liter/detik. Potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk energi alternatif adalah Oelfaub-Desa Kuluan, Kecamatan Biboki Feotleu (100 liter/detik); Oel Ainiut, Kecamatan Insana (200 liter/detik); Oel Nianin, Kecamatan Miomaffo Barat (250 liter/detik); Oeaijao,Kecamatan Miomaffo Barat (300 liter/detik); dan Oel Ainiut Jak, Kecamatan Miomaffo Timur (100 liter/detik).

Kondisi hidrologi ini menggambarkan pola Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten TTU dan sesuai Satuan Wilayah Daerah Aliran Sungai (SWP-DAS) di pulau Timor, maka wilayah Kabupaten TTU termasuk DAS Benenain (wilayah tengah) dengan luas 150,080 ha dan memiliki Sub DAS Maubesi dan Bikomi. Pola aliran DAS tersebut bersifat *dendritik* dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang. Selain DAS Benenain, terdapat DAS lintas negara yakni DAS Noebesi, DAS Banain dan DAS Ekat sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hasil studi yang diterbitkan P3E Bali Nusra menunjukkan bahwa hanya terdapat 3 potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Kabupaten TTU yaitu

CAT Oemeu di wilayah Kecamatan Noemuti dan Noemuti Timur, CAT Besikama di Kecamatan Insana dan CAT Aeroki di Kecamatan Biboki Tanpah dan Biboki Utara. Dengan demikian dukungan penyediaan air bersih dari sumber air tanah pada sebagian besar wilayah TTU dapat dikatakan tidak tersedia dan sekaligus mengindikasikan bahwa porsi terbesar pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten TTU harus mengandalkan ketersediaan air permukaan.

Penyediaan air bersih di Kabupaten TTU masih merupakan masalah serius yang belum dapat diatasi dengan baik. Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 menunjukkan bahwa 56% wilayah Kabupaten TTU termasuk kategori rendah dalam hal ketersediaan air bersih, 30% sedang dan hanya 14% dapat digolongkan tinggi.

Gambar 2.3
Peta CAT Pulau Timor

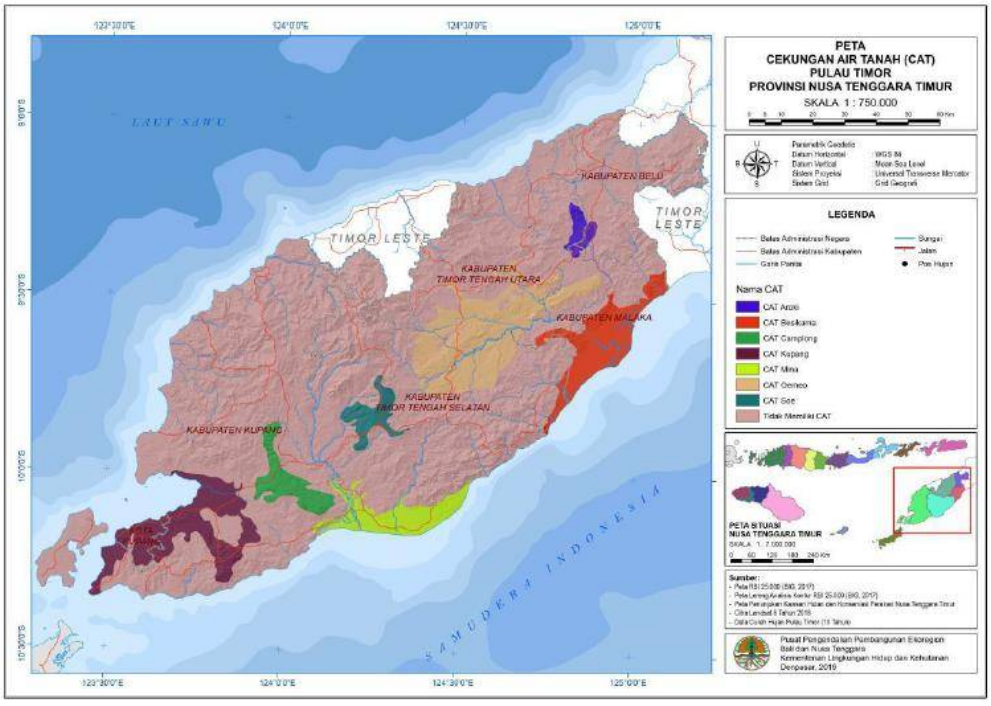

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Gambar. 2.4
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

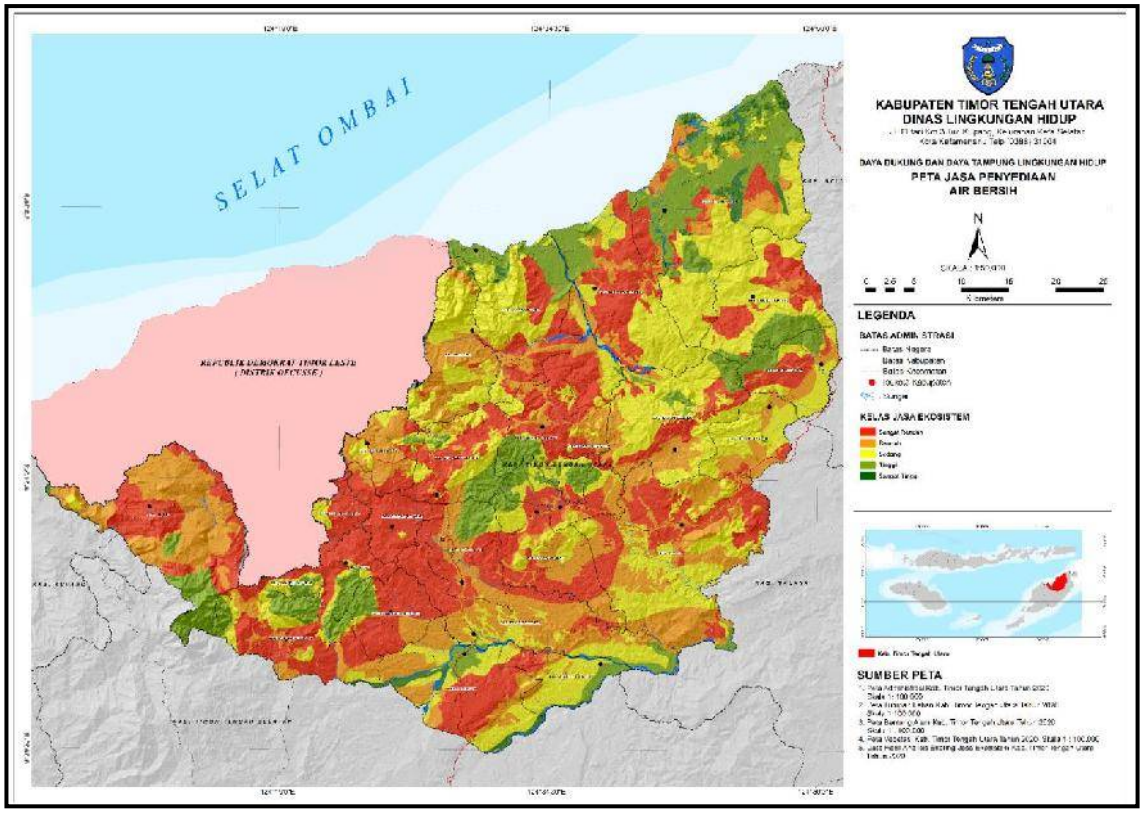

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Gambar 2.5
Diagram Klasifikasi Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten TTU

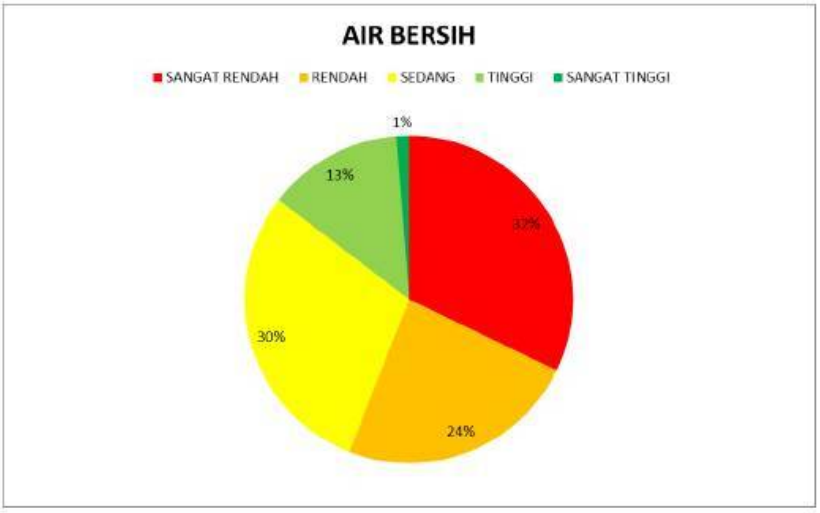

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Rendahnya penyediaan air bersih di Kabupaten TTU dimana 86% luas wilayah berada pada kategori rendah sampai dengan sedang, dipengaruhi langsung oleh kondisi geografis Pulau Timor dengan iklim yang cenderung kering, dimana curah hujan relatif kecil dan waktu hujan yang pendek berkisar antara 3-4 bulan pada Desember hingga April. Kondisi ini juga diperkuat dengan struktur geologi Pulau Timor yang umumnya tersusun dari batuan muda dengan karakteristik batuan karang yang memiliki porositas tinggi sehingga tidak dapat menyimpan air. Iklim dan geologi seperti ini mengakibatkan jumlah air baku sangat terbatas dan kapasitas yang kecil serta fluktuasi yang amat besar di sumber-sumber mata air yang ada. Fluktuasi mata air di Pulau Timor rata-rata berkisar antara 40 persen sampai 60 persen di musim kemarau.

Secara administratif, hanya terdapat 1 kecamatan yaitu Kecamatan Biboki Anleu yang kinerja ketersediaan air bersihnya di atas angka 40% dari luas wilayah kecamatan sedangkan Kecamatan Bikomi Tengah merupakan kecamatan dengan ketersediaan air bersih terendah dimana 99,02% dari luas total 6.149 Ha (6.089 Ha) termasuk kategori rendah. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 dan gambar 2.6 Di bawah ini

Tabel.2.4

Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih

No	Kecamatan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Biboki Anleu	4102	1987	7632	3698	8906	4315	20640	100
2	Biboki Feotleu	4467	3582	5848	4689	2157	1730	12472	100
3	Biboki Moenleu	4121	4805	3287	3832	1169	1363	8577	100
4	Biboki Selatan	6484	3950	8314	5064	1619	986	16417	100
5	Biboki Tanpah	3682	3713	6181	6233	53	53	9916	100
6	Biboki Utara	6014	4336	4492	3239	3363	2425	13869	100
7	Bikomi Nilulat	5091	6209	2084	2541	1025	1250	8200	100
8	Bikomi	3370	6924	1109	2279	388	797	4867	100

No	Kecamatan	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Selatan								
9	Bikomi Tengah	6089	9902	60	98	0	0	6149	100
10	Bikomi Utara	5712	8080	1236	1748	121	171	7069	100
11	Insana	22317	6700	10574	3175	417	125	33308	100
12	Insana Barat	7233	7090	2306	2261	662	649	10201	100
13	Insana Fafinesu	3184	6022	914	1729	1189	2249	5287	100
14	Insana Tengah	7783	6277	2991	2412	1626	1311	12400	100
15	Insana Utara	2180	4049	2037	3783	1167	2168	5384	100
16	Kota Kefamenanu	5812	7854	317	428	1271	1718	7400	100
17	Miomaffo Barat	13219	6622	3522	1764	3222	1614	19963	100
18	Miomafo Tengah	6326	8435	148	197	1026	1368	7500	100
19	Miomaffo Timur	5622	5541	2779	2739	1745	1720	10146	100
20	Musi	4152	5053	976	1188	3089	3759	8217	100
21	Mutis	7626	8427	84	93	1339	1480	9049	100
22	Naibenu	3941	4478	4675	5313	184	209	8800	100
23	Noemuti	9388	6030	3923	2520	2259	1451	15570	100
24	Noemuti Timur	1443	2587	3112	5580	1022	1833	5577	100
Total		**149358**		**78601**		**30113**		**266978**	

Sumber : Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Gambar 2.6
Diagram Indeks Jasa Ekosistem Air Bersih

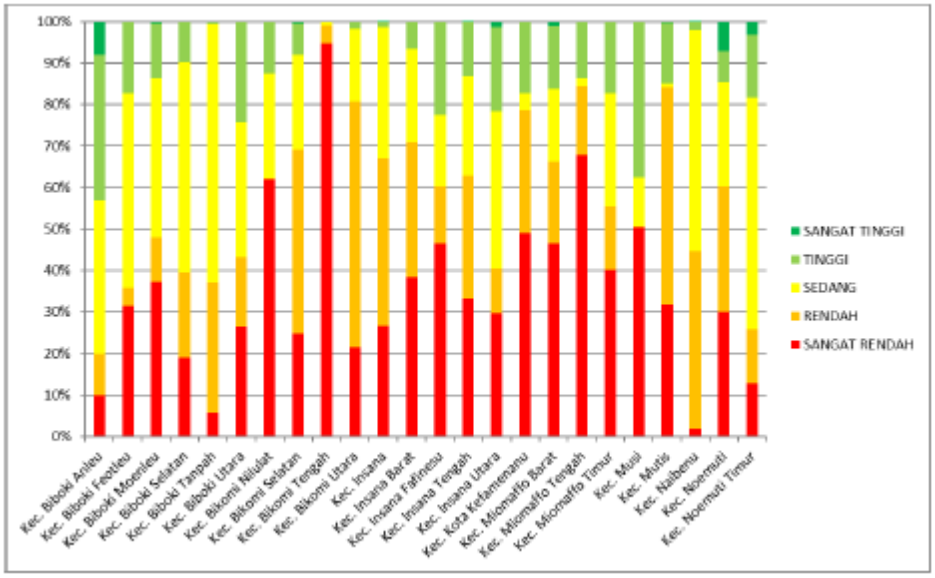

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Potensi jasa ekosistem penyedia air bersih di Kabupaten TTU tergolong rendah yang disebabkan oleh kondisi geologi dan iklim. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya pemanenan air seperti pembangunan bendungan, cekdam, embung, sumur resapan dan jebakan-jebakan air lainnya.

f. Klimatologi

Sesuai dengan klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson, Kabupaten TTU termasuk wilayah iklim tipe D (iklim semi arid) dengan koefisien 2 sebesar 71,43 % atau beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan. Curah hujan rata-rata selama 5 tahun (2012-2016) sebesar 1.581,47 mm/tahun dengan jumlah hari hujan adalah 94.84 hari/tahun. Suhu udara berkisar antara 22º - 34º C, kelembaban udara 69 – 87 % dan intensitas penyinaran matahari 50 – 98 %.

Seperti halnya di tempat lain di Provinsi NTT, pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus

angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian, mengingat letak Pulau Timorlebih dekat dengan Benua Australia, maka pertemuan arus angin dari Asia yang banyak mengandung uap air dan arus angin dari Samudera Pasifik yang sedikit kandungan uap airnya mengakibatkan hari hujan lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan TTU sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari, Febuari, Maret, dan Desember yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

Sistem pengaturan iklim yang baik berada pada kawasan dengan keadaan vegetasi yang rapat dan terletak di daerah ketinggian (pegunungan dan perbukitan). Vegetasi berperan penting dalam hal reduksi emisi CO_2 dan efek rumah kaca secara alami. Hutan bervegetasi memiliki kemampuan menyimpan air dan mampu meredam panas sehingga suhu di permukaan tanah akan menjadi lebih rendah dibandingkan lahan-lahan yang didominasi oleh permukaan keras berupa bebatuan, beton atau aspal.

Hutan merupakan penghasil oksigen serta sebagai filter alami dalam menjaga udara tetap sejuk dan relatif bersih. Dengan demikian indikator kinerja pengaturan iklim adalah luasan tutupan lahan yang bervegetasi (Ha) di Kabupaten TTU. Semakin tinggi jumlah kerapatan vegetasi dalam suatu kawasan, semakin besar pula kemampuan reduksi emisi CO_2 dan gas rumah kaca. Pohon (daun) memegang peran penting dalam proses reduksi tersebut karena proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis stomata akan menyerap CO_2 kemudian menghasilkan O_2 yang dibutuhkan oleh makluk hidup. Pusat Penelitian Biologi-LIPI menunjukkan kontribusi beberapa jenis pohon dalam mengurangi emisi gas CO_2 (Gambar 2.7)

Gambar 2.7.
Laju serapan CO_2 beberapa jenis pohon.

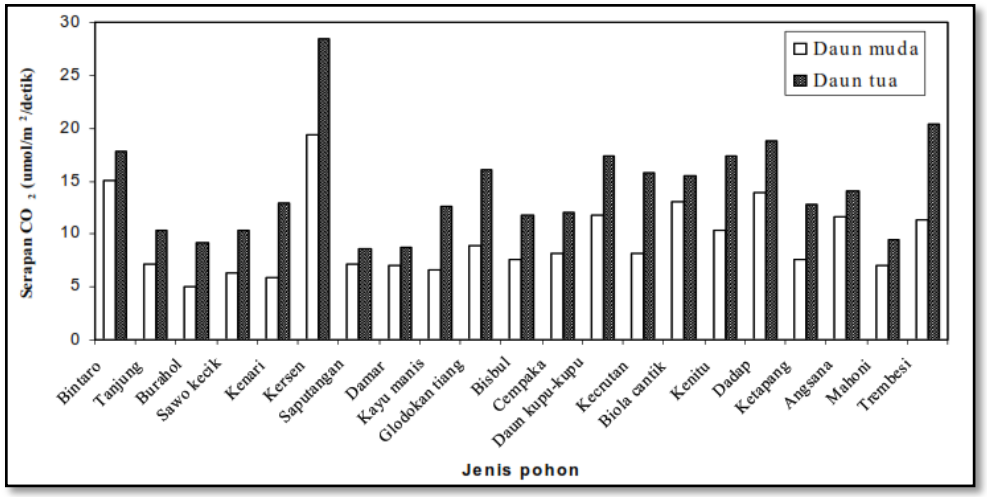

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Berdasarkan peta jasa ekosistem pengaturan iklim (Gambar 2…), kemampuan pengaturan iklim di Kabupaten TTU terdiri dari kategori tinggi (7.025.889 Ha atau 26 %), sedang (5.074.483 Ha atau 19%) dan rendah (14.596.629 Ha atau 55%). Secara umum, kemampuan ekosistem dalam pengaturan iklim di Kabupaten TTU termasuk kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi hutan (vegetasi) di wilayah Kab. TTU yang semakin rusak akibat aktivitas manusia (budaya tebas bakar, alih fungsi lahan). Deforestasi menyebabkan ekosistem hutan terganggu sehingga menurunkan fungsi hutan dalam hal pengaturan iklim.

Gambar 2.8.
Persentase Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten TTU

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Rendahnya kamampuan pengaturan iklim di Kabupaten TTU dipengaruhi oleh keberadaan vegetasi hutan batu gamping pamah monsoon merangas yang dominan (48 %) dengan luasan 1.273,50 Ha. Vegetasi ini merupakan hutan di dataran batu gamping dengan vegetasi monsoon yang menggugurkan daun dan miskin unsur hara. Rendahnya unsur hara menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi terhambat. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya jumlah vegetasi pengatur iklim alami di Kabupaten TTU. Berkurangnya jumlah dan luasan daun akan mengurangi kapasitas penyerapan terhadap gas CO_2 sehingga keadaan suhu cenderung terus meningkat dan mempengaruhi unsur iklim lainnya seperti radiasi matahari, temperatur, kelembaban, hujan, tekanan udara dan angin.

Penyedia jasa ekosistem pengaturan iklim yang tegolong rendah di kabupaten TTU adalah kecamatan Bikomi Tengah seluas 564.011 Ha (92%) dan Kecamatan Bikomi Selatan seluas 403.354 Ha (83%). Hampir keseluruhan wilayah kecamatan Bikomi Tengah dan Bikomi Selatan tidak memberikan kontribusi pengaturan iklim di Kabupaten TTU karena tidak terdapat kawasan hutan lahan kering primer maupun hutan mangrove di kedua wilayah tersebut. Ditinjau dari

jenis vegetasi, wilayah ini memiliki hutan batu gamping pamah moonson merangas yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi terhambat akibat rendahnya unsur hara.

Tabel 2.5

Distribusi Luasan Jasa Ekositem Pengaturan Iklim Kab. TTU Per Kecamatan (Ha)

KECAMATAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI	TOTAL
Kec. Biboki Anleu	623	4.235	3.418	10.235	2.129	20.640
Kec. Biboki Feotleu	3.708	81	377	6.420	1.883	12.470
Kec. Biboki Moenleu	1.322	3.227	1.258	2.499	271	8.578
Kec. Biboki Selatan	2.088	3.766	2.962	7.479	122	16.417
Kec. Biboki Tanpah	5.200	146	183	4.385	-	9.915
Kec. Biboki Utara	5.422	3.593	-	2.563	2.292	13.870
Kec. Bikomi Nilulat	-	6.308	920	971	-	8.200
Kec. Bikomi Selatan	2.328	1.705	49	312	473	4.868
Kec. Bikomi Tengah	-	5.640	355	66	89	6.150
Kec. Bikomi Utara	443	1.551	3.942	1.135	-	7.070
Kec. Insana	8.781	11.625	4.925	1.370	6.606	33.308
Kec. Insana Barat	3.909	2.854	886	225	2.326	10.200
Kec. Insana Fafinesu	1.336	1.442	1.823	671	16	5.288
Kec. Insana Tengah	3.448	4.743	3.136	788	286	12.400
Kec. Insana Utara	220	1.802	1.028	2.212	122	5.384
Kec. Kota Kefamenanu	2.419	3.174	1.730	-	77	7.400
Kec. Miomaffo Barat	1.492	10.002	6.049	2.421	-	19.963
Kec. Miomaffo Tengah	1.015	5.233	1.223	29	-	7.500
Kec. Miomaffo Timur	521	3.977	2.532	2.798	317	10.145
Kec. Musi	-	5.981	2.232	5	-	8.217
Kec. Mutis	1.532	1.839	5.381	185	112	9.050
Kec. Naibenu	260	705	3.278	3.887	670	8.800
Kec. Noemuti	7.071	5.228	2.644	238	380	15.560
Kec. Noemuti Timur	1.205	2.764	414	202	991	5.577
TOTAL	54.343	91.623	50.745	51.096	19.163	266.970

Sumber : Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Gambar 2.9.
Distribusi Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

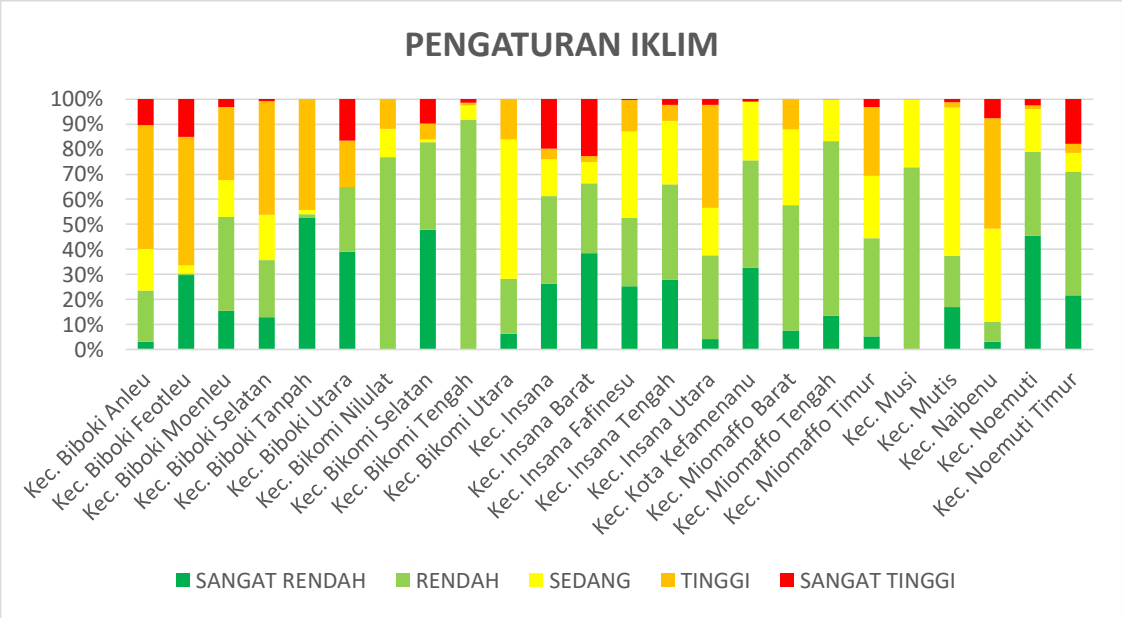

Sumber: Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten TTU tergolong rendah sehingga berdampak pada perubahan iklim mikro. Perubahan iklim merupakan fenomena global maka diperlukan solusi yang bersifat global namun dalam bentuk aksi lokal. Solusi konkrit saat ini yang dapat dilakukan adalah kegiatan konservasi dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain untuk meningkatkan luasan vegetasi serta tutupan lahan, konservasi juga dapat meningkatkan ketersediaan air sebagai salah satu faktor utama dalam sistem budidaya pertanian karena Kabupaten TTU merupakan wilayah dengan dominasi pertanian lahan kering.

2.1.2. Kependudukan-Demografi

Jumlah penduduk keadaan Tahun 2020berjumlah259.829jiwa dengan tingkat kepadatan rumah tangga 4 orang dan kepadatan penduduk 94 orang per km^2.Dari sebaran penduduk, Kecamatan Kota adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 47.766 jiwa (18,38%) dengan tingkat kepadatan penduduk 672

jiwa/km2 lebih tinggi dibanding keadaan bulan januari tahun 2020, sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Biboki Feotleu sebanyak 4.254 jiwa (1,64%) dengan tingkat kepadatan penduduk 36 jiwa/km2. Secara rinci sebaran penduduk ditiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Table 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten TTU

Keadaan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)	Rata-rata Rumah Tangga per penduduk*
1	Miomaffo Barat	15.337	199.63	4,095	82	4
2	MiomaffoTengah	6,081	75.00	1,244	87	4
3	Musi	4,740	82.17	1,265	61	3
4	Mutis	7,150	90.50	2,027	83	4
5	Miomaffo Timur	12,417	101.45	3,329	131	4
6	Noemuti	12,743	155.60	3,139	87	4
7	Bikomi Selatan	11,188	48.68	2,561	238	5
8	Bikomi Tengah	7.613	61.50	1,974	133	4
9	Bikomi Nilulat	4,800	82.00	1,267	62	4
10	Bikomi Utara	6,252	70.70	1,578	94	4
11	Naibenu	5.576	88.00	1,251	67	4
12	Noemuti Timur	4,270	55.77	1,012	82	4
13	Kota Kefamenanu	47,766	74.00	9,186	672	5
14	Insana	20,996	333.08	4,883	68	4
15	Insana Utara	10,166	53.84	2,365	196	4
16	Insana Barat	10,660	102.00	2,654	112	4
17	Insana Tengah	10.491	124.00	2,761	94	4
18	Insana Fafiunesu	5.898	52.88	1,461	119	4
19	Biboki Selatan	9.393	164.17	2,357	63	4

20	Biboki Tanpah	5620	99.15	1,491	59	4
21	Biboki Moenleu	8,021	85.78	1,859	98	4
22	Biboki Utara	11,269	138.70	2,657	86	4
23	Biboki Anleu	17,128	206.40	3,949	91	4
24	Biboki Feotleu	4,254	124.70	1,018	36	4
	Jumlah	**259.829**	**2,670**	**61,383**		**4**

Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.3.1. Kawasan Lindung

Penentuan kawasan lindung didasarkan atas data dan berbagai referensi peraturan seperti Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu wilayah yang karena keadaan dan sifat fisiknya mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, flora dan fauna yang didalamnya tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan budidaya. Dalam hubungan ini konsepsi dasar pengembangan, aspek konservasi dan rehabilitasi pada dasarnya ditujukan untuk:

a. Melestarikan lingkungan dengan mempertahankan kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, kawasan jalur pengamanan aliran sungai/aliran air dan sumber mata air dan areal lindung lainnya di luar kawasan hutan yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budi daya. Kawasan lindung perlu dipertahankan sebagai areal bervegetasi tetap;
b, Melestarikan hutan suaka alam/hutan wisata dengan memperhatikan keanekaragaman fauna, flora, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan bagi pembangunan pada umumnya;
c. Membina kawasan lindung yang masih merupakan areal perkebunan dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air.

Jenis kawasan lindung berupa Hutan dan Non Hutan terdiri dari:

a. Kawasan lindung berupa Hutan Lindung dominan berada di Kecamatan Mutis, Musi, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Noemuti, Insana Tengah, Insana Utara, Insana Barat, Biboki Selatan. Untuk mendukung fungsi hutan lindung maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
b. Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan pantai berada di Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu di bagian pantai utara. Untuk mendukung fungsi kawasan sempadan pantai maka diarahkan dengan menanam jenis tanaman mangrove.
c. Kawasan sekitar mata air tersebar di kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Noemuti dan Insana dengan debit air bervariasi antara 5-300 liter/detik. Untuk mendukung fungsi kawasan sekitar mata air maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan, kawasan hutan mangrove untuk pengamanan pantai yang terletak di kawasan Pantura. Untuk sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi kiri-kanan sungai besar dan 50 m kiri-kanan anak sungai dan kawasan danau berupa daratan sekeliling tepian yang letaknya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
d. Kawasan cagar alam dan cagar budaya yaitu air terjun Pahkoto di kawasan utara pegunungan Mutis; Gua Suti (Desa Bijaepasu, Miomaffo Tengah); Kawasan Tumbaba Raya dengan panorama alam, Gua Popnam (Noemuti), Danau Tunoe (Miomaffo Timur); Pantai Tanjung Bastian (Insana Utara) dan Pantai Batu Putih (Biboki Anleu). Untuk mendukung fungsi Suaka Alam maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
e. Kegiatan konservasi untuk mendukung kondisi kawasan lindung dengan mengembangkan tanaman perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat yang dialokasikan di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Miomaffo Tengah dan Naebenu. Fungsi konservasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap wilayah disekitar suaka alam.

2.1.3.2. Kawasan Budidaya

2.1.3.2.1. Kawasan Budidaya Pertanian

Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya pertanian dialokasikan pada kawasan-kawasan berikut:

- Kegiatan Hutan Produksi Terbatas merupakan kegiatan budidaya di Kawasan Hutan. Dalam rencana tata ruang wilayah, alokasi untuk Hutan Produksi terbatas berada di Kecamatan Miomaffo Tengah, Miomaffo Barat, Bikomi Utara, Insana Tengah, Insana, Biboki Selatan, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Biboki Foetleu, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Utara dan Naibenu.
- Untuk kegiatan Hutan Produksi dialokasikan sebagai kawasan penyangga antara fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya yang diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang berfungsi perlindungan. Alokasi Lahan Hutan Produksi di Kecamatan Kota Kefamenanu, Bikomi Selatan, Noemuti dan Noemuti Timur. Untuk mendukung fungsi Hutan Produksi maka kawasan diarahkan dengan menanam jenis tanaman tahunan.
- Kegiatan budidaya lahan basah direncanakan sebagai sentra produksi tanaman Pangan. Untuk lahan basah tersebar di Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.
- Kegiatan budidaya lahan kering dominan berada di Kecamatan Insana, Biboki Tanpah, Biboki Anleu dan Biboki Selatan.
- Kegiatan budidaya tanaman tahunan dominan berada di kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tanpah.
- Kegiatan Budidaya Padang Rumput/Pengembalaan: Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Musi, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan dan Insana.
- Kegiatan budidaya perikanan air tawar mengikuti keberadaan air yang dikembangkan di kawasan yang disiapkan untuk pertanian lahan basah tersebar di Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Utara, Biboki Tanpah,

Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.

- Pengembangan kegiatan budidaya usaha pertanian laut dan perikanan laut dengan hasil usaha kegiatan berupa budidaya rumput laut, keramba jaring apung, usaha tambak ikan bandeng dan udang windu serta tambak garam. Kegiatan ini dikembangkan di Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu. Potensi lahan usaha di perairan Kabupaten Timor Tengah Utara seluas ± 200 ha sedangkan untuk perikanan tambak seluas ± 3.500 ha. Untuk kegiatan Perikanan laut yang disiapkan berupa kegiatan perikanan tangkap.
- Pengembangan Kawasan Buffer di wilayah sekitar perbatasan Distrik Oecuse, rencana pengembangan buffer dengan memberikan batasan wilayah dengan menggunakan tanaman tahunan sebagai buffer negara dengan lebaran kawasan yang disesuaikan dengan ketentuan negara.
- Penyiapan pengembangan kecamatan-kecamatan di sekitar perbatasan untuk mengoptimalisasi perkembangan wilayah sekitar perbatasan dengan memberikan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung sebagai serambi depan Negara Indonesia yaitu di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Bikomi Nilulat, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu, Insana Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu dan Kota Kefamenanu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Penyiapan pengembangan kegiatan pertanian di Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Biboki Anleu dengan pusat di Ponu. Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Insana Tengah, Insana Utara, Insana dan Naibenu merupakan penyangga bagi pengembangan agropolitan di Kota Terpadu Mandiri.
- Penyiapan dan pengembangan kawasan-kawasan agropolitan dengan prioritas kegiatanadalah :
    - Miomaffo Barat (Kecamatan Mutis, Miomaffo Tengah, Musi, Bikomi Nilulat menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Pertanian Hortikultura dan Peternakan.

- Miomaffo Timur (Kecamatan Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Naibenu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Insana (Kecamatan Insana Tengah, Insana Barat dan Insana Fafinesu menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan dan Peternakan.
- Insana Utara, Biboki Moenleu dan Biboki Anleu untuk Kawasan Pengembangan Perikanan Laut dan Peternakan.
- Noemuti (Kecamatan Noemuti Timur menjadi Wilayah Hinterland penunjang) untuk Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan.

2.1.3.2.2. Kawasan Budidaya Non Pertanian

a. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan hasil explorasi/penelitian dari Dinas Pertambangan, potensi kandungan mineral yang teridentifikasi di wilayah Kabupaten TTU terdiri dari:

- Potensi bahan galian golongan A dengan jenis bahan tambang nikel, wilayah yang memiliki potensi nikel adalah Desa Benus di Kecamatan Naibenu, Desa Nonotbatan dan Motadik di Kecamatan Biboki Anleu, Desa Naku di Kecamatan Biboki Feotleu, Desa Humusu Sainiup di Kecamatan Insana Utara dan Desa Fafinesu C di Kecamatan Insana Fafinesu, Desa Tautpah di Kecamatan Biboki Selatan, Desa Tapenpah di Kecamatan Insana dan Desa Fatuneno, Saenam, Fatunisuan di Kecamatan Miomaffo Barat dan Desa Tasinifu di Kecamatan Mutis.
- Potensi bahan galian golongan B dengan jenis bahan galian mangan, emas, Tembaga, Perak dan Besi.
  - Wilayah yang berpotensi mangan ditemukan di setiap kecamatan.
  - Wilayah yang berpotensi emas, ditemukan di daerah zona Benus, Noetoko, Noemeto, Bakitolas, Nono Tabun dan Bitefa.
- Potensi Bahan galian golongan C dengan jenis sirtu sungai, sirtu gunung, batu gamping, rijang, napal, marmer, batuan beku, breksi vulkanik, sekis, oker, perlit, batu lempung dan batu semi permata.

- Lokasi Sirtu sungai di Noemuti, Maurisu, Noe Manufono, Manamas, Motasokon, Noel Siman, Tublopo dan Noe Meto.
- Lokasi batu gamping di Tubu Kuaken, Tubu Palak, Tubu Kabuta, Tubu Kuanteum, Tubu Naenim, di wilayah Maurisu, Nunpene Kecamatan Miomaffo Timur, Bakitolas dan Wini
- Lokasi Batu Rijang di Desa Napan, Sainoni, Haumeni, Amol, Oesena, Taekas, Inbate, Nainaban, Nimasi, Sasi, Oelami, Naiola Bitefa, dan Sunsea.
- Lokasi Batu Marmer di Desa Bakitolas, Oinbit, Fatunisuan, Banain, Napan, Sainoni, Kaenbaun, Jak, Amol, Oesena, Haumeni, Buk, Taekas, Inbate, Nainaban, Nimasi, Oelami, Sasi, Naiola, Benus, Bitefa dan Nilulat.

- Penyiapan kawasan potensial pertambangan untuk mengoptimalkan hasil pertambangan, kegiatan ini disiapkan dalam bentuk tambang rakyat dengan jenis barang tambang yaitu Mangan. Luas kegiatan rencana penambangan mengikuti sebaran yang ada dan disesuaikan dengan kegiatan yang berkembang seluas 994 Ha atau 0,37% dari luas wilayah. Daerah tambang mangan yang disiapkan untuk pengembangan yaitu di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Tengah, Bikomi Utara, Bikomi Selatan, Insana, Insana Barat, Biboki Tanpah, Biboki Moenleu, Biboki Anleu dan Biboki Selatan.

b. Kawasan Pesisir Laut

Potensi pesisir laut cukup besar dimiliki Kabupaten Timor Tengah Utara karena memiliki panjang garis pantai sepanjang ±50 km, dengan luas wilayah lautan adalah ± 950 km^2. Dari kondisi perkembangan pesisir, masih dapat dikembangkan kegiatan masyarakat terkait untuk pengembangan kegiatan kelautan berupa kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Dengan luas ± 950 km^2 jenis sumberdaya perikanan yang dimiliki berupa ikan demersal maupun ikan pelagis dengan jumlah potensi lestari sebesar 1.800 ton per tahun, produksi penangkapan hasil laut tahun 2014 sebesar 410,9 ton. Sementara untuk pengembangan kegiatan budidaya luas lahan perairan yang dapat diusahakan adalah ± 200 Ha dengan kegiatan usaha berupa budidaya rumput laut dan budidaya keramba jaring apung. Untuk pengembangan budidaya di wilayah

daratan memiliki potensi budidaya air payau seluas 3.500 Ha dengan jenis pengembangan tambak ikan bandeng dan udang windu.

c. Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata didasarkan pada hasil Studi Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dari sekian banyak objek wisata di setiap kecamatan, ada beberapa objek prioritas yang akan dikembangkan antara lain meliputi Wisata pantai, Wisata budaya, Wisata hutan, Wisata alam dan Wisata religi.

Sebaran obyek wisata yang perlu terus dikembangkan antara lain :

- Wilayah Kefamenanu dengan lokasi wisata Kampung Adat Maslete;
- Lokasi wisata Pegunungan Mutis, Gua Suti di Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah dan Sonaf Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat;
- Wilayah Miomaffo Timur dengan lokasi wisata Kawasan Tunbaba Raya, Danau Tunoe, Oebikase;
- Wisata Bahari di wilayah Pantai Utara;
- Wilayah Biboki Anleu dengan lokasi wisata Pantai Batu Putih;
- Biboki Selatan dengan lokasi wisata Sonaf Tamkesi, Gua Naijalu`u dan Pantai Oebubun di Biboki Moenleu;
- Insana dengan lokasi wisata Sonaf Oelolok, Sonaf Maubesi, Wisata religi Gua Bitauni, Bendungan Benkoko;
- Noemuti dengan lokasi wisata Kuburan Sonbai, Prosesi Kure, Oeluan/Hutan Wisata.

Untuk kegiatan pariwisata yang perlu disiapkan adalah pengembangan kawasan dan pemasaranpariwisata. Bentuk pengembangan kawasan wisata dengan memberikan peningkatan fasilitas pendukung serta peningkatan aksesibilitas menuju kawasan wisata tersebut. Sedangkan bentuk pemasaran

pariwisata dibuat untuk memberikan informasi tentang sebaran kawasan wisata juga disiapkan dalam bentuk-bentuk paket wisata.

d. Kawasan Perkotaan dan Permukiman

Kawasan Pengembangan Perkotaan dan Pemukiman merupakan bagian kedua dari proses penataan ruang wilayah. Yang dimaksud dengan kawasan tersebut adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk berkembang menjadi daerah perkotaan dengan daerah pemukiman berkonsentrasi tinggi yang ditunjang oleh kegiatan pembangunan perkotaan yang pesat.

Secara keseluruhan, kawasan pusat pengembangan perkotaan yang direncanakan sampai dengan tahun 2028 adalah Kota Kefamenanu, Wini dan Ponu di Wilayah Pantai Utara. Kedua lokasi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Kefamenanu yang saat ini sebagai Pusat Koleksi dan Distribusi dan juga sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN).

Dilihat dalam lingkup wilayah kabupaten, selain Kecamatan Kota Kefamenanu yang akan menjadi tujuan permukiman perkotaan, beberapa kota kecamatan yang diperkirakan akan mengalami perkembangan pesat pada masa mendatang adalah Wini, Eban, Ponu dan Kaubele. Untuk pengembangan permukiman lainnya disiapkan di tiap kecamatan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu akan dikembangkan permukiman perkotaan yang terpusat pada lokasi yang tidak potensial untuk pengembangan pertanian. *Design* pengembangan KTM Ponu akan disesuaikan dengan hasil revisi RTRW dan dengan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.

2.1.3.2.3. Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan-kawasan dengan spesifikasi khusus yang penanganannya perlu diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kawasan tersebut merupakan kawasan tempat pemusatan sumber daya alam ataupun kegiatan budidaya yang strategis, yang jika dikembangkan akan memberikan *multiplier effect* pada kawasan lain disekitarnya baik secara fisik maupun ekonomis. Selain itu yang masuk dalam kategori kawasan prioritas adalah

kawasan dengan permasalahan khusus yang membutuhkan penanganan mendesak.

Penetapan kawasan prioritas ditentukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Kegiatan di kawasan tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki perkembangan yang cepat dan dinamis sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya.
- Kegiatan di kawasan tersebut memiliki dampak penting terhadap kegiatan sejenis maupun kegiatan lainnya. Dampak penting yang tercipta itu harus tetap diwaspadai karena bisa berupa dampak positif maupun negatif.
- Kegiatan di kawasan tersebut merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan dan pertahanan keamanan wilayah.
- Kegiatan di kawasan tersebut memiliki permasalahan khusus yang perlu diprioritaskan penanganannya.
- Arah kebijakan pembangunan daerah pada kawasan yang bersangkutan.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

2.1.4.1. Banjir

Wilayah rawan banjir setiap tahunnya terjadi di 17 kecamatan dari 24 Kecamatan di Kabupaten TTU yakni Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, Bikomi Tengah, Bikomi Nilulat, Mutis, Insana, Insana Tengah, Bikomi Selatan, Kota Kefamenanu, Noemuti, Noemuti Timur, Biboki Selatan, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana Utara, Biboki Anleu dan Biboki Moenleu. Bencana alam ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan fungsi ekologis/lingkungan hidup yang berdampak tingginya aliran air. Musibah ini terjadi dari tahun ke tahun yang telah telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan rusaknya rumah pemukiman penduduk ataupun gagal panen.

2.1.4.2. Tanah Longsor

Wilayah rawan longsor terjadi hampir di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten TTU. Terdapat 22 kecamatan yang berpotensi longsor atau hanya 2 kecamatan yang bebas bahaya longsor yaitu Kecamatan Insana Barat dan Insana

Fafinesu. Potensi longsor terutama terjadi akibat banjir yang mengancam pemukiman penduduk dan areal persawahan. Penanganan longsor dilakukan setiap tahun dengan pemasangan tembok penahan maupun bronjong bantaran kali/sungai.

2.1.4.3. Angin Taufan

Wilayah yang sering terkena bencana angin taufan (puting beliung) dengan kategori tinggi adalah Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Selatan, Insana Tengah, Insana, Kota Kefamenanu, Bikomi Tengah. Wilayah rawan angin puting beliung tersebut umumnya berada pada daerah punggung bukit/tertinggi dari elevasi sekitar maupun hamparan luas.

2.1.4.4. Kekeringan, Kebakaran dan Hama Belalang

Wilayah Kabupaten TTU pada dasarnya beriklim *semi arid* artinya tingkat kekeringan pasti akan lebih besar sebagai akibat dari kondisi iklim yang ada. Masalah kekeringan ini melanda seluruh wilayah Kabupaten TTU dengan tingkat keparahan tertinggi di daerah pantai utara (pantura) yang kadang-kadang juga membawa faktor ikutannya berupa kebakaran dan serangan hama belalang kumbara seperti terjadi di Kecamatan Biboki Utara (Boronubaen dan Hauteas), Kecamatan Miomaffo Timur (Jak, Tuntun dan Taekas) dan Kecamatan Bikomi Utara (Sainoni, Banain A, Banain B dan Banain C) yang telah menyebabkan rawan pangan.

2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Dalam Pembangunan Daerah

Paradigma pembangunan pada masa lalu semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keseimbangan lingkungan. Sumber daya alam yang menjadi modal dasar pembangunan dieksploitasi secara terus menerus dan tidak terkendali hingga melampaui daya dukung lingkungan. Demikian pula limbah dari berbagai aktivitas dilepaskan langsung ke alam hingga melebihi daya tampung lingkungan. Hal-hal ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan rusaknya keseimbangan ekologi lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan sebagai jawaban untuk mengurangi beban lingkungan yang disebabkan aktivitas pembangunan dan beragam aktivitas manusia dewasa ini. Pembangunan berkelanjutan menekankan

pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Bijaksana, karena sumber daya bersifat terbatas sehingga penggunaannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Bertanggung jawab, karena sumber daya harus dilestarikan untuk mendukung kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang.

Salah satu pendekatan yang kerap digunakan untuk menghitung dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup adalah perhitungan kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memiliki definisi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya dukung dapat juga diartikan sebagai kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan mahluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Sedangkan definisi Daya Tampung Lingkungan Hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya Tampung secara berbeda diartikan sebagai kemampuan lingkungan menyerap zat yang masuk ke lingkungan dan memulihkan diri sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekologisnya.

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung dapat diukur dengan pendekatan koefisien jasa ekosistem. Secara partial, daya dukung lingkungan dapat ditentukan dengan menghitung perbandingan ketersediaan (supply) terhadap kebutuhan (demand). Analisis kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan tidak dilakukan secara menyeluruh tetapi dibatasi pada daya dukung air dan daya dukung pangan. Kondisi ini dapat dimaklumi karena bahkan pada tingkat nasionalpun baru dihasilkan perhitungan daya dukung air dan pangan

2.1.5.1. Daya Dukung Air

Kapasitas daya dukung air dihitung dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Data dasar untuk menentukan kapasitas ketersediaan air adalah curah hujan dan penggunaan lahan. Sedangkan data dasar untuk menghitung kebutuhan air adalah populasi penduduk dan standar kebutuhan air untuk hidup layak. Selisih *supply* terhadap *demand* menunjukkan kondisi daya dukung air dalam keadaan surplus atau defisit.

Keadaan surplus menunjukkan bahwa ketersediaan air tercukupi. Sebaliknya, keadaan defisit menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan akan air. Wilayah yang mengalami defisit air memerlukan intervensi program dan kegiatan guna memenuhi kebutuhan air misalnya konservasi sumber daya air dan pemanfaatan teknologi penyediaan air.yang ramah lingkungan. Kondisi Daya Dukung Air menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel.2.7

Kondisi Daya Dukung Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Kecamatan	Supply	Demand	DD Air	Simpulan
1	Kec. Biboki Anleu	49.417.759,90	30.064.000	19.353.759,90	surplus
2	Kec. Biboki Feotleu	27.316.593,83	7.208.000	20.108.593,83	Surplus
3	Kec. Biboki Moenleu	24.010.466,24	13.404.800	10.605.666,24	surplus
4	Kec. Biboki Selatan	40.243.370,01	16.518.400	23.724.970,01	surplus
5	Kec. Biboki Tanpah	25.643.523,07	9.377.600	16.265.923,07	surplus
6	Kec. Biboki Utara	39.090.251,31	19.156.800	19.933.451,31	surplus
7	Kec. Bikomi Nilulat	55.446.803,87	8.145.600	47.301.203,87	surplus
8	Kec. Bikomi Selatan	12.398.272,69	18.561.600	- 6.163.327,31	Defisit
9	Kec. Bikomi Tengah	42.029.586,53	13.046.400	28.983.186,53	surplus
10	Kec. Bikomi Utara	38.178.888,70	10.617.600	27.561.288,70	surplus
11	Kec. Insana	45.622.740,97	36.000.000	9.622.740,97	surplus
12	Kec. Insana Barat	15.584.143,46	10.036.800	5.547.343,46	surplus
13	Kec. Insana Fafinesu	7.639.120,94	18.265.600	- 10.626.479,06	Defisit
14	Kec. Insana Tengah	19.282.927,42	18.720.000	562.927,42	surplus
15	Kec. Insana Utara	8.252.996,35	16.918.400	- 8.665.403,65	Defisit
16	Kec. Kota Kefamenanu	19.712.444,09	79.560.000	- 59.847.555,91	Defisit
17	Kec. Miomaffo Barat	135.166.351,10	26.286.400	108.879.951,10	sangat surplus

No.	Kecamatan	Supply	Demand	DD Air	Simpulan
18	Kec. Miomaffo Tengah	53.990.470,36	10.473.600	43.516.870,36	surplus
19	Kec. Miomaffo Timur	64.472.535,24	21.296.000	43.176.535,24	surplus
20	Kec. Musi	57.641.976,02	7.968.000	49.673.976,02	surplus
21	Kec. Mutis	58.157.190,65	11.996.800	46.160.390,65	surplus
22	Kec. Naibenu	25.049.593,19	9.364.800	15.684.793,19	surplus
23	Kec. Noemuti	41.566.781,66	21.576.000	19.990.781,66	surplus
24	Kec. Noemuti Timur	10.888.015,51	7.276.800	3.611.215,51	surplus
	Total	**916.802.803,09**	**441.840.000,00**	**474.962.803,09**	**surplus**

Sumber : Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

Memperhatikan tabel 2.7 diatas, status daya dukung air pada 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bikomi Selatan, Insana Fafinesu, Insana Utara dan Kota Kefamenanu dinyatakan defisit. Hal ini berarti kebutuhan air untuk hidup layak di keempat wilayah tersebut tidak terpenuhi pada tahun ini. Kondisi ini akan menjadi lebih parah ke depan apabila tidak segera ditangani.

Selanjutnya terdapat juga 4 kecamatan yaitu Kecamatan Insana, Insana Barat, Insana Tengah dan Noemuti Timur yang walaupun berstatus surplus tetapi dapat dikategorikan rentan karena nilai daya dukung air yang kecil. Artinya, dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan keempat wilayah kecamatan yang saat ini surplus akan mengalami defisit air apabila langkah antisipasi tidak dilakukan.

Untuk mengatasi defisit maupun kerentanan daya dukung air pada 8 wilayah kecamatan ini, maka kebijakan pembangunan sektor sumber daya air perlu diprioritaskan pada lokasi-lokasi kecamatan dimaksud, baik dalam skala penanganan jangka pendek maupun jangka panjang. Penanganan jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi penyediaan air ramah lingkungan seperti pembangunan embung dan pemurnian air. Sedangkan untuk jangka panjang dilakukan konservasi pada sumber mata air maupun daerah tangkapan air.

2.1.5.2. Daya Dukung Pangan

Untuk mengetahui Daya Dukung Pangan, maka perlu dilakukan perhitungan Daya Dukung Lahan berdasarkan *Supply and Demand* dan dilanjutkan dengan perhitungan lahan pertanian. Berdasarkan analisis atas status Daya Dukung Lahan terdapat 4 (empat) kecamatan yang mengalami defisit yaitu Kecamatan Miomaffo Barat (Defisit tahun 2021), Kecamatan Noemuti (Defisit tahun 2023), Kecamatan Bikomi Tengah (Defisit tahun 2023) dan Kecamatan Kota Kefamenanu (Defisit tahun 2021).

Berdasarkan perhitungan terhadap Daya Dukung Lahan Pertanian diketahui bahwa seluruh wilayah Kabupaten TTU termasuk dalam kategori lahan yang sesuai untuk swasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Ditinjau dari ratio kemampuan Daya Dukung Lahan Pertanian (CCR) tahun 2021 diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) Kecamatan dengan ratio kemampuan Daya Dukung sangat rendah yaitu Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Naibenu dan Kecamatan Kota Kefamenanu dan 8 (delapan) Kecamatan berada pada kategori rendah yaitu Kecamatan Noemuti, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Biboki Selatan dan Kecamatan Biboki Moenleu. Proyeksi ratio kemampuan Daya Dukung Lahan Pertanian tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa terdapat 17 (tujuh belas) Kecamatan yang tergolong kategori rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel.2.8

Proyeksi Rasio Kemampuan Daya Dukung (CCR) Kabupaten TTU

Tahun 2021 -2026

No	Kecamatan	CCR						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Miomafo Barat	2,13	2,20	2,13	1,82	1,73	1,68	sangat baik hingga baik
2	Miomaffo Tengah	1,63	1,70	1,65	1,41	1,35	1,31	baik
3	Musi	1,11	1,12	1,06	0,89	0,83	0,80	baik hingga rendah

No	Kecamatan	CCR						Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
4	Mutis	2,61	2,75	2,70	2,35	2,28	2,21	sangat baik
5	Miomafo Timur	0,33	0,34	0,32	0,27	0,25	0,24	sangat rendah
6	Noemuti	0,74	0,75	0,71	0,59	0,56	0,54	rendah
7	Bikomi Selatan	1,20	1,25	1,22	1,05	1,01	0,98	baik hingga rendah
8	Bikomi Tengah	1,28	1,29	1,22	1,02	0,95	0,92	baik hingga rendah
9	Bikomi Nilulat	1,83	1,85	1,74	1,45	1,35	1,31	baik
10	Bikomi Utara	1,22	1,25	1,20	1,02	0,97	0,94	baik hingga rendah
11	Naibenu	0,35	0,36	0,35	0,29	0,28	0,27	sangat rendah
12	Noemuti Timur	1,08	1,10	1,05	0,88	0,83	0,80	baik hingga rendah
13	Kota Kefamenanu	0,30	0,30	0,28	0,23	0,21	0,21	sangat rendah
14	Insana	0,77	0,79	0,75	0,63	0,59	0,57	rendah
15	Insana Utara	0,76	0,79	0,77	0,66	0,64	0,62	rendah
16	Insana Barat	0,64	0,65	0,61	0,52	0,48	0,47	rendah hingga sangat rendah
17	Insana Tengah	0,63	0,65	0,63	0,54	0,52	0,50	rendah
18	Insana Fafinesu	0,65	0,65	0,61	0,51	0,47	0,46	rendah hingga sangat rendah
19	Biboki Selatan	0,72	0,74	0,72	0,61	0,58	0,57	rendah
20	Biboki Tanpah	2,16	2,32	2,33	2,07	2,04	1,98	sangat baik hingga baik
21	Biboki Moenleu	0,88	0,92	0,90	0,77	0,75	0,72	rendah
22	Biboki Utara	1,53	1,58	1,51	1,29	1,22	1,18	baik hingga cukup
23	Biboki Anleu	1,31	1,31	1,23	1,02	0,95	0,92	cukup hingga rendah
24	Biboki Feotleu	2,15	2,22	2,13	1,81	1,72	1,67	sangat baik hingga baik

Sumber : Dokumen DDDT LH tahun 2020, dalam dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social,focus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Tingkat perkonomian masyarakat Kabupaten TTU dalam periode Tahun 2016 - 2020 ditunjukkan oleh beberapa indikator yakni pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita serta persentase Pertumbuhan Ekonomi. Pada 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan seperti yang tercantum pada Gambar 2.10 dan 2.11 dibawah ini

Gambar 2.10

Pertumbuhan PDRB Tahun 2016–2020

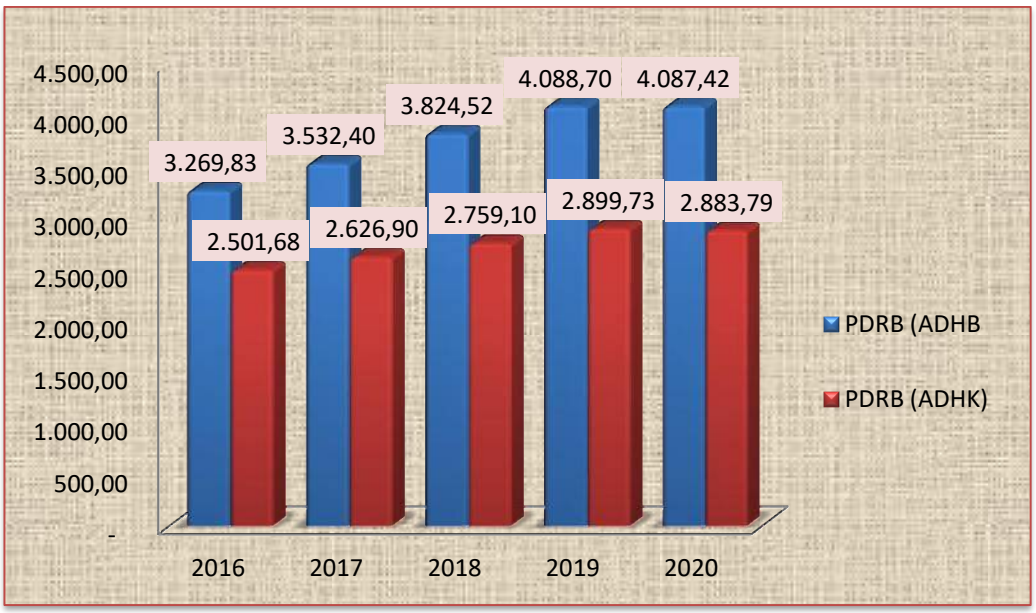

Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 3.269,83 Milyar Rupiah mengalami peningkatan manjadi 3.532,40 Milyarpada tahun 2017, meningkat lagi menjadi 3.824,52 Milyar pada Tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 4.088,70 Milyard sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 4.087,42 Milyard, sedangkan menurut Harga Konstan sebesar 2.501,68 Milyar Rupiah pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 2.626,90 di tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 2.759,10, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 2.899,73 sedangkan pada tahun 2020

sedikit mengalami penurunan menjadi 2.883,79 Milyard. PDRB Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha terdiri dari Pertanian, Kehutanan dan perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang Bangunan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate dan Jasa Perusahaan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Gambar 2.11

Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Tahun 2016- 2020

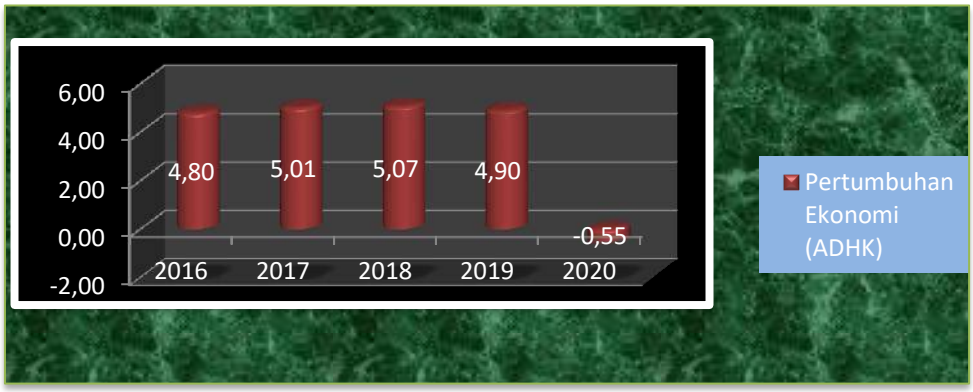

Sumber data: Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2020

Pada gambar diatas digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016 sebesar 4,80 mengalami peningkatan sebesar 0,49 persen selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 menjadi 5,07 % ,pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,17 menjadi 4,90 % namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -0,55%, hal ini disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang sedang melanda Dunia, akan tetapi dengan berbagai upaya pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tayaran yang stabil.

b. **Laju Inflasi*(Data tidak tersedia pada TTU dalam Angka 2021)***

Meningkatnya harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dikenal dengan istilah ***inflasi***. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang import yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konstan (IHK) per bulan di Kota Kefamenanu terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa. Inflasi umum pada tahun 2016 adalah sebesar 4,65%, tahun 2017 adalah 8,63% dan tahun 2018 adalah 5,36%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 4,99%. Kenaikan inflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan transportasi. Di Kabupaten TTU, keberadaan makanan di pasaran lebih dipengaruhi oleh faktor musim yang turut menentukan bulan-bulan kapan terjadinya inflasi tertinggi ataupun terendah.

c. **PDRB Per Kapita *(Data tidak tersedia pada TTU Dalam Angka 2020dan 2021)***

Gambar 2.12

PDRB Per KapitaTahun 2014 -2018

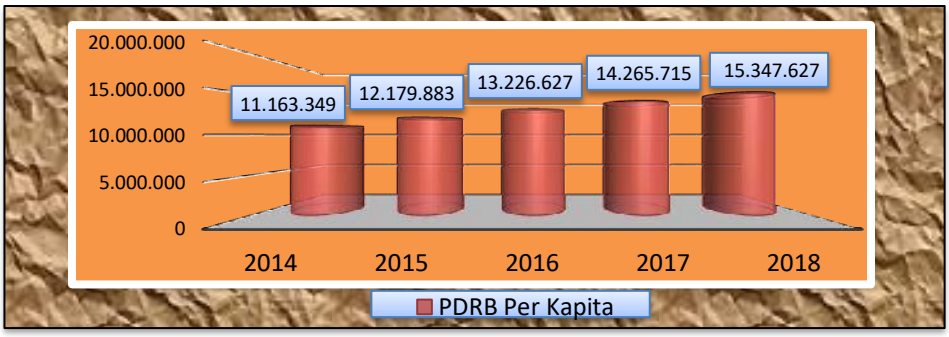

Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2019

PDRB Perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat, dari data di atas menggambarkan bahwa PDRB per kapita tahun 2014 sebesar Rp. 11.163.349.- meningkat menjadi Rp.15.347.627,-pada tahun 2018 atas dasar harga berlaku atau Rp.1.278.968,92,- per bulannya. Jika angka pendapatan perkapita ini dikonversi ke dalam jumlah hari dalam setahun, maka rata-rata pendapatan penduduk TTU sebesar Rp.42.048,29- per hari. Kenaikan ini mempunyai arti bahwa secara agregat terjadi peningkatan produksi pada semua kategori yang berakibat pada kenaikan nilai tambahnya selama tahun 2018.

d. Rasio Gini

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Tabel 2.9

Patokan Nilai Koefisien Gini

No	Nilai	Distribusi Pendapatan
1	*2*	*3*
1	< 0.4	Tingkat Ketimpangan Rendah
2	0.4 - 0.5	Tingkat Ketimpangan Sedang
3	> 0.5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Rilis BPS TTU menunjukkan bahwa Rasio Gini Kabupaten TTU tahun 2019 sebesar 0,36. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten TTU relatif rendah atau mendekati pemerataan sempurna.

e. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomiuntuk memenuhikebutuhandasarmakanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokaloriperkapitaperhari)danbukan makanan(kebutuhan minimumuntuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan.Oleh karena itu penduduk miskinadalahpendudukyangmemiliki rata-ratapengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten TTU dapat dilihat pada gambar 2.13

Gambar 2.13

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

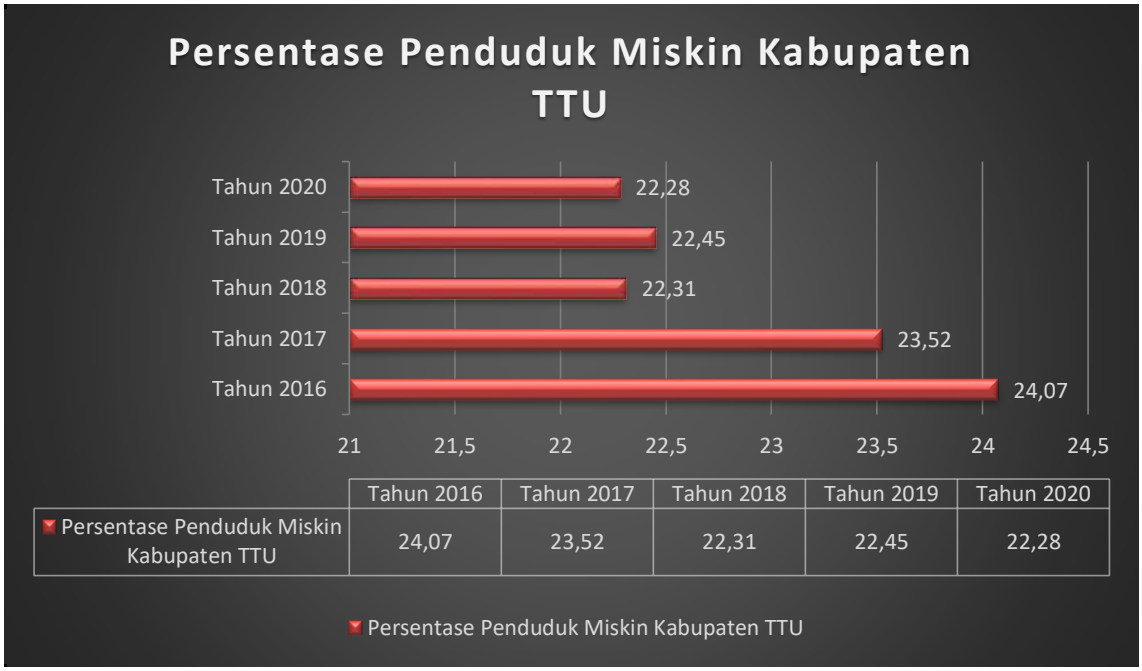

Sumber : Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2021

Data diatas menggambarkan jumlah penduduk miskin terlihat menurun persentasinya. Di mana pada tahun 2016 terjadi sebesar 24,07% menurun menjadi 23,52% pada tahun 2017 menurun lagi menjadi 22,31% pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 sedikit mengalami peningkatan menjadi 22,45 % sedangkan pada

tahun 2020 sedikit mengalami penurunan menjadi 22,28%.. Kecenderungan menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan oleh berbagai program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten antara lain Program Keluarga Harapan, PUAP, Program Padat KaryaPangan dan Program Sari Tani.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan yang dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata – rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka usia harapan hidup.

2.2.2.1. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan dapat membaca, menulis dan berhitung, manusiadapatmeningkatkan kualitasdirinya,yangpada akhirnya akan mampu mengarah pada tingkat intelektualitasseseorang. Disisilain pembangunan suatu bangsa dapat dinilai berdasarkan kualitas pendidikan yang ada pada bangsa tersebut.Angka MelekHuruf di sini difokuskan pada kriteria penduduk pada usia 15-59 tahun (sesuai panduan Penyelenggaraan dan pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun secara rinci dapat diuraikan bahwa manfaat dari diketahuinya angka melek huruf adalah sebagai berikut :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD,
- Menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media,
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Sehingga angka melek huruf kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Realisasi angka melek huruf Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 sebesar 85,08 %, tahun 2018 88,82, tahun 2019 mencapai 92,74 sedangkan pada tahun 2020 mencapai 94,37. Meskipun meningkat dari tahun ke tahun namun masih banyak masyarakat yang mengalami buta aksara sehingga hal ini akan menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komponen pembentuk IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 menempati peringkat ke-13 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih perlu ditingkatkan karena IPM TTU hanya meningkat sebesar 0,19 dari tahun 2019 sebesar 63,34 menjadi 63,53 pada tahun 2020. Perbandingan IPM kabupaten Timor Tengah Utara dengan kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2019-2020

Kabupaten	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
Sumba Barat	63,56	11	63,53	11
Sumba Timur	65,34	5	65,52	5
Kupang	64,43	8	64,43	8
Timor Tengah Selatan	62,23	16	62,15	16

Kabupaten	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
Timor Tengah Utara	**63,34**	**13**	**63,53**	**13**
Belu	62,54	15	62,54	15
Alor	61,03	18	61,03	18
Lembata	64,91	6	64,74	6
Flores Timur	64,34	9	64,22	9
Sika	64,75	7	65,11	7
Ende	67,20	3	67,04	3
Ngada	67,76	2	67,88	2
Manggarai	64,15	10	64,54	10
Rote Ndao	62,22	17	62,39	17
Manggarai Barat	63,50	12	63,89	12
Sumba Tengah	61,01	19	61,53	19
Sumba Barat Daya	62,60	14	62,28	14
Nagakeo	65,88	4	65,81	4
Manggarai Timur	60,47	20	60,85	20
Sabu Raijua	56,66	22	57,02	22
Malaka	60,34	21	60,21	21
Kota Kupang	79,55	1	79,71	1
Nusa Tenggara Timur	**65,23**		**65,19**	

Sumber : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2021

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020, Indeks pembangunan manusia di Kabupaten TTU terus mengalami peningkatan. Jika dilihat pada Gambar 2.6. dibawah ini IPM Kabupaten TTU mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun berada di bawah IPM Provinsi NTT dimana IPM Kabupaten TTU sebesar 61,54 di tahun 2016 meningkat menjadi 63,53 di tahun 2020 namun masih berada di bawah IPM Provinsi NTT Tahun 2020 sebesar 65,19.

Gambar 2.14

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. TTU Tahun 2016 – 2020

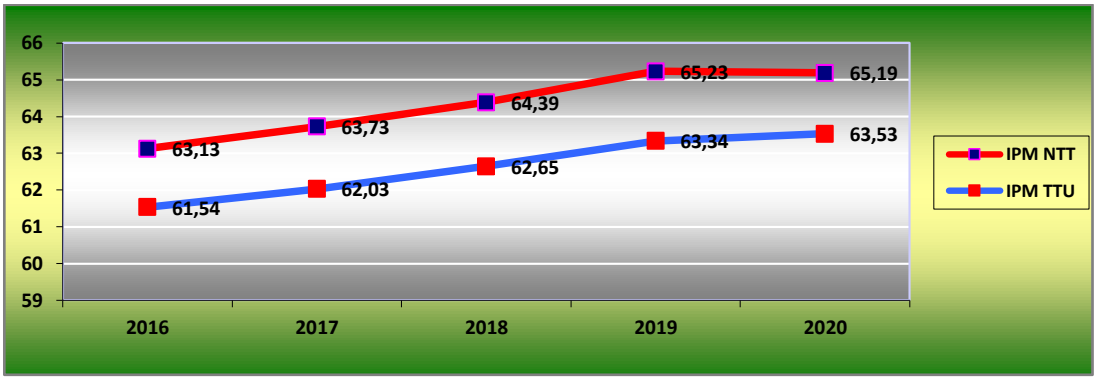

Sumber: Kabupaten TTU Dalam Angka, Tahun 2021

c.Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau*meanyears ofschooling* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalammenjalani pendidikan formal. Dengan menggunakan rumus : jumlah penduduk X yang menyelesaikan jenjang pendidikan dan lama sekolah : jumlah penduduk A. Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasiantara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki serta pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 mencapai7,3(hasilpenghitungan TTU Dalam Angka Tahun 2020)meningkat menjadi 7,5 pada tahun 2019. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah dikarenakan kesadaran masyarakat tentang wajib belajar sembilantahun dan pentingnya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang baik terhadap masyarakat sehingga memotivasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan layak.

2.2.2.2. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Salah satu usaha dalam meningkatkanusia harapan hidup adalah melalui program kesehatan, meningkatnya pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata–rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan angka harapan hidup (AHH) di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel. 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	Umur	66,2	66,4	66,9

Sumber : TTU Dalam Angka Tahun 2020

Tabeldiatasmenunjukkan bahwaperkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utaramengalami peningkatan pada setiap tahun, meskipun demikian, hal ini menjadi tantangan oleh pemerintah daerah, khususnya di bidang kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik melaluiusaha promotif, preventif maupun kuratif.

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Cakupanbalitadengangiziburukmenggambarkankasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlahbalitayangadadiKabupaten Timor Tengah Utara. Persentase balita giziburuk diKabupatenTimor Tengah Utara mengalamipenurunanselama kurun waktu 2 (dua) tahun namun pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan, hal tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, dikarenakan balitagizi buruk berkaitan erat dengan penanggulangan *stunting*. Oleh karena itu penanggulangangizi buruk menjadi prioritas. Perkembangan persentase balita gizi buruk di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

Tabel 2.12
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
Balita Gizi Buruk	%	1,64	0,007	0,002	0,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten TTU 2020

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Aspek seni budaya dan olah raga menjadi salah satu instrumen yang mengindikasikan tingkat kemandirian masyarakat suatu daerah. Di samping aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jumlah event serta sarana olah raga dan kesenian menunjukkan tingkat kemapanan masyarakat. Asumsinya sederhana, semakin tinggi *event* dan semakin banyak sarana olah raga dan kesenian, mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hiburan semakin tinggi.

Kondisi lain dalam fokus Seni Budaya dan Olahraga adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di bidang olah raga pada tahun 2019 terdapat 1 induk organisasi olah raga yaitu KONI Kab.TTU dan 15 Pengurus cabang olah raga,sedangkan di bidangkepemudaan terdapat 12 organisasi kepemudaan.Jumlah klub olahraga sebanyak 14 klub dan jumlah kegiatan olahraga

yang dilaksanakan setiap tahun sebanyak 14 kegiatan. Jumlah fasilitas olah raga antara lainlapangan sepak bola 12 unit, lapangan basket 3 unit, lapangan volley 45 unit, lapangan bulu tangkis 9 unit, kolam renang 2 unit dan lapangan futsal berjumlah 1 unit.

Dalam konteks pembangunan, budaya yang mencirikan identitas suatu Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan karena nilai-nilai budaya selalu menjadi dasar pijak pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Dengan asumsi ini, pemerintah wajib melestarikan budaya yang dianut masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan dasar pemikiran yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah berupaya mengembangkan kebudayaan masyarakat *atoni meto* sebagai identitas mayoritas penduduk TTU melalui berbagai terobosan. Salah satu upaya untuk melestarikan Kebudayaan Daerah dilakukan kegiatan Festival Seni dan Budaya, Napak Tilas untuk mengenang sejarah berdirinya Kota Kefamenanu yang kemudian diikuti dengan pameran pembangunan dan karnaval budaya yang diikuti oleh semua etnis di wilayah TTU. Data kegiatan Napak Tilas dan Karnaval Budaya Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13

Jumlah Regu dan Peserta Napaktilas dan Karnaval Budaya

Tahun 2015– 2019

No	Kegiatan	Tahun	Jumlah Regu	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Napaktilas	2015	35 Regu	210 Orang	
		2016	30 Regu	180 Orang	
		2017	33 Regu	198 Orang	
		2018	33 Regu	198 Orang	
		2019	35 Regu	210 Orang	
2.	Karnaval Budaya	2015	19 Regu	285 Orang	
		2016	19 Regu	380 Orang	
		2017	19 Regu	475 Orang	
		2018	19 Regu	570 Orang	
		2019	22 Regu	770 Orang	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2020

Setidaknya ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah membangun kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ketiga alat ukur itu adalah jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Pada tahun 2019, penyelenggaraan festival seni dan budaya berjumlah 8 (delapan) kali baik yang diikuti di tingkat lokal, regional maupun nasional. Jumlah sarana seni dan budaya yang ada sebanyak 1 (satu) unit sementara rasio benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan mencapai 100% pada tahun 2019 dimana jumlah yang dilestarikan sebanyak 3.514 buah dari 3.514 buah yang ada.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Salah satu alasan keberadaan pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas baik berupa barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten guna memenuhi kebutuhan dan menjawab tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan konteks pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik dipilah kedalam dua jenis urusan pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan

yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang digunakan adalah penduduk usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 2-6 Tahun, Sekolah Dasar (SD) 7-12 Tahun dan Tingka Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13-15 Tahun.

Berikut dapat dilihat gambaran jumlah penduduk pada kelompok usia 2-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di PAUD, SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia 2-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-15 tahun pada periode yang sama. APM dapat dijelaskan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

1) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

Realisasi APM PAUD di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 87,95 % pada tahun 2018 meningkat menjadi 88,85%, pada tahun 2019 meningkat menjadi 91,12% sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 92,60%. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahun namun belum mencapai 100% oleh karena itu APM PAUD perlu ditingkatkan lagi pada tahun-tahun yang akan datang.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Realisasi APM SD/MI di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu waktu 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebesar 97,20%, meningkat menjadi 99,70% pada tahun 2018, pada tahun 2019 menurun menjadi 98,23% sedangkan tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 98,54% oleh karena itu perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan APM SD/MI.

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Realisasi APM SMP/MTS di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebesar 94,30%, meningkat menjadi 98,90% pada tahun 2018, pada tahun 2019 menurun manjadi 98,07 % sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 98,25%. Upaya peningkatan APM telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui dana APBD Kabupaten TTU dan dana BOS.

Target dan realisasi APM PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut :

Gambar 2.15
Realisasi APM PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

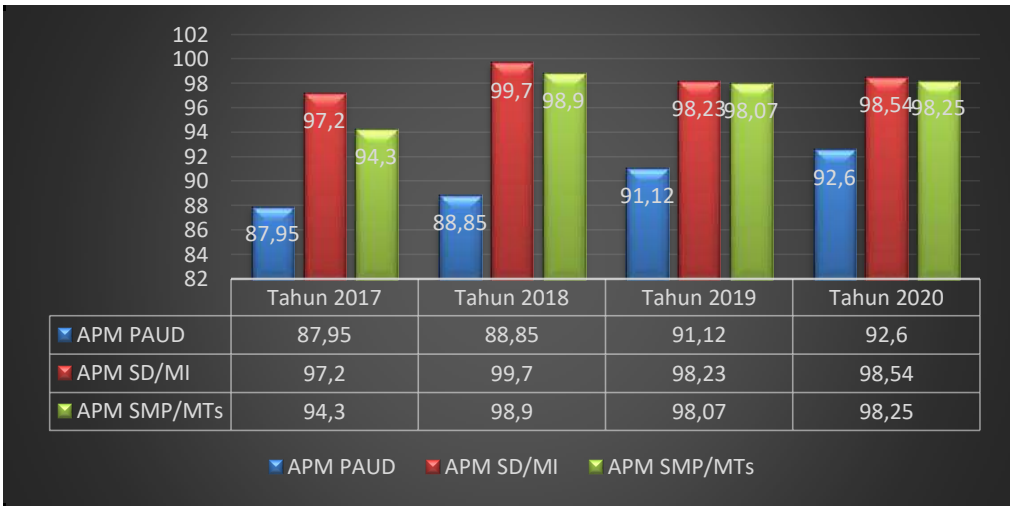

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
APM PAUD	87,95	88,85	91,12	92,6
APM SD/MI	97,2	99,7	98,23	98,54
APM SMP/MTs	94,3	98,9	98,07	98,25

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

b. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan dapat membaca, menulis dan berhitung manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya yang pada akhirnya akan mampu mengarah pada tingkat intelektual seseorang. Angka Melek Huruf disini difokuskan pada criteria penduduk pada usia 15-59 tahun. Pada tahun 2017 realisasi

Angka Melek Huruf adalah sebesar 85,08 meningkat menjadi 88,82 pada tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 92,74 sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 94,37. Walaupun mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun namun belum mencapai target yang telah ditargetkan. Realisasi Angka Melek Huruf Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.16

Realisasi Angka Melek Huruf

Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

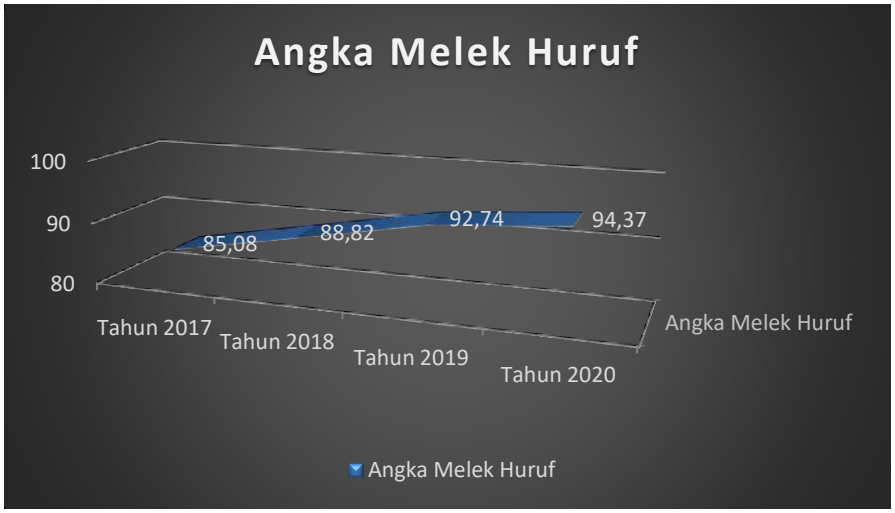

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

c. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu factor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2020 kondisi bangunan SD/MI mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 SD/MI dalam kondisi baik sebesar 46,00%, meningkat menjadi 52,45 pada tahun 2018, meningkat lagi menjadi 61,90 pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 terjadi lagi peningkatan menjadi 68,97%. Kondisi bangunan SMP/MTs dalam keadaan baik pada tahun 2017 adalah 35,86%, tahun 2018 52,68%, tahun 2019 61,29% dan

tahun 2020 meningkat lagi menjadi 73,11%. Walaupun Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keaadaan baik meningkat dalam kurun waktu 4 (empat) tahun namun belum mencakup secara keseluruhan. Bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam Kondisi baik di kabupaten TTU tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.17
Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

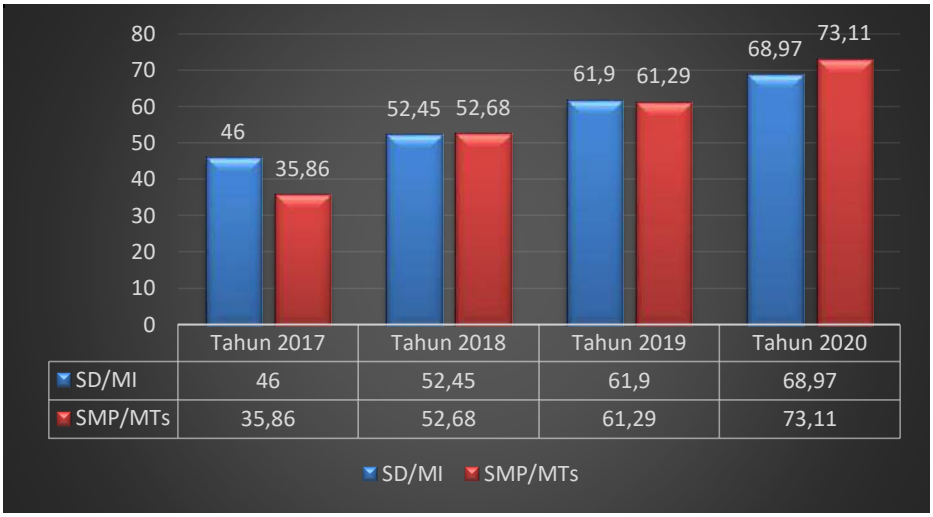

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

d. Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan Sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada Tingkat SD/MI dalam kurun waktu tahun 2017-2020 yang cukup baik. Pada tahun 2017 mencapai 99,85%, pada tahun 2018 mencapai 100%, tahun 2019 100% dan tahun 2020 100% sedangkan tingkat kelulusan pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 100%, menurun menjadi 99,43% pada tahun 2018, kembali meningkat menjadi 100% pada tahun 2019 dan tetap mempertahankan 100% pada tahun 2020. Walaupun angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan akan tetapi tingkat kelulusan harus tetap menjadi perhatian pemerintah Kabupaten agar tetap dipertahankan.

Realisasi Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.18

Realisasi Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

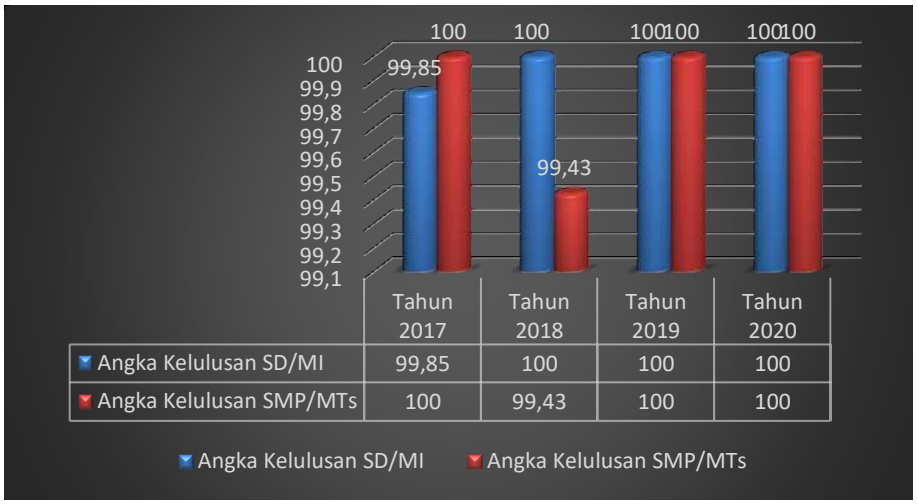

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

e. Angka Melanjutkan

Angka melanjtkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara pada tahun 2017 sebesar 92,68%, tahun 2018 94,56%, meningkat lagi menjadi 97,59% sedangkan tahun 2020 data tidak tersedia. Angka Melanjutkan Sekolah dari jenjang SMP/MTs/Setara ke Jenjang SMA/SMK/Setara pada tahun 2017 sebesar 85,64% sedangkan tahun 2018-2020 data tidak tersedia. Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara dan dari jenjang SMP/MTs/Setara ke jenjang SMA/SMK/Setara di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.19

Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara dan dari jenjang SMP/MTs/Setara ke jenjang SMA/SMK/Setara di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

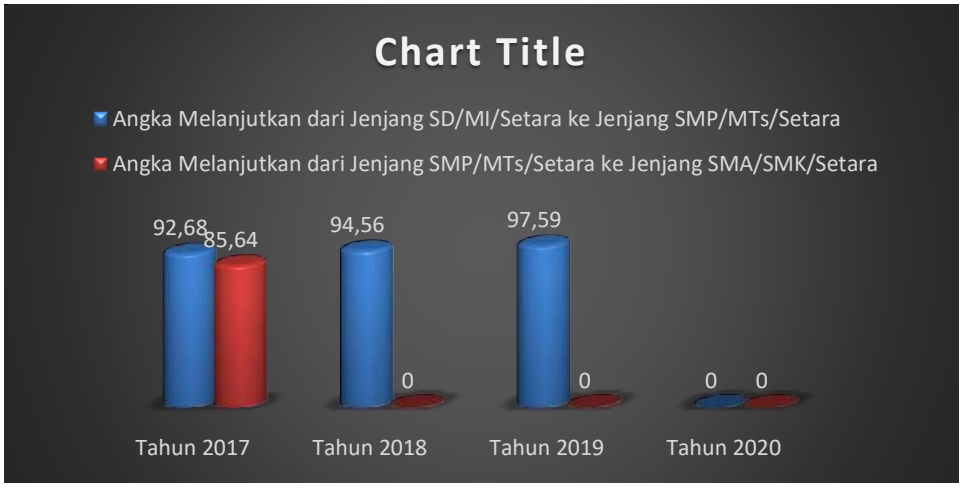

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

f. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan baik pada jenjan SD/MI maupun SMP/MTs. Pada tahun 2017 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mencapai 72,50%, tahun 2018 86,17%, tahun 2019 92,17% dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 93,50%. Walaupun terjadi peningkatan setiap tahun namun kualifikasi pendidikan bagi tenag pendidik harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di kabupaten TTU pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.20

Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4 di Kabupaten TTU pada tahun 2017-2020

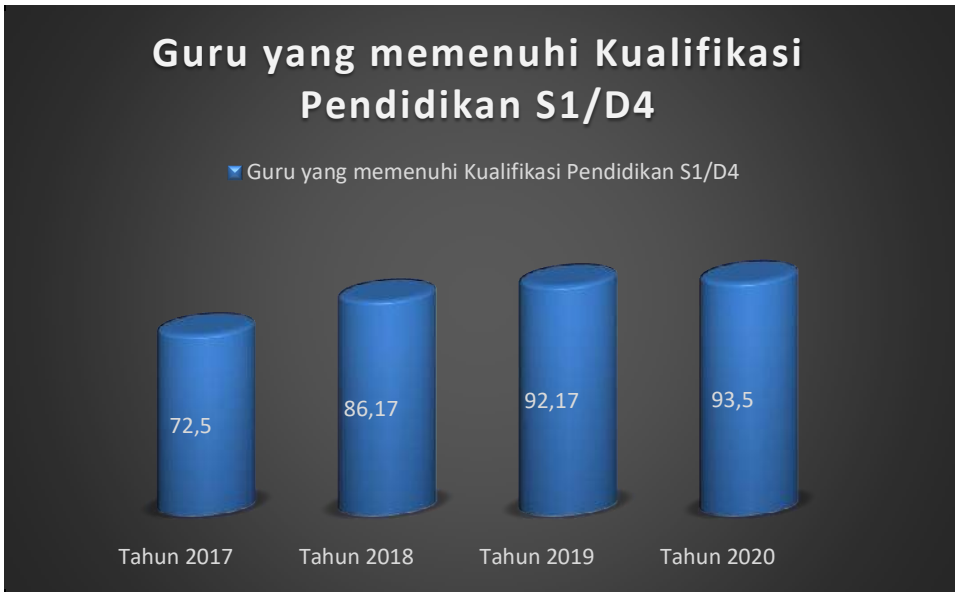

Sumber : Dinas PKO Kab. TTU, 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan manusia. Tujuan Pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan msyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang kesehatan sebagai berikut :

a. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kh)

Angka kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun disbanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun

tempat melekatnya janin yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate*(MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target angka kematian Ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Susitenable Development Goals*) harus dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir berfluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebesar 39,50/100.000 Kh meningkat menjadi 114,39/100.000 Kh pada tahun 2018, menurun lagi menjadi 58,12 pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 131,14/100.000 Kh. Realisasi AKI Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.21
Realisasi AKI /100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

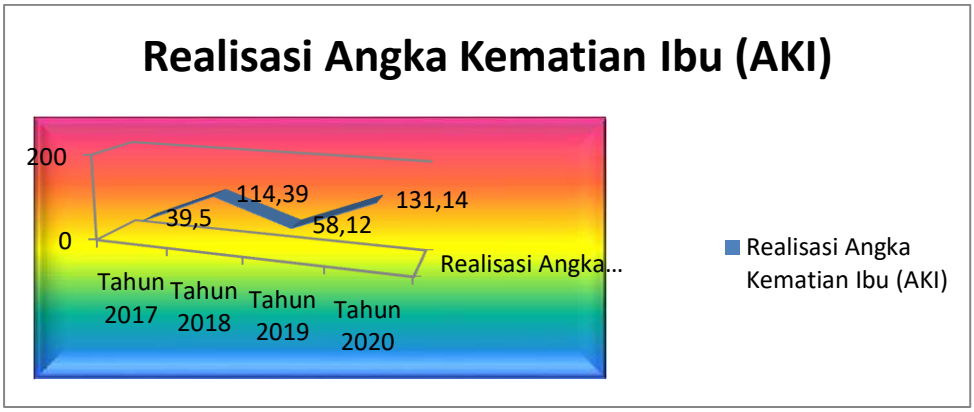

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa factor penyebab terbesar kematian ibu hamil dan saat melahirkan diantaranya karena pendarahan dan komplikasi penyakit. Oleh karena itu untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, maka peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil menjadi prioritas kedepannya.

b. Angka Kematian Bayi (per 1000)

Angka Kematian Bayi merupakan indicator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitive terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi dan sangat erat kaitannya dengan status social orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingka AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakantolak ukur yang sensitive dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khusunya dibidang kesehatan. Angka Kematian Bayi di kabupaten Timor Tengah Utara dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Susitenable Development Goals*) harus dibawah 12per 1000 Kelahiran hidup pada tahun 2030. Data Realisasi AKI Kabupaten TTU tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar2.22
Realisasi AKB/1000 Kh Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

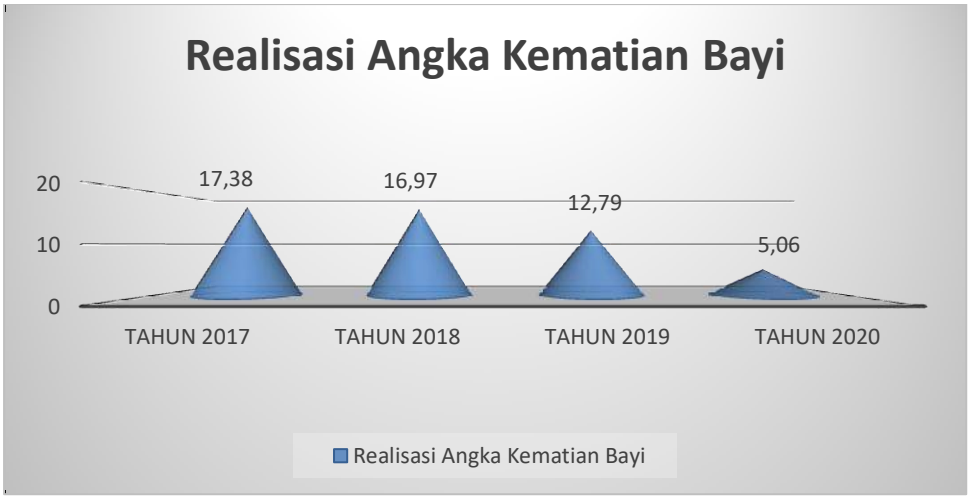

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan

tenaga medis.Kendati demikian AKB tetap manjadi perhatian Pemerintah kedepan.

c. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 1 (satu) rumah sakit rujukan yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Kefamenanu. Prioritas pembangunan kesehatan antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, cepat dan adil serta peningkatan penjaminan kesehatan (Universal Coverage) bagi masyarakat. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2018-2020

No	Sarana Kesehatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1	Posyandu	Unit	495	498	498
2	Polindes/PKD	Unit	139	144	144
3	Poskesdes	Unit	18	16	16
4	Puskesmas :				
	- Induk	Unit	26	26	26
	- Pembantu	Unit	43	40	40
	- Keliling	Unit	26	26	26
5	Poliklinik	Unit	13	9	9
6	Rumah Bersalin Swasta	Unit	5	5	5
7	RSUD :				
	Tipe C	Unit	1	1	1
	Tipe D	Unit	-	-	-
8	Rumah Sakit Swasta	Unit	1	2	2
9	Klinik/Praktek Dokter	Unit	20	14	14
10	Laboratorium Kesehatan :				
	- Pemerintah	Unit	2	2	2
	- Swasta	Unit	0	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU 2021

d. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan terutama dokter dan dokter gigi belum sesuai Permenkes Nomor 75 tentang Puskesmas. Kebutuhan dokter umum di puskesmas adalah 32 orang dan di RSUD sebanyak 10 orang, sedangkan kebutuhan dokter gigi di puskesmas sebanyak 26 orang. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terus berupaya menambah jumlah dokter dan dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan dokter serta pemberian insentif khusus bagi dokter dan dokter spesialis kontrak. Meski jumlah tenaga kesehatan selain dokter telah memenuhi standar, namun penyebarannya di sarana kesehatan belumlah merata, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam sebaran tenaga kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2018-2020

No	Tenaga Kesehatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1	Dokter Umum	Orang	20	32	32
2	Dokter Spesialis	Orang	4	4	4
3	Dokter Gigi	Orang	13	15	15
4	Perawat	Orang	281	306	306
5	Bidan	Orang	297	304	304
6	Ahli Kes. Masy.	Orang	30	47	47
7	Ahli Penyeh. Lingk.	Orang	31	39	39
8	Apoteker	Orang	7	8	8
9	Ahli Gizi	Orang	29	29	29
10	Analis Lab.	Orang	45	47	47
11	Rekam Medis	Orang	15	13	13
12	Fisioterapis	Orang	21	23	23
13	Perawat Gigi	Orang	26	29	29
11	Teknik Kefarmasian	Orang	52	67	67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU 2021

e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya meliputi Cakupan kunjunga ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas, cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare yang ditangani, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten selama 3 (tiga) tahun terakhir (2017-2019) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut sedangkan data tahun 2020 belum tersedia

Tabel 2.16
Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

No	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Cakupan kunjunga ibu hamil K4	67,59	64,40	66,69	66,69
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	63,65	71,85	60,80	60,80
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	75,77	78,48	77,55	77,55

No	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
4.	Cakupan pelayanan nifas	74,84	75,50	65,81	65,81
5.	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	58,76	61,75	29,45	29,45
6.	Cakupan kunjungan bayi	89,19	115,01	105,55	105,55
7.	Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*	65,97	84,97	68,91	68,91
8.	Cakupan pelayanan anak balita	62,01	72,23	72,68	72,68
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	19,08	86,45	84,13	84,13
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100
11.	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	82,37	100	90,68	90,68
12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	52,98	41,02	33,65	33,65
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare yang ditangani,	28,09	31,17	26,47	26,47
15.	Cakupan pelayanan	RS			

No	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	kesehatan dasar masyarakat miskin				
16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	RS			
17.	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, 2021

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Berdasarkan data Timor Tengah Utara Dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin cenderung…….kendati demikian penerima bantuan kesehatan Non BPJS kesehatan masih berada dibawah jumlah penduduk miskin.

Data kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 adalah penerima Jamkesmas sebanyak136.435Jiwa dan Jamkesda sebanyak12.671jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 4 (empat) tahun terakhir tersaji pada tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penerima Jamkesmas (Jiwa)	% Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda (Jiwa)	% Penerima Jamkesda
Tahun 2017	249.711	58.590	136.435	232,86	3000	5,12
Tahun 2018	251.993	56.090	136.435	243,24	3000	5,34
Tahun 2019	254.171	56.940	136.435	239,61	7000	12,29
Tahun 2020	259.829	56.980	136.435	239,44	12.671	22,23

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2021

2.2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi suatu keharusan mutlak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Dengan infrastruktur yang memadai, akses pengembangan ekonomi rakyat, penumbuhan investasi dan akses masyarakat terhadap pelayanan berbagai bidang menjadi lebih baik. Dalam urusan Perkejaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu diparhatikan dalam perencanaan pembangunan meliputi jalan, jembatan irigasi drainase dan penataan ruang. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Jalan

Jalan raya di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan kewenangan. Jalan Negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi

dan jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Pada Tahun 2016 Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi sepanjang 346,78km meningkat sepanjang 19,8km menjadi 366,58km pada tahun 2017. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi sepanjang 22,24 km menjadi 388,82km, pada tahun 2019 meningkat sepanjang 18,81 km menjadi 407,63 km sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi sepanjang 9 km menjadi 416,63 km. Walaupun terjadi peningkatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir akan tetapi belum mencapai secara keseluruhan panjang jalan di kabupaten TTU. Panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami peningkatan sepanjang 37.375m menjadi 70.100m pada tahun 2020 sedangkan pembangunan jembatan sebagai penghubung transportasi darat, Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 110 Unit sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 1 Unit pada tahun 2017 menjadi 111 Unit jembatan sedangkan pada tahun 2018 terjadi penambahan sebanyak 3 Unit menjadi 114 Unit jembatan sedangkan pada tahun 2019 ada penambahan 3 unit jembatan menjadi 117 unit Jembatan dan pada tahun 2020 ada penambahan 5 uni menjadi 122 Unit.

Data realisasi jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.23
Realisasi Panjang Jalan Kabupaten yang di bangun dan direahbilitasi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

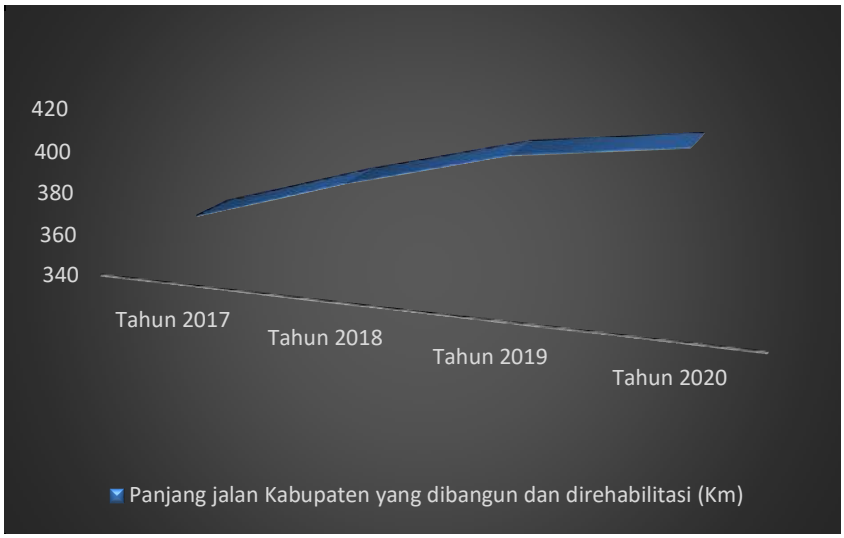

Sumber : Dinas PUPR Kab. TTU, 2021

Berdasarkan gambar diatas,data capaian panjang jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun baru mencapai 416,63 km dari panjang jalan kabupaten secara keseluruhan sepanjang 848,85 km. Oleh karena itu jalan Kabupaten akan menjadi perhatian pemerintah pada pembangunan yang akan datang.

b. Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017-2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2017 jaringan irigasi yang dibangun seluas 38.423,82 ha, tahun 2018 seluas 44.673,82 ha, tahun 2019 seluas 45.571,62 ha dan pada tahun 2020 seluas 49.976,82 ha. Walaupun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pembangunan jaringan irigasi mengalami peningkatan namun belum bias menjawab kebutuhan masyarakat untuk pengembangan pertanian secara umum. Oleh karena itu Pemerintah akan berupaya menambah luas jaringan irigasi yang dibangun untuk mendukung budidaya pertanian dan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Data capaian jaringan irigasi yang dibangun di

Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 disajikan pada gambar berikut ini

Gambar 2.24
Realisasi jaringan irigasi yang dibangun
di kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

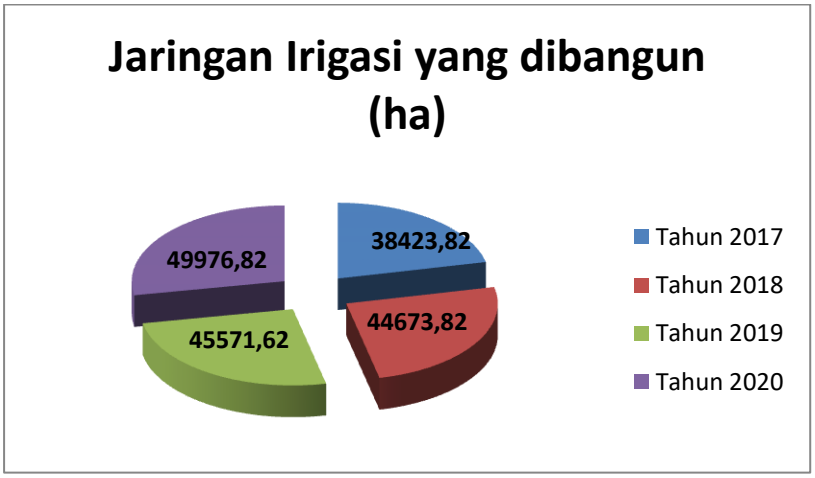

Sumber : Dinas PUPR Kab. TTU,2021

c. Drainase

Selain saluran irigasi yang setiap tahun menjadi perhatian pemerintah adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota kefamenanu sampai dengan tahun 2020 sepanjang 32,725 m. jika dibandingkan dengan panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun sepanjang 70.100 m, maka panjang drainase yang dibangun belum mencapai harapan. Terhadap pembangunan drainase yang belum sesuai dengan harapan pemerintah akan memperhatikan pembangunan drainase pada kawasan permukiman untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan pada kawasan permukiman dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman pada pembangunan yang akan datang.

d. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktifitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya

berkembang secara harmonis dan lestari. Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menetukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang. Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dalam urusan sub bidang penataan ruang kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun capaian kinerja pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan sub bidang penataan ruang dinilai belum mencapai target yang diharapkan yaitu penyusunan dokumen tata ruang. Terkait dengan penataan ruang di Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini belum dilakukan revisi terhadap Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Penataan Ruang di kabupaten Timor Tengah Utara, walaupun pada tahun 2017-2021 direncanakan untuk direvisi namun belum dilaksanakan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu revisi Peraturan daerah tentang Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan pada periode 2021-2026.

2.2.4.1.4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Dengan argumentasi ini, urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang perumahan dapat diketahui sebagai berikut :

a. Rumah Layak Huni

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Salah satu indicator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni.Perkembangan kinerja daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diukur dengan menggunakan beberapa indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni. Pada Tahun 2016 Cakupan Rumah Layak Huni sebesar 34,96% dengan Jumlah Rumah layak Huni sebanyak 27.526 meningkat 6,62% (3.814 Rumah Layak Huni) menjadi 54,43% (31.340 Rumah Layak Huni) pada tahun 2020. Walaupun terjadi peningkatan cakupan ketersediaan rumah layak huni dan Jumlah Rumah Layak Huni dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, namun masih jauh dari target yang direncanakan. Oleh Karena itu Rumah Layak Huni masih menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani. Data capaian rumah layak huni di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.25

Realisasi capaian Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

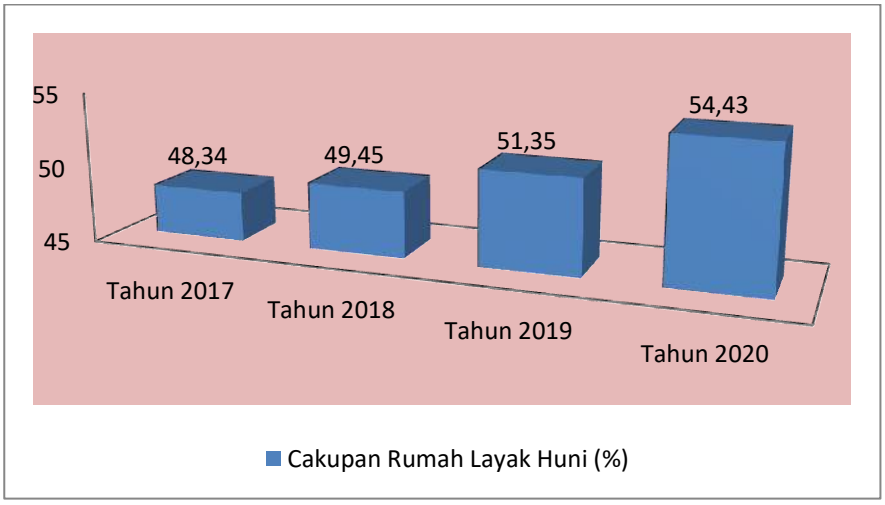

Sumber : Dinas PRKPP Kab. TTU, 2021

b. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Cakupan rumah tangga pengguna air bersih yang aman di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 sebesar 85,43%, tahun 2018 sebesar 86,05%, di tahun 2019 sebesar 86,39% dan di tahun 2020 tidak ada peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 86,39%. Walaupun mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir namun belum menjangkau secara keseluruhan kebutihan air bersih di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kendati demikian cakupan rumah tangga pengguna air bersih akan menjadi perhatian pemerintah. Data capaian cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini

Gambar 2.26
Capaian Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

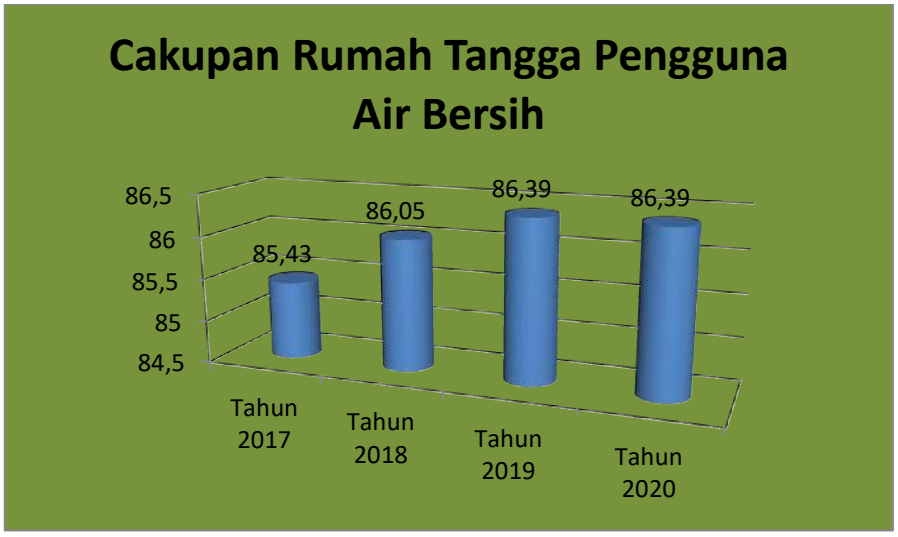

Sumber : Dinas PRKPP Kab. TTU, 2021

c. Kawasan Permukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh menjadi faktor lain yang penting diperhatikan. Penentuan lokasi dan luas permukiman kumuh diatur dalam Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 352 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus

2014, mencakup areal seluas 99,16 Ha setara dengan 0,04% wilayah TTU. Penanganan permukiman kumuh mulai dilakukan pada tahun 2014 dengan cakupan 0,04% atau seluas 0,04 ha dari total luas 99,16ha dan dipusatkan di dalam Kota Kefamenanu. Luas lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 mencapai 72,9% atau 1.948,88 Ha Lingkungan Permukiman Kumuh dari Total Luas Wilayah 2.669,72 Km^2.

Data Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Timor Tengahn Utara sesuai Surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 352 Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Penetapan Lokasi Lingkungan perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK Bupati Nomor 352 Tahun 2014

No	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
I.	Kecamatan Bikomi Selatan		
	1. Desa Oelami - Kawasan Beba	2,56	Permukiman
II.	Kecamatan Kota Kefamenanu 2. Kelurahan Sasi - Kawasan Sasi	21,06	Permukiman
	3. Kelurahan Maubeli - Kawasan Maubeli	33,58	Permukiman
	4. Kelurahan Tubuhue - Kawasan Papin - Kawasan Tubuhue	4,68 7,18	Permukiman Permukiman
	5. Kelurahan Kefamenanu Selatan - Kawasan Nekmatanik	7,06	Permukiman
	6. Kelurahan Benpasi - Kawasan Pasar Baru	17,65	Kawasan Pasar
	7. Kelurahan Bansone - Kawasan Maumolo	2,98	Permukiman
	8. Kelurahan Kefamenanu Tengah - Kawasan Tanah Putih	1,12	Permukiman
	9. Kelurahan Aplasi - Kawasan Nefomasi	1,29	Permukiman

Sumber :Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, 2021

2.2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 mempunyai beberapa target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali	8	82	85	85	85	48	>
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	7	7	7	7	7	9	<
3	Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara	Org	10	20	10	20	20	20	*

Sumber : Satpol PP Kab. TTU 2021

Pada tahun 2016 cakupan patroli petugas satpol pp dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, pada tahun 2017 sebanyak 82 kali dan pada tahun 2018 sebanyak 85 kali sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 85 kali. Kegiatan pembinaan politik daerah selama kurun waktu tahun 2016 – 2019 dilakukan setiap tahun 7 kali sedangkan, Jumlah pemuda/pelajar yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan bela Negara pada tahun 2016 sebanyak 10 orang, tahun 2017 sebanyak 20 Orang dan tahun 2018 sebanyak 10 orang sedangkan pada tahun 2019 meningkat 10 orang menjadi 20 orang sedangkan jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memuat snksi yang ditegakkansebanyak 6 (enam) Peraturan.

Aparat Linmas sampai tahun 2018berjumlah 1.954 orang, sehingga rasionya mencapai 129/10.000 penduduk sedangkan tahun 2019 berjumlah 1940 Orang. Artinya bahwa setiap 10.000 jiwa dilayani oleh 129 orang anggota Linmas. JumlahPos Kamling sebanyak 194pada 194 desa/kelurahan, dimana setiap desa/kelurahan memiliki 1 (satu) Pos Kamling. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Ummumerupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling.

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi salah satu kewenangan yang telah diberikan kepada daerah kabupaten untuk dikelola secara otonom. Arah dan fokus dari urusan ini adalah untuk memantapkan tekad dan cita-cita mewujudkan NKRI serta mengembangkan demokrasi pada level lokal secara sehat dengan melakukan pembinaan politik kepada masyarakat dan lembaga-lembaga *non government*.

Terhadap urusan ini, Pemerintah Daerah telah melakukan banyak hal dengan menggunakan beberapa alat ukur yakni jumlah kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) serta jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Sampai dengan kondisi terakhir, jumlah LSM sebanyak57 sedangkan OKP sebanyak 14.

2.2.4.1.6. Sosial

Pembangunan social dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek social maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi

Permasalahan dalam penanganan PMKS sangat kompleks, dan membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun ada sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan PMKS akan dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Program pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan pemerintah agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi

terhadap berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, tuna susila dan gelandangan di Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 44.864 jiwa, Sedangkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan social pada Tahun 2017sebesar 69,44 % (sekitar 21.795 jiwa) dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, pada tahun 2018 sebesar 62,33% (21.795 jiwa) dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, pada tahun 2019 sebesar 55,33% (21.793 jiwa) sedangkan pada tahun 2020 sebesar 66,38% (25.770 jiwa). Penanganan PMKS dilakukan melalui pendampingan,pembinaan dan pemberian dana stimulan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten. Realisasi Persentase penanganan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosisl di kabipaten TTU tahun 2017-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar2.27

Realisasi Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosisl di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020

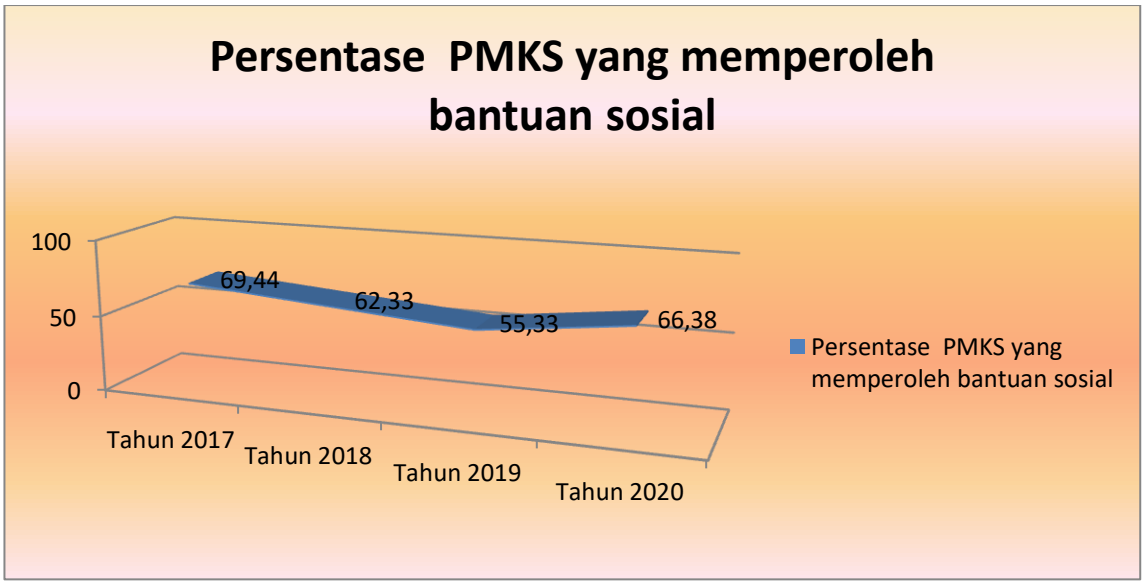

Sumber : Dinas Sosial Kab. TTU, 2021

2.2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.4.2.1. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, intervensi di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, Kabupaten TTU masih mengalami beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang perlu penanganan serius yaitu masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan padaurusan tenaga kerja dapat diketahui sebagai berikut :

1. **Jumlah Tenaga Kerja Terlatih**

   Salah satu jenis pendidikan non formal adalah pelatihan, kegiatan pelatihan memberikan manfaat yang cukup besar bagi peserta pelatihan apabila dikelola dengan baik. Dewasa ini banyak orang telah memanfaatkan pelatihan untuk membantu mereka dalam melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan, pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku dalam hal ini pengetahuan , *skill* dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan.

   Salah satu akibat dari globalisasi adalah terjadinya persaingan yang semakin kuat di bidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut kualitas tenaga kerja yang dicetak (*Supply)* yang harus memenui standart kebutuhan permintaan (*demand*) dunia usaha dan dunia industri. Proses pelatihan tersebut untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, oleh karena itu diklat keterampilan dan produktifitas tenaga kerja bagi masyarakat sangat diperlukan.

   Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU adalah UPT Tenaga Kerja yang baru dibangun pada tahun 2018 yang beralamatkan Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, sebagai wadah pemberian bekal kepada masyarakat untuk ikut bersaing dan meningkatkan pendapatan. Begitu pentingnya penanganan masalah

pengangguran bagi pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Data Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kabupaten TTU Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.28
Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kabupaten TTU
Tahun 2017 – 2020

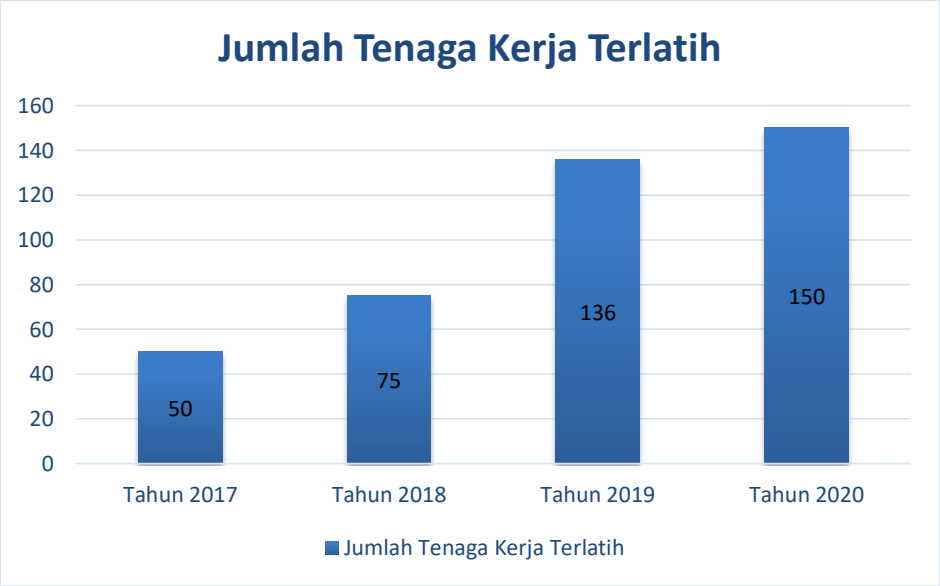

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TTU, 2021

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara pada kurun waktu 2017 s.d. 2020. Pada tahun 2017 sebesar 74,28%, tahun 2018 sebesar 75% ,tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 75,03%. Sedangkan tahun 2020 sebesar 78,13, menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun

belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar2.29
Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diKabupaten TTU
Tahun 2017-2020

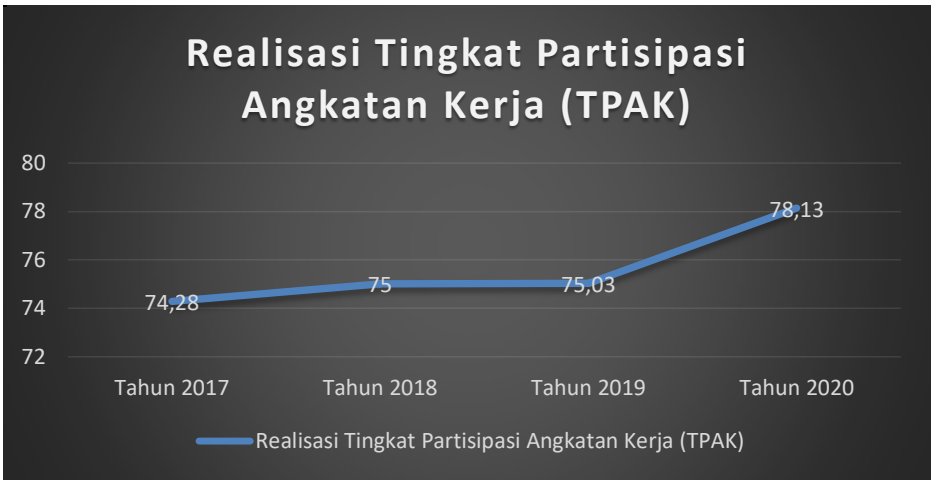

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan paling mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, diperlukan kemauan yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah berupaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan salah satunya dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), akan tetapi sampai dengan sekarang masih belum optimal karena kurangnya SDM yakni tenaga psikologi dan tenaga psikiater. Belum optimalnya focal point (penyusunan perencanaan program di OPD berbasis gender) di Kabupaten Timor Tengah Utara, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah belum membuat kegiatan berbasis gender.

Pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sebanyak 181 kasus tahun 2017, tahun 2018mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 63 kasus pada tahun 2018 pada tahun 2019 kasus keekrasan dalam Rumah Tangga mengalami penurunan menjadi 36 kasus, sedangkan tahun n2020 terjadi lonjakan lagi menjadi 131 kasus. Kasus KDRT akan menjadi Perhatian Pemerintah yang akan dilakukan dengan cara Upaya preventif berupa sosialisasi, promosi dan pendidikan kepada masyarakat perlu ditingkatkan oleh lintas sektor khusunya dinas P3A perlu ditingkatkan sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Forum konsultasi/konseling bagi anak dan perempuan korban kekerasan telah tersedia pada tahun 2018 seperti yang telah diuraikan diatas. Gambaran capaian kinerja di bidang perlindungan terhadap perempuan dana anak dapat dilihat pada gambar 2.30

Gambar2.30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

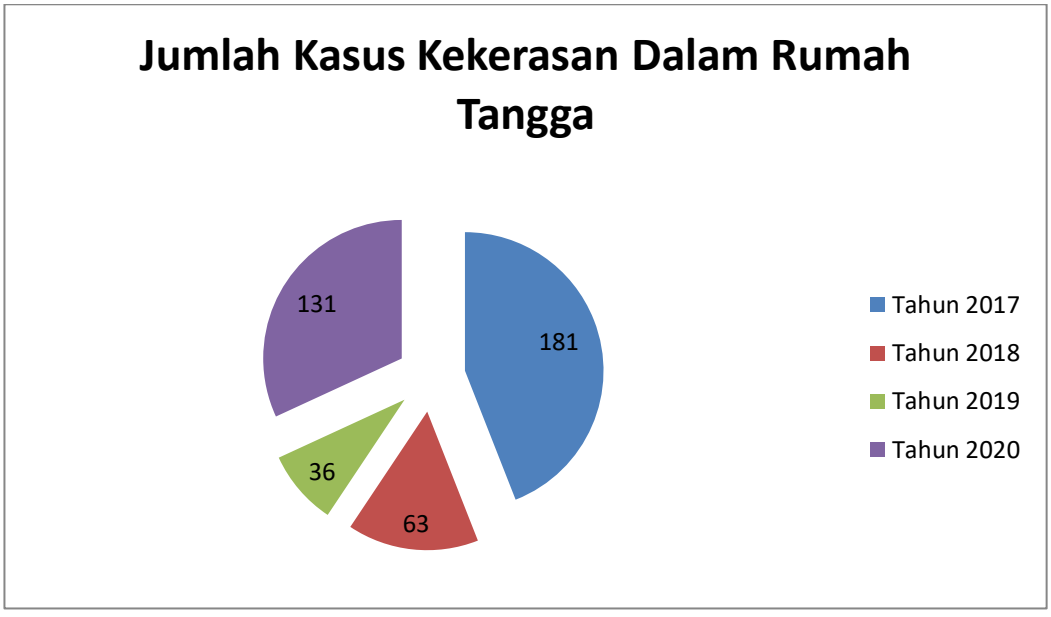

Sumber : Dinas P2PA Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu system yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan yang memadai menjadi kebutuhan paling pokok dari setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus diutamakan karena berkenaan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari dan bersinggungan pula dengan aspek pendidikan dan kesehatan.

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Ketersediaan pangan disuatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan padaurusan pangan dapat diketahui sebagai berikut :

1. **Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan**

   Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energy baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten TTU dari tahun 2017-2020 yang ditunjukkan dengan cukup meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun namun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten TTU dari aspek konsumsi. Pada tahun 2017 Skor Pola Pangan Harapan mencapai 89,9% meningkat sebesar 0,1% menjadi 90% pada tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat lagi 0,1% menjadi 90,01% namun pada tahun 2020 menurun

1,01 menjadi 89%. Capaian Skor Pola Pangan Harapan dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.31
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU
Tahun 2017-2020

2. Ketersediaan Cadangan Pangan

Ketersediaan Cadangan Pangan Utama dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berfluktuatif . Pada tahun 2017 mencapai 20% meningkat sebesar 10% menjadi 30% pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15,50% menjadi 14,50% sedangkan pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar 7,89% menjadi 22,39%. Capaian ketersediaan pangan di Kabupaten TTU pada tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.32

Capaian ketersediaan pangan di Kabupaten TTU pada tahun 2017 – 2020

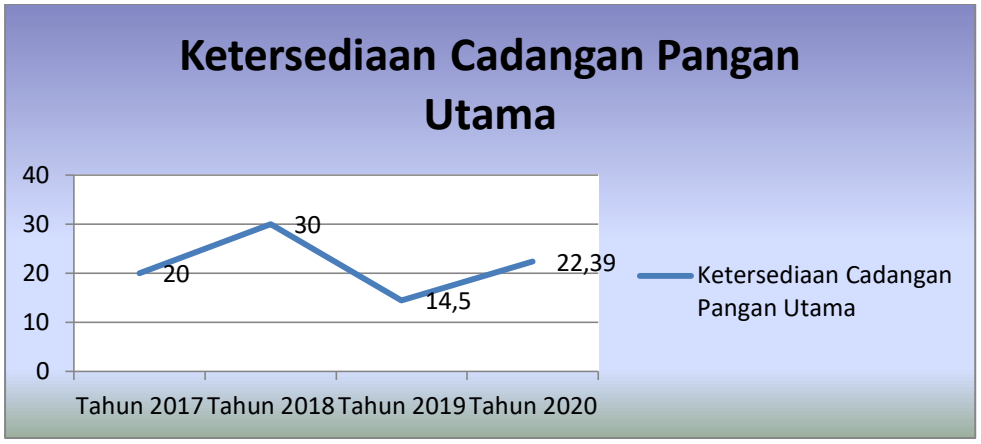

Sumber : Dinas Pangan Kab. TTU, 2021

Pemerintah daerah berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (dalam arti luas) dan terobosan-terobosan lain yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Karenanya penting untuk dideskripsikan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir.

Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten TTU, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa regulasi daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten TTU.

2.2.4.2.4. Pertanahan

Kewenangan pertanahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota masih sangat terbatas. Karena itu layanan di bidang ini pun sangat terbatas karena sebagian besar masih dijalankan oleh instansi vertikal di daerah yang membidangi pertanahan.Dalam urusan pertanahan, ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti koordinasi sertifikasi tanah serta penanganan masalah tanah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui

kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pertanahan adalah persentase luas lahan bersertifikat.

Jenis hak kepemilikan tanah/lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten TTU meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan Hak Pakai (HP) yang persentasenya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2016jumlah tanah bersertifikat sebanyak 1.888 dokumen dengan total luas lahan bersertifikat mencapai 28.885,659 m^2atau 1,1% dari keseluruhan luas daratan, meningkat menjadi 3.837 dokumen pada tahun 2019 dengan luas lahan bersertifikat mencapai 11.976.042 m^2atau 1,4% dari keseluruhan luas daratan.

Dari persentase kepemilikan lahan diatas dapat disimpulkan bahwa total luas lahan bersertifikat masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total luas daratan.Untuk itu pemerintah daerah harus terus melakukan upaya-upaya konkrit untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengurus keabsahan lahan yang dimiliki serta upaya sertifikasi bagi tanah milik pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalisir konflik pertanahan akibat sengketa kepemilikan lahan dan juga penyalahgunaan lahan pemerintah oleh masyarakat.

2.2.4.2.5. Lingkungan hidup

Pada dekade ini, isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu global. Perhatian dunia semakin intens pada persoalan lingkungan sebab lingkungan menjadi *determinant* pembangunan dunia yang berdampak sangat serius bagi keberlangsungan habitat makluk hidup. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), upaya pelestarian lingkungan hidup mendapat tempat sebagai salah satu prioritas pembangunan dunia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global SDGs dimaksud sehingga seluruh jenjang pemerintahan wajib memperhatikan isu lingkungan hidup dalam setiap aspek kebijakan pembangunan.

Tingkat kerusakan lingkungan terutama hutan di Kabupaten TTU masih menjadi persoalan klasik yang diwariskan dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya adalah cara bertani sebagian petani yang masih menggunakan sistem tebas bakar secara berpindah-pindah. Pemerintah daerah telah berusaha keras untuk menurunkan tingkat kerusakan lingkungan melalui intervensi berbagai kebijakan. Beberapa diantaranya

adalah program Padat Karya Pangan (PKP), melakukan rehabilitasi lahan kritis dalam kawasan hutan, di luar kawasan hutan dan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir Pantai Utara.

Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu indikator pembangunan urusan lingkungan hidup yang menjadi perhatian pemerintah. Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis Selama 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 9.815 ha dari areal lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan seluas 26.349 ha. Akan tetapi besarnya proyek rehabilitasi hutan tersebut belum mampu menjawab tuntutan perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan yang sudah mengkhawatirkan. Meski demikian, apresiasi sudah tentu diberikan kepada pemerintah daerah atas daya upayanya, namun kekurangan-kekurangannya perlu diperbaiki melalui terobosan baru yang diharapkan mampu memberikan perubahan bagi pelestarian lingkungan hidup.

Tidak hanya soal hutan, masih ada indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup tersebut adalah TPA Aktif /Sanitary landfill (Unit). Pembangunan TPA Aktif / Sanitary Landfill direncanakan pembangunannya pada tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 akan tetapi belum terealisasi. Indikator lain yang turut mendukung kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup adalah Jumlah RTH dalam Kota yang dibangun (Unit). Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Kota dalam ditargetkan 1 (satu) unit pada tahun 2018 akan tetapi belum terealisasi sehingga Pembangunan RTH dimaksud akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah pada Tahun 2022, sedangkan prosentase penanganan sampah pada tahun 2017sebesar 17,73% mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebesar 10,35% menjadi 28,08% pada tahun 2020.Capaian Kinerja pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20

Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capain Kinerja					Target RPJMD 2019	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	2017	2018	2019	2020		
1	Luas lahan kritis yang direboisasi	Ha	10	0	20	50	50	90	<
2	TPA Aktif/Sanitary Landfill	Unit	-	-	1	-	-	1	<
3	Presentase Penanganan sampah	%	17,6	17,73	27,51	27,80	28,08	37,60	<
4	Jumlah mata air terpelihara	Unit	377	0	20 (397)	50 (447)	447	979	<
5	Status mutu air teruji	%	10	4 (14)	20 (34)	61 (95)	95	40	>
6	Jumlah RTH Dalam Kota	Unit	0	0	0	0	0	1	<

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU 2021

2.2.4.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang kewenangannya menerbitkan dan menertibkan administrasi kependudukan dan pelaksanaannya diberikan kepada Kabupaten/Kota. Pada urusan ini terdapat beberapa indicator yang digunakan sebagai standar diantaranya rasio penduduk berKTPN, Rasio penduduk Berakte Kelahiran dan Rasio Penduduk Berakte Nikah. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang kependudukan dancatatan sipil dapat diketahui sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Persentase KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun atau telah menikah.Pada tahuyn 2017 Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP sebesar 69,61% meningkat menjadi 74,19 pada tahun 2018, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 83,40% sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 90%. Persentase Penduduk Ber KTPdi Kabupaten TTU pada tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Ber KTP Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

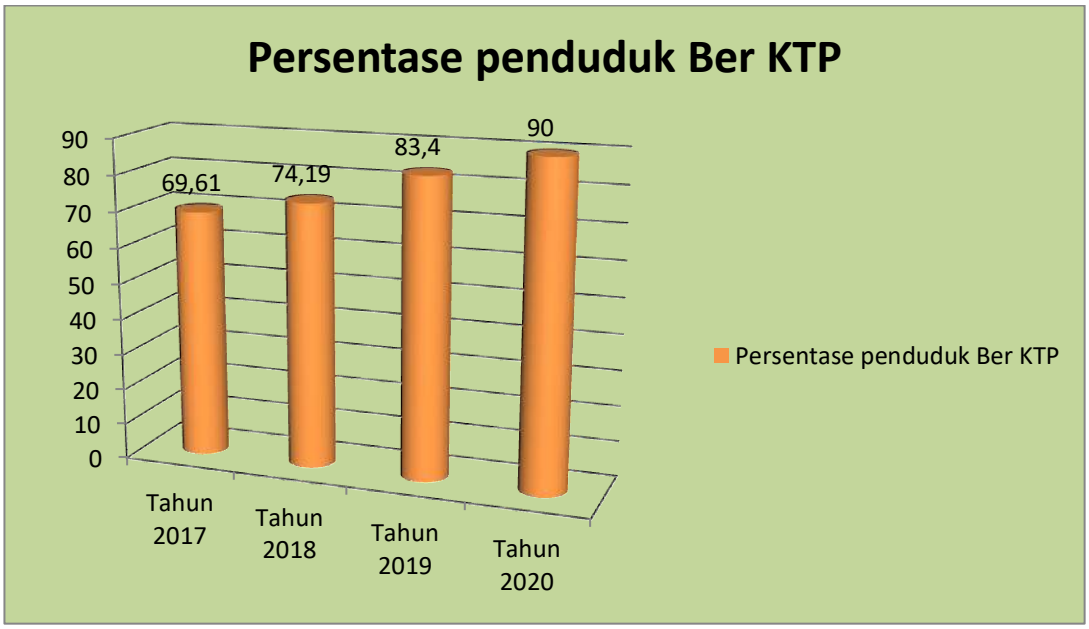

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU, 2021

2. Rasio Penduduk Berakta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan

dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Kepemilikan akta kelahiran Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap rasio kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2020 mencapai 91,65% meningkat dari tahun 2016 yang hanya 17,30 persen, hal ini karena adanya program pencatatan akte keliling yang dilakukan Disdukcapil di semua desa. Dalam rangka mengoptimalkan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik kepada masyarakat, telah dikembangkan SIAK dan *e-KTP* secara *online* di 24 kecamatan disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan ketersediaan peralatan infrastruktur pendukung. Data Rasio penduduk Berakta kelahiran ditunjukkan dalam Gambar 2.34

Gambar 2.34
Rasio Penduduk Berakta Kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

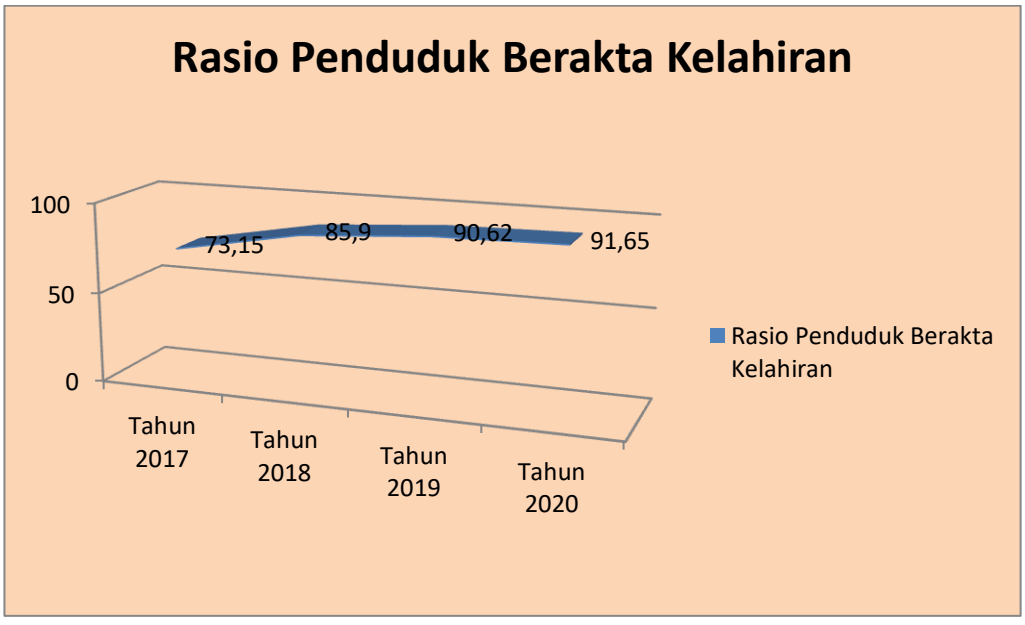

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU, 2021

3. Rasio Penduduk Berakta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Pada tahun 2017 penduduk yang berakta nikah sebesar 33,30%, meningkat menjadi 52,57% pada tahun 2018, meningkat lagi menjadi 65,68% pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 43,20%. Rasio Penduduk Berakta Nikah di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.35
Rasio Penduduk Berakta Nikah di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

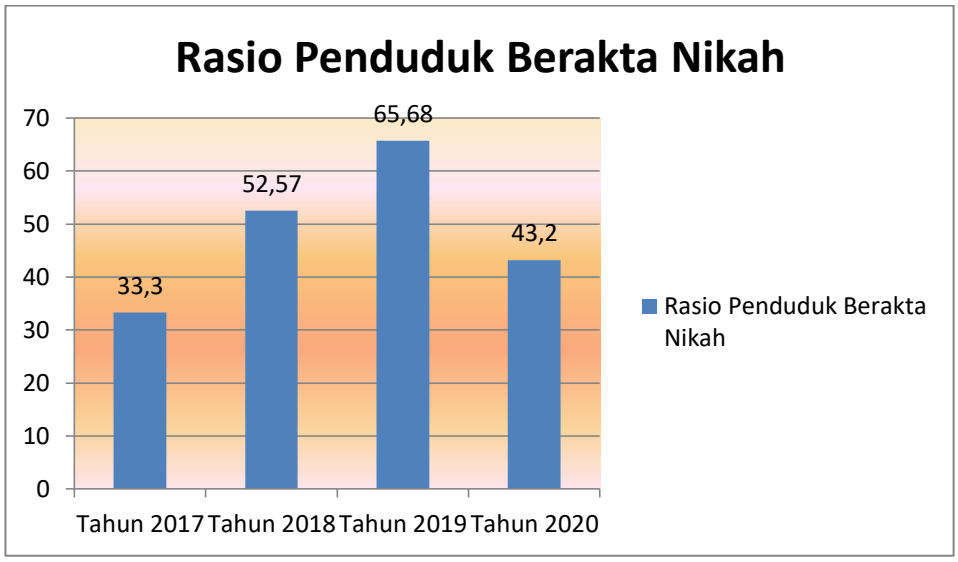

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU,2021

2.2.4.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan

pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan di integrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui sebagai berikut :

1. Persentase Posyandu Aktif

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2017-2020 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2017-2020 Persentase posyandu aktif 100%. Data posyandu aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar 2.36 berikut

Gambar 2.36
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

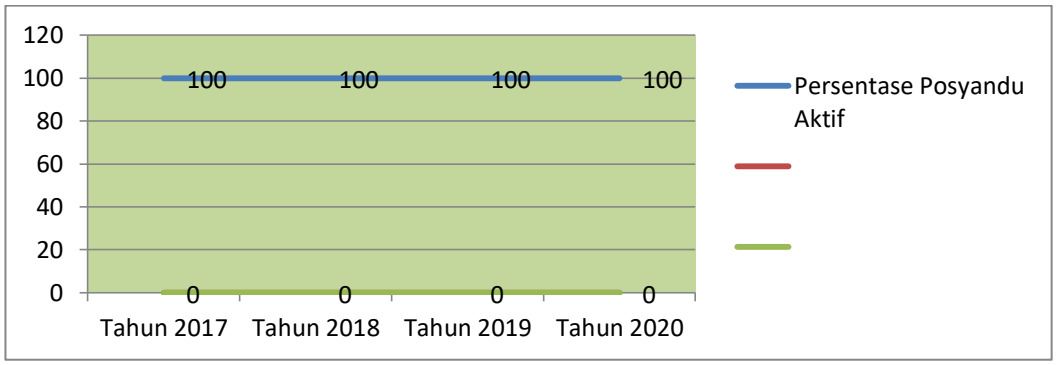

Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, 2021

2. Persentase PKK Aktif

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kabupaten TTU memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU. Persentase PKK aktif mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 100%. Data Persentase PKK Aktif di Kabupaten TTU Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.37

Persentase PKK Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2017-2020

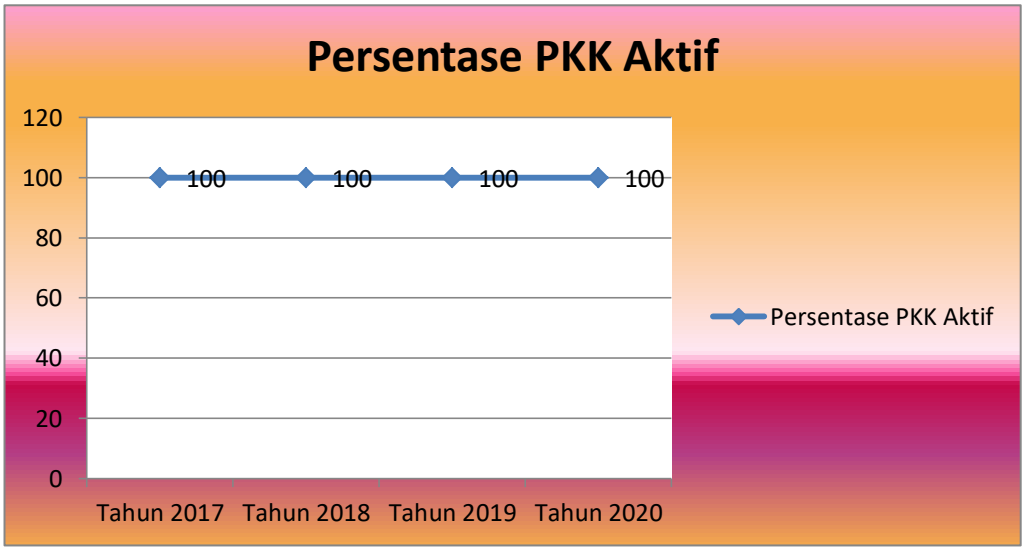

Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, 2021

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbentuk

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hokum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pada tahun 2017 BUMDes terbentuk sebanyak 18, tahun 2018 tidak ada penambahan masih tetap 18 BUMDes, pada tahun 2019 penambahan 1 BUMDes terbentuk menjadi 19 BUMDes,

sedangkan pada tahun 2020 tidak ada pembentukan BUMDes sehingga masih tetap 19 BUMDes. Walaupun mencapai target namun belum semua desa membentuk BUMDes untuk mendukung perekonomian di Desa sehingga diharapkan agar pada periode 2021-2026 diharapkan semua desa harus membentuk BUMDes demi kemajuan di Bidang perekonomian. Data BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.38
Jumlah BUMDes Terbentuk di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

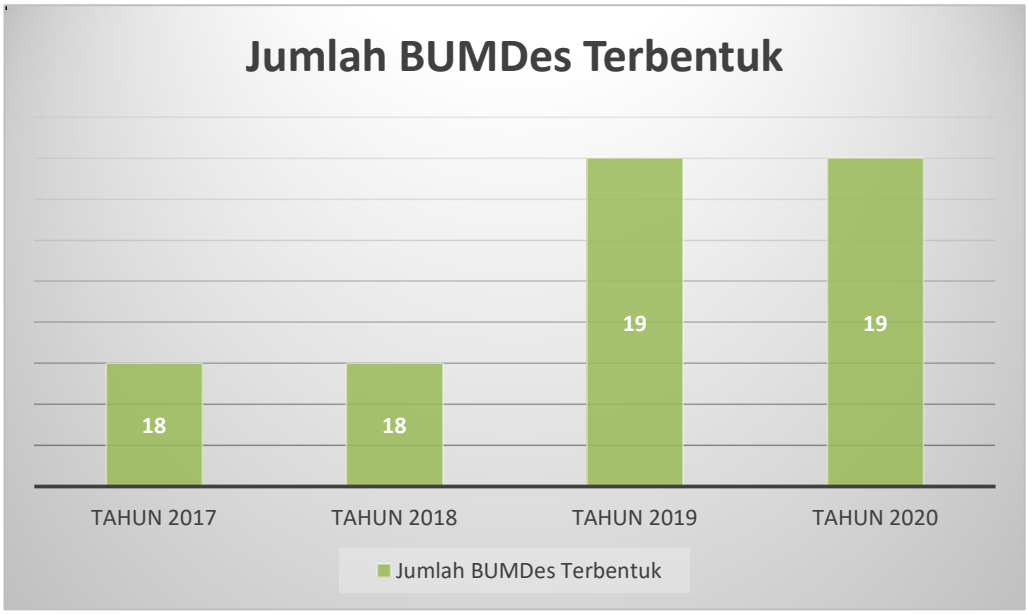

Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, 2021

4. **Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu**

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka seluruh desa diharapkan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Pada tahun 2017 Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sebanyak

50%, pada tahun 2018 sebanyak 60%, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 81% dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 82%. Walaupun mengalami peningkatan setiap tahun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun namun belum mancapai target yang diharapkan. Data Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.39

Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

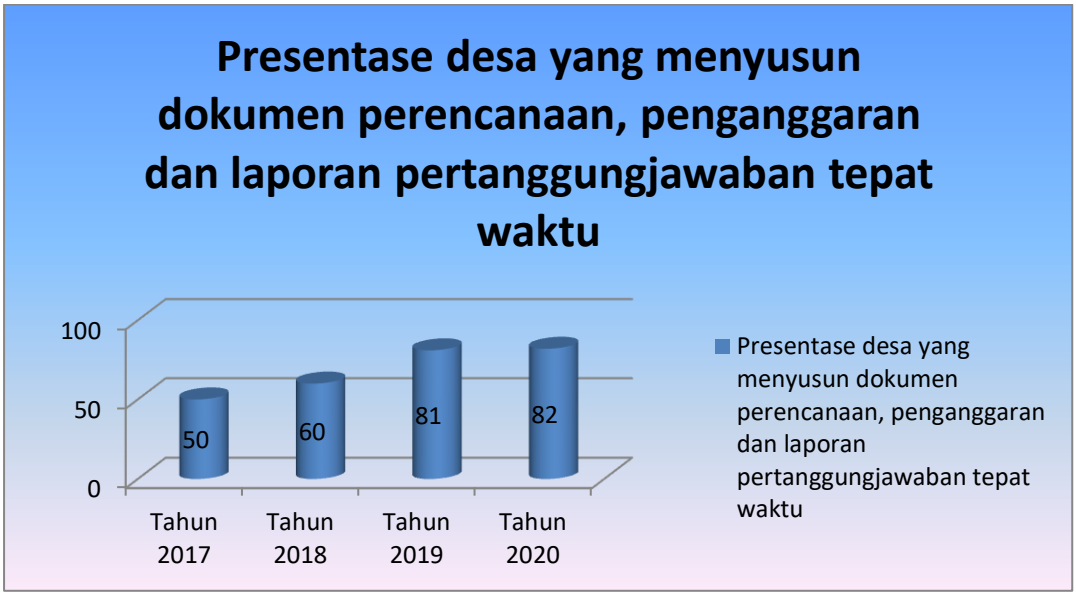

Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, 2021

5. **Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilatih**

Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang juga merupakan unsurpenyelenggaraan pemerintahan desa harus memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik agar penyelenggaran pemerintahan desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pada Tahun 2017 Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

dilatih sebanyak 172 orang, pada tahun 2018 sebanyak 183 orang, tahun 2019 masih tetap 183 orang dan tahun 2020 belum ada penambahan masih sebanyak 183 orang. Data jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.31
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

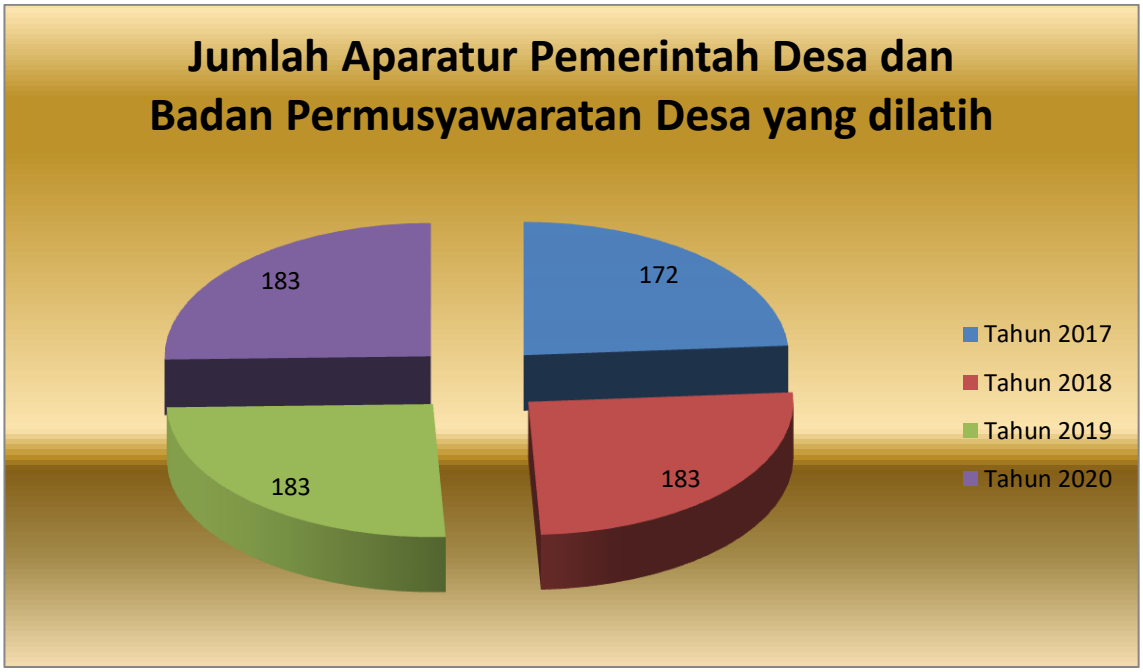

Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk dapat menjadi potensi sekaligus sebagai permasalahan pembangunan, yaitu apabila laju pertumbuhannya tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan mengefektifkan program KB. Pencanangan Kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016 diharapkan dapat mencapai target – target yang ditetapkan tersebut. Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana hanya melakukan pencapian 1(satu) indicator dari berbagai indicator yaitu Cakupan perserta KB aktif. Pada tahun 2017 cakupan peserta aktif sebesar 53,89, pada tahun 2018 sebesar 59%, tahun 2019 meningkat menjadi 64,37% dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi 70,45%. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar2.40
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. TTU 2021

2.2.4.2.9. Perhubungan

Penataan perhubungan, baik perhubungan darat maupun perhubungan laut merupakan urusan pemerintahan wajib dapat dilihat dari jumlah arus barang dan jasa melalui angkutan darat maupun jumlah bongkar muat melalui pelabuhan Wini. Perkembangan pelayanan angkutan darat diketahui dari jumlah izin trayek Antar Kota Dalam Propinsi, jumlah izin trayek angkutan kota, izin trayek angkutan pedesaan, jumlah bus umum, terminal bus tipe A dan tipe B serta jumlah penumpang angkutan

umum. Pelayanan urusan ini menjadi penting karena berkenaan dengan kebutuhan akan kelancaran dan keamanan transportasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.

Jumlah kendaraan angkutan umum yang telah dilakukan uji selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun.Pada tahun 2017 jumlah 100% , Tahun 2018 masih mempertahankan prosentase 100%sedangkan tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi 99,03% sedangkan pada tahun 2020 masih tetap sebesar 99,03%. Untuk melayani arus penumpang dari dan keluar Kota Kefamenanu hanya tersedia 1 (satu) buah terminal bus, sementara pelabuhan laut juga hanya berjumlah 1 (satu) buah yakni pelabuhan laut Wini yang selama ini berfungsi sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal barang karena statusnya pelabuhan pengumpul. Selama lima tahun terakhir, ada pembangunan sarana dan prasarana di Pelabuhan Wini seperti pelataran bongkar muat, gudang, penerangan di areal pelabuhan.Secara rinci realisasi capaianindikator yang mendukung kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.41

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

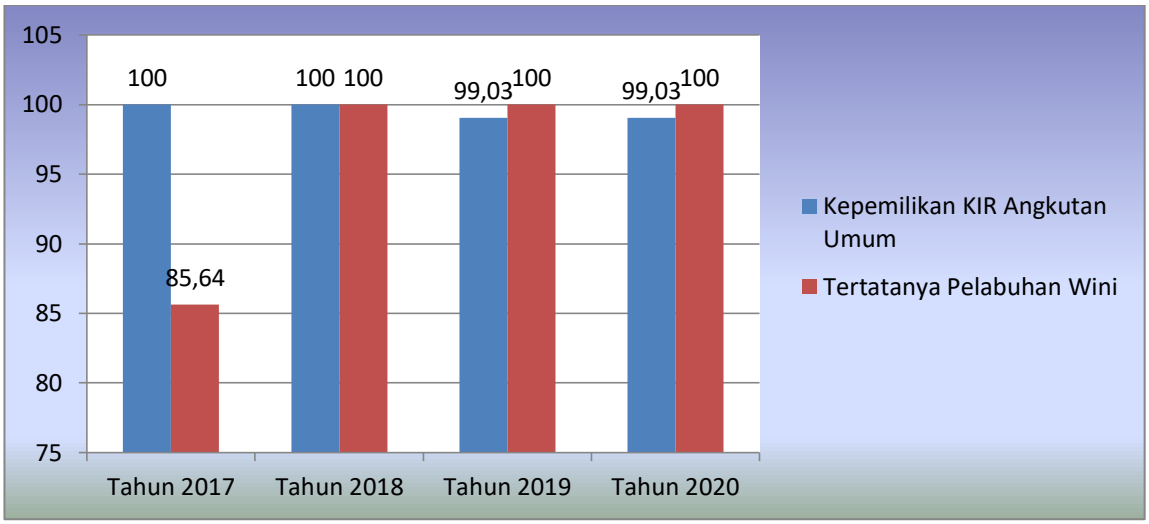

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.10. Komunikasi dan Informatika

Dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi melalui radio, sampai pada tahun 2020, terdapat 1 radio dan 1 stasiun Televisi local yang melayani masyarakat dilingkup Kabupaten Timor Tengah Utara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah banyak menumbuhkan warung internet (warnet) yang dikelola oleh masyarakat. Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi pada pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memanfaatkan internet dengan membangun jaringan pada masing-masing OPD, serta pembuatan web di masing-masing OPD dapat meningkatakan transparansi pembangunan untuk masyarakat. Pada tahun 2020, jaringan komunikasi (layanan telepon seluler) yang ada di Kabupaten TTU sebanyak 2 (dua) yakni Telkomsel dan Indosat. Sementara jaringan informasi dan komunikasi internet (warnet) sebanyak 13 unit dan warung telekomunikasi (wartel) sebanyak 12 unit. Masih terkait dengan sarana publik, jumlah surat kabar lokal yang masuk Kabupaten TTU sebanyak 3 (tiga) jenis. Khusus untuk televisi lokal sebanyak 1 unit dan televisi nasional pun hanya ada 1 yakni TVRI. Sementara radio lokal dan nasional pun sama, masing-masing hanya berjumlah 1 unit sedangka Pameran atau Expo setiap tahun dilakukan 1 (satu) kali pada saat Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.

Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten TTU sebanyak 1 (satu) blog yang dikelola oleh Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kab. TTU. Meskipun informasi resmi Pemerintah Daerah melalui website hanya berjumlah 1 blog, namun kreativitas warga Kefamenanu menyebarluaskan informasi daerah sangat tinggi, dimana tersedia ± 10 blog pribadi yang berisi beragam data dan informasi tentang Kabupaten TTU.Kondisi kinerja bidang komunikasi dan infromasi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

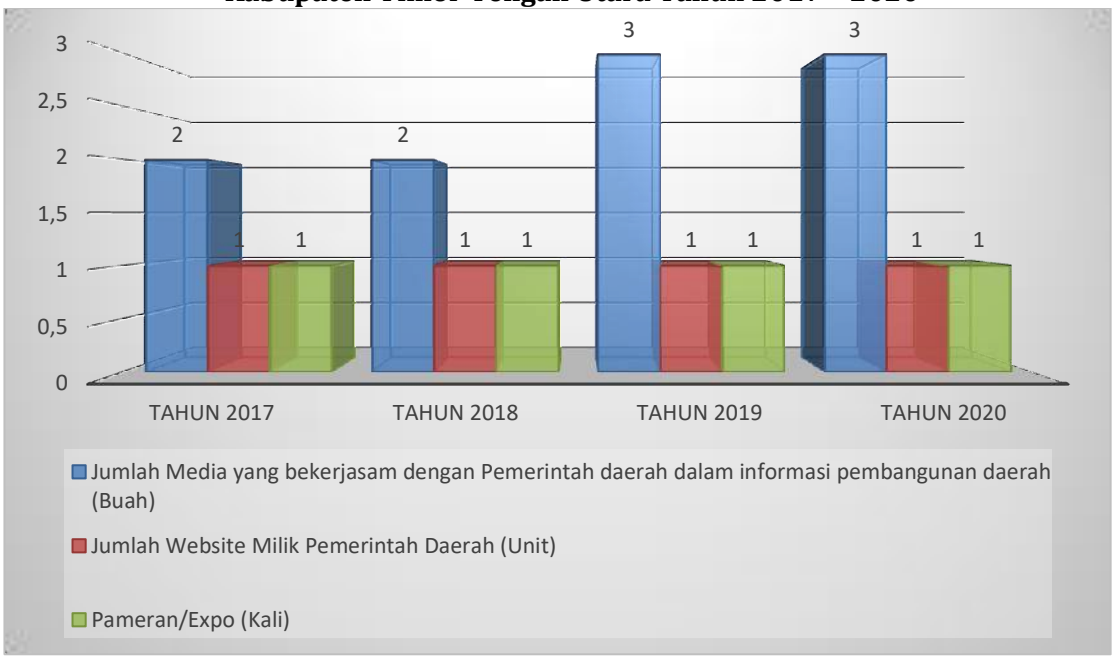

Sumber : Dinas Kominfotik Kab. TTU 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu,yang meliputi :Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan

domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

a. Domain Kebijakan SPBE
b. Domain Tata kelola SPBE
c. Domain Layanan SPBE

Adapun Indkes SPBE kabupaten Timor Tengah Utara selama kurun waktu 2017-2020 tidak dilakukan perhitungan, oleh karena itu Pemerintah daerah akan melaksanakan penerapan SPBE dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2.2.4.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan ekonomi rakyat baik di pedesaan maupun perkotaan, peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Kedua jenis lembaga ini selain berfungsi sebagai pemodal (menyediakan modal pinjaman) bagi usaha rakyat juga diharapkan sebagai distributor hasil-hasil usaha masyarakat baik di bidang pertanian, industri dan lain sebagainya. Dengan demikian, geliat perekonomian rakyat akan meningkat karena ada lembaga yang menyalurkan dan atau menjual hasil usaha masyarakat kepada pasar. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang Koperasi dan UMKM dapat diketahui sebagai berikut :

1. **Jumlah Koperasi Aktif**

   Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 sebanyak 56 Unit, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 2 unit menjadi 58 Unit, tahun

2019 terjadi peningkatan sebanyak 4 Unit menjadi 62 Unit dan tahun 2020 terjadi lagi peningkatan sebanyak 2 Unit menjadi 64 Unit. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun namun Koperasi Aktif belum mencapai target sesuai target RPJMD. Ketidakaktifan dan kurang berkualitasnya sejumlah koperasi antara lain diakibatkan oleh rendahnya kapasitas SDM dan manajemen koperasi yang belum tertata dengan baik. Data Jumlah Koperasi Aktif di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.43
Jumlah Koperasi Aktif di kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

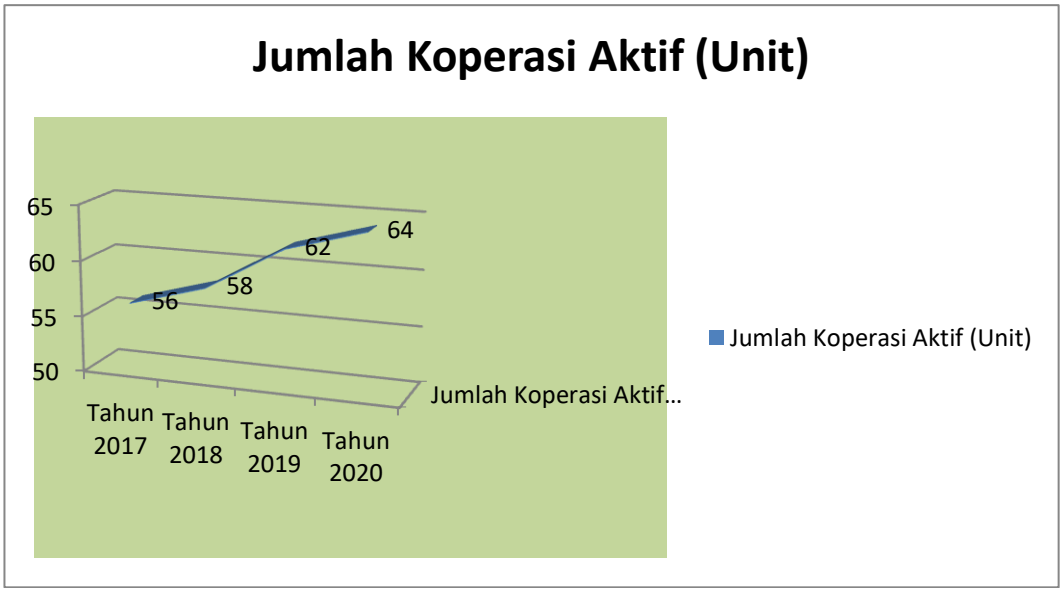

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. TTU, 2021

2. Jumlah UKM Terbina

jumlah UKM yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 166 UKM, pada tahun 2018 meningkat menjadi 186 UKM, pada tahun 2019 bertambah menjadi 292 UKM sedangkan pada tahun 2020 UKM yang dibina sebanyak 292. .Data jumlah UKM yang dibina di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.44
jumlah UKM yang dibina di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

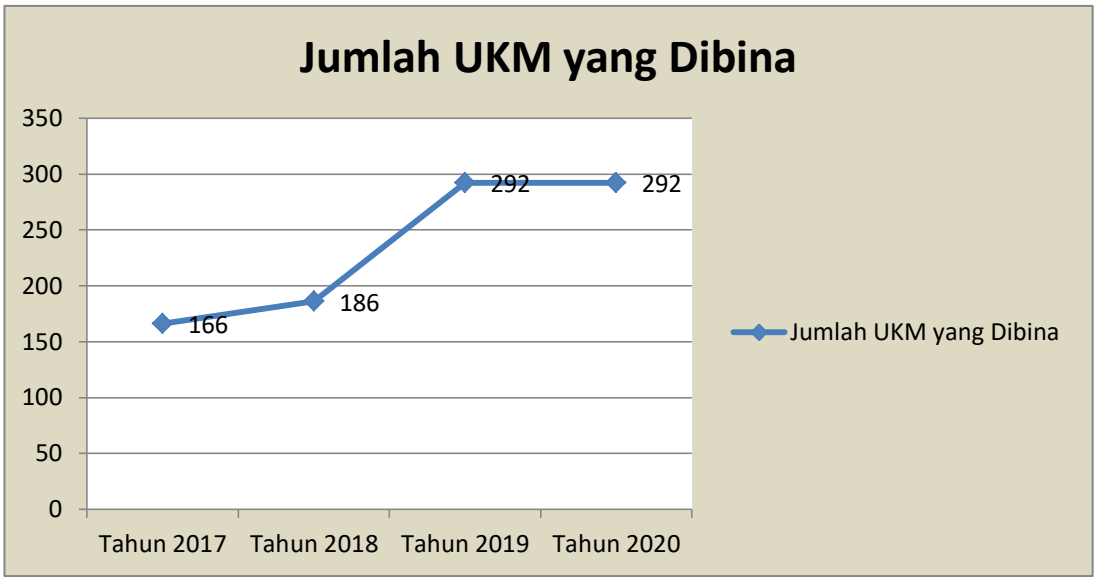

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.12. Penanaman Modal

Penguatan investasi daerah secara optimal akan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dicirikan oleh pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB. Semakin banyak investor dan nilai investasi, semakin tinggi pula peredaran uang di daerah yang akan mendongkrak pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal. Kinerja Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dapat diketahui sebagai berikut

1. **Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

   Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan investasi daerah melalui program pengembangan iklim investasi daerah yang mencakup beberapa kegiatan penting untuk mempromosikan dan mendatangkan investor. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pameran produk unggulan daerah dalam pameran/expo di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kinerja pelayanan urusan ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yakni jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).Pada tahun 2017 sebanyak 29 Investor,pada tahun 2018 bertambah sebanyak 8 (delapan) orang investor menjadi 37dan

pada tahun 2019 jumlah investor berkurang sebanyak 4 investor menjadi 33 investor sedangkan pada tahun 2020 masih tetap 33 Investor hal ini disebabkan karena Indonesia sedang dilanda *Pandemi COVID-19*. Data Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 sebagai berikut

Gambar 2.45
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

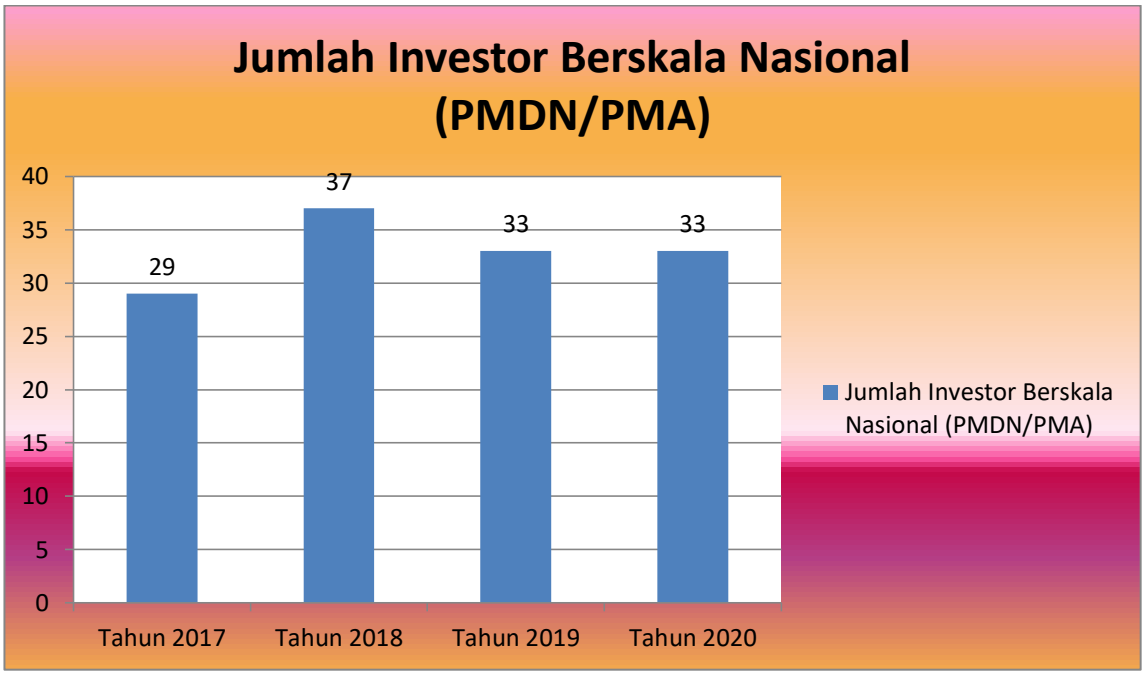

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. TTU,2021

2. Nilai Investasi (Milyard)

Nilai Investasi.pada tahun 2017 sebesar Rp. 442 Milyard sedangkan pada tahun 2018 bertambah sebesar Rp.446.Milyard dan pada tahun 2019 jumlah investor berkurang sebanyak 4 investor menjadi 33 investor dengan nilai investasi sebesar Rp. 293 Milyard sedangkan pada tahun 2020 nilai investasi masih sama seperti tahun 2019 yakni 293 Milyard hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Adapun jenis perijinan secara online melalui online single subsmission (OSS) sudah

dilaksanakan pada tahun 2018 dengan jumlah jenis perijinan sebanyak 32 jenis. Data Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.46
Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara
tahun 2017-2020

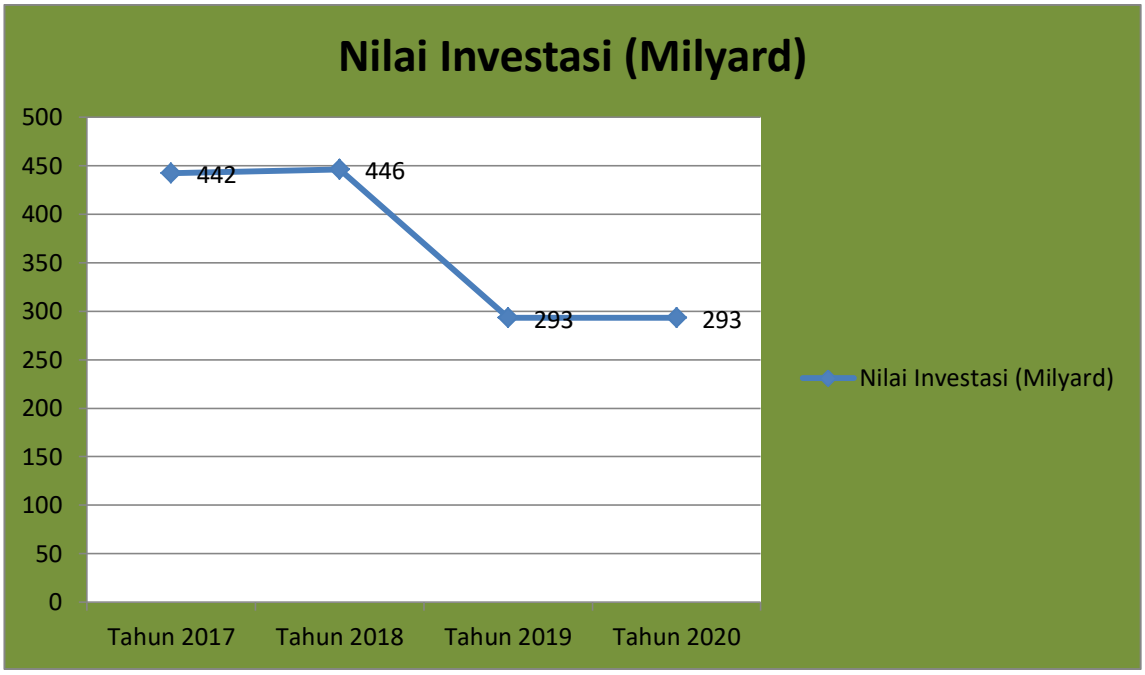

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu satu Pintu Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka peningkatkan kualitas Sumber daya manusia maka diperlukan pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan berprestasi di bidang olahraga. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan Berbagai kebijakan dan program di bidang pemuda dan olahraga, akan tetapi melihat capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga masih belum sesuai target yang diharapkan.

Ada 3 (tiga) Indikator utama yang digunakan untk mengukur capaian Urusan kepemudaan dan Olah Raga yakni Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina, Jumlah Organisasi Olahraga yang dibantu dan Jumlah even Olahraga yang diselenggarakan. Dari Ketiga indicator dimaksud data yang tersedia adalah salah satu indicator yakni Jumlah Even Olahraga yang diselenggarakan. Pada tahun 2017 sebanyak 5 Kegiatan, hal

yang sama terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2019 yaitu 5 kegiatan yang dilaksanakan sedangkan tahun 2020 tidak dilaksanakan karena adanya Pandemic Covid-19.Jumlah pemuda berprestasi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 sebanyak 25 Orang dari 10 cabang olahraga, atlet berprestasi meningkat menjadi 30 orang dari 9 cabang olahranga pada tahun 2018, sedangkan perolehan medali pada PORDA Nusa Tenggara Timur dari tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 9 medali menjadi 48 medali pada tahun 2017, perolehan medali ini diraih dari cabang olahraga atletik sebanyak 6 medali, pencak silat 2 medali, taekwondo 13 medali, kempo 25 medali, perolehan medali pada tahun 2018 turun menjadi 46 medali emas pada tahun 2019 turun menjadi 45 medali emas Oleh karena itu diperlukan komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah dan swasta agar pembangunan pemuda dan olahraga dapat terwujud. Pemerintah daerah juga mengalokasikan dana ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga.Perkembangan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar2.47

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

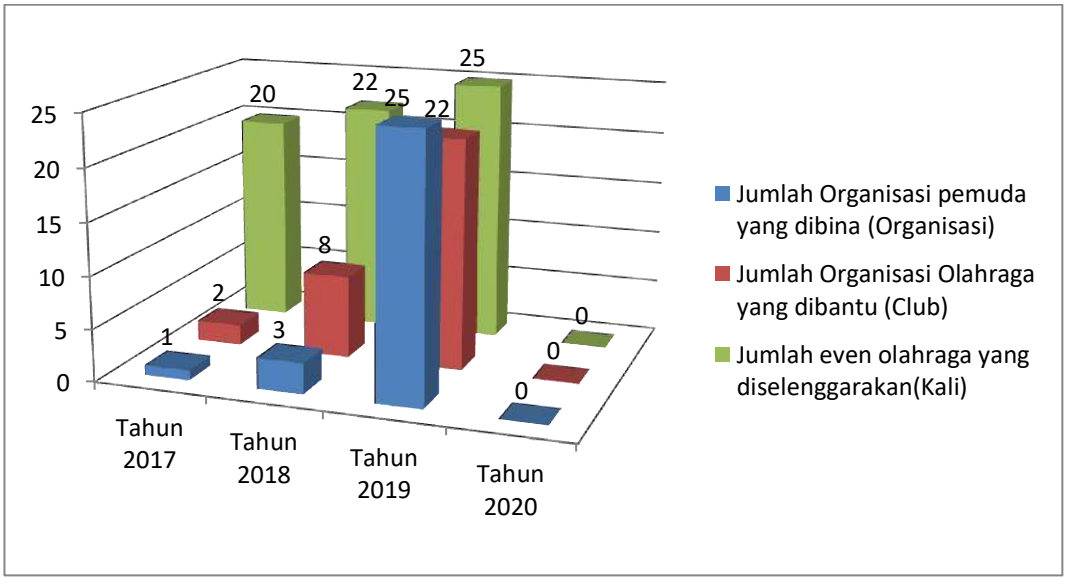

Sumber :Dinas PKO Kab. TTU 2021

2.2.4.2.14. Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Capaian indikator urusan statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel2.21

Tabel 2.21

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan BidangStatistik

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
2	Buku "PDRB"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
3	Persentase OPD yang memiliki buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB	%	100	64,18	63,64	100	100	100	*

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2021

2.2.4.2.15. Persandian

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Timor Tengah Utara telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang persandian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.48
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan bidang Persandian
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2021

2.2.4.2.16. Kebudayaan

Dalam konteks pembangunan, budaya yang mencirikan identitas suatu Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan karena nilai-nilai budaya selalu menjadi dasar pijak pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Dengan asumsi ini, pemerintah wajib melestarikan budaya yang dianut masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan dasar pemikiran yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah berupaya mengembangkan kebudayaan masyarakat *atoni meto* sebagai identitas mayoritas penduduk TTU melalui berbagai terobosan. Salah satu upaya untuk melestarikan Kebudayaan Daerah dilakukan kegiatan Festival Seni dan Budaya, Napak Tilas untuk mengenang sejarah berdirinya Kota Kefamenanu yang kemudian diikuti dengan pameran pembangunan dan karnaval budaya yang diikuti oleh semua etnis di wilayah TTU. Pencapain kinerja urusan kebudayaan selama kurun waktu 4 (empat) tahun yakni 2017 – 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 2.49

Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kebudayaan

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTU 2021

Setidaknya ada 1 (satu) indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah membangun kebudayaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Alat ukur tersebut adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Pada tahun 2017, penyelenggaraan festival seni dan budaya berjumlah 8 (delapan) kali sedangkan pada tahun 2018 menurun dari tahun 2017 menjadi 4 (empat) sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8 kali sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 5 (lima) kali dalam mengikuti penyelenggaraan festival seni dan budaya baik yang diikuti di tingkat lokal, regional maupun nasional hal ini disebabkan karena adanya Pandemic Covid-19 yang sedang melanda dunia sehingga adanya Pembatasan dalam melakukan kegiatan.

2.2.4.2.17. Perpustakaan

Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana maupun prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang harus dikelola dengan

baik dalam rangka meningkatkan pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan perpustakaan. Tenaga Fungsional Perpustakaan selama kurun waktu 5 tahun belum tersedia yang idealnya harus memiliki 5 (lima) orang tenaga fungsional pada satu Kabupaten. Jika melihat dari kinerja urusan perpustakan dapat diukur dengan indikator jumlah perpustakaan, tingkat kunjungan perpustakaan dalam satu tahun, dan tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Jumlah perpustakaan desa dalam kurun waktu tahun 2017-2020sebanyak 78, Jumlah pengunjung perpustakaan selama kurun waktu 4 tahun yakni 2017-2020cenderung menurun yaitu pada tahun 2017 sebanyak 53.809 orang, pada tahun 2018 sebanyak 39.484 Orang, di tahun 2019 menurun lagi menjadi 28.417 sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunanyang cukup drastis yakni hanya 5.217 Orang Pengunjung. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan selama 4 tahun yakni mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah koleksi buku 96.245 judul,pada tahun 2018meningkat menjadi 98.745 buku, kemudian pada tahun 2019 tidak ada penambahan sedangkan pada tahun 2020terjadi penambahannlagi menjadi 101.445 Buku. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Perpustakaan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.50
Jumlah Desa yang memiliki Perpustakaan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

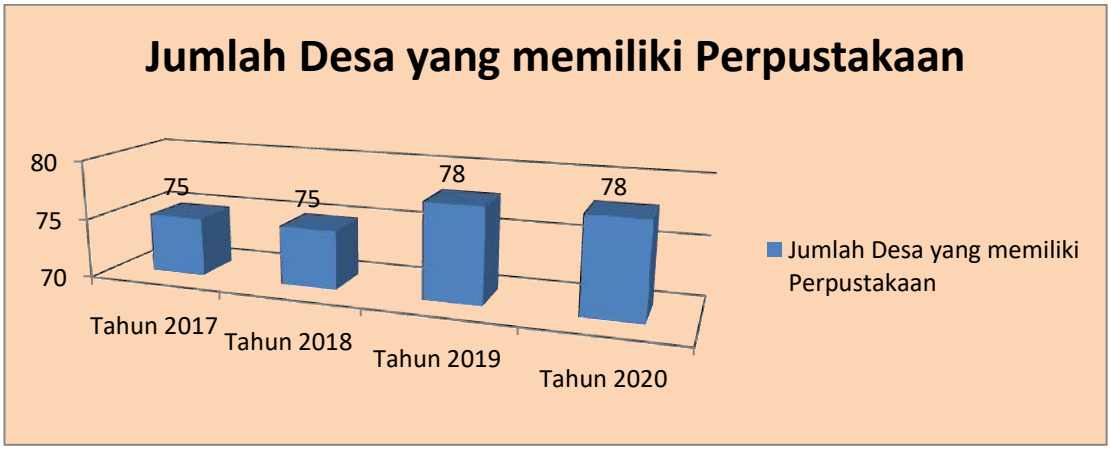

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. TTU, 2021

Gambar 2.51

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Jumlah Buku yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

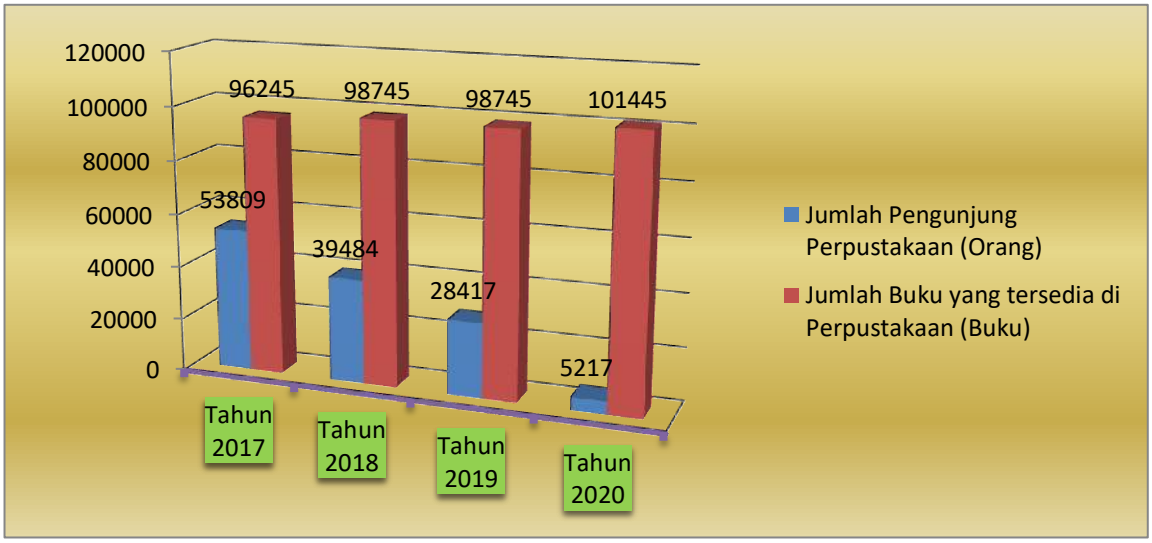

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. TTU, 2021

2.2.4.2.18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam kurun waktu 2017-2020 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma, dan standar yang ada namun belum optimal, persentase arsip yang terolah dengan baik secara baku sebanyak 54 OPD atau 79,41% dari 68 OPD pada tahun 2017 meningkat menjadi 82,35% persen pada tahun 2020. Di lain pihak, cakupan kegiatan peningkatan SDM aparatur pengelola kearsipan sebanyak 5 (lima) kegiatan dan magang teknis tata kearsipan sebanyak 1 (satu) kegiatan namun sampai dengan tahun 2020 tenaga fungsional arsiparis hanya 1 orang yang idealnya 5 (lima) orang pada satu Kabupaten. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada gambar 2.52

Gambar 2.52

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

Sumber :Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. TTU 2021

2.2.4.3. Fokus Layanan urusan Pilihan

2.2.4.3.1. Pariwisata

Arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten TTU adalah untuk menjadikan TTU sebagai daerah destinasi dan transit dari dan ke negara Timor Leste (District Oeccuse). Untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan baik mancanegara maupun Wisatawan Nusantara maka pemerintah daerah telah melakukan beberapa terobosan seperti mempromosikan potensi wisata daerah ke luar negeri dan di dalam negeri. *Outcome* yang diharapkan dari upaya tersebut adalah meningkatnya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan yang semakin tinggi akan meningkatkan sirkulasi uang dalam daerah dan dengan demikian akan berdampak langsung pada menguatnya ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi dan pemasaran pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain

promosi melalui media cetak (Majalah Fortuna) dan penyelenggaraan eventpariwisata, sedangkan partisipasi *event* pariwisata luar negeri masih belum terjangkau.

Secara khusus, pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang pariwisata indikator yang digunakan yakni jumlah kunjungan pariwisata. Jumlah Kunjungan Pariwisata selama 4 (empat) tahun terakhir cukup meningkat. Pada tahun 2017 sebanyak 64.454, tahun 2018 sebanyak 65.200 orang dan pada tahun 2019 sebanyak 111.421 orangsedangkan pad tahun 2020 menurun cukup signifikan yakni sebanyak 34.171 Orang hal ini tentunya didorong karena adanya event pariwisata antara lain Festifal Band, Festival Budaya Timor, HUT Kota Kefamenanu/Pameran Pembangunan, Pacuan Kuda, Relly motor, Motor Cross, Tour de Timor, Wonderfull Indonesia dan *Sail Indonesia yakni, komodo dan karimata*namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis karena adanya Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.. Pencapain kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat pada gambar 2.53

Gambar 2.53

Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pariwisata

Kabupaten Timor Tengah UtaraTahun 2017 – 2020

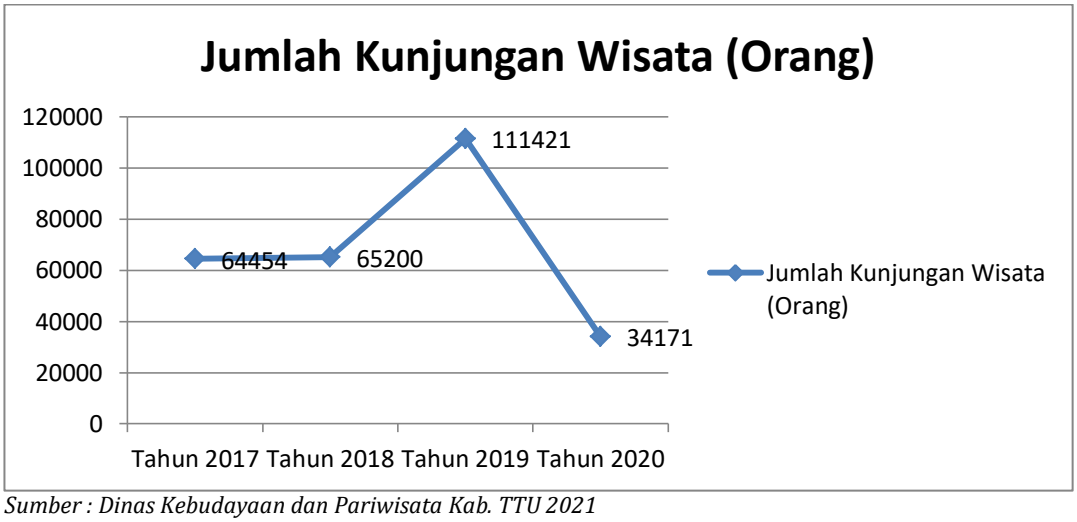

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTU 2021

Pada Tahun 2020, jumlah obyek wisata sebanyak 34 obyek wisata seperti yang terlihat pada tabel 2.22

Tabel 2.22

Nama Obyek Wisata, Lokasi dan Jarak Tempuh dari Kefamenanu

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Jarak dari Kefamenanu (Km)	Jenis Obyek Wisata
1	Kota Kefamenanu	Rumah Adat Sonaf Bikomi Maslete	1	Budaya
		Rumah Adat Tubuhue	1	Budaya
		Gua Sasi	5	Alam / Religius
		Pacuan Kuda Tradisional	6	Minat Khusus
		Museum Gereja	1	Religius
2	Miomafo Barat	Noetoko - Sejarah Kota Kefamenanu	18	Budaya
3	Mutis	Air Terjun Boni Pah Koto	36	Alam
4	Miomafo Tengah	Gua Suti	12	Religius
5	Miomafo Timur	Puna Sinai	8	Alam
		Gua Popnam	6	Alam
		Puncak Tunnoe	10	Alam
6	Bikomi Tengah	Oebikase	14	Alam
7	Bikomi Nilulat	Rumah Adat Nilulat	15	Budaya
		Rumah Adat Inbate	15	Budaya
8	Bikomi Utara	Perbatasan Napan	21	Geowisata
9	Noemuti	Upacara Kure	18	Religius
		Oeluan	20	Wisata Buatan
		Gua Maria Oeparigi	23	Religius
10	Insana	Bendungan Benkoko	40	Wisata Buatan
		Gua Maria Bitauni	28	Religius
		Berburu Tradisional	30	Minat Khusus
		Sonaf Oelolok	30	Budaya
11	Insana Tengah	Sonaf Maubesi	20	Budaya
		Makam Malafu Neno	23	Budaya
		Bendungan Oebuain	30	Wisata Buatan
12	Insana Utara	Pantai Utara	67	Alam
		Pacuan Kuda Tradisional	67	Minat Khusus

No	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Jarak dari Kefamenanu (Km)	Jenis Obyek Wisata
		Kawasan Perbatasan Wini	60	Geowisata
13	Biboki Selatan	Rumah Adat Tamkesi	42	Budaya
		Rumah Adat Upfaon	36	Budaya
		Gua Naijaluu	30	Religius
		Makam Raja Biboki	30	Budaya
14	Biboki Anleu	Kolam Oeroni	80	Alam
		Sonaf Atoinfui	80	Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTU, 2021

2.2.4.3.2. Pertanian

Struktur perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh bidang pertanian (dalam arti luas). Hal ini diindikasikan oleh kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB yang mencapai 42 %. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan daerah *(core competence)*terutama sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Dengan menyandang predikat sebagai sektor primadona, pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pertanian ditempatkan sebagai lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Asumsinya bahwa pertanian yang maju akan mampu menarik perkembangan bidang lainnya, pendidikan akan menjadi maju, kesehatan akan lebih baik, koperasi dan UKM pun akan menjadi lebih maju, sehingga dalam Agenda Strategis Kabupaten TTU 2016–2021, pengembangan pertanian ditempatkan sebagai Agenda pertama atau sebagai prioritas pertama untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja urusan pertanian adalah produksi jagung (ton), produksi kacang tanah (ton), produksi bawang putih lokal (ton) produksi padi (ton), jumlah populasi ternak sapi bali (ekor).

Pada bidang peternakan, ternak sapimerupakan primadona dan kebanggaan masyarakat TTU. Perkembangan capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada pada gambar berikut.

Gambar 2.54

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian

Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2017-2020

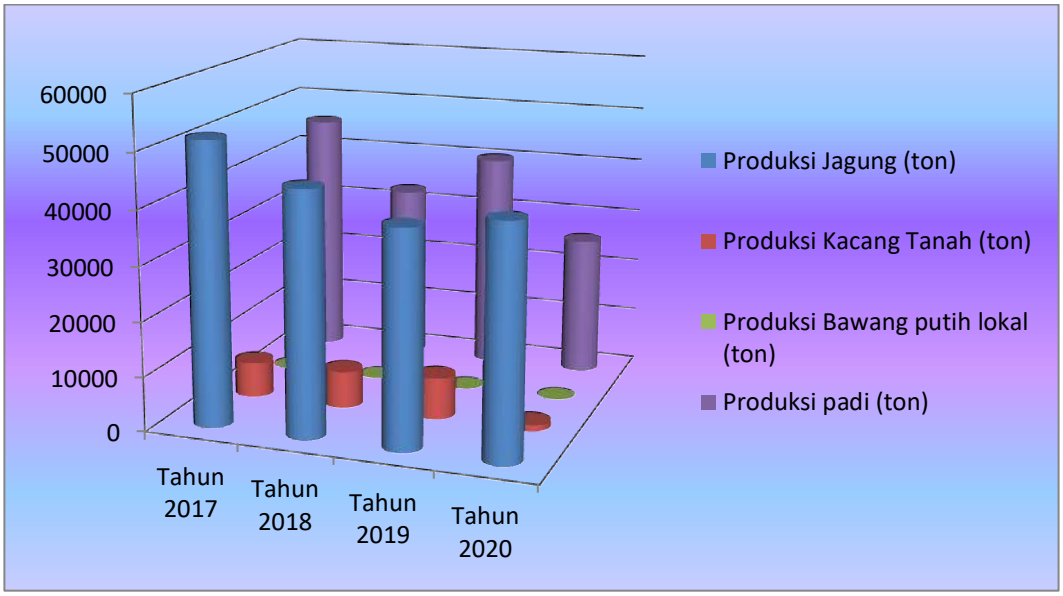

Sumber : Dinas Pertanian Kab. TTU, 2021

Gambar 2.55

Jumlah Populasi Sapi Bali dan Jumlah ternak hasil IB
di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

Gambar 2.56

Luas Areal Pakan Ternak (Ha) di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017-2020

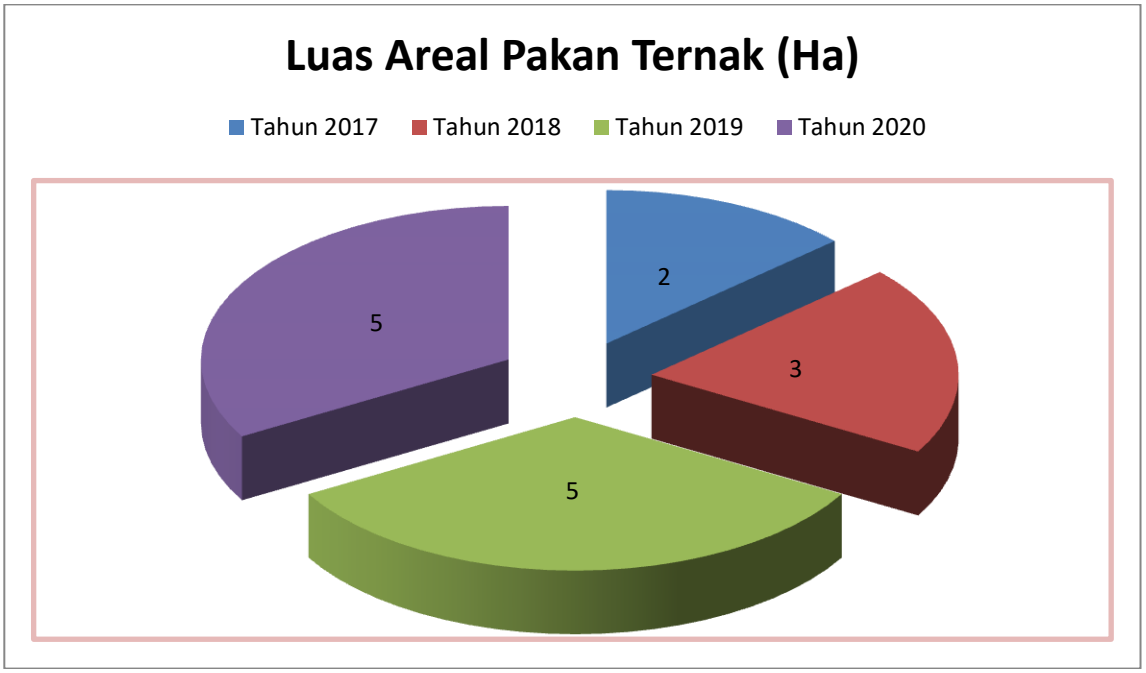

Sumber : Dinas Peternakan Kab. TTU, 2021

Gambar 2.57

Cakupan Bina Kelompok Petani
Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

Sumber : Dinas Pertanian Kab. TTU,2021

Indikator utama yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan bidang pertanian adalah produktivitas. Pada gambar di atas menggambarkan bahwa produktivitas jagung pada tahun 2017 sebanyak 51.833 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan produksi menjadi 44.728 ton/ha pada tahun 2019 terjadi lagi penurunan produksi menjadi 39.623 Ton/ha sedangkan pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan produksi menjadi 42.230 ton/ha.

Produktivitas Kacang tanah 6.595 ton pada tahun 2017, pada tahun 2018 meningkat menjadi 6.900 ton pada tahun 2019terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 7829 ton sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastic menjadi 1.240 ton. Produktivitas bawang putih local pada tahun 2017 sebanyak 71,3 ton, pada tahun 2018 meningkat menjadi 78,02, pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi menjadi 69,6 ton sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan produksi lagi menjadi 36,58 ton. Produksi padi pada tahun 2017 sebesar 45.609 ton, pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan dari 45.609 ton menjadi 32.859 ton pada tahun 2019 meningkat menjadi 40.368 ton sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan yaitu hanya 25.832 ton.

Populasi ternak sapi bali selama kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami peningkatan Pada tahun 2017 populasi sapi sebanyak 126413 ekor pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 128.264 ekor, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 129.325 ekor dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan populasi lagi menjadi 136.659 ekor.Pada Sub Sektor Peternakan upaya peningkatan populasi dilakukan melalui Inseminasi Buatan (IB), Centra Breeding (pusat Pembibitan), pencegahan penyakit, pengendalian pemotongan dan pengeluaran ternak, penyediaan pakan dan air.

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa peningkatan produksi yang dicapai masih dapat ditingkatkan dengan penerapan intensifikasi pertanian dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana teknologi pertanian tepat guna untuk meningkatkan produktivitas lahan karena produktivitas padi sawah untuk terus meningkatkan produktifitas pertanian. Pada tahun 2020 produktivitas jagung hanya mencapai 42.230 ton. Keadaan tersebut di atas mengindikasikan keberhasilan pembangunan pertanian yang telah dicapai masih harus terus ditingkatkan, mengingat angka-angka tersebut

belum mampu melepaskan petani dari rawan pangan akibat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang rendah.

Secara agregat beberapa komoditas ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dikelompokkan menjadi komoditas unggulan yang dapat mendongkrak nilai ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten TTU.

Pengembangan pertanian pada periode tahun 2016-2021 yang masih menempatkan Pertanian sebagai Agenda Strategis Pertamamasih dibingkai dalam spirit Gerakan Cinta Petani Menuju Pensiun Petani. Dua program yang dilaksanakan adalah Program Padat Karya Pangan (PKP) dan Program Desa Mandiri Cinta Petani (SARI TANI). Program PKP dilakukan dengan sasaran meningkatkan luas lahan petani menjadi 1,25 ha per KK Tani. Sementara melalui Program SARI TANI pemerintah mengalokasikan dana bagi pengembangan usaha khususnya di sektor pengembangan pertanian unggulan daerah. Sampai dengan tahun 2019, 183 desa telah menerima program tersebut di mana setiap desa dialokasikan dana sebesar Rp.300.000.000 sehingga total dana Program Sari Tani sebesar Rp. 54.900.000.000. Program-program ini masih perlu dikembangkan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana oleh Unit Pengelola Sari Tani (UPST).

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan produksi pertanian adalah adanya kelompok tani. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani menurut kelas kemampuan Kelompok Tani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23

Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan Tahun 2017 – 2019

No	Tahun	Kelas Kemampuan Kelompok Tani				Jumlah	Gapoktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama		
1.	2017	1.436	115	6	-	1.557	142
2.	2018	1.446	121	6	-	1.573	152
3.	2019	1.457	115	6	-	1.578	152

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2020

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Data Kelompok Tani menurut Kelas kemampuan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 1.557 Kelompok Tani yang terdiri dari Kelas Pemula, Lanjut, madya dan Utama menjadi 1.578 pada tahun 2019*(data tahun 2020 belum tersedai)*, Hal ini tentu sangat berdampak pada peningkatan produktifitas pertanian.

2.2.4.3.3. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat strategis dalam mata rantai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan geliat ekonomi daerah. Sektor ini juga sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi pengangguran sebab bidang usaha perdagangan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perdagangan terbaca dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan cakupan bina kelompok/usaha informal. Pada tahun 2018, kontribusi sub sektor perdagangan dalam skala besar dan eceran terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 4,52% sementara cakupan kelompok usaha yang dibina tidak tercatat namun jumlah perusahaan perdagangan menurut skala perusahaan di kabupaten TTU sebanyak 2.212 unit sesuai data Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2019. Dengan angka ini maka dapat disimpulkan bahwa sektor ini sesungguhnya masih dapat ditingkatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan perdagangan adalah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terlihat sangat baik karena keseluruhan kelompok pedagang/usaha informal dibina oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara. Capaian kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.58
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020

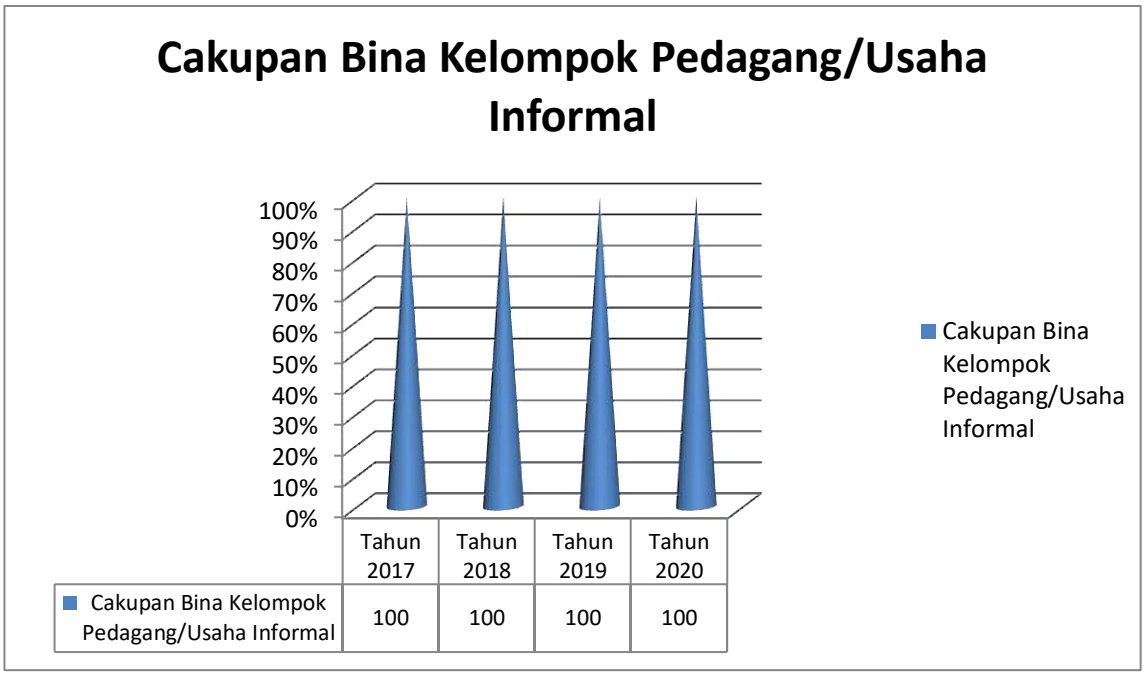

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdaganagan Kab. TTU 2021

2.2.4.3.4. Perindustrian

Pembinaan sektor industri di Kabupaten TTU lebih diarahkan pada jenis industri rumah tangga *(home* industry*)* guna memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Alasan lainnya bahwa perindustrian di Kabupaten TTU masih didominasi industri kecil dan belum terdapat industri dalam skala besar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang industri tercermin pada indikator Cakupan bina kelompok pengrajin (%). Dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, rata-rata share sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 1,06%. Sementara jumlah IKM yang dibina sebanyak 470 di tahun 2020. Capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut

Gambar2.59

Jumlah IKM Terbina

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

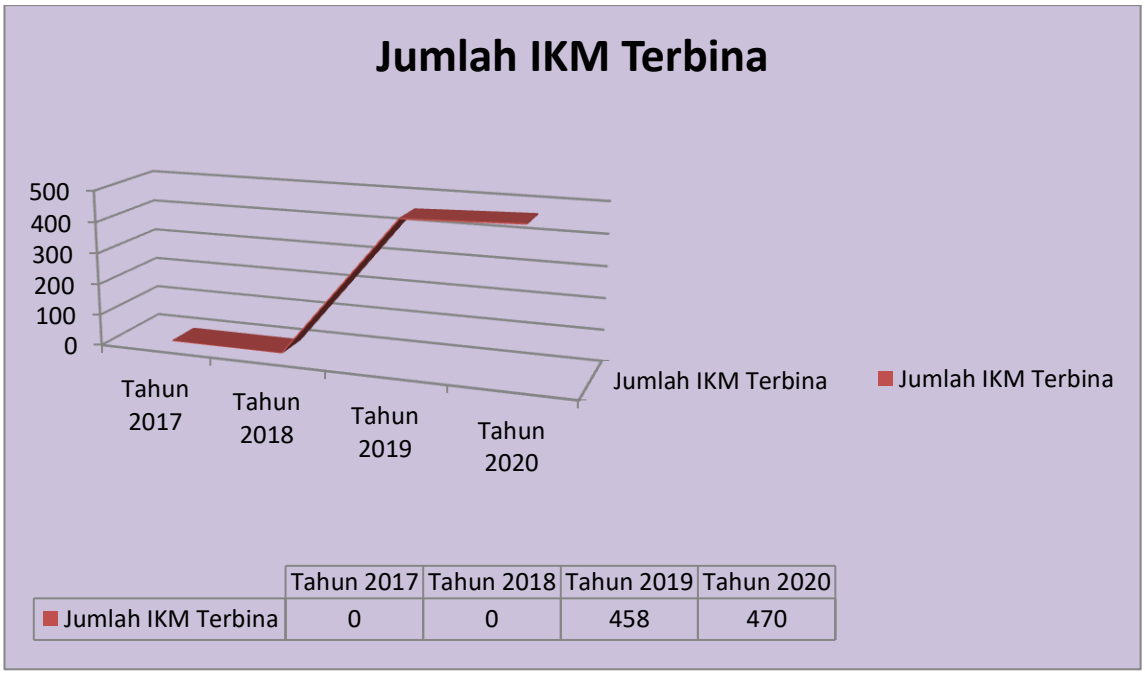

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah IKM Terbina	0	0	458	470

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. TTU 2021

2.2.4.3.5. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Upaya pengembangan bidang ini dilakukan melalui Kegiatan Review Grand Design KTM Ponu yang sampai dengan tahun 2020 belum terealisasi.

2.2.4.3.6. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan penghasilan/pendapatan masyarakat. Karena sifatnya pilihan, maka perlu disesuaikan dengan potensi daerah otonom yang memilih urusan dimaksud. Urusan ini sangat prospektif bagi masyarakat Kabupaten TTU bila pengelolaan potensi perikanan dan kelautan di kawasan pantai utara dilaksanakan secara optimal akan tetapi berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten hanya memiliki kewenangan pada sub urusan Perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Indikator utama yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan bidang ini adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan terbantu (%), jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) jumlah produksi perikanan Budidaya(ton) dan jumlah kelompok nelayan terbina. Pada tahun 2017 Produksi Perikanan tangkap sebanyak 608,2 ton, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 720,2 ton, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 748,3 ton dan pada tahun 2020 terjadi lagi peningkatan produksi menjadi 822,5 ton. Kelompok pembudidaya ikan terbantu pada tahun 2017 sebesar 75%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 79%, pada tahun 2019 meningkat menjadi82% sedangkan pada tahun 2020 terjadi lagi peningkatan jumlah kelompok yang mendapat bantuan yakni sebesar87%. Jumlah Produksi perikanan Budidya pada tahun 2017 sebanyak 171,8 ton, sedikit mengalami penurunan menjadi 170,6 ton pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 162,4ton pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 hanya mencapai 160,2 ton sedangkan Jumlah Kelompok nelayan terbina pada tahun 2017 sebanyak 25 kelompok meningkat lagi menjadi 35 kelompok pada tahun 2018, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 44 kelompok dan pada tahun 2020 terjadi lagi peni gkatan pembinaan terhadap kelompok nelayan sebanyak 48 kelompok. Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 2.60
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020

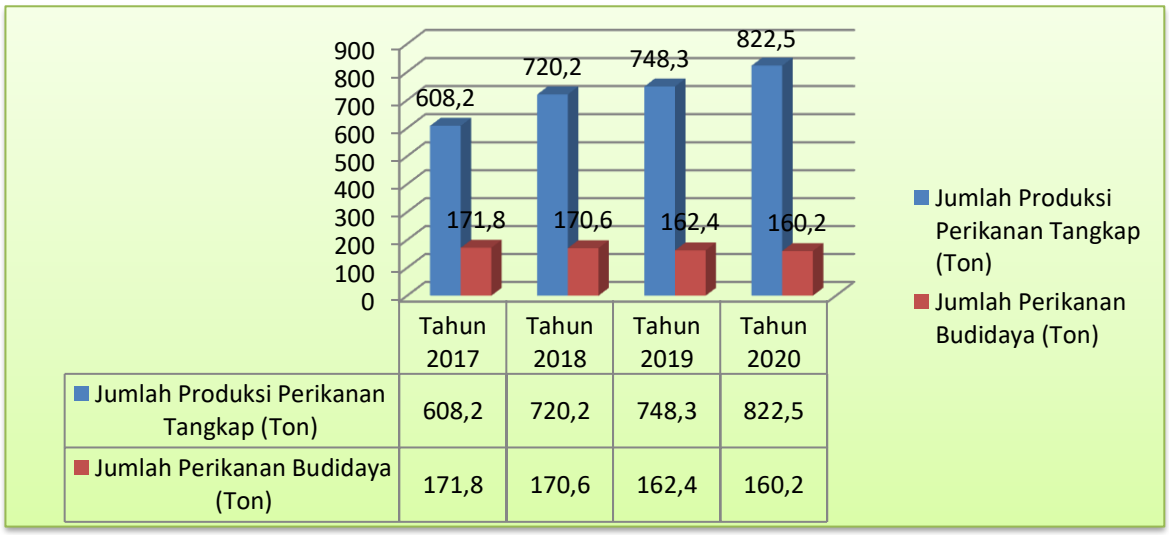

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	608,2	720,2	748,3	822,5
Jumlah Perikanan Budidaya (Ton)	171,8	170,6	162,4	160,2

Sumber :Dinas Perikanan Kab. TTU 2021

Gambar 2.61

Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan terbantu dan

Jumlah Kelompok Nelayan Terbina

Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017– 2020

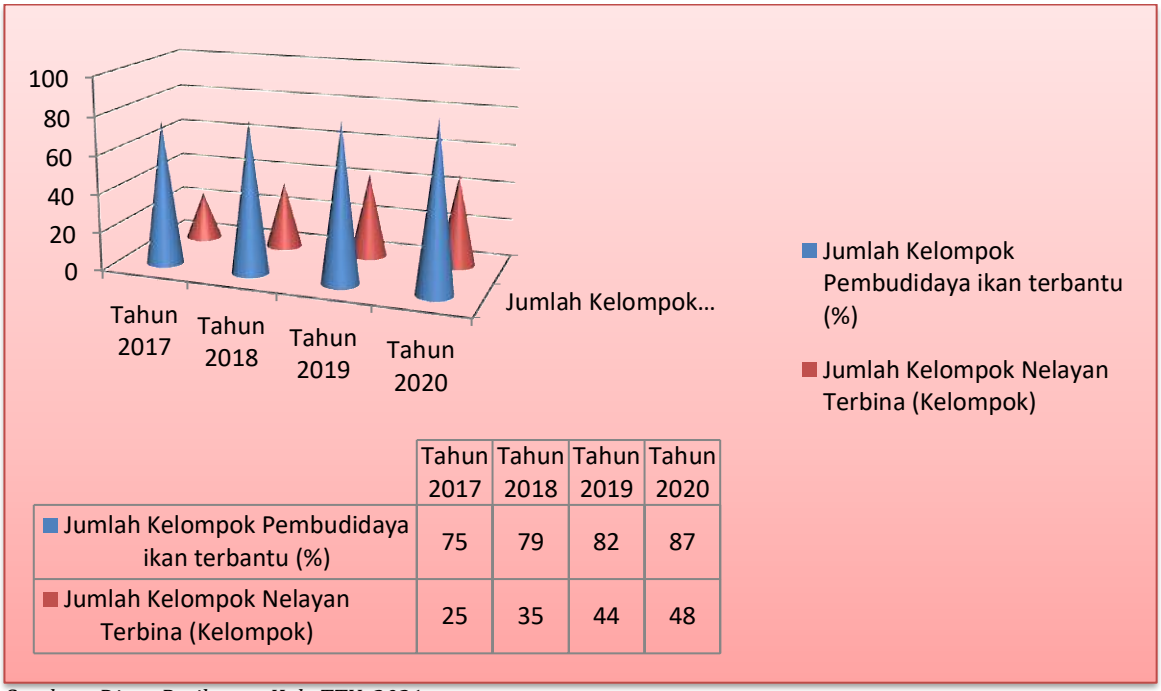

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan terbantu (%)	75	79	82	87
Jumlah Kelompok Nelayan Terbina (Kelompok)	25	35	44	48

Sumber : Dinas Perikanan Kab. TTU, 2021

2.2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Pelaksanaan asas desentralisasi secara penuh dengan titik tekan pada daerah kabupaten sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setidaknya ada beberapa elemen pokok otonomi daerah yang mesti dibenahi yakni penataan perencanaan, kewenangan daerah, personil, kelembagaan, keuangan dan pelayanan secara optimal.Kondisi beberapa tahun terakhir, penataan elemen-elemen pokok tersebut sudah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebagai contoh, untuk penataan kewenangan daerah, pemerintah daerah telah menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dengan menetapkan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam konteks penataan kelembagaan, pemerintah daerah juga telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan menetapkanPeraturanDaerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016.

2.2.4.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada skala daerah, dan perencanaan di tingkat PD (sektoral). Secaraumum perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Timor Tengah Utara telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, yaitu RPJPD tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila dikategorikan menurut jangka waktu perencanaan, maka perencanaan pembangunan daerah dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok yakni perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Tahunan (RKPD). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya,pemerintah daerah telah menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk skala tahunan dan 5 tahunan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang ini adalah ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah serta penjabaran program RPJMD kedalam RKPD. Dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 - 2025. Sementara dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan Peraturan DaerahKabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara 2016 – 2021. Selain itu, penjabaran RPJMD tersebut telah dilakukan dengan penyusunan dan penetapan RKPD setiap tahun. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan
Bidang Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2021

2.2.4.4.2. Keuangan

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utaramasih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, dan akan meningkatkan terus kinerja pengelolaan keuangan dan asset guna meningkatkan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)pada tahun-tahun berikutnya, melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola

keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah. Perkembangan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Opini BPK		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	<

Sumber :BKAD Kab. TTU 2021

2.2.4.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompetenguna pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kabupaten Timor Tengah Utara telah banyak melaksanakan program/kegiatan Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar (pengiriman dokter umum untuk melanjutkan ke jenjang spesialis yakni Spesialis Anak dan Spesialis Bedah) dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dll. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar pada jenjang S1/D4 pada tahun 2017sebanyak 37 Orang, pada tahun 2018 bertambah menjadi 42 Orang jenjang S1/D4, pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 48 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan lagi menjadi 55 orang. Pada Jenjang Strata 2 pada tahun 2017 sebanyak 21 Orang yang telah mengikuti pendidikan tugas belajar, pada tahun

2018terjadi penambahan lagi menjadi 27 Orang, pada tahun 2019terjadi penambahan lagi menjadi37 Orang sedangkan pada tahun 2020terjadi lagi peningkatan menjadi 57 Orang. Pada Jenjang Strata 3 dari tahun 2017 sampai dengan 2020 belum ada PNS yang melaksanakan tugas Belajar ke Strata 3 (S3).Perkembangan capaian indikator bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2021 pada Indikator kinerja daerah dapat dilihat capaiannya pada tabel berikut

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2017 – 2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan formal (Tugas Belajar):							
	S1/D4	Org	34	41	48	55	47	(>)
	S2	Org	21	27	37	57	19	(>)
	S3	Org	-	-	-	-	3	(<)

Sumber : BKD Kab. TTU 2021

2.2.4.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan yang diwujudkan diantaranya dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 03 dan Nomor : 36 Tahun 2012 .

Penelitian dan pengembangan (Litbang) adalah fungsi urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tolak ukur keberhasilan dari

pelaksanaan fungsi litbang dinilai dengan indicator kinerja Persentase implementasi rencana kelitbangan dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rancana litbang yang dibutuhkan oleh kepala daerah dalam pengambilan kebijakan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir belum ada capaian terkait kedua indicator tersebut, hal ini disebabkan karena sejauh ini belum ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap suatu obyek yang memiliki daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat melakukan penelitian dan pengembangan terhadap suatu obyek yang memiliki daya ungkit terhadap kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

2.2.4.4.5. Pengawasan

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan dalam pemanfaatan keuangan daerah. Capaian kinerja bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel 2.27

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pengawasan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2017	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	64,34	67,5	75	80	70	>
2	Jumlah temuan BPK	Kasus	11	11	12	12	0	**<**

Sumber : Inspektorat Kab. TTU 2021

2.2.4.4.6. Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan dalam mendukung kegiatan DPRD berpedoman pada Rencana Kerja yang disusun Sekretariat dewan dan dibahas serta disetujui melalui rapat Paripurna. Capaian kinerja bidang Sekretariat Dewan dapat dilihat pada tabel 2.28

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sekretariat Dewan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen angaran setwan DPRD	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. TTU 2021

2.2.4.4.7. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungandan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Timor Tengah Utara anatara lain sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 Kerjasama di Bidang pendidikan dengan Universitas Gadja Madah tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kerjasama dibidang pemberdayaan masyarakat desa dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentang Penanggulangan kemiskinan pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan peningkatan pelayanan social dasar melalui program Generasi Sehat dan cerdas. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan tentang Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pegawai Tidak Tetap, Kerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog sub Divisi Regional Atambua di Bidang ekonomi tentang Penyediaan dan pendistribusian Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Pola Padat Karya Pangan (PKP) dan Kerjasama dengan PT Fortuna Explore Indo di bidang pariwisata tentang Pemuatan Advertorial Pembangunan Kepariwisataan dan Investasi ekonomi perbatasan di Kabupaten TTU.
- Pada tahun 2018 Kerjasama di bidang Kesehatan dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur tentang pemeriksaan kesehatan (Medical check up) eksekutif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kerjasama dibidang perdagangan dengan Pemerintah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan pelayanan Tera, Tera ulang dan Pengawasan Metrologi Ilegal dan kerjasama di bidang Hukum tentang Koordinasi

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan Laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi TIPIKOR pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Pada Tahun 2019 Kerjasama di bidang Kesehatan dengan Rumah Sakit Leona tentang Penyediaan darah, pengambilan dan pengiriman sampel darah, cross matching darah dan pendistribusian darah transfuse, kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP) tentang Program pendidikan seksualitas komprehensif, Layanan Kesehatan ramah remaja dan layanan penganagan kasus kekerasan berbasis Gender dan seksualitas (KBGS) ramah remaja dan Kerjasama di bidang keuangan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengelolaan dan transaksi keuangan secara cash management system melalui fasilitas layanan perbankan.

  Diharapkan agar kedepan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019-2024 oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mencakup beberapa area perubahan yaitu :

1. Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.
2. Penataan tata laksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasitugas/izin belajar
4. Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD
5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7. Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hokum Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diakses melalui web Bagian Hukum
8. Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja harus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP pada tahun 2020 baru mencapai 50,22 dengan predikat CC,

sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB Tahun 2020 baru mencapai 44,54 dengan predikat "C".

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Konsumsi Rumah Tangga perkapita

Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat mapun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perludiwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB. Secara rinci realiasasi capaian rasio konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.29

Tabel 2.29
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017 – 2020

NO	Uraian	Realisasi Capaian Kinerja			
		2017	**2018**	**2019**	**2020**
1	Total Pengeluaran RT	470.549	515.043	604.747	721.679
2	Jumlah RT	53.081	52.535	52.535	52.535
3	Rasio	9	10	11,51	11,51

b) Nilai Tukar petani

Sektor pertanian sampai dengan tahun 2018 masih menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Secara rinci realiasasi capaian rasio Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2017-2020data tdk tersedia pada Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing wilayah dapat diketahui dari ketersediaan sarana prasarana wilayah, diantaranya bank, perusahaan asuransi, hotel dan penginapan, restoran, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan sarana telekomunikasi. Keberadaan infrastruktur tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sarana-prasarana penunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.30

Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2017-2020

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020		
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
1	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Orang	339.250	919.763	1.000.354	1.000.354	571.217	>
2	Jumlah orang/penumpang melalui dermaga/terminal per tahun	Orang	565	743	519	519	765	<
3	Jumlah barang melalui dermaga/terminal per tahun	Ton	113.322	97.120	129.140	129.140	105.183	>
4	Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	23	22	22	22	22	*
5	Jumlah restoran dan rumah makan	Unit	106	109	112	112	106	<
6	Jumlah penginapan/hotel	Unit	11	10	10	10	10	*
7	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	%	82,06	83,28	81,65	81,65	85,24	<
8	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	%	74,27	73,29	74,07	74,07	55	>

Sumber : Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

2.2.5.3. Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi

politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel 2.31

Tabel 2.31
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017-2020

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Target RPJMD 2020	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2017	**2018**	**2019**	**2020**		
1	Angka kriminalitas	Kasus	9	7	22	20		
2	Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun	Kasus	-	-	4	-		

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2021

2.2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diukur berdasarkan 2 (dua) indikator berdasarkan indikator pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara yakni Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan) dan Rasio Ketergantungan. Secara rinci realisasi indicator kualitas tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.32

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2018

No	Uraian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		
			2016	**2017**	**2018**
1	Jumlah lulusan S1	Orang	8.900	9.483	10.494
2	Jumlah lulusan S2	Orang	217	234	252
3	Jumlah lulusan S3	Orang	27	1	6
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	9.144	9.718	10.752
5	Jumlah penduduk	Orang	259.797	269.276	274.697
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	%	3,52	3,61	3,91

Sumber Data : Kab. TTU Dalam Angka, Tahun 2019

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2018. Di Tahun 2016 sebesar 0,47 persen kenaikan cukup signifikan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 0,73 persen kemudian turun menjadi 0,48 peresen di tahun 2018. Kecenderungan ini memberi gambaran bahwa struktur Kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini mengarah pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (labor supply), tabungan (saving), dan kualitas sumber daya manusia (human capital).Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara.Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.Perkembangan ratio ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel 2.33

Tabel 2.33

Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2017-2020

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			
			2017	**2018**	**2019**	**2020**
1	Jumlah penduduk <15 thn	Orang	88.066	91.777	64.579	92.711
2	Jumlah penduduk >64 thn	Orang	13.937	14.825	22.122	14.977
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	Orang	102.003	106.602	86.701	107.688
4	Jumlah penduduk usia 15-64 thn	Orang	148.661	146.987	178.999	148.468
5	Rasio ketergantungan (3)/ (4)	%	68,61	72,52	48,44	72,52

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU 2021

2.5. Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluai RPJMD sampai dengan tahun 2020 yang ditunjukkan dengan capaian indicator kinerja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.34

Capaian Kinerja RPJMD Sampai Dengan Tahun 2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
01.01	Pertumbuhan PDRB (%)	4,54	4,84	5,14	5,44	5,74	6,04	*5,01*	*5,07*	*4,9*	*-0,55*	6,04	Belum Tercapai
01.02	Laju inflasi	5,8	5,6	5,4	5,2	5	4,8	*0*	*0*	*0*	*0*	4,8	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
01.03	Pertumbuhan PDRB per kapita (Rp)	5.567.626	6.067.626	6.567.626	7.067.626	7.567.626	8.067.626	*14.265.715*	*15.347.627*	*0*	*0*	8.067.626	Belum Tercapai
01.04	Penduduk miskin (%)	21,59	21,09	20,59	20,09	19,59	19,09	*23,52*	*22,31*	*22,45*	*22,28*	19,09	Belum Tercapai
01.05	Penduduk dengan rumah layak huni (Unit)	27.526,00	31.876,00	38.300,00	44.724,00	51.148,00	57.572,00	*27.752,00*	*28.410,00*	*29.875,00*	*31.340,00*	57.572,00	Belum Tercapai
01.06	Angka kriminalitas tertangani (%)	91,72	92,72	93,72	94,72	95,72	97	*0*	*0*	*0*	*0*	97	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat												
1	**Pendidikan**												
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61,54	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	*62,03*	*62,65*	*63,34*	*63,53*	66,00	Belum Tercapai
01.01	Angka melek huruf (%)	93,45	94	94,5	95	95,5	96	*85,08*	*88,82*	*92,74*	*94,37*	96	Belum Tercapai
01.02	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	6,69	7,19	7,69	8,19	8,69	9	*0*	*7,3*	*7,5*	*0*	9	Belum Tercapai
01.03	**Angka Partisipasi Murni**												
01.03.01	Angka partisipasi murni (APM) PAUD (%)	34,97	43,97	52,97	61,97	70,97	80	*87,95*	*88,85*	*91,12*	*92,6*	80	Tercapai (Melampaui)
01.03.02	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	97,76	98,5	99	99,5	99,8	100	*97,2*	*99,7*	*98,23*	*98,54*	100	Belum Tercapai
01.03.03	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	85,99	88	92	95	97	100	*94,3*	*98,9*	*98,07*	*98,25*	100	Belum Tercapai
02.00	**Kesehatan**												
02.01	Angka harapan hidup (tahun)	65,89	65,9	65,91	65,92	65,93	65,94	*66,2*	*66,4*	*66,9*	*0*	65,94	Belum Tercapai
02.02	Balita gizi buruk (%)	0,44	0,39	0,34	0,3	0,25	0,2	*1,64*	*0,007*	*0,002*	*0,15*	0,2	Belum Tercapai
02.03	Prevalensi Balita Stunting								*51,08*	*42,06*	*28,09*		Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
03.00	**Pertanahan**												
03.01	Tanah Pemda bersertifikat (bidang)	536	556	576	596	606	636	*0*	*0*	*0*	*0*	636	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
04.00	**Ketenagakerjaan**												
04.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,17	70	73	76	79	81	*74,28*	*75*	*75,03*	*78,13*	81	Belum tercapai
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga												
1	**Kebudayaan**												
01.01	Jumlah grup kesenian	93	98	94	99	95	100	*0*	*0*	*0*	*0*	100	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.00	**Pemuda dan Olahraga**												
02.01	Jumlah klub olahraga yang diberikan bantuan	-	1	2	3	4	5	*2*	*8*	*22*	*0*	5	Tercapai (Melampaui)
	ASPEK PELAYANAN UMUM												
	Fokus Layanan Urusan Wajib												
01.00	**Pendidikan**												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
01.01	Fasilitas Pendidikan:												
01.01.01	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	80,15	83,12	86,09	89,06	92,03	95	*46*	*52,45*	*61,9*	*68,97*	95	Belum Tercapai
01.01.02	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	57,14	60,74	64,34	67,94	71,54	75	*35,86*	*52,68*	*61,29*	*73,11*	75	Belum Tercapai
01.02	Angka kelulusan dan Angka melanjutkan												
01.02.01	Angka lelulusan (AL) SD/MI (%)	99,3	99,4	99,65 %	99,83	100	100	*99,85*	*100*	*100*	*100*	100	Tercapai
01.02.02	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,97	99,98	99,99	100	100	100	*100*	*99,43*	*100*	*100*	100	Tercapai
01.02.04	Angka kelanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	92,16	93,36	94,56	95,76	96,96	98,16	*92,68*	*94,56*	*97,59*	*0*	98,16	Belum Tercapai
01.02.05	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	84,92	86,12	87,32	88,52	89,72	90,92	*85,64*	*0*	*0*	*0*	90,92	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
01.03	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	67,65	69,65	71,65	73,65	75,65	77,65	*72,5*	*86,17*	*92,17*	*93,5*	77,65	Tercapai
02.00	**Kesehatan**												
02.01	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000)	19,33	20,83	22,33	23,83	25,33	26,83	*0*	*0*	*0*	*0*	26,83	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
02.02	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000)	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	*0*	*0*	*0*	*0*	1,4	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.03	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000)	0,16	0,17	0,21	0,24	0,26	0,28	*0*	*0*	*0*	*0*	0,28	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.04	Pelayanan Kesehatan Dasar												
02.04.01	Cakupan kunjungan ibu hami k4 (%)	67,9	72,9	77,9	82,9	87,9	95	*67,59*	*64,4*	*66,69*	*66,69*	95	Belum Tercapai
02.04.02	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	82,85	84,25	85,65	87,05	88,45	90	*63,65*	*71,85*	*60,8*	*60,8*	90	Belum Tercapai
02.04.03	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	82,91	84,41	85,91	87,41	88,91	90	*75,77*	*78,48*	*77,55*	*77,55*	90	Belum Tercapai
02.04.04	Cakupan pelayanan nifas (%)	81,61	83,21	84,81	86,41	88,01	90	*74,84*	*75,5*	*65,81*	*65,81*	90	Belum Tercapai
02.04.05	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	77,12	78,72	80,32	81,92	83,52	85	*58,76*	*61,75*	*29,45*	*29,45*	85	Belum Tercapai
02.04.06	Cakupan kunjungan bayi (%)	87,96	89,46	90,96	92,46	93,96	95	*89,19*	*115,01*	*105,55*	*105,55*	95	Tercapai (Melampaui)
02.04.07	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)	58,55	66,55	74,55	82,55	90,55	100	*65,97*	*84,97*	*68,91*	*68,91*	100	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
02.04.08	Cakupan pelayanan balita (%)	56,39	63,39	70,39	77,39	84,39	90	*62,01*	*72,23*	*72,68*	*72,68*	90	Belum Tercapai
02.04.09	Cakupan pemberian makanan pendamping Asi pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	12,53	29,53	46,53	63,53	80,53	100	*19,08*	*86,45*	*84,13*	*84,13*	100	Belum Tercapai
02.04.10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Tercapai
02.04.11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	95,37	96,37	97,37	98,37	99,37	100	*82,37*	*100*	*90,68*	*90,68*	100	Belum Tercapai
02.04.12	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	38,48	45,48	52,48	59,48	66,48	70	*0*	*0*	*0*	*0*	70	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.04.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	30,96	47,96	64,96	81,96	98,96	100	*52,98*	*41,02*	*33,65*	*33,65*	100	Belum Tercapai
02.04.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Tercapai
02.04.15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare (%)	70,06	77,56	85,06	92,56	95	100	*28,09*	*31,17*	*26,47*	*26,47*	100	Belum Tercapai
02.04.16	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	93,89	94,94	95,99	97,04	98,09	100	*0*	*0*	*0*	*0*	100	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.05	**Pelayanan Kesehatan Rujukan**												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
02.05.01	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18,97	30,97	42,97	54,97	66,97	75	*0*	*0*	*0*	*0*	75	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.05.02	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten (%)	50	60	70	80	90	100	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Tercapai
02.05.03	Cakupan desa siaga aktif (%)	65,7	70,7	75,7	80,7	85,7	90	*0*	*0*	*0*	*0*	90	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.06.00	**Angka Kematian Ibu dan Bayi**												
02.06.01	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kh	215,6	192,95	170,35	147,75	125,15	120	*39,5*	*114,39*	*58,12*	*131,14*	120	Belum Tercapai
02.06.02	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kh	24,1	23	22	21	20	19	*17,38*	*16,97*	*12,79*	*5,06*	19	Tercapai
03.00	**Pekerjaan Umum**												
03.01	Panjang jalan kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi (km)	346,78	379,29	411,8	444,31	476,82	509,31	*366,65*	*388,82*	*407,63*	*416,63*	509,31	Belum Tercapai
03.02	Penjang jalan lingkungan dalam kondisi baik (m)	32.725,20	44.537,16	56.349,12	68.161,80	79.973,04	91.785,00	*47.444,00*	*62.621,00*	*65.250,00*	*70.100,00*	91.785,00	Belum Tercapai
03.03	Drainase dalam kota dalam kondisi baik (m)	20.000,00	23.000,05	26.000,10	29.000,15	32.000,20	35.000,25	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*32.725,00*	35.000,25	Belum Tercapai
03.04	Jumlah jembatan terbangun (unit)	110	112	114	116	118	120	*111*	*112*	*117*	*122*	120	Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
03.05	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	34.974,82	37.975,22	40.975,62	43.976,02	46.976,42	49.976,82	*38.423,82*	*44.673,82*	*45.571,62*	*49.976,82*	49.976,82	Tercapai
04.00	**Perumahan**												
04.01	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	82,06	83,65	85,24	86,83	88,42	90	*85,43*	*86,05*	*86,39*	*86,39*	90	Belum Tercapai
04.02	Panjang jalan dengan penerangan (buah)	-	12	24	36	48	60	*0*	*0*	*0*	*0*	60	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
04.04	Rumah layak huni terbangun (unit)	-	4.350	6.424	6.424	6.424	6.424	*226*	*658*	*1.465*	*1.465*	30.046	Belum Tercapai
05.00	**Penataan Ruang**												
05.01	Jumlah RTH Terbangun (unit)	-	-	1	1	1	-	*0*	*0*	*0*	*0*	3	Belum Tercapai
05.02	Dokumen Perencanaan Tata Ruang tersusun (dokumen)	1	2	3	4	5	6	*0*	*0*	*0*	*0*	6	Belum Tercapai
06.00	**Perencanaan Pembangunan**												
06.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*Ada*	*Ada*	*Ada*	*Ada*	Ada	Tercapai
06.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*Ada*	*Ada*	*Ada*	*Ada*	Ada	Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
06.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*Ada*	*Ada*	*Ada*	*Ada*	Ada	Tercapai
06.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	*Ada*	*Ada*	*Ada*	*Ada*	Ada	Tercapai
06.05	SKPD yang menyusun Renja tepat waktu (%)	25	50	65	75	85	100	*50*	*75*	*85*	*90*	100	Belum Tercapai
07.00	**Perhubungan**												
07.01	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	13,05	30,44	47,83	65,22	82,61	100	*100*	*100*	*100*	*100*	100	Tercapai
07.02	Tertatanya Pelabuhan Wini (%)	-	20	30	40	50	60	*85,64*	*100*	*100*	*100*	60	Tercapai
08.00	**Lingkungan Hidup**												
08.01	Persentase penanganan sampah (%)	17,6	22,6	27,6	32,6	37,6	42,6	*17,73*	*27.51.00*	*27,8*	*28,08*	42,6	Belum Tercapai
08.02	Status mutu air teruji (%)	-	10	20	30	40	50	*14*	*34*	*61*	*95*	50	Tercapai
08.03	Jumlah mata air terpelihara (unit)	377	482	587	692	797	900	*377*	*397*	*447*	*447*	900	Belum Tercapai
08.04	Luas lahan kritis yang direboisasi (Ha)	10	30	50	70	90	120	*0*	*20*	*50*	*50*	120	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
08.05	TPA Aktif/Sanitary Landfill (Unit)	-	-	1	-	-	-	*0*	*0*	*0*	*0*	1	Belum Tercapai
09.00	**Kependudukan dan Catatan Sipil**												
09.01	Penduduk ber KTP (%)	63,72	70	75	80	85	90	*69,61*	*74,19*	*83,4*	*90*	90	Tercapai
09.02	Rasio penduduk berakte kelahiran (%)	17,3	28,84	40,38	51,92	63,46	75	*73,15*	*85,9*	*90,62*	*91,65*	75	Tercapai
09.03	Rasio pasangan berakte nikah (%)	44,23	51,38	58,53	65,68	72,83	80	*33,3*	*52,57*	*65,68*	*43,2*	80	Belum Tercapai
10.00	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**												
10.01	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	10	8	6	4	3	2	*181*	*63*	*36*	*131*	2	Belum Tercapai
10.02	Forum Konsultasi/Konseling bagi anak dan perempuan korban kekerasan (Forum)	-	-	1	-	-	-	*0*	*1*	*0*	*0*	1	Tercapai
11.00	**Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**												
11.01	Cakupan peserta KB aktif (%)	55	56	57	58	59	60	*53,89*	*59*	*64,37*	*70,45*	60	Tercapai
12.00	**Sosial**												
12.01	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)	72,16	75	80	85	87	90	*69,44*	*62,33*	*55,33*	*66,38*	90	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
13.00	**Ketenagakerjaan**												
13.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	67,17	70	73	76	79	81	*74,28*	*75*	*75,03*	*78,13*	81	Belum Tercapai
13.02	Jumlah tenaga kerja terlatih (Orang)	25	50	100	150	200	250	*50*	*75*	*136*	*150*	250	Belum Tercapai
14.00	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**												
14.01	Koperasi aktif (Koperasi)	53	59	65	71	77	85	*56*	*58*	*62*	*64*	85	Belum Tercapai
14.02	Jumlah UKM terbina	146	166	186	206	226	246	*166*	*186*	*292*	*292*	246	Belum Tercapai
14.03	Jumlah IKM terbina	380	398	416	434	452	470	*0*	*0*	*458*	*470*	470	Tercapai
15.00	**Penanaman Modal**												
15.01	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	25	26	27	29	31	32	*29*	*37*	*33*	*33*	32	Tercapai
15.02	Nilai investasi (milyar)	97,53	102,4	107,52	112,9	118,55	124,47	*442*	*446*	*293*	*293*	124,47	Tercapai
16.00	**Kebudayaan**												
16.01	Jumlah festival budaya yang diselenggarakan	3	4	4	5	5	5	*8*	*4*	*8*	*5*	5	Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
17.00	**Kepemudaan dan Olahraga**												
17.01	Jumlah organisasi pemuda yang dibina (organisasi)	-	2	4	6	8	10	*1*	*3*	*25*	*0*	10	Tercapai
17.02	Jumlah organisasi olahraga yang dibantu (klub)	-	1	2	3	4	5	*2*	*8*	*22*	*0*	5	Tercapai
17.03	Jumlah kegiatan olahraga (kegiatan)	-	1	2	3	4	5	*20*	*22*	*25*	*0*	5	Tercapai
18.00	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**												
18.01	Patroli petugas Satpol PP (Kali/tahun)	8	12	24	36	48	54	*82*	*85*	*85*	*85*	54	Tercapai
18.02	Persentase SKPD dengan pelaporan keuangan tepat waktu (%)	50	75	80	100	100	100	*82*	*85*	*85*	*85*	100	Belum Tercapai
18.03	SKPD yang didampingi dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan (%)	-	75	80	100	100	100	*66*	*66*	*66*	*66*	100	Belum Tercapai
18.04	Opini pengelolaan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	*WDP*	*WDP*	*WDP*	*WDP*	WTP	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
18.05	PNS yang mendapat tugas belajar:												
18.05.01	S1	27	32	37	42	47	50	*34*	*41*	*48*	*55*	50	Tercapai
18.05.02	S2	17	17	18	19	19	20	*21`*	*27*	*37*	*57*	20	Tercapai
18.05.03	S3	-	-	1	2	3	4	*0*	*0*	*0*	*0*	4	Belum Tercapai
18.06	Kondisi bangunan kantor camat dalam kondisi baik (unit)	20	22	22	22	23	24	*0*	*0*	*0*	*0*	24	Belum Tercapai
19.00	**Ketahanan Pangan**												
19.01	Jumlah lumbung desa terbentuk (unit)	11	20	30	50	70	80	*0*	*0*	*0*	*0*	80	Belum Tercapai
19.02	Ketersediaan cadangan pangan (%)	46,3	52,3	58,3	64,3	70,3	75	*20*	*30*	*14,5*	*22,39*	75	Belum Tercapai
20.00	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												
20.01	Persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (%)	-	50	75	100	100	100	*50*	*60*	*81*	*82*	100	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
20.02	Jumlah BUMDes terbentuk (unit)	-	5	7	9	11	13	*18*	*18*	*19*	*19*	13	Tercapai
20.03	Jumlah koperasi desa terbentuk (unit)	-	5	10	15	20	25	*0*	*0*	*0*	*0*	25	Belum Tercapai
21.00	**Statistik**												
21.01	Buku "Data dan Informasi Statistik Kabupaten"	1	1	1	1	1	1	*1*	*1*	*1*	*1*	1	Tercapai
21.02	Buku "PDRB kabupaten"	2	2	2	2	2	2	*2*	*2*	*2*	*2*	2	Tercapai
22.00	**Kearsipan**												
22.01	Pengelolaan arsip secara baku (%)	63	69	75	81	87	90	*79,41*	*82,35*	*82,35*	*82,35*	90	Belum Tercapai
23.00	**Komunikasi dan Informatika**												
23.01	Jumlah media yang bekerjasama dengan Pemda dalam informasi pembangunan daerah	-	1	2	3	4	5	*2*	*2*	*3*	*3*	5	Belum Tercapai
23.02	Website milik pemerintah daerah (unit)	1	1	1	1	1	1	*1*	*1*	*1*	*1*	1	Tercapai
23.03	Pameran/expo (Kali)	1	1	1	1	1	1	*1*	*1*	*1*	*1*	5	Belum Tercapai
24.00.00	**Perpustakaan**												
24.01.00	Jumlah perpustakaan desa (unit)	75	96	117	138	159	183	*75*	*75*	*78*	*78*	183	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
24.02.00	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahun (orang)	17.098	19.000	21.000	23.000	25.000	27.000	*53.809*	*39.484*	*28.417*	*5.217*	27.000	Belum Tercapai
24.03.00	Judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	24.764	24.923	25.082	25.241	25.400	25.561	*96.245*	*98.745*	*98.745*	*101.445*	25.561	Tercapai
	Fokus Layanan Urusan Pilihan												
01.00	**Pertanian**												
01.01	Produksi pertanian:												
01.01.01	Jagung (ton)	73.111	76.767	80.605	84.635	88.867	93.310	*51.833*	*44.728*	*39.623*	*42.230*	93.310	Belum Tercapai
01.01.02	Kacang tanah (ton)	6.110	6.416	6.737	7.074	7.427	7.799	*6.595*	*6.900*	*7.829*	*1.240*	7.799	Belum Tercapai
01.01.03	Padi (ton)	46.895	49.895	52.895	55.895	58.895	61.895	*45.609*	*32.860*	*40.368*	*25.832*	61.895	Belum Tercapai
01.01.04	Bawang putih lokal (ton)	67	77	87	97	107	117	*71,3*	*78,2*	*69,6*	*36,58*	117	Belum Tercapai
01.02	Populasi ternak sapi bali (ekor)	115.084	117.789	121.356	125.361	129.498	133.771	*126.413*	*128.264*	*129.325*	*136.659*	133.771	Tercapai
01.03	Luas areal pakan ternak per kelompok tani (ha/kelompok)	-	1	1	2	3	4	*2*	*3*	*5*	*5*	4	Tercapai
01.04	Ternak hasil IB (ekor)	-	250	500	750	1.000	1.250	*500*	*750*	*1.175*	*1.917*	1.250	Belum Tercapai
01.05	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	100%	Tercapai
02.00	**Pariwisata**												
02.01	Kunjungan wisata (orang)	46.380	46.844	47.312	47.785	48.263	48.746	*64.454*	*65.200*	*111.421*	*34.171*	48.746	Belum Tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
02.02	Taman doa terbangun (unit)	-	-	-	1							1	Belum Tercapai
03.00	**Ketransmigrasian**												
03.01	Review *Grand Design* Pengembangan KTM Ponu (dokumen)	-	-	1	-	-	-	*0*	*0*	*0*	*0*	1	Belum Tercapai
04.00	**Kelautan dan Perikanan**												
04.01	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	600	648	696	745	793	841,1	*608,2*	*720,2*	*748,3*	*822,5*	841,1	Belum Tercapai
04.02	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	150	158	166	174	182	191	*171,8*	*170,6*	*162,4*	*160,2*	191	Belum Tercapai
04.03	Jumlah Kelompok Nelayan Terbina (Kelompok)	70	74	77	81	85	90	*25*	*35*	*44*	*48*	90	Belum Tercapai
04.04	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Terbantu (%)	71	74	78	82	86	90	*75*	*79*	*82*	*87*	90	Belum Tercapai
	ASPEK DAYA SAING DAERAH												
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah												
01.00	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**												
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (%)	61,93	61,34	60,75	60,16	59,57	58,98	*0*	*0*	*0*	*0*	58,98	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	38,07	38,66	39,25	39,84	40,43	41,02	*0*	*0*	*0*	*0*	41,02	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur												
01.00	**Penataan Ruang**												
02.01	Ketaatan terhadap RTRW (%)	20	50	60	70	80	85	*0*	*0*	*0*	*0*	85	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.00	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**												
02.01	Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)	22	22	22	23	23	24	*0*	*0*	*0*	*0*	24	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
02.02	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (unit)	9	9	10	10	11	11	*0*	*0*	*0*	*0*	11	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
03.00	**Lingkungan Hidup**												
03.01	Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (%)	82,06	83,65	85,24	86,83	88,42	90	*85,43*	*86,05*	*86,39*	*86,39*	90	Belum Tercapai
04.00	**Komunikasi dan Informatika**												
04.01	Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	46	50	55	60	65	75	*0*	*0*	*0*	*0*	75	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
	Fokus Iklim Berinvestasi												

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Status Ketercapaian
			2017	2018	2019	2020	2021	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*		
01.00	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**												
01.01	Jumlah demo (kali)	4	3	3	2	1	-	*0*	*0*	*0*	*0*	1	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)
01.02	Lama proses perijinan (hari)	7	7	7	6	4	3					3	
	Fokus Sumber Daya Manusia												
01.00	**Ketenagakerjaan**												
01.01	Rasio ketergantungan (%)	73,75	73,25	72,75	72,25	71,75	71,25	*0*	*0*	*0*	*0*	71,25	Belum Tercapai (Data tidak tersedia)

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai dengan tahun 2020 pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa indicator yang belum tercapai. Adapun indicator yang termuat dalam RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2016-2021 tidak mengakomodir secara keseluruhan indicator yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

2.6. Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yang merupakan komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat.

Jumlah target dan indikator TPB/SDGs dimodifikasi ke TPB/SDGs Nasional yaitu berjumlah 17 Tujuan, 94 target dan 319 Indikator sasaran global. Setiap tujuan memiliki jumlah target dan jumlah indikator yang berbeda-beda. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia;
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua;
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan;
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan;
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua;
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua;
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi;
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara;
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan;
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan;
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya;
14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan;
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan;
17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Target merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu sedangkan indikator merupakan ukuran dari suatu kondisi tidak langsung yang sudah atau telah terjadi. Pencapaian indikator terhadap kategori dapat dirincikan sesuai dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Rincian pencapaian indikator terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ditujukkan pada Tabel 2. 235

Tabel 2. 35
Jumlah Kategori Capaian Indikator Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Total
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	11	12	1	0	**24**
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	6	5	0	0	**11**
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	18	10	2	2	**32**
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	6	1	0	**13**
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	7	5	1	1	**14**
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3	6	4	0	**13**
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	0	0	0	**0**
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	6	13	0	0	**19**
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	4	1	4	2	**11**
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	4	1	0	**8**

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D	Total
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6	2	1	1	**10**
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2	1	2	0	**5**
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	0	**2**
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	1	0	0	**3**
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	1	2	1	0	**4**
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	4	12	6	0	**22**
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	5	2	0	**15**
	Total	**89**	**85**	**18**	**14**	**206**

Sumber : Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU 2021-2026

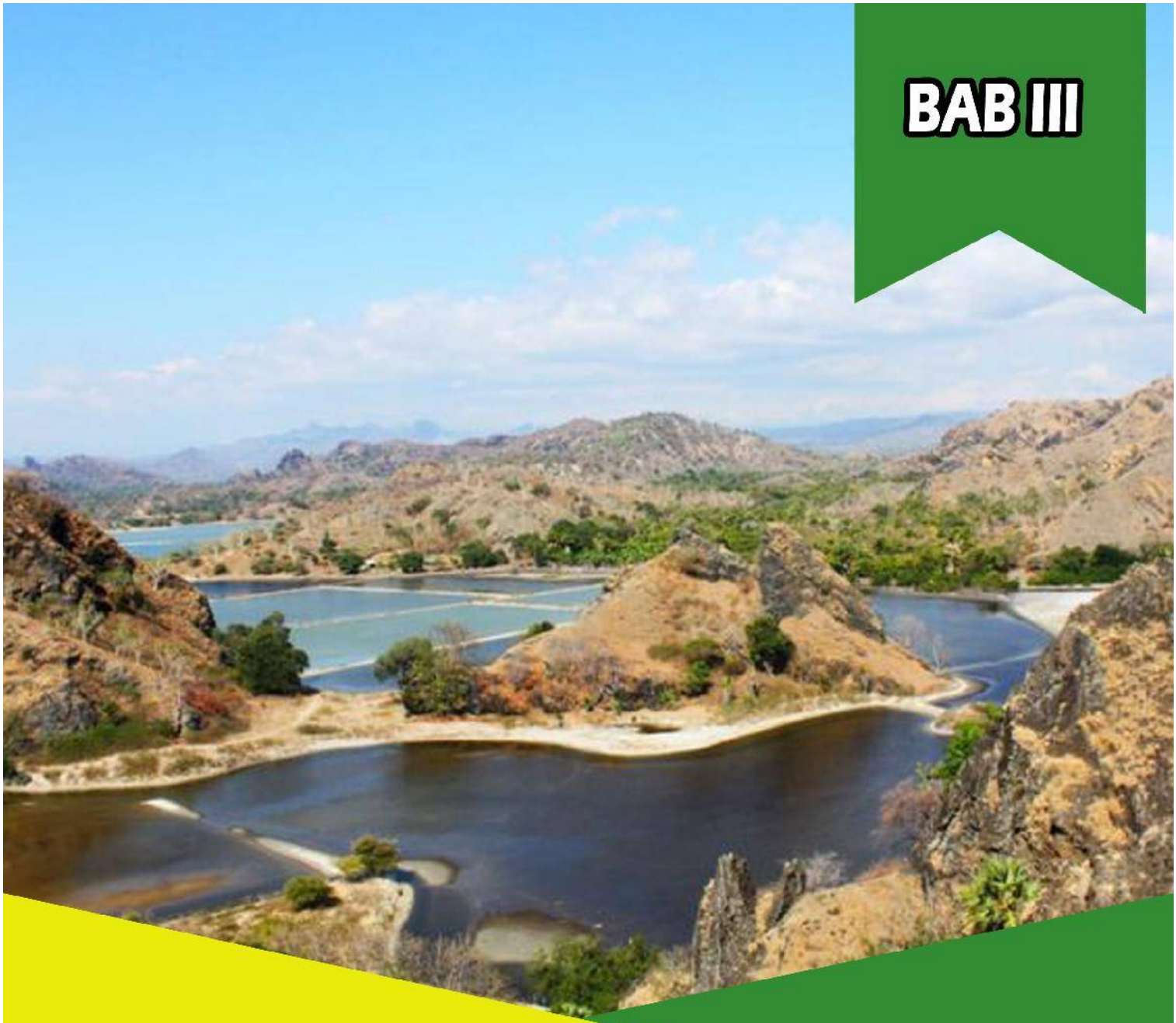

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBDdan laporan keuangan daerah yang mencerminkan kinerja keuangan masa lalu (2016-2020) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya, berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan yang akan datang.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat didaerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2016-2020. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2016-2021

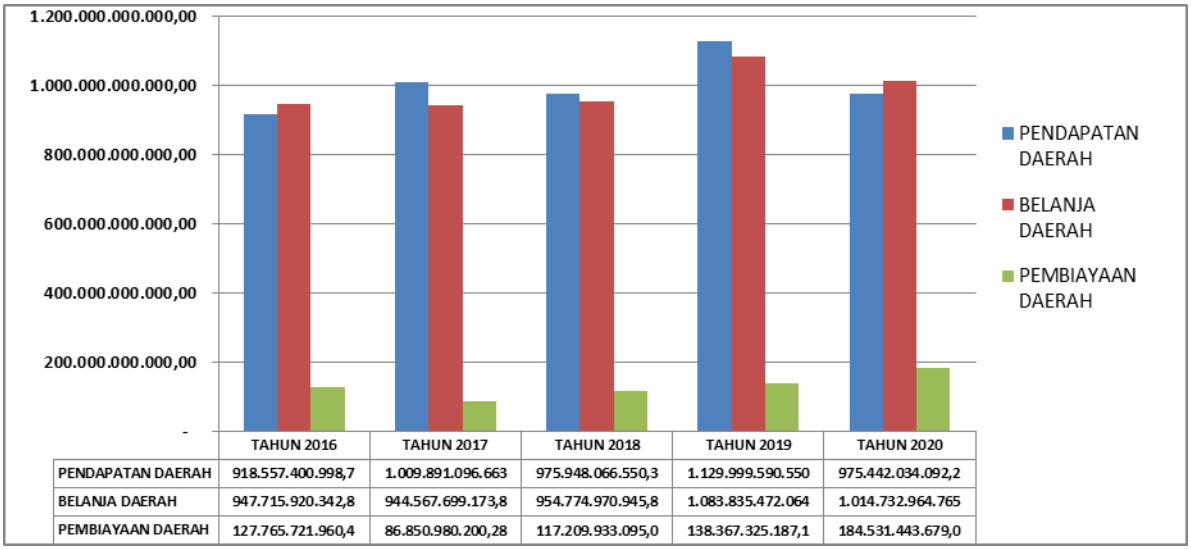

	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
PENDAPATAN DAERAH	918.557.400.998,7	1.009.891.096.663	975.948.066.550,3	1.129.999.590.550	975.442.034.092,2
BELANJA DAERAH	947.715.920.342,8	944.567.699.173,8	954.774.970.945,8	1.083.835.472.064	1.014.732.964.765
PEMBIAYAAN DAERAH	127.765.721.960,4	86.850.980.200,28	117.209.933.095,0	138.367.325.187,1	184.531.443.679,0

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 918.557.400.998,73, tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.009.891.096.663,69, pada tahun 2018 menurun menjadi Rp.975.948.066.550,30, tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp.1.129.999.590.550,96 sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 975.442.034.092,25. Secara rinci perkembangan pendapatan daerah tercantum pada diagram berikut.

Gambar.3.2.
Perkembangan Realisasi Pandapatan Daerah
Kabupaten TTU Tahun 2016 – 2020

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

Pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi dari dana perimbangan dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah cenderung menurun dari sebesar 82,46% pada tahun 2016 menjadi74,92% pada tahun 2020. Sementara itu proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 05,22% pada tahun 2016 kemudian menjadi 04,48% pada tahun 2020. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah tersebut juga menunjukkan peningkatan derajat kemandirian keuangan daerah. Adapun proporsi lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan daerah cenderung meningkat dari sebesar12,32% pada tahun 2016 menjadi 20,60% pada tahun 2020. Perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah tercantum pada gambar berikut :

Gambar 3.3.
Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

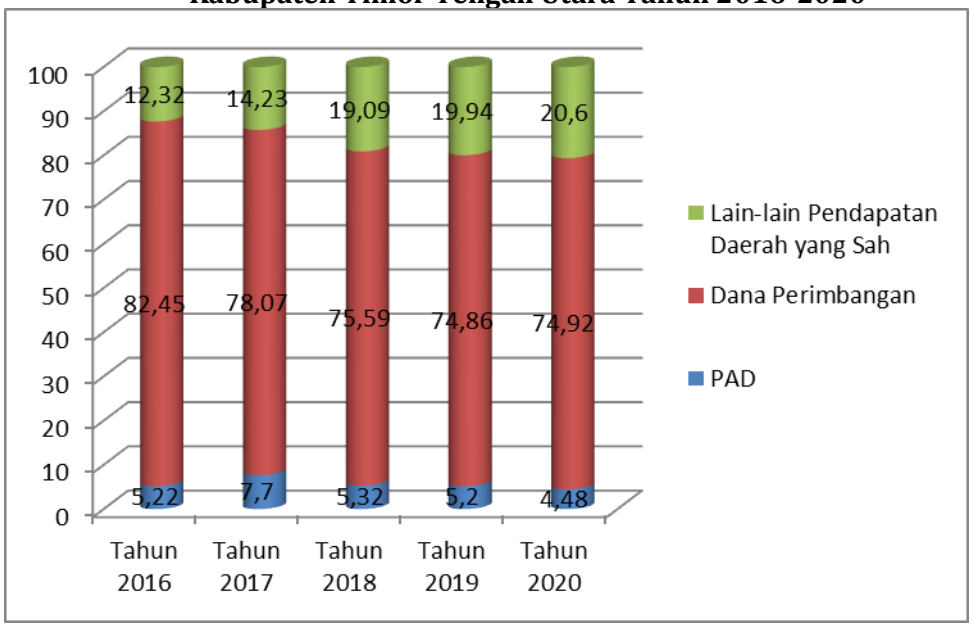

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2021

Pendapatan asli daerah mencakup pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar Rp.47.974.079.043,73, meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 sebesar Rp.77.782.160.334,69, pada tahun 2018 menurun menjadiRp. 51.895.359.575,30, pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 58.749.871.979,96,sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.43.654.391.464,64. Kondisi ini menunjukkan agar perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan PAD. Secara rinci perkembangan pendapatan asli daerah tercantum pada gambar berikut.

Gambar 3.4.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

Dana transfer dari Pemerintah Pusa tatau Perimbangan terdiri dari dana hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama kurun waktu tahun 2016-2020 perkembangan dana perimbangan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp.757.385.944.356,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 730.830.843.048,00 pada tahun 2020. Pencapaian target dana perimbangan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat kepada daerah, sehingga sangat sulit untuk diprediksi pencapaiannya. Secara rinci perkembangan dana perimbangan tercantum pada gambar berikut.

Gambar 3.5.
Perkembangan Dana Transfer/Perimbangan
Kabupaten TTU Tahun 2016 – 2020

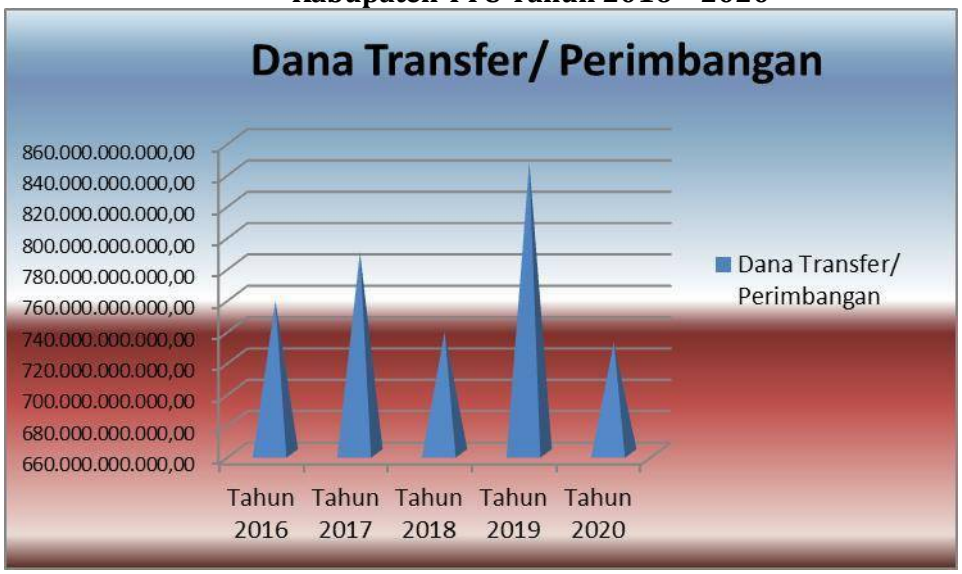

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

Lain-lain pendapatan daerah yang Sah mencakup Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari sebesar Rp. 113.197.377.599,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 200.956.799.579,61 pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercantum pada gambar berikut.

Gambar 3.6.
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten TTU Tahun 2016-2020

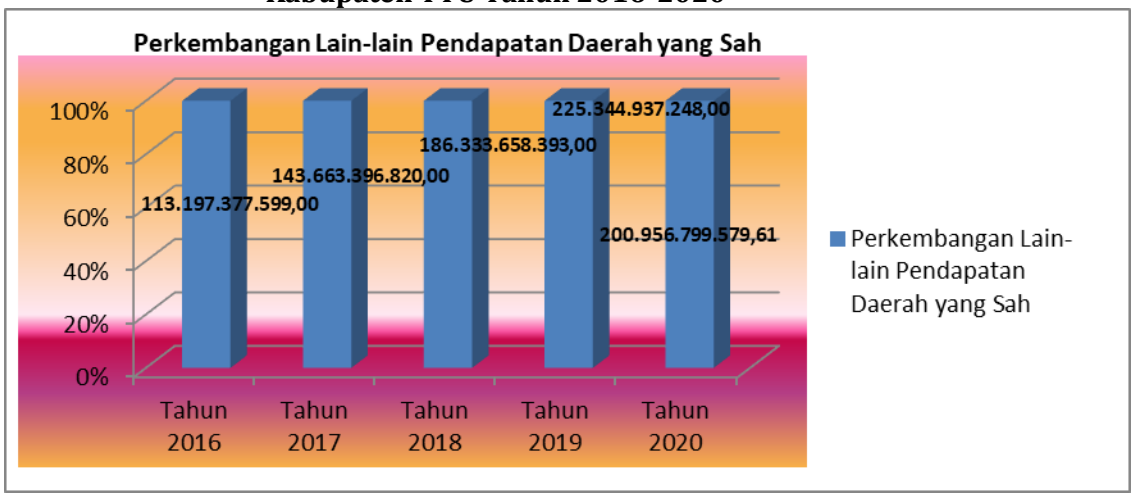

Sumber : BKAD Kab. TTU dan olahan Tim 2021

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah dan perbandingannya dengan target pendapatan daerah tercantum pada table berikut :

Tabel 3.1
Perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah dan perbandingannya dengan target pendapatan daerah

No. Urut	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
1	**PENDAPATAN**	**918.557.400.998,73**	**91,15**	**1.009.891.096.663,69**	**97,62**	**975.948.066.550,30**	**97,34**	**1.129.999.590.550,96**	**96,46**	**975.442.034.092,25**	**92,45**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**47.974.079.043,73**	**86,59**	**77.782.160.334,69**	**100,69**	**51.895.359.575,30**	**84,18**	**58.749.871.979,96**	**94,75**	**43.654.391.464,64**	68,68
	PendapatanPajak Daerah - LRA	9.382.622.550,88	133,28	7.497.585.015,66	132,57	8.195.455.929,56	98,65	8.333.286.848,88	93,31	7.975.727.484,63	87,13
	PendapatanRetribusi Daerah - LRA	4.618.612.618,00	83,58	4.706.474.570,00	108	4.872.256.676,00	112,58	5.463.115.279,00	192,07	4.217.602.968,89	103,60
	PendapatanHasilPengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	8.729.760.226,00	100	8.529.135.608,00	97,7	9.408.624.596,00	100	14.622.492.481,00	100	6.681.396.574,00	45,76
	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	25.243.083.648,85	74,01	57.048.965.141,03	97,51	29.419.022.373,74	74,28	30.330.977.371,08	88,91	24.779.664.437,12	69,33
	DANA PERIMBANGAN	**757.385.944.356,00**	**91,22**	**788.445.539.509,00**	**97,27**	**737.719.048.582,00**	**98,26**	**845.904.781.323,00**	**95,09**	**730.830.843.048,00**	96,17
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**757.385.944.356,00**	**91,22**	**788.445.539.509,00**	**97,27**	**737.719.048.582,00**	**98,26**	**845.904.781.323,00**	**95,09**	730.830.843.048,00	96,17
	BagiHasilPajak - LRA	14.019.060.781,00	126,71	7.968.981.030,00	77,26	7.519.333.764,00	84,21	5.536.998.300,00	71,87	7.626.364.469,00	86,23
	BagiHasilBukanPajak/SumberDayaAlam - LRA	2.940.737.076,00	59,56	1.831.226.609,00	64,12	1.682.081.635,00	72,76	1.403.693.353,00	65,4	-	-
	Dana AlokasiUmum (DAU) - LRA	583.821.023.000,00	100	579.318.905.000,00	100	581.514.817.375,00	99,85	603.488.889.000,00	98,02	551.022.165.207,00	97,40
	Dana AlokasiKhusus (DAK) - LRA	156.605.123.499,00	67,95	199.326.426.870,00	91,41	147.002.815.808,00	93,53	235.475.200.670,00	89,18	172.182.313.372,00	92,92
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**113.197.377.599,00**	**92,73**	**143.663.396.820,00**	**97,95**	**186.333.658.393,00**	**98**	**225.344.937.248,00**	**102,49**	**200.956.799.579,61**	86,77
	Hibah					29.377.345.137,00	88,02	44.322.899.000,00	123,53	37.374.740.000,00	84,50
	Dana Darurat										
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.335.605.599,00	84,37	20.649.933.213,00	87,33	19.125.258.056,00	101,05	20.633.060.048,00	87,44	22.813.171.814,61	95,80
	Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus	96.493.772.000,00	100	123.013.463.607,00	99,99	137.831.055.200,00	100	160.388.978.200,00	100	140.768.887.765,00	86,08
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.368.000.000,00	93,83								

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas pendapatan daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pembangunan dan Pembiayaan. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah 2016-2020

No. Urut	URAIAN	REALISASI					Rata- Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	**PENDAPATAN**	918.557.400.998,73	1.009.891.096.663,69	975.948.066.550,30	1.129.999.590.550,96	975.442.034.092,25	2,49
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.974.079.043,73	77.782.160.334,69	51.895.359.575,30	58.749.871.979,96	43.654.391.464,64	-1,97
	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	9.382.622.550,88	7.497.585.015,66	8.195.455.929,56	8.333.286.848,88	7.975.727.484,63	-14,80
	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	4.618.612.618,00	4.706.474.570,00	4.872.256.676,00	5.463.115.279,00	4.217.602.968,89	-3,28
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	8.729.760.226,00	8.529.135.608,00	9.408.624.596,00	14.622.492.481,00	6.681.396.574,00	2,86
	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	25.243.083.648,85	57.048.965.141,03	29.419.022.373,74	30.330.977.371,08	24.779.664.437,12	-1,70
	DANA PERIMBANGAN	757.385.944.356,00	788.445.539.509,00	737.719.048.582,00	845.904.781.323,00	730.830.843.048,00	0,30
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	757.385.944.356,00	788.445.539.509,00	737.719.048.582,00	845.904.781.323,00	730.830.843.048,00	0,30
	Bagi Hasil Pajak – LRA	14.019.060.781,00	7.968.981.030,00	7.519.333.764,00	5.536.998.300,00	7.626.364.469,00	-7,55
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.940.737.076,00	1.831.226.609,00	1.682.081.635,00	1.403.693.353,00	-	-31,92
	Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	583.821.023.000,00	579.318.905.000,00	581.514.817.375,00	603.488.889.000,00	551.022.165.207,00	-1,33
	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	156.605.123.499,00	199.326.426.870,00	147.002.815.808,00	235.475.200.670,00	172.182.313.372,00	8,81

No. Urut	URAIAN	REALISASI					Rata- Rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	113.197.377.599,00	143.663.396.820,00	186.333.658.393,00	225.344.937.248,00	200.956.799.579,61	15,66
	Hibah			29.377.345.137,00	44.322.899.000,00	37.374.740.000,00	17,60
	Dana Darurat						
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.335.605.599,00	20.649.933.213,00	19.125.258.056,00	20.633.060.048,00	22.813.171.814,61	11,55
	Dana Penyesuaiandan Otonomi Khusus	96.493.772.000,00	123.013.463.607,00	137.831.055.200,00	160.388.978.200,00	140.768.887.765,00	9,44
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.368.000.000,00					

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU, 2021: diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2016 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.918.557.400.998,73 atau 91,15%, tahun 2017 realisasi menjadi sebesar Rp. 1.009.891.096.663,69 atau meningkat menjadi 97,62%. Tahun 2018 realisasi turun menjadi Rp.975.948.066.550,3 dan secara presentase realisasinya menurun, hanya sebesar 97,34%. Sedangkan di tahun 2019, realisasi meningkat kembali sebesar Rp.1.129.999.590.550,96 namun presentasenya menurun menjadi 96,46%, tahun 2020 relisasi turun kembali menjadi sebesar Rp. 975.442.034.092,25 dengan presentase yang menurun kembali menjadi 92,45%.

Berdasarkan sumber pendapatan yang paling dominan adalah Dana Perimbangan (danaTransfer) yang diikuti oleh lain-lain pendapatan asli daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi paling sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Timor Tengah Utara masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Realisasi pendapatan yang fluktuatif setiap tahun menunjukkan belum berjalannya strategi peningkatan dan kebijakan yang dijalankan melalui berbagai upaya baik dalam bentuk kegiatan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat. Kedepan perlu adanya perencanaan anggaran yang tepat dan akurat serta mencari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang lebih prospektif dengan tetap berpijak kepada landasan hukum yang berlaku.

Ketergantungan pendapatan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar, sehingga dalam prakteknya pendapatan daerah akan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Tingkat kemandirian APBD dapat dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi total pendapatan daerah setidaknya dalam 5(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Proporsi (%)
2016	918.557.400.998,73	47.974.079.043,73	5,22
2017	1.009.891.096.663,69	77.782.160.334,69	7,70
2018	975.948.066.550,30	51.895.359.575,30	5,31
2019	1.129.999.590.550,96	58.749.871.979,96	5.19
2020	975.442.034.092,25	43.654.391.464,64	4,47

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU, 2021 : diolah.

Dilihat dari table diatas bahwa proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil dan cenderung terjadi penurunan proporsi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menjadi sebesar 4,47%. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan
2016	47.974.079.043,73	
2017	77.782.160.334,69	38,32
2018	51.895.359.575,30	-49,88
2019	58.749.871.979,96	11,66
2020	43.654.391.464,64	-34,57

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU, 2020 : diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 7,70%, peningkatan tersebut dikarenakan adanya kebijakan system pemungutan pendapatan daerah dan pembenahan manajemen data penerimaan PAD serta perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 total Belanja Daerah sebesar Rp.947.715.920.342,87 meningkat menjadi sebesar Rp.1.014.732.964.765,00 pada tahun 2020. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2016-2020 terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten TTU Tahun 2016-2020

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap total belanja Daerah selama kurun waktu 2016– 2020 Belanja Tidak Langsung memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.577.751.167.079,87 dibanding dengan Belanja Langsung pada tahun 2016 sebesar Rp.369.964.753.263,00. Porporsi tersebut fluktuatif selama kurun waktu 2016– 2020 dan pada tahun 2020

proporsi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.615.284.804.167,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.399.448.160.598,00. Perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Timor Tengah Utara tercantum pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Kabupaten TTU Tahun 2016-2020

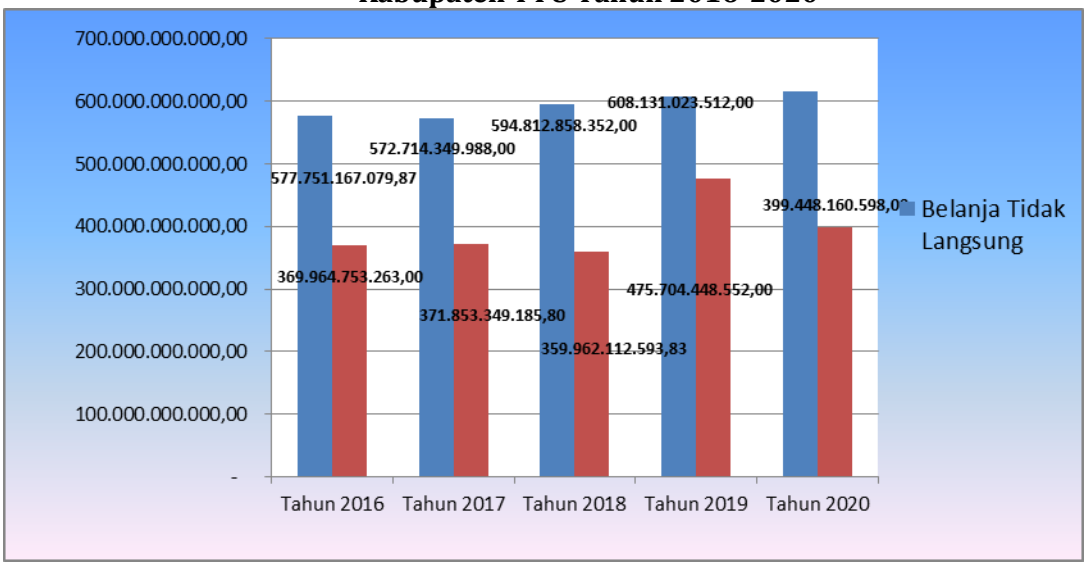

Sumber :BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda. Kab. TTU, 2021

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur Belanja Daerah dan perbandingannya dengan target Belanja Daerah tercantum pada table berikut :

Tabel 3.5
Perkembangan Belanja Daerah
Kabupaten TTU Tahun 2016 - 2020

REK	URAIAN	2016			2017			2018			2019			2020		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
05.01	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**646.384.553.240,11**	**577.751.167.079,87**	**89,38**	**645.994.145.395,32**	**72.714.349.988,00**	**88,66**	**633.210.258.529,21**	**94.812.858.352,00**	**3,94**	**670.736.282.910,34**	**608.131.023.512,00**	**90,67**	**649.673.677.688,01**	**615.284.804.167,00**	**94,71**
05.01.01	Belanja Pegawai	485.439.307.921,11	420.369.352.360,00	86,6	407.049.014.295,32	387.311.767.223,00	95,15	423.109.317.686,21	385.894.536.015,00	91,2	441.844.966.610,34	392.662.488.242,00	88,87	387.768.176.688,01	372.860.364.466,00	96,16
05.01.04	Belanja Hibah	2.179.830.000,00	650.000.000,00	29,82	2.760.000.000,00	1.710.000.000,00	61,96	2.550.000.000,00	2.550.000.000,00	100	1.729.500.000,00	1.724.171.340,00	99,69	40.803.425.000,00	39.985.828.660,00	98,00
05.01.05	Belanja Bantuan Sosial	2.138.800.146,00	1.881.245.646,00	87,96	46.793.057.500,00	885.112.500,00	1,89	1.234.500.000,00	677.000.000,00	54,84	3.531.156.000,00	2.415.000.000,00	68,39	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
05.01.07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	155.126.615.173,00	154.850.569.073,87	99,82	189.392.073.600,00	182.807.470.265,00	96,52	205.803.940.843,00	205.586.323.337,00	99,89	223.218.660.300,00	211.329.363.930,00	94,67	218.602.076.000,00	197.798.442.541,00	90,48
05.01.08	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00						512.500.000,00	104.999.000,00	20,49	412.000.000,00	-	0	1.500.000.000,00	3.640.168.500,00	242,68
05.02	**BELANJA LANGSUNG**	**474.071.538.850,42**	**369.964.753.263,00**	**78,04**	**436.073.046.816,39**	**71.853.349.185,80**	**85,27**	**486.535.081.211,21**	**59.962.112.593,83**	**3,98**	**639.112.140.323,81**	**475.704.448.552,00**	**74,43**	**590.088.380.114,41**	**399.448.160.598,00**	**67,69**
05.02.01	Belanja Pegawai	43.007.203.849,00	39.819.324.957,00	92,59	50.800.463.510,00	49.055.839.820,00	96,57	64.158.655.670,00	61.451.859.607,00	95,78	80.523.024.291,00	74.042.796.311,00	91,95	74.439.289.678,00	69.106.800.371,00	92,84
05.02.02	Belanja Barang dan Jasa	195.643.218.070,73	148.415.477.850,00	75,86	191.468.625.215,08	169.046.183.714,80	88,29	252.888.092.322,21	164.484.003.032,83	65,04	225.409.540.136,31	191.446.076.225,00	84,93	289.481.091.048,10	235.400.306.571,00	81,32
05.02.03	Belanja Modal	235.421.116.930,69	181.729.950.456,00	77,19	193.803.958.091,31	153.751.325.651,00	79,33	169.488.333.219,00	134.026.249.954,00	79,08	333.179.575.896,50	210.215.576.016,00	63,09	226.167.999.388,31	94.941.053.656,00	41,98

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan Peningkatan dari sebesar RP.127.765.721.960,48 pada tahun 2016 menjadi Rp.184.531.443.679,09 pada tahun 2020. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.9.
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda.Kab. TTU, 2021

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar RP.16.000.000.000,00. turun menjadi Rp.0 Pada tahun 2020. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10.
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2020

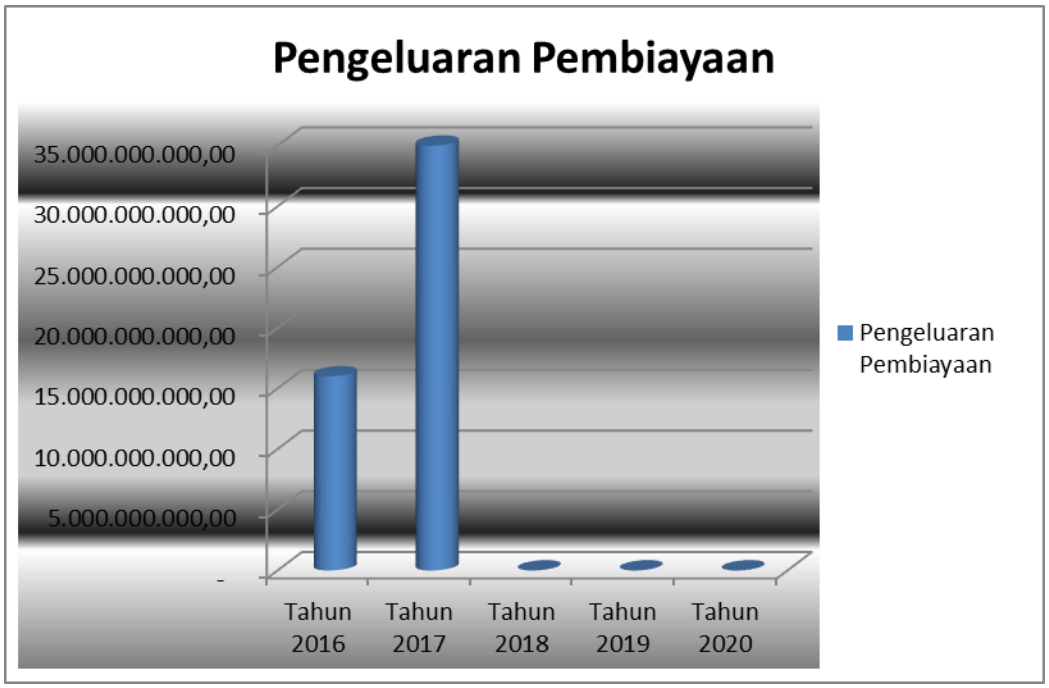

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

SisaLebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Perkembangan SILPA di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2016-2020 menunjukkan fluktuatif dari sebesar Rp.127.765.721.960,48.- pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.86.850.980.200,28 pada tahun 2017, tahun 2018 sebesar Rp.117.209.933.095,00, dan tahun 2019 sebesar Rp.138.367.325.187,13. Dan tahun 2020 meningkat lagi sebesar Rp.184.531.443.674,09. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik sehingga perlu menjadi perhatian.

Gambar 3.11.
Perkembangan SiLPA
Kabupaten TTU tahun 2016-2020

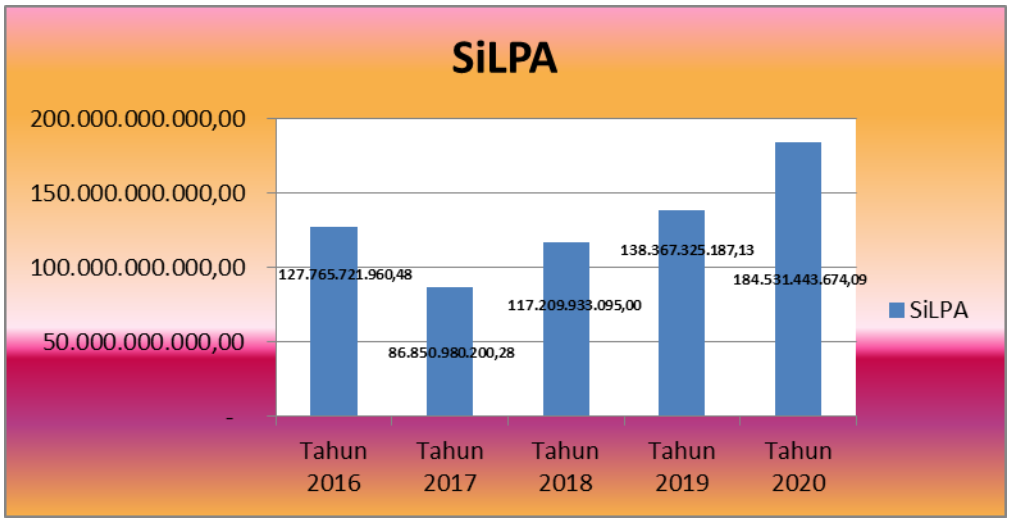

Sumber : BKAD Kab. TTU dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yangdikuasai dan/atau dimiliki oleh Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Kabupaten Timor Tengah Utara, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber–sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran kinerja neraca Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6
Neraca Kabupaten TTU Tahun 2016-2019

URAIAN	2016 (AUDITED)	2017 (AUDITED)	2018 (AUDITED)	2019 (AUDITED)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	80.276.413.479,94	110.243.125.140,73	129.211.090.012,07	71.638.890.324,03
Kas di Bendahara Penerimaan	22.577.511,40	84.092.186,50	0,00	36.246.488,46
Kas di Bendahara Pengeluaran	977.893.234,00	135.385.600,00	487.221.116,00	63.518.928,60
Kas di BLUD	1.806.508.083,00	2.516.191.090,00	3.939.025.478,00	4.348.688.036,00
Kas Lainnya	-		308.097.951,46	66.056.865,00
Kas di Bendahara FKTP		1.957.562.744,00	1.875.915.731,00	1.854.863.954,00
Kas di Bendahara BOS	1.562.399.204,00	2.368.188.635,94	2.707.785.156,94	11.612.090.215,00
Investasi Jangka Pendek	-			0,00
Piutang Pendapatan	9.359.583.483,64	9.363.891.030,78	11.921.970.569,74	12.468.073.142,87
Piutang Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	50,00
Penyisihan Piutang	(3.322.465.111,44)	(4.068.504.715,91)	(3.878.055.372,51)	(5.241.749.620,43)
Beban Dibayar Dimuka	-	0,00	0,00	0,00
Persediaan	14.805.518.379,00	23.514.313.243,29	19.003.892.375,17	19.071.284.951,99
JUMLAH ASET LANCAR	105.548.428.263,54	146.114.244.955,33	165.576.943.017,87	**115.917.963.335,52**

INVESTASI JANGKA PENDEK				
Investasi Jangka Pendek Non Permanen				
Investasi dalam Deposito				95.000.000.000,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PENDEK				**95.000.000.000,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-			0,00
Investasi dalam Obligasi	-			0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	-	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	-			0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	8.318.391.886,18	8.274.758.979,18	8.242.655.269,18	8.228.925.049,18
Penyisihan Investasi Non Permanen	(6.803.930.492,41)	(6.865.401.166,36)	(7.113.343.045,18)	(7.109.808.000,18)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.514.461.393,77	1.409.357.812,82	1.129.312.224,00	1.119.117.049,00
Investasi Jangka Panjang Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.771.588.577,00	97.744.223.203,00	96.746.000.178,00	96.003.804.433,00
Investasi Permanen Lainnya	-	0,00	0,00	0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	62.771.588.577,00	97.744.223.203,00	96.746.000.178,00	96.003.804.433,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**64.286.049.970,77**	**99.153.581.015,82**	**97.875.312.402,00**	**97.122.921.482,00**

ASET TETAP				
Tanah	99.784.567.501,00	183.601.789.486,00	213.301.429.901,00	231.781.467.801,00
Peralatan dan Mesin	221.887.022.607,00	246.991.090.482,00	242.643.921.562,00	199.163.609.971,00
Gedung dan Bangunan	362.199.322.182,00	383.016.970.108,00	416.724.626.549,00	363.270.592.334,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.045.175.618.397,00	1.107.841.813.708,00	1.191.578.541.676,00	1.233.730.582.115,00
Aset Tetap Lainnya	27.380.672.705,00	27.904.979.194,00	27.936.985.869,00	9.765.985.261,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.329.486.623,00	42.440.380.684,00	34.072.864.174,00	103.545.400.858,58
Akumulasi Penyusutan	(540.249.576.700,00)	(649.254.728.284,00)	(831.535.796.213,00)	(261.026.209.648,00)
JUMLAH ASET TETAP	**1.248.507.113.315,00**	**1.342.542.295.378,00**	**1.294.722.573.518,00**	**1.880.231.428.692,58**
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	10.168.607.435,93	11.546.018.311,11	11.546.018.311,11	11.955.318.041,44
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	0,00	0,00	0,00

Aset Tidak Berwujud	2.901.114.235,00	2.999.764.235,00	2.999.764.235,00	1.947.760.210,00
Aset Lain-lain	45.733.296.039,96	72.597.079.268,96	73.175.146.295,96	265.322.106.365,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain	(6.954.421.434,00)	(6.980.523.334,00)	(24.541.409.621,00)	(24.272.730.704,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(30.100.000,00)	(30.100.000,00)	(30.100.000,00)	(30.100.000,00)
Kas lainnya yang dibatasi penggunaannya				1.406.250.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	51.818.496.276,89	80.132.238.481,07	63.149.419.221,07	**256.328.603.912,44**
JUMLAH ASET	1.470.160.087.826,20	1.667.942.359.830,22	1.621.324.248.158,94	**2.444.600.917.422,54**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	476.189.692,00	130.167.707,00	146.106.746,00	88.911.461,00
Utang Bunga	-	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	72.366.843,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	66.872.183,50	1.256.166.259,50	1.802.208.096,50	2.554.588.109,40
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.787.075.104,00	7.909.119.429,00	6.513.587.818,80	15.117.528.314,58
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.402.503.822,50	9.295.453.395,50	8.461.902.661,30	**17.761.027.884,98**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	-	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	0,00	0,00	0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	22.402.503.822,50	9.295.453.395,50	8.461.902.661,30	**17.761.027.884,98**
EKUITAS				
EKUITAS	1.447.757.584.003,70	1.658.646.906.434,72	1.612.862.345.497,64	2.426.839.889.537,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.470.160.087.826,20	1.667.942.359.830,22	1.621.324.248.158,94	**2.444.600.917.422,54**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU, 2020 : diolah.

Adapun rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2016- 2019 dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016-2019

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Kas Daerah	(12,83)
Kas di Bendahara Penerimaan	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	(405,71)
Kas di BLUD	24,58
Kas Lainnya	-
Kas di Bendahara FKTP	31,50
Kas di Bendahara BOS	41,08
Investasi Jangka Pendek	-
Piutang Pendapatan	8,63
Piutang Lainnya	-
Penyisihan Piutang	13,15
Beban Dibayar Dimuka	-
Persediaan	4,55
JUMLAH ASET LANCAR	**(1,11)**
INVESTASI JANGKA PENDEK	**-**
Investasi Jangka Pendek Non Permanen	-
Investasi dalam Deposito	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PENDEK	**-**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**-**

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-
Investasi dalam Obligasi	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-
Dana Bergulir	-
Deposito Jangka Panjang	-
Investasi Non Permanen Lainnya	(0,36)
Penyisihan Investasi Non Permanen	1,44
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(11,06)
Investasi Jangka Panjang Permanen	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11,32
Investasi Permanen Lainnya	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	11,32
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**11,03**
ASET TETAP	**-**
Tanah	22,52
Peralatan dan Mesin	(4,49)
Gedung dan Bangunan	(0,40)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5,37
Aset Tetap Lainnya	(61,36)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,12
Akumulasi Penyusutan	(59,95)
JUMLAH ASET TETAP	**11,48**
DANA CADANGAN	**-**
Dana Cadangan	-
JUMLAH DANA CADANGAN	**-**
ASET LAINNYA	
Tagihan Jangka Panjang	5,12

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
Aset Tidak Berwujud	(16,91)
Aset Lain-lain	36,74
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	23,61
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
Kas lainnya yabg dibatasi penggunaannya	-
JUMLAH ASET LAINNYA	27,93
JUMLAH ASET	14,22
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(106,42)
Utang Bunga	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-
Utang Beban	51,48
Utang Jangka Pendek Lainnya	(46,66)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(32,83)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
JUMLAH KEWAJIBAN	(32,83)
EKUITAS	
EKUITAS	14,47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**14,22**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Kabupaten TTU, 2020 : diolah

a. aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari table diatas aset tetap pemerintah daerah Kabupaten TTU selama periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,48%.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten TTU mengalami penurunan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar (-32,83%).

c. Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten TTU pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Kabupaten TTU selama tahun 2016-2019 tumbuh rata- rata sebesar 14,22%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja di lakukan untuk memperoleh gambaran realisasidari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

1. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
2. Analisis Pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauhmana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan.

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

1. Belanja Tidak Langsung, yang meliputi:
   1.1. Belanja Pegawai
   1.2. Belanja Bunga;
   1.3. Belanja Subsidi;
   1.4. Belanja Hibah;
   1.5. Belanja Bantuan Sosial;
   1.6. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
   1.7. Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa;
   1.8. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung, yang meliputi:
   2.1. Belanja Pegawai;
   2.2. Belanja Barang dan Jasa;
   2.3. Belanja Modal.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kemampuan pengelolaan belanja APBD Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 terlihat pada Gambar 3.11. Realisasi belanja tidak langsung menunjukkan trend menurun. Hal ini bias jadi karena ketidakmampuan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan, atau karena pengalokasian anggaran yang terlampau besar, dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Disisi lain, penyerapan belanja langsung terlihat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran belanja langsung relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Prosentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana Gambar 3.12.

Gambar 3.12.
Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016-2020

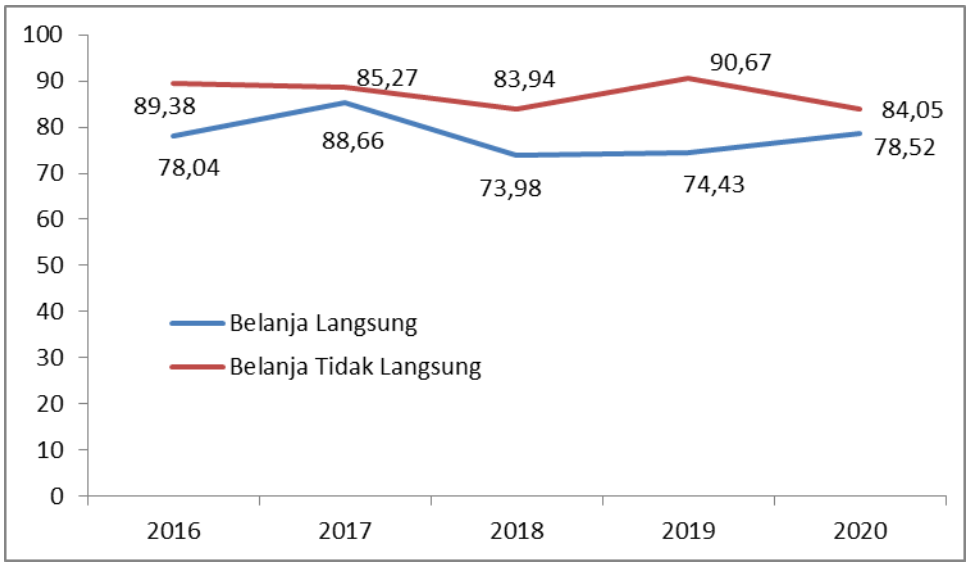

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Kinerja Belanja Daerah Kabupaten TTU selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8, Proporsi Belanja pada Tabel 3.9 dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung pada Tabel 3.10.

Table 3.8
Kinerja Belanja Daerah 2016–2020

No Urut	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**89,38**	**88,66**	**93,94**	**90,67**	96,52
	Belanja Pegawai	86,6	95,15	91,2	88,87	97,45
	Belanja Hibah	29,82	61,96	100	99,69	99,69
	Belanja Bantuan Sosial	87,96	1,89	54,84	68,39	124,71
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	99,82	96,52	99,89	94,67	94,77
	Belanja Tidak Terduga	0	0	20,49	0	0,00
	BELANJA LANGSUNG	**78,04**	**85,27**	**73,98**	**74,43**	100,61
	Belanja Pegawai	92,59	96,57	95,78	91,95	96,00
	Belanja Barang dan Jasa	75,86	88,29	65,04	84,93	130,58
	Belanja Modal	77,19	79,33	79,08	63,09	79,78

Sumber:Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU

Tabel 3.9
Rata–Rata Proporsi Belanja Daerah 2016 -2020

NO URUT	BELANJA	PROPORSI					RATA-RATA PROPORSI
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**						
	Belanja Pegawai	72,76	67,63	64,88	64,57	60,60	66,09
	Belanja Hibah	0,11	0,30	0,43	0,28	6,50	1,52
	Belanja Bantuan Sosial	0,33	0,15	0,11	0,40	0,16	0,23
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PemerintahanDesa	26,80	31,92	34,56	34,75	32,15	32,04
	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,02	0,00	0,59	0,12
	BELANJA LANGSUNG						
	Belanja Pegawai	10,76	13,19	17,07	15,56	17,30	14,78
	Belanja Barang dan Jasa	40,12	45,46	45,69	40,24	58,93	46,09
	Belanja Modal	49,12	41,35	37,23	44,19	23,77	39,13

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel 3.10
Rata–Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2016 –2020

No Urut	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**577.751.167.079,87**	**572.714.349.988,00**	**594.812.858.352,00**	**608.131.023.512,00**	**615.284.804.167,00**	1,60
	Belanja Pegawai	420.369.352.360,00	387.311.767.223,00	385.894.536.015,00	392.662.488.242,00	372.860.364.466,00	-2,88
	Belanja Hibah	650.000.000,00	1.710.000.000,00	2.550.000.000,00	1.724.171.340,00	39.985.828.660,00	599,74
	Belanja Bantuan Sosial	1.881.245.646,00	885.112.500,00	677.000.000,00	2.415.000.000,00	1.000.000.000,00	30,42
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	154.850.569.073,87	182.807.470.265,00	205.586.323.337,00	211.329.363.930,00	197.798.442.541,00	6,73
	Belanja Tidak Terduga			104.999.000,00	-	3.640.168.500,00	
	BELANJA LANGSUNG	**369.964.753.263,00**	**371.853.349.185,80**	**359.962.112.593,83**	**475.704.448.552,00**	399.448.160.598,00	3,36
	Belanja Pegawai	39.819.324.957,00	49.055.839.820,00	61.451.859.607,00	74.042.796.311,00	69.106.800.371,00	15,57
	Belanja Barang dan Jasa	148.415.477.850,00	169.046.183.714,80	164.484.003.032,83	191.446.076.225,00	235.400.306.571,00	12,64
	Belanja Modal	181.729.950.456,00	153.751.325.651,00	134.026.249.954,00	210.215.576.016,00	94.941.053.656,00	-6,55

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (a/b) x 100%
1	Tahun 2016	420.369.352.360,00	947.715.920.342,87	44,35
2	Tahun 2017	387.311.767.223,00	944.567.699.173,80	41,00
3	Tahun 2018	385.894.536.015,00	954.774.970.945,83	40,41
4	Tahun 2019	392.662.488.242,00	1.083.835.472.064,00	36,22
5	Tahun 2020	372.869.374.460.00	1.013.732.964.766.00	36,78

Sumber :Badan Keuangan dan Aset Daerah, diolah

Tabel – tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan anggaran belanja selama periode yang direncanakan. Setelah mengetahui perilaku belanja, perlu dilakukan analisis belanja periodic dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup deficit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3.12
Defisit Riil Anggaran Kabupaten TTU Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	918.557.400.998,73	1.009.891.096.663,69	975.946.066.550,30	1.192.999.590.550,96	975442034092
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	947.715.920.342,87	944.567.699.173,80	954.774.970.945,83	1.083.835.472.064,00	1.083.835.472.064,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.000.000.000,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0	0
	DEFISIT RIIL	(45.158.519.344,14)	30.323.397.489,89	(13.828.904.395,53)	109.164.118.486,96	(108.393.437.971,75)

Sumber : Badan Keuangan Daerah, diolah

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Kabupaten TTU Tahun 2016-2020 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Kabupaten TTU
Tahun 2016-2020

KODE REK.	URAIAN	REALISASI TA.2016	REALISASI TA.2017	REALISASI TA.2018	REALISASI TA.2019	REALISASI TA.2020
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.1.	**SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**	**127.755.721.960,48**	**86.850.980.200,78**	**117.209.933.095,00**	**138.367.325.182,13**	**184.531.443.674,09**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2020.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung meningkat, pada tahun 2016 pembiayaan daerah sebesar Rp. 127.755.721.960,00 meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp.184.531.443.674,09. Peningkatan pembiayaan daerah tersebut merupakan implikasi dari selisih Jumlah Pendapatan daerah dengan belanja daerah. Untuk menutupi selisih tersebut, maka dilakukan kebijakan menggunakan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada tahun 2020 telah ditetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pelaksanaan PSBB sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 berdampak cukup parah pada sector perekonomian. Sehubungan hal tersebut dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah masih mempertimbangkan dampak atas Covid-19.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.116.128.118.156,14,- dan di akhir periode RPJMD pada tahun 2026 menjadi Rp. 1.303.152.715.751,25,- Dari tiga komponen pendapatan daerah diproyeksikan naik setiap tahun hanya 2 (dua) komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan 10 persen pada tahun 2022 dan meningkat 2,5% pertahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, Dana perimbangan atau dana transfer pemerintah pusat diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 3,5%. DAU diproyeksikan naik dengan asumsi adanya kenaikan jumlah ASN melalui pengadaan CPNS dan asumsi kenaikan

gaji ASN sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diproyeksikan. Secara rinci Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.14.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026

Kode	Uraian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,035,851,226,998.00**	**1,116,128,118,156.14**	**1,607,440,055,597.00**	**1,189,423,492,610.35**	**1,242,742,407,968.90**	**1,303,152,715,751.25**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**63,713,279,488.00**	**73,204,069,835.84**	**82,354,578,565.32**	**94,707,765,350.12**	**111,281,624,286.39**	**133,537,949,143.67**
4.1.01	Pajak Daerah	9,153,700,086.00	12,271,170,782.26	13,805,067,130.04	15,875,827,199.55	18,654,096,959.47	22,384,916,351.37
4.1.02	Retribusi Daerah	4,628,985,564.00	7,285,500,968.33	8,196,188,589.37	9,425,616,877.78	11,075,099,831.39	13,290,119,797.67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,600,000,000.00	19,125,000,000.00	21,515,625,000.00	24,742,968,750.00	29,072,988,281.25	34,887,585,937.50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31,330,593,838.00	34,522,398,085.25	38,837,697,845.90	44,663,352,522.79	52,479,439,214.28	62,975,327,057.13
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**927,908,412,510.00**	**1,005,267,048,320.30**	**1,487,428,477,031.68**	**1,057,058,727,260.23**	**1,093,803,783,682.51**	**1,131,957,766,607.58**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904,276,687,000.00	980,926,371,045.00	1,462,722,689,597.25	1,031,858,824,077.11	1,067,973,882,919.81	1,105,352,968,822.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,631,725,510.00	24,340,677,275.30	24,705,787,434.43	25,199,903,183.12	25,829,900,762.70	26,604,797,785.58
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**44,229,535,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	6,572,535,000.00	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat						
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00

Sumber: BKADKab. TTU dan Olahan Tim,2021

Untuk proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan dasar perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan meningkat 2,5 persen pertahun mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Tahun 2022 PAD diproyeksi sebesar Rp. 73.204.069.835,84,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat 2,5 persen sampai dengan tahun 2026 sebesar Rp. 133.537.949.143,67,-.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur Pendapatan Transfer pada APBD yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022-2026 diproyeksikan naik 3,5% walaupun perkembangan tahun 2016-2020 sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi tahun 2022-2026 diasumsikan 1% walaupun perkembangan tahun 2016-2020 sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Sementara untuk pos Bantuan Keuangan Provinsi tahun 2021-2026 diproyeksikan 1%.

Masih menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dimana Lain-lain Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Hibah tidak diproyeksikan, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tahun 2022-2026 tidak diproyeksikan.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar secara rupiah adalah Dana Transfer pemerintah pusat. Seperti yang terlihat pada table 3.15, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Dana Transfer

pemerintah Pusat. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Menerapkan *E-monitoring* pajak daerah merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak. Tujuan e-Monitoring Pajak Daerah:
   a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
   b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
   c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
   d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
   e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
   f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
3. Pemberian *Reward dan Punishment*
   a. Pemberian *Reward*, seperti:
      - Penganugerahan Bupati Timor Tengah Utara setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
      - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
      - Pemberian stimulusfiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
      - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemkab TTU, seperti Pameran Pembangunan dan Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.
   b. Pemberian *Punishment*, berupa:
      - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar

- Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerja sama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
5. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
6. Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
7. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
8. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi PendapatanDaerah
9. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
11. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Peraturan daerah-peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJN on PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data PAD pada Badan Pendapatan Daerah dengan dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)
18. Optimalisasi manajemen kas daerah degan memanfaatkan *idlecash* dalam bentuk deposito
19. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan asset daerah
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkakt dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak
21. Ekstensifikasi PAD melalui restrukturisasi dan refungsionalisasi perusahaan daerah yang diharapkan mampu menggenjot PAD secara signifikan
22. Pinjaman Daerah dengan memperhitungkan tingkat fisibilitas pengembalian modal dan bunga serta sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah untuk tahun 2022-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.116.128.118.156,14,- dan di akhir periode RPJMD pada tahun 2026 menjadi Rp. 1.253.152.715.751,25,-.Proyeksi belanja daerah Kabupaten Timor tengah Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan perincian sebagai berikut:

   a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 5,00 persen pertahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

   b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 1% per tahun yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan tariff listrik dan kebijakan pemerintah seperti Program Pembangunan Rumah Layak Huni dan Program bantuan Ternak Sapi.

c. Proyeksi belanja hibah dialokasikan rata-rata sebesar 1% pertahun kecuali untuk tahun 2024 dikarenakan ada hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024.

d. Proyeksi belanja bantuan sosial 1% pertahunnya.

2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1%. Namun demikian kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2022, 2023 dan 2024 yaitu pada tahun 2022 pembangunan Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, tahun 2023 pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dan Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.

3) Belanja TakTerduga diproyeksikan naik 1% setiap tahun

Secara rinci Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 20221-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026

Kode Rekening	URAIAN	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**1,133,549,847,281.00**	**1,116,128,118,156.14**	**1,607,440,055,597.00**	**1,189,423,492,610.35**	**1,192,742,407,968.90**	**1,253,152,715,751.25**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**794,212,087,246.00**	**754,861,372,792.50**	**787,606,706,099.56**	**841,859,686,143.89**	**841,702,963,437.77**	**919,462,419,430.23**
5.1.01	Belanja Pegawai	442,184,707,184.00	446,671,686,334.15	465,007,840,077.11	467,186,406,533.57	478,866,066,696.91	490,837,718,364.33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349,165,360,062.00	297,689,686,458.35	311,993,866,022.45	318,988,229,610.32	352,018,736,240.86	417,698,358,960.90
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	1,862,020,000.00	2,000,000,000.00	2,020,000,000.00	47,014,200,000.00	2,060,602,000.00	2,081,208,020.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,585,000,000.00	8,670,850,000.00	8,757,558,500.00	8,845,134,085.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**112,517,014,416.00**	**136,281,258,744.14**	**592,598,008,011.74**	**118,056,111,565.91**	**119,236,672,681.57**	**99,569,496,752.96**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,217,733,187.00	15,596,176,516.68	15,754,158,281.85	15,911,699,864.67	16,070,816,863.31	16,231,525,031.95
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,127,573,533.00	45,684,081,839.06	501,092,839,337.60	25,635,891,205.04	25,892,250,117.09	26,151,172,618.27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71,156,905,714.00	72,935,828,356.85	73,665,186,640.42	74,401,838,506.82	75,145,856,891.89	55,037,772,805.37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,014,801,982.00	2,065,172,031.55	2,085,823,751.87	2,106,681,989.38	2,127,748,809.28	2,149,026,297.37

Kode Rekening	URAIAN	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,200,390,619.00**	**5,200,390,619.00**	**5,252,394,525.19**	**5,304,918,470.44**	**5,357,967,655.15**	**5,411,547,331.70**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,200,390,619.00	5,200,390,619.00	5,252,394,525.19	5,304,918,470.44	5,357,967,655.15	5,411,547,331.70
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**221,620,355,000.00**	**219,785,096,000.50**	**221,982,946,960.51**	**224,202,776,430.11**	**226,444,804,194.41**	**228,709,252,236.36**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221,620,355,000.00	219,785,096,000.50	221,982,946,960.51	224,202,776,430.11	226,444,804,194.41	228,709,252,236.36

Sumber:BKAD Kab. TTU, olahan Tim,2021

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam aspek pembiayaan adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah dan optimalisasi pemanfaatan SILPA untuk membiayai program prioritas, dan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin.

Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam lima tahun ke depan akan di arahkan untuk:

1. Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan
2. Menciptakan pembiayaan anggaran dengan risiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari Dana SILPA
3. Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD

Secara riil, penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SILPA, namun demikian tidak diperkenankan untuk memproyeksi SILPA. Disisi lain, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2025 dan tahun 2026 diakibatkan karena terjadinya Surplus Pendapatan Daerah. Terjadinya Surplus Pendapatan Daerah untuk mengakomodasi penyertaan modal bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang sifatnya menghasilkan pendapatan. Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 s.d 2026

6.0	Pembiayan	Target 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	77,857,529,283.00	-	-	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (6.1.01. s/d 6.1.06.)	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-					

6.0	Pembiayan	Target 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (6.2.01. s/d 6.2.05.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
	Pembiayaan Netto (6.1 - 6.2)	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**(50,000,000,000.00)**	**(50,000,000,000.00)**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)				-		-

Sumber : BKAD Kab. TTU, olahan Tim, 2021

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas Tahun 2022-2026, seperti tercantum pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil Keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (*lima*) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil Keuangan Daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Data kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (*lima*) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah.

Tabel.3.17
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	PENDAPATAN	1,116,128,118,156.14	1,607,440,055,597.00	1,189,423,492,610.35	1,242,742,407,968.90	1,303,152,715,751.25
2	PENCAIRAN DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)					
3	SISA LEBIH RIIL PERHITUNGAN ANGGARAN					
	TOTAL PENERIMAAN	**1,116,128,118,156.14**	**1,607,440,055,597.00**	**1,189,423,492,610.35**	**1,242,742,407,968.90**	**1,303,152,715,751.25**
	DIKURANGI					
4	BELANJA TIDAK LANGSUNG (PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006) AKAN DISESUAIKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020	682,157,172,953.65	702,848,181,562.81	752,379,151,434.12	721,486,999,046.47	735,884,860,037.39
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN	**433,970,945,202.49**	**904,591,874,034.19**	**437,044,341,176.23**	**471,255,408,922.43**	**517,267,855,713.86**

Sumber : Olahan Tim, 2021

Dari Tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk 5 Tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD 2021- 2026, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2022 sebesar Rp. 433,970,945,202.49,-
2. Proyeksi Tahun 2023 sebesar Rp. 904,591,874,034.19,-
3. Proyeksi Tahun 2024 sebesar Rp. 437,044,341,176.23,-
4. Proyeksi Tahun 2025 sebesar Rp. 471,255,408,922.43,-
5. Proyeksi Tahun 2026 sebesar Rp. 517,267,855,713.86,-

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah untuk selama 5 (*lima*) tahun ke depan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (*lima*) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.17. Dari rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berupa total penerimaan/pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja Operasi dan belanja Modal dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas sebagaimana Tabel 3.18. sebagai berikut :

Tabel 3.18.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN	433,970,945,202.49	904,591,874,034.19	437,044,341,176.23	471,255,408,922.43	517,267,855,713.86
	PRIORITAS I	315,619,055,367.73	787,054,569,930.42	304,064,063,045.39	317,712,406,747.25	335,938,419,313.71
	PRIORITAS II	118,351,889,834.76	117,537,304,103.77	132,980,278,130.84	153,543,002,175.18	181,329,436,400.15

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Berdasarkan gambaran umum kondisi Kabupaten Timor Tengah Utara dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, serta gambaran pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun pada periode 2016-2021, terdapat aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun demikian masih terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan serta program secara terencana, terukur, sinergis, serta berkelanjutan (*sustainable*).

Agar berbagai program pembangunan yang dirumuskan menjadi lebih efektif dan optimal dalam mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, salah satu tahapan yang dilakukan adalah identifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2021-2026

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah adalah selisih (*gap*) antara kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan yang telah direncanakan maupun yang menjadi target dan terukur secara nasional, serta antara kondisi riil pada saat perencanaan disusun terhadap apa yang ingin dicapai di masa mendatang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu, analisis isu strategis untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan pembangunan dengan menentukan 4 (empat) strategi pokok yaitu: (1) Mengoptimalkan kekuatan agar meraih peluang; (2) Menggunakan kekuatan untuk mencegah ancaman;(3) Mengurangi kelemahan untuk meraih peluang; dan (4) Mengurangi kelemahan untuk mencegah ancaman.

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah Kabupaten TTU adalah Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats), yaitu* dengan mengidentifikasi berbagai faktor internal dan faktor

eksternal dalam pembangunan daerah yang mempengaruhi potensi dan daya saing pembangunan secara sistematis dan sesuai (*match*) diantara faktor tersebut untuk merumuskan strategi pembangunan ke depannya. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu *input* bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih untuk 2021-2026

Analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi danjuga kondisi yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan uraian tentang gambaran daerah. Analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan dan dikelompokkan sesuai kontribusi masing-masing. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel.4.1.

Faktor-Faktor Analisis SWOT

No	FAKTOR	URAIAN
1	**S = Strength (Kekuatan)**	Strenght (S) adalah analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi saat ini. Organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaingnya.
2	**W = Weaknesses (Kelemahan)**	Weaknesses (W) yaitu analisi kelemahan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi saat ini atau cara menganalisis kelemahan di dalam sebuah organisasiyang menjadi kendala yang serius dalam kemajuan suatu organisasi.
3	**O = Opportunities (Peluang)**	Opportunity (O), yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar suatu organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
4	**T=Threats (Hambatan)**	Threats (T) yaitu analisis ancaman ,cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan, yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera di atasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik di masa sekarang maupun

No	FAKTOR	URAIAN
		masa yang akan datang.

Analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai factor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis ini bermanfaat dalam penyusunan strategi pembangunan daerah.

Tabel 4.2.
Analisis SWOT dalam Indentifikasi Permasalahan Pembangunan di Kabupaten TTU

A. Faktor Internal

No	Faktor Internal	Uraian	
1	**Kekuatan**		Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di kawasan strategis pengembangan perekonomian Nusa Tenggara Timur yaitu berada di tengah-tengah pulau Timor
			Memiliki Kawasan pantai utara yang merupakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang akan dikembangkan secara terpadu dekat dengan pelabuhan Sehingga memudahkan pengiriman bahan baku ke Pulau Jawa.
			Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah pertanian
			Di Kabupaten Timor Tengah Utara tersedia lahan pertanian/ perkebunan dan lahan pertambakan yang dapat dioptimalkan
			Potensi hasil kerajinan dan UMKM di Kabupaten Timor Tengah Utara sangat beragam, terutama pengolahan jamu, kuliner dan kerajinan lainnya. Industri kecil kerajinan dan UMKM memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat.
			Sistem sosial budaya masyarakat Timor Tengah Utara yang kondusif dan toleran mendukung perkembangan dunia usaha yang sedang tumbuh dan dapat menerima para pendatang yang beragam budaya dan suku bangsa.

No	Faktor Internal	Uraian
2	**Kelemahan**	Jumlah kelompok usia produktif (15– 54 tahun) yang menganggur masih cukup tinggi. Rata-rata pendidikan para pencari kerja masih rendah (lulus SD/SMP)
		Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi 22,28%. Kelompok masyarakat miskin antara lain buruh tani, buruh nelayan dan penganggur. Kelompok tersebut berpendidikan rendah, keterampilan terbatas dan kurang memilik peralatan usaha dan lahan pertanian serta akses permodalan usaha,
		Potensi tenaga kerja usia produktif (15–64 tahun) yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha masih cukup besar.
		Dalam pembangunan perkoperasian dan lembaga keuangan mikro belum optimal. Hal ini diketahui dari besarnya koperasi aktif baru 64,3% pada tahun 2020 dan LKM belum merata di semua wilayah.

B. Faktor-Faktor Eksternal

No	Faktor Eksternal	Uraian
1	**Peluang**	Fasilitasi pemerintah pusat dalam pelayanan perizinan usaha dengan sistem OSS dan pelayanan perizinan satu pintu telah dapat meningkatkan penanaman modal di NTT, termasuk Kabupaten TTU.
		Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan pinjaman daerah dari pihak ke tiga untuk mendapatkan dana pembangunan daerah selain dari bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi.
		Pemerintah daerah dapat membuka peluang bagi pengembangan perekonomian daerah, melalui kerjasama

No	Faktor Eksternal	Uraian
		antar pemerintah kabupaten/kota, kerjasama dengan dunia usaha dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain inovasi daerah dan penelitian dan pengembangan Iptek guna mendorong pemanfaatan potensi daerah bagi kesejahteraan rakyat.
		Perkembangan inovasi dan kreativitas daerah di era otonomi daerah memberikan peluang bagi perkembangan unggulan daerah, antara lain Pertanian, pariwisata dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah.
2	**Tantangan**	Perkembangan otonomi daerah di era globalisasi telah menjadikan masing- masing pemerintah daerah harus bersaing dalam membangun perekonomian daerah, menarik investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
		Tuntutan masyarakat dan kalangan dunia usaha tentang pelayanan publik yang mudah dan cepat semakin meningkat. Hal ini menjadikan masing- masing perangkat daerah harus melakukan inovasi baru.
		Terjadi ketertinggalan perkembangan pembangunan perdesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan sehingga perkembangan perkotaan lebih cepat dibandingkan perdesaan. Hal ini dikatahui dari penduduk miskin di perdesaan lebih banyak daripada perkotaan.
		Keterwakilan perempuan di parlemen masih relatif rendah
		Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diketahui rata-rata lama sekolah belum mencapai12 tahun.
		Sumbangan sektor usaha pariwisata dalam pendapatan daerah masih rendah, dibandingkan dengan jumlah potensi wisata bahari, wisata alam dan wisata buatan yang tersedia di

No	Faktor Eksternal	Uraian
		Kabupaten Timor Tengah Utara.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk penentuan program pembangunan Kabupaten TTU yang diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan daerah dan permasalahan yang berkaitan dengan bidang urusan Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud juga berdasarkan hasil kajian Permasalahan yang terdapat pada dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis RPJMD seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Identifikasi keterkaitan permasalahan daerah dan Permasalahan Perangkat Daerah untuk penentuan program pembangunan daerah Kabupaten TTU Tahun 2021 – 2026

NO	MASALAH DAERAH	MASALAH PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1.	Belum optimalnya produksi pertanian unggulan	Produktifitas pertanian unggulan yang rendah (Padi, jagung, Kacang tanah lurik, bawang putih lokal dan porang)	Dinas Pertanian
2.	Belum optimalnya populasi ternak sapi	Populasi ternak sapi yang belum maksimal	Dinas Peternakan
3.	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kecenderungan produksi ikan menurun dan belum tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Dinas Perikanan
4.	Masih rendahnya kunjungan wisata	Infrastruktur pariwisata belum memadai	Disbudpar
5.	Belum tercapainya Skor Pola Pangan Harapan	Masih rendahnya ketersediaan pangan utama	Dinas Pangan
6.	Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Disnakertrans
7.	Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
8.	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Masih rendahnya kepatuhan IMB	Dinas PUPR
9.	Tingginya tingkat pencemaran air	Belum optimalnya sarpras pengolah limbah	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Masih tingginya Angka Melek Huruf	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan	Dinas PKO
11.	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan	Dinas PKO

NO	MASALAH DAERAH	MASALAH PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
12.	Rendahnya Usia Harapan Hidup	Belum terpenuhinya SPM Kesehatan sehingga masih tingginya angka kematian ibu (AKI) AKB dan angka kesakitan	Dinas Kesehatan
13.	Masih tingginya prevalensi stunting	Masih tingginya Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan dan OPD terkait
14.	Masih tingginya rumah tidak layak huni	Belum optimalnya pembangunan rumah layak huni	PRKPP
15.	Belum optimalnya layanan transportasi darat	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten	PUPR
16.	Belum optimalnya cakupan layanan air bersih	Belum optimalnya penyediaan sarpras air bersih	PUPR
17.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal *(Smart governance)*	Belum optimalnya domain Kebijakan, tata kelola dan Layanan SPBE	Kominfotik
18.	Belum optimalnya kualitas layanan publik *(Smart governance)*	Pelayanan publik belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat	Kominfotik dan seluruh urusan
19.	Belum optimalnya implementasi manajemen ASN	Belum optimalnya keterisian jabatan, formasi ASN dan pola pengembangan karier ASN	BKD
20.	Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Konsistensi perencanaan penganggaran masih perlu ditingkatkan	Bapelitbangda dan BKAD
21.	Akuntabilitas keuangan perlu ditingkatkan	Rasio SiLPA masih cukup tinggi	Semua Urusan
22.	Belum optimalnya penerapan zona integritas	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
23	Belum optimalnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam Kota Kefamenanu	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten dan jalan lingkungan dalam kota	PUPR dan PRKPP
24.	Belum optimalnya penanganan drainase dan persampahan dalam Kota Kefamenanu	Masih terbatasnya pembangunan drainase dan sarana persampahan dalam kota	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
25.	Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
26.	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kecenderungan produksi ikan menurun pada Kawasan pantai Utara	Dinas Perikanan
27.	Masih rendahnya kunjungan wisata pada kawasan Pantai Utara	Infrastruktur pariwisata belum memadai pada Destinasi Pariwisata di kawasan Pantai Utara	Disbudpar
		Keterbatasan media promosi pariwisata	
28.	Belum optimalnya pengembagan KTM Ponu	Infrastruktur KTM Ponu belum memadai	Disnakertrans
29.	Belum optimalnya Infrastruktur jalan dan jembatan pada Kawasan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan	Dinas PUPR
30.	Masih rendahnya kunjungan wisata pada kawasan Perbatasan	Infrastruktur pariwisata belum memadai pada Destinasi Pariwisata di kawasan Perbatasan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Keterbatasan media promosi pariwisata	

4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dalam suatu

periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan tersebut tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Gambaran permasalahan pada urusan pemerintahan dengan capaian indikator kinerja pembangunan sampai dengan tahun 2020 seperti diuraikan dibawah ini:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.

a. Belum optimalnya angka capaian APM jenjang Pendidikan baik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/sederajat maupun APM SMP/sederajat. Data tahun 2020 capaian AMP PAUD sebesar 92,60%, SD/sederajat sebesar 98,54% dan SMP/sederajat sebesar 98,25%. Angka tersebut masih dibawah target SDG;s dan PUS/EFA (Pendidikan Untuk Semua/Education For All) sebesar 100%.

b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik, baik SD maupun SMP.

c. Belum meratanya distribusi tenaga guru PNS pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

d. Masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik di Kabupaten TTU. Saat ini persentase pendidik dengan kualifikasi S1/D4 untuk pendidik PAUD pada tahun 2019 98%, SD/MI sebesar 77,59 dan SMP/MTS sebesar 95,47.

e. Masih kurangnya tenaga pendidik baik SD maupun SMP

f. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018.

2. Kesehatan.

a. Tingginya Angka kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam SDG's bahwa toleransi angka kematian ibu adalah 306 per 100.000, Kelahiran Hidup. Angka kematian Ibu di Kabupaten TTU pada Tahun 2020 131/100.000. Kh, walaupun angka ini masih dibawah target SDG's namun Pemerintah Daerah diharapkan untuk menurunkan angka kematian Ibu menjadi 0%

b. Tingginya Angka Kematian bayi dan Balita (AKB). Pada tahun 2020 AKB sebesar 5,06/1000 Kh. Kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12,79/1000 Kh.
c. Masih tingginya prevalensi *stunting.* Pada Tahun 2020 prevalensi stunting sebesar 26,08, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 42,58%.
d. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan dasar karena belum seluruh puskesmas terakreditasi. Sampai tahun 2020 yang terakreditasi baru… puskesmas dari 26 Puskesmas.
e. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana PMK Nomor 4 Tahun 2019.
f. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
g. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
h. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetis Melitus, Kanker, Jantung).
i. Masih rendahnya masyarakat misikin yang memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.

a. Belum semua jalan kondisinya baik. Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 47,13% atau 416,63 km pada tahun 2020 dari total panjang jalan Kabupaten 884 km.
b. Belum semua Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisinya baik. Persentase DI Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 49.976,82 Ha
c. Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena masih perlu perubahan atau peninjauan kembali pola struktur ruang pada dokumen RTRW.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

a. Rendahnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak (jamban sehat).
b. Belum optimalnya system drainase perkotaan karena banyak saluran drainase yang rusak atau tersumbat serta belum memiliki drainase. Persentase drainase perkotaan baru mencapai 25.111 m pada tahun 2019.

c. Rendahnya persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak.
d. Belum semua rumah tinggal memenuhi syarat rumah sehat.
e. Belum optimalnya bantuan rumah layak huni bagi penduduk sangat miskin. Pada tahun 2020 baru mencapai 31.340 rumah layak huni dari total target sebesar 51.148 Rumah tidak layak huni.
f. Masih rendahnya kawasan perumahan, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas dalam kondisi baik.
g. Belum tersedianya fasilitas pengolah air limbah dan lumpur tinja.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

a. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah.
b. Masih terjadinya kejadian criminal.
c. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.
d. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana.

6. Sosial.

a. Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani.
b. Masih tingginya angka kemiskinan. Persentase angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 22,28%.
c. Belum terintegrasikannya amanat tentang standar pelayanan minimal urusan sosial ke dalam dokumen perencanaan daerah.
d. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada.
e. Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja.

a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2020 TPT Kabupaten TTU sebesar 4,26%.
b. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
d. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.

2. **Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.**
    a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak. Pada tahun 2020 Kasus terhadap perempuan dan anak sebanyak 136 Kasus.
    b. Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak.
    c. Masih belum optimalnya perempuan dalam legislatif.
3. **Pangan.**
    a. Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten TTU. Pada tahun 2020 persentase Pola Pangan Harapan sebesar 89%.
    b. Belum mantapnya ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di Kabupaten TTU. Pada tahun 2020 ketersediaan cadangan pangan utama baru mencapai 22,39%
    c. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan.
4. **Pertanahan.**
    a. Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.(Data tidak tersedia)
    b. Masih adanya konflik pertanahan milik pemerintah daerah
    c. Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.
5. **Lingkungan hidup.**
    a. Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup.
    b. Belum maksimalnya kinerja pengangkutan sampah. Persentase penanganan sampah pada tahun 2020 baru mencapai 28,08%
    c. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.
    d. Belum terpenuhinya penyediaan RTH publik.
    e. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.
    f. Belum optimalnya penanganan tutupan lahan.
    g. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.
6. **Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.**
    a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat dari cakupan penduduk yang memiliki KTP sebanyak 90%, berakte nikah 43,2% dan berakte kelahiran sebanyak 91,65% pada tahun 2020.

7. **Pemberdayaan masyarakat dan desa.**
    a. Belum semua desa memiliki BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian pembentukan BUMDes yang baru mencapai 19 BUMDes yang terbentuk dari 183 Desa.
    b. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu baru mencapai 82%
8. **Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.**
    a. Tingginya*Total Fertility Rate* dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten TTU.
    b. Masih belum optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB. Pada tahun 2020 cakupan peserta KB Aktif baru mencapai 70,45%, walaupun melampaui target RPJMD namun belum sesuai dengan harapan yang diinginkan.
9. **Perhubungan.**
    a. Belum optimalnya Uji Kir Angkutan Umum. Walaupun pada tahun 2020 sdh mencapai 100% namun belum optimal.
    b. Belum tersedianya fasilitas keamanan jalan raya (Rambu jalan) pada ruas jalan Kabupaten.
10. **Komunikasi dan informatika.**
    a. Belum optimalnya capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik
    b. Belum semua desa terlayani telepon universal dan jaringan internet
    c. Belum efektifnyapemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah untuk pelaksanaan e-government.
    d. Rendahnya jumlah, kapasitasdan inovasi SDM pengelola aplikasi pemerintah.
    e. Rendahnya promosi pembangunan daerah (belum optimalnya pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat di kecamatan).
11. **Koperasi, usaha kecil, dan menengah.**
    a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif. Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2020 baru mencapai 64 Unit Koperasi Aktif.
    b. Rendahnya cakupan dukungan manajemen UKM,
    c. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif..

12. Penanaman modal.

a. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Pada tahun 2020 hanya tercatat sebanyak 33 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.293.000.000.000,-
b. Belum optimalnya peran pemerintah dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif
c. Kurangnya promosi potensi kepada calon investor.

13. Kepemudaan dan olahraga.

a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten TTU.
b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlit.
c. Belum optimalnya penyelenggaran event olah raga.

14. Statistik;

a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah
c. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

15. Persandian.

a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten TTU dengan pusat dan provinsi.

16. Kebudayaan.

a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten TTU.
b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.

17. Perpustakaan.

a. Masih kurangnya minat baca di masyarakat.
b. Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung di tahun 2017 sebesar 53.809 menjadi 5.217 ditahun 2020.

18. Kearsipan.

a. Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis dimana pada tahun 2020 baru mencapai 82,35%.
b. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai.

c. Persentase PD yang mengelola arsip secara baku masih rendah.
d. Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan masih terbatas.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan.

a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, dipengaruhi oleh kurangnya sarana perikanan, dan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan mengenai teknik penangkapan ikan yang baik, dan cara budidaya ikan yang baik
b. Kurangnya konsumsi ikan, dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan dan daya beli masyarakat terhadap ikan yang masih rendah.

2. Pariwisata.

a. Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan.
b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
c. Belum optimalnya tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata.
d. Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi.
e. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif.
f. Kurangnya daya tarik wisata TTU, sehingga belum memberikan dampak wisata lain yang ada di sekitarnya.
g. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).

3. Pertanian.

a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, holtikultura, dan perkebunan.
b. Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan
c. Masih terbatasnya jaringan pemasaran produksi pertanian sehingga petani dalam berusaha belum berorientasi pada pasar dan hanya berusaha untuk konsumsi rumah tangga
d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian potensial
e. Masih rendahnya SDM Petani dalam mengadopsi teknologi.

f. Belum optimalnya kontinuitas produksi komoditi pertanian terutama produk unggulan daerah karena pertanian terbesar adalah lahan kering yang berproduksi sekali dalam setahun.
g. Ketersediaan pakan ternak dengan popupasi tidak seimbang.
h. Belum optimalnya tingkat keberhasilan inseminasi buatan (IB)
i. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

4. Perdagangan.

a. Belum tumbuh dan optimalnya pengelolaan sentra-sentra penjualan produk-produk hasil UMKM.
b. Belum ada industry dengan skala besar yang mampu pengolah potensi unggulan sekaligus membuka peluang kerja.
c. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
d. Masih belum optimalnya penataan PKL di Kabupaten TTU
e. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen.

5. Perindustrian.

a. Rendahnya status IKM yang berijin.
b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil.
c. Masih rendahnya daya saing produk industry sehingga belum bias diekspor.
d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

D. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran.
c. Belum validnya data-data pendukung untuk perencanaan pembangunan yang akurat.
d. Masih lemahnya system monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
e. Belum adanya tenaga fungsional perencana.
f. Belum adanya pengembangan inovasi daerah

2. **Keuangan.**
    a. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.
    b. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
    c. Belum tercapainya peningkatan opini BPK dari status WDP ke WTP.
    d. Masih tingginya rasio ketergantungan APBD dari dana transfer pusat.
3. **Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan**
    a. Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi.
    b. Profesionalisme ASN masih belum sesuai harapan
    c. Pengembangan karier pegawai dengan sistem merit belum dilaksanakan sesuai dengan harapan.
    d. Belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai
    e. Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai.
4. **Pengawasan**
    a. Belum optimalnya kapasitas APIP.
    b. Pengawasan kinerja PD belum optimal.
    c. Belum semua temuan BPK ditindak lanjuti sampai tuntas.
5. **Kewilayahan.**
    a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
    b. Belum optimalnya realisasi dana desa.
6. **Sekretariat Daerah**
    a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat.
    b. Belum optimalnya penataan organisasi.
    c. Belum semua unit aktivitas PD telah menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur)
    d. Belum optimalnya penerapan e-government.
7. **Sekretariat Dewan**
    a. Belum optimalnya penyusunan Peraturan Daerah inisiatif

b. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

8. Kesbangpolinmas

a. Masih terjadinya potensi konflik di Masyarakat.

b. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Penelaahan Isu Internasional

a. Sustainable Development Goals (SDGs)

Agenda pembangunan internasional pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tahun 2016-2030 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembahasan mengenai isu SDGs mengemuka sebagai tindak lanjut proposal yang diusulkan oleh Columbia, Guatemala, dan Peru pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Juni 2012, kemudian dikenal dengan KTT Rio+20. Usulan isu SDGs muncul karena adanya berbagai indikasi yang menunjukkan sulitnya mencapai konsensus global atas kompleksitas dua tema besar KTT Rio+20, yaitu *green economy* dan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan yang lebih dikenal sebagai *Institutional Framework for Sustainable Development* (IFSD).

Isu pembangunan global pasca 2015 juga dibahas dalam KTT Rio+20 yang menghasilkan *outcome document* "*The Future We Want*" yang mencantumkan tentang SDGs dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Dokumen tersebut memberikan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan.

Sebagai tindaklanjut hal tersebut, pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat diadakan pertemuan *Sustainable Development Summit* yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari kesepakatan pada tanggal 2 Agustus 2015 untuk pengesahan dokumen SDGs yang mengadopsi dokumen berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*"atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan".

SDGs merupakan agenda pembangunan yang lebih luas dibandingkan agenda MDGs dalam bentuk 12 *illustrative* goals yang memuat sejumlah isu baru seperti lapangan pekerjaan yang layak, ketahanan energi, pangan dan gizi, air dan sanitasi, *good governance* dan institusi yang efektif, *rule of law*, masyarakat yang stabil dan damai, *global enabling*

environment dan *catalyze long term finance.* Esensi tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mengubah kenyataan saat ini menjadi kenyataan hidup yang lebih layak dan bermartabat bagi semua orang tanpa kecuali.

Proposal SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 tujuan dengan 169 target yang melingkupi hal-hal terkait isu pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development.* Isu-isu pokok pembangunan berkelanjutan adalah penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan kota yang berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim dan perlindungan laut dan kemaritiman. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin dunia akan menyatakan komitmennya menyukseskan 3 (tiga) tujuan mulia dalam SDGs pada 2030 yaitu *mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim*. Untuk mencapai 3 (tiga) tujuan mulia tersebut, dirumuskan 17 tujuan SDGs yakni:

1. **Tanpa Kemiskinan:** Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. **Tanpa Kelaparan:** Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
3. **Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan:** Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. **Pendidikan Berkualitas:** Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. **Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. **Air Bersih dan Sanitasi:** Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. **Energi Bersih dan Terjangkau:** Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. **Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak:** Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. **Industri, Inovasi dan Infrastruktur:** Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. **Mengurangi Kesenjangan:** Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. **Keberlanjutan Kota dan Komunitas:** Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan.
12. **Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab:** Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. **Aksi Terhadap Iklim:** Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. **Kehidupan Bawah Laut:** Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. **Kehidupan di Darat:** Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. **Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian:** Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:** Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiapnegara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Timor Tengah Utara, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

c. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas- batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai- nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

d. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak signifikan terhadap sebagian besar dunia. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah, menjaga jarak baik secara fisik (physical distancing) maupun sosial (social distancing) bahkan melakukan lockdown (karantina wilayah) untuk menghambat penyebaran virus corona. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Berbagai pembatasan yang dilakukan terhadap masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah sehingga industri dan bisnis sangat terdampak oleh pandemi corona. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah perekonomian dunia yang berkontraksi hebat dan pada tahun 2020 kemungkinan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang minus. Amerika Serikat sebagai raksasa perekonomian dunia pun juga sangat terdampak dengan pandemi ini sehingga akan berdampak juga bagi sebagaian besar perekonomian negara di berbagai belahan dunia. Diperkirakan dampak pandemi ini masih akan terus berlangsung pada tahun- tahun berikutnya.

Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama. Masyarakat dunia pun belajar bahwa kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan. Di samping itu, dengan menurunnya proses produksi di masyarakat maka berdampak menurunnya polusi dan langit pun terlihat biru, kembali cerah sehingga seolah-olah memberikan kesempatan kepada alam untuk melakukan *recovery*.

4.2.2. Penelaahan Isu Strategis RPJMN Tahun 2020-2024

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Isu strategisnya adalah:

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

   Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

   Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat

   Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan olehkualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatkan kualitas UMKM belum optimal.

4. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

   Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2021-2025 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau dibidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan BerdayaSaing

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

   Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat penganguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih

banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

2. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk

   Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.

3. Pemenuhan Layanan Dasar

   Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yangbelum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

4. Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda

   Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

5. Pengentasan Kemiskinan

   Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat.

6. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing

   Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

d. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum OptimalnyaPemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.

4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
6. Rendahnya budaya literasi.
7. Belum optimalnyaperan keluarga.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.
2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
6. Konektivitas Transportasi Jalan.
7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim

1. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

1. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.
2. Pemberantasan korupsi belum optimal.
3. Indeks profesionalisme ASN.
4. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah
5. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
6. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

4.2.3. Penelaahan Isu Strategis RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023

Isu Strategis RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya

2. **Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan yang berkelanjutan**

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65%

pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km2 atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi

komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana social Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik.

Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata- rata Nasional sebesar 70,81

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari "kebiasaan lama" ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana maka perlu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing perangkat daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi Birokrasi juga perlu

menerapkan system e-government untuk mengintegrasikan Perangkat Daerah (PD) dalam satu system secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak apad terstandarisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang tindih antara regulasi-regulais yang memiliki tujaun yang sama.

7. Dampak Covid-19

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT tidak saja disebabkan dampak Covid-19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid-19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relative besar yaitu 46,56% (2019) maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar.

4.2.4. Penelaahan Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten TTU Tahun 2021-2026

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi 21 (dua puluh satu) isu yang kemudian ditapis menjadi isu-isu prioritas. Ke-dua puluh satu isu-isu KLHS RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 4.4
Isu-isu Strategis KLHS RPJMD Kab. TTU
Tahun 2021-2026

No	Isu Strategis	No	Isu Strategis	No	Isu Strategis
1	Ketersediaan air bersih	8	Derajat kesehatan masyarakat	15	Perberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	9	Mitigasi bencana	16	Kebijakan penganggaran pemerintah
3	Alih fungsi lahan	10	Ekonomi kreatif dan investasi daerah	17	Kemandirian desa
4	Ketahanan pangan	11	Perlindungan sosial	18	Kemitraan pembangunan daerah
5	Pemupukan dan rumah layak huni	12	Kebijakan pengelolaan lingkungan	19	Informasi dan telekomunikasi
6	Persampahan dan sanitasi lingkungan	13	Administrasi dan pengendalian penduduk	20	Perlindungan HAM
7	Partisipasi dan kualitas pendidikan	14	Pelayanan publik	21	Inovasi transportasi

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026

Untuk memperoleh isu-isu prioritas dilakukan penyaringan terhadap 21 isu –isu strategis tersebut. Penyaringan dilakukan dengan scoring (skala likert) terhadap 6 kriteria sesuai Pasal 9 Ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 20 Ayat 1 Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017. Tiap kriteria memiliki bobot sesuai keterangan dalam kurung. Ke-enam kriteria tersebut adalah:

1) Karakteristik wilayah (10%)
2) Tingkat pentingnya potensi dampak dan resiko (25%)
3) Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan (15%)
4) Keterkaitan dengan muatan KRP (25%)
5) Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (15%)
6) Hasil KLHS dari KRP wilayah di atasnya dijadikan acuan, dan wilayah tetangga disinkronkan (10%)

Hasil kombinasi skor dan bobot dari 21 isu strategis menghasilkan 9 isu-isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Ketersediaan air bersih
2. Derajat kesehatan masyarakat
3. Ketahanan pangan
4. Penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
5. Permukiman dan perumahan layak huni
6. Persampahan dan sanitasi lingkungan
7. Partisipasi dan kualitas pendidikan
8. Mitigasi bencana
9. Alih fungsi lahan

4.2.5. Penelaahan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tetangga (Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang)

a. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016-2021

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- **Isu Strategis 1 : Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan di Kabupaten Belu terjadi karena masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dengan produktivitas ekonomi yang rendah. Hal tersebut dipicu dengan sektor pertanian yang menampung tenaga kerja berkategori pengangguran terselubung cukup tinggi yaitu sekitar 30 % merupakan tenaga kerja yang tidak mendapat upah. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tenaga kerja terdidik tidak ingin lagi menjadi petani. Mereka berpandangan bahwa sektor pertanian tidak akan mampu meningkatkan pendapatannya. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya adopsi-inovasi paket teknologi pertanian sehingga mengakibatkan produksi dan produktivitas semakin menurun dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten Belu, seperti sektor UMKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah, ataupun penyalur output karena produksi pertanian yang tidak mencapai kapasitas untuk dikomersilkan atau diperdagangkan. Kondisi tersebut, berdampak pada minimnya belanja masyarakat untuk sektor jasa

sehingga memberikan dampak lanjutan terhadap sektor pariwisata menjadi tidak berkembang karena belum optimalnya pengelolaan agrowisata unggulan. Kondisi ini menimbulkan kurangnya penghasilan dan pendapatan masyarakat secara memadai dengan implikasi terhadap gangguan terhadap pembangunan kualitas manusia. Penyebab lain dari tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Belu adalah kurangnya pemenuhan infrastruktur dasar seperti akses jalan, rumah layak huni, dan infrastruktur penunjang perekonomian seperti embung dan irigasi. Faktor pemicu utama disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi.

Walaupun tingkat kemiskinan di Kabupaten Belu cenderung menurun dalam empat tahun terakhir, yaitu sebesar 14,58 % pada tahun 2013 menjadi 15,92 % pada tahun 2017, namun angka ini masih berada di atas 10% merupakan satu hal yang perlu segera ditangani secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan Perangkat Daerah.

Menurut hasil analisis pembangunan daerah di Propinsi NTT (2014), Kabupaten Belu dalam hal pengurangan kemiskinan termasuk dalam kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan berada di bawah rata-rata Propinsi NTT *(Low growth, less pro-poor)*. Hal ini berarti bahwa untuk mendorong percepatan pengurangan kemiskinan perlu meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin serta meningkatkan efektivitas maupun efeisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

- **Isu Strategis 2 : Peningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan**

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah pengelolaan potensi SDA unggulan untuk dikembangkan, terutama pada sektor primer (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan) maupun sektor pariwisata (Wisata budaya, alam, dan religius) yang didukung oleh penanaman modal/investasi

oleh investor. Adapun sektor primer kurang diminati oleh investor luar dan dalam negeri, hal ini lebih dikarenakan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan, kelistrikan dan stabilitas politik daerah serta regulasi masih dirasa kurang mendukung. Pengembangan pada sub sektor pertanian di Kabupaten Belu telah menghasilkan produk unggulan seperti padi, jagung, jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersedian prasarana produksi (industri pengolahan hasil), pasar dan tenaga kerja yang terampil. Padahal pengembangan sektor pertanian akan dapat meningkatkan pendapatan ± 60 % bagi masyarakat Kabupaten Belu. Selain itu, dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang menyediakan input bagi sektor pertanian, ataupun memanfaatkan produk sektor pertanian sebagai input.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu pada tahun 2013 mencapai 6.03% dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5.81% dengan tingkat pendapatan perkapita mencapai Rp. 17,33 Juta,-. Kondisi ini dipengaruhi oleh kontribusi PDRB ADHb pada kategori ekonomi kerakyatan yaitu sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,04 %.

Peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan, di dukung pula dengan letak Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara RDTL sebagai PKSN dapat memberikan daya dongkrak terhadap penyaluran produk unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun aspek distribusinya lebih terbuka peluang perdagangan antar negara, sehingga secara ekonomik dapat dikatakan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat RDTL lebih besar kepada Indonesia (Kabupaten Belu) jika hal ini di dukung oleh kerjasama bilateral ekonomi maupun intensnya pelaksanaan promosi produk unggulan daerah lewat event expo Indonesia –Timor Leste (Indo-Tiles).

Selanjutnya peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menghasilkan berbagai produk unggulan hasil pertanian/perkebunan, hasil peternakan, hasil laut dan perikanan,dan hasil industri kerajinan untuk mendukung program “Tol Laut” sehingga kapal pengangkut dari Indonesia Bagian Barat yang singgah di pelabuhan laut Atapupu sebagai Zona Pelabuhan

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dapat membawa produk -produk dimaksud ke Indonesia Bagian Barat.

- **Isu Strategis 3 : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kemiskinan dan rendahnya produktivitas ekonomi telah berimplikasi pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Belu karena dengan pendapatan tersebut masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik dan kondisi kesehatan masyarakat yang masih minim, sehingga menyebabkan SDM masyarakat masih rendah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu pada tahun 2017 sebesar 61,44% namun masih dikategorikan rendah bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi NTT sebesar 63,73% (seperti pada gambar 4.1).

Gambar 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

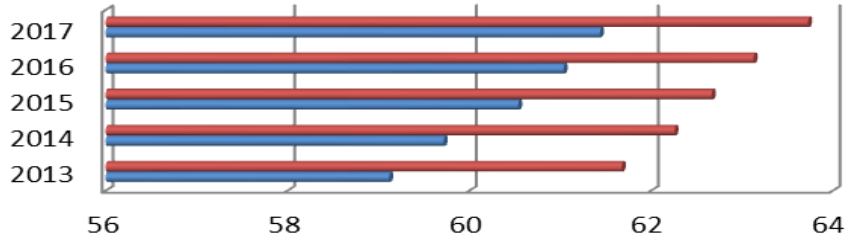

	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73
Kabupaten Belu	59,12	59,72	60,54	61,04	61,44

Rendahnya IPM tersebut karena rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, masih minimnya nuansa akademik pada setiap level pendidikan. Sedangkan aspek kesehatan berkaitan dengan kekurangan prasarana dan sarana kesehatan serta kurangnya tenaga paramedis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan mutu pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak

selanjutnya yang ditimbulkan adalah mampu menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor, bahkan menghasilkan masyarakat yang kritis sehingga keberhasilan pembangunan menjadi lebih terwujud.

Produktivitas tenaga kerja perlu untuk ditingkatkan dengan menurunkan angka pengangguran terbuka melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan dan untuk meningkatkan pendapatan perkapita melalui program pengembangan keahlian/keterampilan baik itu bersifat *life skill* maupun pelatihan berbasis kompotensi dan berbasis komunitas untuk kemampuan daya saing masyarakat yang lebih baik.

Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga serta minimnya penyelenggaraan *event-event* telah memberikan dampak kepada masyarakat terutama para pemuda yakni kurang optimalnya pengembangan potensi. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga serta penyelenggaraan *event-event* bila dikelola dengan tepat sekaligus akan dapat mengurangi permasalahan sosial di Kabupaten Belu dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pengurangan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (fisik, psikis, seksual, penelantaran, penganiayaan dan pemerkosaan) merupakan suatu kebijakan untuk meningkatkan kualitas ketahanan sosial kemasyarakatan.

Revitalisasi peranan lembaga adat dan kearifan lokal yang mendukung berbagai kegiatan pembangunan pedesaan (termasuk sosial kemasyarakatan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup) dengan terus untuk menghidupkan lagi peranan struktur adat *(Na'I, Kapitan, Makleat*, *Dato*) untuk mengatur tata kehidupan sosial yang dapat mendukung pembangunan wilayah lewat berbagai kegiatan pemberdayaan.

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat, terutama dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memberikan implikasi persaingan tenaga kerja. Kabupaten Belu sebagai kota yang berada di pintu gerbang RI dan RDTL sudah selayaknya mempersiapkan kualitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal melalui pendidikan, baik formal maupun informal, serta sertifikasi kompetensi sesuai dengan *benchmark* yang dimiliki. Sistem informasi pekerja yang baik juga perlu menjadi perhatian bersama karena sejatinya dengan data yang baik, perencanaan, implementasi, dan evaluasi ketenagakerjaan akan lebih mudah dijalankan.

- **Isu Strategis 4 : Peningkatan Infrastruktur Wilayah**

Prasarana dan sarana transportasi antar wilayah di Kabupaten Belu belum tersedia secara memadai, sehingga akses masyarakat antar kota dengan desa atau sebaliknya kurang sinergis. Hal tersebut, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *Multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi akan dapat menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Belu. Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum menjangkau seluruh rumah tangga. Selain itu, minimnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengakses informasi publik secara baik. Fokus pembangunan infrastruktur wilayah diarahkan dalam upaya untuk peningkatan aksesibilitas daerah antara lain:

1) Penyediaan dan perbaikan jaringan jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan barang dan jasa;
2) Penyediaan ruas-ruas jalan akses ke ibukota Kecamatan;
3) Pengembangan Bandara Udara Haliwen (A.A Bere Tallo) dan Pelabuhan Laut Atapupu;
4) Memperluas cakupan infrastruktur air minum untuk pelayanan air bersih di perkotaan Atambua dan pedesaan;
5) Memperluas cakupan pelayanan listrik bagi masyarakat dengan pembiayaan PLTS atau energi baru terbarukan ;
6) Pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB)
7) Pengembangan Perumahan layak huni dan lingkungan sehat
8) Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

- **Isu Strategis 5 : Pembangunan Kawasan Perbatasan**

Semakin meningkatnya pelintas batas *illegal* dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan merupakan permasalahan

tersendiri bagi Kabupaten Belu di samping permasalahan-permasalahan yang kompleks lainnya. Kualitas sumber daya manusia masyarakat di daerah perbatasan masih rendah di samping sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal.

Fokus pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Belu dibagi ke dalam 5 (lima) Lokasi Prioritas (Lokpri) yaitu :

(1) Pengembangan kawasan peruntukan budidaya tanaman pangan: Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Nanaet Duabesi, Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur;

(2) Pengembangan kawasan peruntukan budidaya hortikultura, perkebunan dan peternakan : Kecamatan Raihat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Lamaknen Selatan, Lasiolat, Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;

(3) Pengembangan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan; Kecamatan Lamaknen (Benteng Mekes) sebagai obyek wisata unggulan;

(4) Pengembangan Bandara Udara A.A. Bere Tallo-Haliwen sebagai bandara udara umum (bandar udara pengumpul) dengan skala pelayanan tersier di Kecamatan Kota Atambua; serta pelabuhan laut Atapupu sebagai pelabuhan pengumpan di Kecamatan Kakuluk Mesak;

(5) Pengembangan PKSN Atambua sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri pengolahan, kerajinan dan industri pengolahan jasa hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

- **Isu Strategis 6 : Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup**

Kabupaten Belu memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Selain itu kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan tidak akan mengembalikan lingkungan seperti sedia kala karena keanekaragaman hayati akan berkurang bahkan ada yang punah. Oleh karena itu, kesanggupan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup adalah hal yang penting karena kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga diperlukan komitmen bersama untuk meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan bila terjadi kerusakan,

maka perlu pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem laut masih juga terjadi yang berakibat pada penurunan produksi ikan dan kerusakan terumbu karang seperti pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai.

Dewasa ini lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang seksama dan cermat karena saat ini mulai terancam oleh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang mulai menampakan perubahan yang signifikan seperti perubahan suhu yang drastis, curah hujan, pola angin dan cuaca yang buruk telah mengakibatkan kekeringan dan kekurangan sumber air (terjadinya *el nino* dan *el nina*) dan fenomena pemanasan global, gangguan kemanan pangan dan kesehatan masyarakat. Perubahan iklim ini disebabkan antara lain : (1) Deforestasi dan Degradasi Hutan: Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terjadi di sektor kehutanan sebagian besar bersumber dari deforestasi (konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat *illegal logging*, kebakaran, *over cutting*, perladangan berpindah dan perambahan; (2) Emisi karbon yang berasal dari sampah : pengelolaan sampah yang tidak maksimal juga telah mengakibatkan estetika lingkungan menjadi berkurang dan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat karena sampah menjadi vektor penyakit, disamping itu dapat menyebabkan terjadinya banjir maupun pencemaran terhadap tanah, udara dan air. Oleh karena itu pencegahan degradasi lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian secara serius untuk ditangani di Kabupaten Belu.

- **Isu Strategis 7 : Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik**

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belu, masih terus untuk di tingkatkan walaupun telah ada peningkatan yang signifikan dari aspek tingkat pendidikan aparatur namun budaya kerja dan motivasi diri belum sepenuhnya menggambarkan tingkat pelayanan publik secara maksimal karena aspek politik telah mendominasi daripada aspek taktis operasional. Pelayanan

publik yang kurang optimal yang diindikasikan dengan kurang transparannya arus informasi sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasi adanya praktek tersebut terjadi pada sistim perizinan maupun sistim perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan masih ada praktek lainnya yang mengindikasikan hal dimaksud.

Pelayanan publik di Kabupaten Belu belum dilakukan secara prima yang diakibatkan oleh fungsi lembaga pemerintah yang belum berperan optimal, sehubungan dengan tumpang-tindihnya tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, masih rendahnya sumber daya aparatur mengakibatkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Padahal *good governance* juga diindikasikan dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tugas dan fungsi (Tusi) perangkat daerah urusan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk memperkuat kebijakan pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai salah satu bentuk interaksi antara sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan sistim inovasi produksi sektor primer (pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan) maupun sektor industrial sebagai sumber penggerak kemajuan dan modal utama kemandirian masyarakat belum dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Oleh karena itu ke depannya perlu untuk dibentuk perangkat daerah yang menfokuskan pada bidang penelitian dan pengembangan untuk peningkatan bidang pengembangan inovasi teknologi berbasis lokal maupun rekayasa dan rancang bangun berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka peningkatan daya saing produk unggulan daerah dan budaya inovasi pelayanan publik melalui *Research and Develeopment (R & D)*.

b. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan, Kualitas dan partisipasi Pendidikan :

a. Keterjangkauan : akses dan pembiayaan pendidikan

b. Kualitas Pendidikan : SDM Pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan
c. Partisipasi Pendidikan Masyarakat : peran serta masyarakat bagi keberlanjutan pendidikan dasar dan menengah

2. Jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan :

a. Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita : Kematian Ibu, Bayi dan Balita, gizi Ibu Bayi dan Balita, cakupan imunisasi dan kunjungan ibu hamil.
b. Jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan : Pengobatan gratis bagi masyarakat Malaka non Peserta BPJS dengan menunjukkan KTP Nasional
c. Mutu Pelayanan Kesehatan : SDM Medis dan Para Medis, sarana dan prasarana kesehatan
d. Promosi, Jejaring dan partisipasi masyarakat
e. Penyehatan Lingkungan : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pengendalian penyakit (menular dan non menular)

3. Ketersediaan dan kemampuan infrastruktur wilayah :

a. Kemantapan jembatan dan jalan (jalan kabupaten dan poros desa)
b. Penataan fasilitas social, fasiulitas umum : Jalan Pemukiman
c. Prasarana air bersih dan sanitasi (SPAL, Sampah dan Jamban)
d. Pemeliharaan Irigasi Teknis dan setengah teknis
e. Prasarana telekomunikasi dan informasi
f. Perencanaan Bandara dan pelabuhan laut

4. Ketahanan Pangan : Revolusi Pertanian :

a. Ketersediaan : Produksi, produktivitas pangan, alih fungsi lahan dan teknologi
b. Akses dan distribusi pangan : Jalan produksi, gugang/lumbung pangan dan tata niaga
c. Keragaman/diversifikasi pangan
d. Stabilitas harga pangan, mutu dan keamanan pangan

5. Pengendalian Kependudukan :

a. Distribusi : Sebaran
b. Jumlah : Kelahiran, Kematian, Perpindahan, Pertumbuhan penduduk dan Rasio Sex.

6. Penurunan jumlah penduduk miskin :

a. Pendapatan : Mata Pencaharian

b. Akses terhadap sumber daya : Modal dll

7. **Reformasi Birokrasi :**
   a. Penataan Kelembagaan
   b. Sistem kepegawaian : Kapasitas dan profesionalisme pegawai dan Remunerasi PNS
   c. Pelayanan Publik
   d. Sarana dan prasarana pemerintahan
8. **Peningkatan investasi :**
   a. Komitmen Kepala Daerah
   b. Pelayanan perizinan usaha dan kepastian hokum
   c. Stabilitas wilayah : Keamanan dan Ketertiban serta politik
   d. Promosi dan akses permodalan
   e. Penciptaan sentra-sentra ekonomi
9. **Ketersediaan Energi :**
   a. Akses listrik bagi rumah tangga tidak mampu
   b. Energi terbarukan
10. **Kesempatan dan Daya Saing Ketenagakerjaan :**
    a. Daya saing tenaga kerja : Keterampilan dan produktivitas
    b. Kesempatan kerja : entrepreneur dan pengangguran
11. **Pengelolaan Lingkungan Hidup :**
    a. Ruang Terbuka Hijau : Hutan Kita dan Taman Kecamatan
    b. Perubahan iklim global dan local
    c. Bencana Alam
    d. Konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
12. **Pembinaan dan pengembangan generasi muda :**
    a. Nilai kebangsaaan dan kepemimpinan
    b. Sarana dan prasarana kepemudaan
13. **Pelestarian dan pengembangan seni budaya, olahraga dan pariwisata :**
    a. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya
    b. Destinasi wisata : local etnik
    c. Sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga : Gedung kesenian dan Stadion.

c. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 – 2024

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk misikin di Kabupaten TTS Tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu mencapai 29,89%. Nilai ini berada pada posisi diatas dari Provinsi (21,38%) dan Nasional (10,12%). Permasalahan kemsikinan dapat dilihat dari 4 (empat) komponen bidang yaitu bidang eknomi, pemdidikan, kesehatan dan infrastruktur :

- Pada Bidang Ekonomi terdapat 3.363 penduduk usia produktif (15-60 tahun) yang tidak bekerja pada tahun 2017.
- Bidang Pendidikan terdapat penduduk tidak bersekolah pada usia 7-24 tahun sebanyak 12.281 jiwa (2,66%)
- Bidang kesehatan, penduduk yang memiliki SKTM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak… sedangkan peyandang cacat sebanyak 5.811 jiwa. Rumah tidak memiliki fasilitas tempat BAB (jamban) sebanyak 31.024 rumah tangga.
- Bidang infrastruktur dasar ditunjukkan dengan terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 36.024 unit. Rasio elektrifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan baru mencapai 43,84% (listrik PLN) lebih rendah dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Provinsi NTT sebesar 58,67% (Data Tahun 2016).

2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Kebencanaan

Pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dapat dipertahankan dan lestari. Selain berwawasan lingkungan pembangunan juga harus berwawasan bencana antara lain peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan masih relative rendah dibandingkan Kabupaten Kota di Provinsi NTT. IPM Kabupaten TTS tahun 2017 sebesar 61,08 lebih rendah dari IPM Provinsi NTT yaitu 63,13 dan Nasional 70, 81. Selain IPM juga dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Timor Tengah

Selatan masih relative rendah dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. PDRB kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 sebesar 6.173.789,00 (jutaan rupiah) lebih rendah dari PDRB Provinsi NTT sebesar 84.172,64 (Jutaan rupiah).

4. **Tata Kelolah Pemerintahan yang Baik dan Reformasi Birokrasi**

   Belum secara keseluruhan perangkat Daerah menerapkan system *e-government* dan belum optimalnya pelayanan serta efisiensi Birokrasi, transparansi dan akuntabel serta belum diterapkan reward dan punishment dan belum berorientasi pada kinerja.

5. **Perluasan Kesempatan Kerja**

   Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2014-2018 berfluktuatif. Tertinggi adalah pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 7.389 orang atau 1,61%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan pengendalian dari sisi *supply* dan *demand* Pengendalian angkatan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi permasalahan sendiri, sementara itu perluasan lapangan kerja dapat ditingkatkan dengan mendorong sector usaha padat karya dan UMKM sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan laju pengiriman tenaga kerja keluar daerah.

6. **Peningkatan Produk Unggulan Daerah**

   Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan cenderung menurun, namun pertanian masih memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan penyerapan tenaga kerja (Kontribusi sector pertanian pada tahun 2014 sebesar 33,67% dan pada tahun 2018 sebesar 30,23%). Menurunnya kontribusi sector pertanian karena banyaknya tenaga kerja produktif yang tidak berminat pada sector pertanian. Penyebanya adalah sector ini tidak memberikan pendapatan yang mencukupi kebutuhan.

7. **Gender dan kekerasan terhadap anak serta perempuan**

   Masih terjadinya ketimpangan gender dan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang berdampak pada tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, begitu pula peran serta perempuan dalam pembangunan masih terbatas.

8. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

   Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten TTS masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari usia harapan hidup, masih tingginya penyakit menular, rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya kasus kematian ibu dan balita serta tingginya angka stunting (52,54%). Usia Harapan Hidup Kabupaten TTS tahun 2018 baru mencapai 65,65 tahun berada di bawah provinsi NTT sebesar 66,07 tahun dan nasional 70,09 tahun. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk yang tinggi menyebabkan tingkat penularan penyakit seperti TB dan HIV/AIDS. Sedangkan rendahnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menyebabkan tingginya kasus muntaber dan diare. Kasus kematian bayi disebabkan oleh kasus afeksia Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan infeksi penyakit lainnya.

9. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

   Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pemerataan pelayanan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, keterjangkauan pelayanan pendidikan, kualitas pendidikan serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan non formal serta PAUD. Kondisi ini ditunjukkan oleh masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Jumlah angka putus sekolah tahun 2018 masih sangat tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu angka putus sekolah SD/MI sebanyak 335 siswa dan SMP/MTs sebanyak 848 siswa. Selain angka putus sekolah yang masih tinggi juga masih rendahnya Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan dasar baik SD/MI maupun SMP/MTs/Paket B. Data tahun 2017 APM SD/MI/Paket A sebesar 98,97 % sedangkan APM SMP/MTs/Paket B sederajat baru mencapai 67,81%. Angka tersebut masih dibawah target SDG's dan juga PUS/EFA (Pendidikan Untuk Semua/*Education For All*) sebesar 100% .

10. **Pengembangan Pariwisata**

    Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata seperti rendahnya aksesibilitas, amenitas, atraksi, aktivitas, kualitas, kuantitas sarana dan prasarana destinasi pariwisata serta kurangnya promosi, menyebabkan rendahnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan pada berbagai lokasi wisata. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata baru mencapai 56.183 orang dengan lama tinggal berkisar antara 1 sampai 2 hari.

11. **Peningkatan Aksesibilitas, Konektivitas, Kontinuitas terhadap infrastruktur Dasar dan Energi.**

    Rendahnya akses konektiviyas dan kontinuitas terhadap infrastruktur dasar merupakan salah satu pemicu tingginya angka kemsikinan. Persentase rumah layak huni yang masih rendah, belum terpenuhinya kebutuhan air bersih, rendahnya rasio elektrifikasi dan persentase jalan dalam kondisi baik belum optimal.

d. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019 – 2024

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Kupang Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan**

   Sampai tahun 2017 penduduk miskin Kabupaten Kupang berjumlah 85.403 jiwa atau sebesar 22.91% dari penduduk yang ada. Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Kupang berada pada angka 325667 rupiah, masih berada dibawah garis kemiskinan Provinsi NTT yang berada dikisaran 343396 rupiah dan garis kemiskinan nasional yang berada diangka 401222 rupiah. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS Kabupaten Kupang pada tahun 2018, terdapat 12,47 persen rumah tangga yang masuk dalam kelompok pengeluaran dibawah 300000 rupiah dan yang berada diantara 300000-499999 rupiah sebanyak 28,89 persen. Dengan demikian, pada tahun 2017, rumah tangga yang pengeluarannya dibawah GK sebanyak 22,10 persen merupakan kelompok rumah tangga yang mata pencahariannya petani dengan tingkat pendidikannya SD. Meskipun, ketimpangan yang tercatat, menunjukan rumah tangga dengan pengeluaran diatas garis kemiskinan lebih banyak dibanding dengan yang dibawah garis kemiskinan. Namun data yang ada menunjukan bahwa ketimpangan pengeluaran terjadi antara penduduk yang bermukim di wilayah pedesaan, dengan mata pencahariannya 93,45 persen tergantung disektor pertanian dibanding dengan kelompok masyarakat perkotaan yang dominan mata pencahariannya disektor pemerintahan dan jasa. Pemerataan pembangunan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan pengeluaran kapita yang terjadi. Dengan Gini Rasio yang berada pada poin 0.21, Kabupaten Kupang yang ketimpangannya tergolong sedang dituntut untuk melakukan pembangunan secara merata di 24 kecamatan yang ada berdasarkan potensi dan karakter sumber daya manusia yang ada.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM Kabupaten Kupang tahun 2017 berada pada poin 62,79 hanya mengalami peningkatan sebesar 1,72 poin dari tahun 2013 yang sudah mencapai 61,07. Namun jika dicermati, peningkatan IPM Kabupaten Kupang sampai tahun 2017 yang terjadi tidak begitu signifikan. Variabel Angka Harapan Hidup menunjukan penambahan 0,62 tahun atau hanya bertambah kurang lebih 7 bulan dari keadaan tahun 2013. Variabel pendidikan, yang terukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah juga tidak menunjukan adanya pergerakan yang progresif. Sampai tahun2017, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kupang baru mencapai 13,49 tahun atau harapan sekolah hanya sampai pada tingat SMP. Hal yang sama juga terjadi pada Rata-Rata Lama Sekolah masyarakat yang baru mencapai 7,10 tahun atau juga hanya sampai pada jenjang pendidikan SMP. Rendahnya peningkatan variabel kesehatan dan pendidikan, berdampak pada rendahnya pertambahan besaran pengeluaran per kapita sebesar 426 ribu rupiah selama tahun 2013 sampai tahun 2017. Permasalahan dunia dan permasalahan nasional yang semakin komplek menuntut adanya sikap adaptif dan responsif dari Pemerintah Daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Kupang yang rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,71 persen atau terjadinya penambahan sebanyak kurang lebih 12 ribu lebih jiwa setiap tahun, bias dijadikan potensi sekaligus bisa juga menjadi ancaman. Potensinya, setiap tahun rata-rata peningkatan angkatan kerja Kabupaten Kupang sebanyak 209.648 jiwa atau sebesar 6,04 persen penduduk usia kerja Provinsi NTT kaurtal dua tahun 2017 yang mencapai 3.471.856 jiwa. Ancamannya, dari jumlah penduduk usia produktif yang ada kualitas tenaga kerjanya hanya mencapai 3,99 persen berdasarkan rata-rata rasio lulusan sarjana terhadap rata-rata penduduk usia produktif tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Arah pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kupang mesti diarahkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme dan kompetensi yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya agar mampu bersaing dalam era revolusi 4.0.

3. Peningkatan Kinerja Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi dan Pemantapan Infrastruktur Daerah.

Kabupaten Kupang yang memiliki luas lahan produktif 193.122,24 Ha atau mencapai38,12 persen dari total luas wilayah yang mencapai 506.626,68 Ha dan panjang garispantai yang mencapai 442,52 km jika diolah secara maksimal akan menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Dibidang Pertanian, produktivitas komuditas padi tahun 2017 baru mencapai 4,85 Ton/Ha dari luas lahan panen 22743,8 Ha,Produktivitas komuditas jagung tahun 2017 baru mencapai 4,61 Ton/Ha dari luas lahan panen 23851,6 Ha, Produktivitas komuditas umbi-umbian tahun 2017 baru mencapai 13,13 Ton/Ha dari luas lahan panen 4150 Ha, dan Produktivitas komuditas kacang-kacangan tahun 2017 baru mencapai 2,50 Ton/Ha dari luas lahan panen2610,4 Ha. Dibidang perikanan dan kelautan, produktivitas perikanan hanya 96Ton/Tahun, dan industri pengolahan garam yang baru memproduksi 2264Ton/tahun. Seluruh potensi yang ada jika dikembangkan secara optimal melalui pelibatan aktif petani sejak proses produktif sampai penyaluran produk, akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara keseluruhan yang tahun 2017 baru mencapai 4,74 persen. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan juga mampu mendorong terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kupang yang pada tahun 2017 baru mencapai 108.40. Meningkatnya NTP secara simultan akan berdampak pada pengeluaran non pangan per kapita yang tahun 2017 baru mencapai 293.809 rupiah atau hanya sebesar 43,44 persen dari total pengeluaran setahun. Sektor pariwisata juga masih perlu dikembangkan untuk memberikan dukungan ekonomi yang kuat di Kabupaten Kupang. Pengembangan Pariwisata dilakukan sebagai bentuk dukungan mewujudkan ring of beauty yang menjadi proritas Pemerintah Provinsi NTT. Dalam pembangunan Pariwisata, objek wisata yang saatini telah ada akan dibangun dan dikembangkan. Pembangunan objek wisata akan memperhatikan potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dengan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan yang meliputi berbagai kelayakan, baik kelayakan finansialnya, kelayakan sosial ekonomi regional, kelayakan teknis, dan kelayakan lingkungannya. Banyak aspek yang masih perlu dikembangkan demi meningkatkan kemampuan daerah dalam mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa yang merupakan komponen pembangunan ekonomi yang penting. Kabupaten Kupang perlu memiliki akses

transportasi menuju pasar secara lancar, mengingat tahun 2017 rasio panjang jalan dalam kondisi baik (Beraspal) terhadap jumlah kendaraan yang ada baru mencapai 0,13. Sarana prasarana pendukung lainnya juga menjadi penting untuk ditingkatkan, seperti rasio elektrifikasi yang baru mencapai 71,12 persen, dimana rasio ketersediaan daya listriknya baru 0,1 dibanding daya terpasang, dan rumah tangga yang menggunakan air bersih baru mencapai 79,54 persen.

4. Pengembangan dan Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Bentuk Pengendalian Dinamika Sosial

Pembangunan di bidang sosial dan budaya merupakan prasayarat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Melalui upaya pembangunan sosial budaya beberapa indicator dibidang sosial budaya akan terwujud, yaitu meningkatkan usia harapan hidup yang tahun 2017 mencapai 63,49 tahun, menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang sudah mencapai 3,71 persen melalui upaya untuk menekan angka kelahiran kasar menjadi 10 dibanding tahun 2017 yang mencapai 16 orang dan juga melalui upaya, menurunkan angka kematian kasar yang sudah berada pada angka 4 orang. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya melalui penguatan dan akselerasi budaya lokal dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sanggar budaya yang ada, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian daerah yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan daerah Meningkatkan jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial, meningkatkan intensitas sosialisasi ke daerah dan semua pihak terkait dalam pembangunan kesejahteraan sosial, meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan menyusun standardisasi pembangunan dan pelayanan sosial. Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) yang baru mencapai 30,57 persen sebagai upaya menjamin kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan daerah. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda, serta meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga.

5. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kupang dilakukan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pada aspek kelembagaan, evaluasi berkala setiap dua tahun terhadap peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah akan dilakukan untuk memperoleh bentuk organisasi pemerintah daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pada aspek ketatalaksanaan, seluruh perangkat daerah yang ada pada tahun 2020 sudah menjalankan (1) bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government yang terukur dengan terlaksananya Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan tersedianya master plan e-government berbagai aplikasi online yang mempermudah pelayanan publik serta pelayanan administrasi pemerintahan; (2) tata kelola pelayanan publik yang terukur dengan tersedianya standar pelayanan publik, standar operasional prosedur, dan ketersediaan peraturan terkait pelayanan umum. Pada aspek penataan sumber daya manusia aparatur, diperlukan adanya manajemen perubahan (mind and culture set.) yang ditunjukan dengan pelaksanaan standar komptensi jabatan, analisis bebankerja, dan analisis jabatan, serta terintegrasinya semua mekanisme ketatalaksanaan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4.2.6. Penelaahan Isu Strategis RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005-2025

Adapun isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten TTU dalam kurun waktu 20 tahun (RPJPD 2005-2025) sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Kemiskinan

   Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten TTU terjadi karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan memiliki produktivitas ekonomi yang rendah. Hal Pemerintah Kabupaten Timor Tengan Utara RPJPD 2005-2025 tersebut terjadi karena sektor pertanian menampung tenaga kerja dengan kategori pengangguran terselubung cukup tinggi, dimana sekitar 30% merupakan tenaga kerja yang tidak mendapat upah. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tenaga kerja terdidik tidak ingin lagi menjadi petani. Mereka berpandangan bahwa sektor pertanian tidak akan mampu

meningkatkan pendapatannya. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya adopsi-inovasi paket teknologi pertanian sehingga mengakibatkan produksi dan produktivitas semakin menurun dan berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten TTU, seperti sektor UKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah, ataupun penyalur output karena produksi pertanian yang tidak mencapai kapasitas untuk dikomersilkan. Kondisi tersebut, berdampak pada minimnya belanja masyarakat untuk sektor jasa sehingga sektor pariwisata menjadi tidak berkembang. Fenomena lain yang terjadi di Kabupaten TTU adalah terjadinya migrasi tenaga kerja antar sektor di mana masyarakat TTU yang umumnya adalah petani memilih untuk menjadi penambang ataupun bila tetap melakukan usahatani sekalipun, waktu dan perhatian yang dicurahkan untuk usahatani semakin kecil sehingga kemungkinan resiko kegagalan panen semakin tinggi. Padahal di saat bersamaan kondisi alam di Timor menunjukkan tanda-tanda kurang bersahabat dimana curah hujan lebih tinggi dari biasanya sehingga menimbulkan kegagalan penen di sebagian besar wilayah TTU. Kondisi tersebut bila tidak diantisipasi dengan melakukan intensifikasi pertanian yang tepat, dalam jangka Pemerintah Kabupaten Timor Tengan Utara RPJPD 2005-2025 panjang kemungkinan akan terjadi kelangkaan pangan di Kabupaten TTU. Padahal di lain sisi, sektor pertambangan dikuasai oleh pemilik modal yang umumnya berasal dari luar NTT, sedangkan masyarakat TTU akan semakin miskin. Kemiskinan, juga diakibatkan oleh dampak pisahnya Timor Leste yang belum ditangani secara tuntas. Pengungsian masyarakat Timor-Timur akibat kebijakan politik nasional berdampak pada aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Masyarakat Kabupaten TTU harus menampung arus pengungsian di Kabupaten TTU, yang selanjutnya mengakibatkan tingkat pengangguran semakin tinggi karena umumnya masyarakat yang mengungsi memiliki sumberdaya yang terbatas sehingga terjadi perebutan terhadap sumberdaya lahan. Selain itu, terjadinya high cost economic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Kondisi tersebut semakin memiskinkan masyarakat TTU yang pada dasarnya sebagian telah miskin.

2. Lemahnya Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Konversi lahan pertanian yang semakin tinggi untuk dijadikan wilayah pertambangan, wilayah pemukiman, wilayah perdagangan mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian. Asumsinya bahwa masyarakat yang bekerja pada sektor non-pertanian memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibanding masyarakat yang bekerja di sektor pertanian. Kondisi tersebut terjadi karena rendahnya economic rent produk pertanian sehingga pendapatan petanian rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya social rent petani dibanding kelompok masyarakat lain. Akumulasinya mengakibatkan rasa bangga sebagai petani Pemerintah Kabupaten Timor Tengan Utara RPJPD 2005-2025 215 yang semakin rendah. Hal tersebut diperparah oleh tidak adanya penghargaan terhadap nilai jasa lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas di bidang pertanian. Padahal pengembangan sektor pertanian akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat TTU yang bekerja pada sektor pertanian. Selain itu, dapat menggerakkan sektor ekonomi lainnya yang menyediakan input bagi sektor pertanian, ataupun memanfaatkan produk sektor pertanian sebagai input. Kondisi tersebut menjadi sebuah ironi karena sesuai Rencana RTRW Kabupaten TTU 2008-2028, Kota Kefamenanu merupakan pusat agropolitan dengan wilayah hinterland berada pada 17 kecamatan dengan basis komoditi hortikultura, pertanian lahan basah dan lahan kering. Pengembangan wilayah hinterland agropolitan tersebut disesuaikan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pewilayahan komoditas menurut kecamatan sehingga setiap kecamatan dapat memiliki spesialisasi dalam mengembangkan komoditi tertentu. Pewilayahan dapat dilakukan dengan menganalisis sektor basis dari setiap kecamatan dan selanjutnya memetakan data produksi per komoditi dari setiap kecamatan tersebut. Rustiadi dan Pranoto (2007) mengatakan bahwa suatu kawasan agropolitan dicirikan oleh kegiatan masyarakat di suatu kawasan yang didominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi. Selanjutnya dikatakan bahwa penetapan suatu kawasan menjadi kawasan agropolitan didasarkan pada kriteria-kriteria berikut:

3. Rendahnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten TTU telah mencapai 48 IUP yang terdiri atas 16 IUP operasi produksi dan 31 IUP eksplorasi. Apabila

dirata-ratakan per kecamatan, maka pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten TTU terdapat 2 IUP. Padahal 46% wilayah TTU merupakan kawasan hutan, yang berarti bahwa akan terjadi konversi kawasan hutan menjadi kawasan pertambangan. Meskipun sesuai regulasi hanya izin pinjam pakai kawasan hutan, namun bila seluruh IUP telah operasi produksi dan menggunakan alat berat, maka akan melakukan pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila pengelolaan kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan baik sekalipun, tidak akan mengembalikan lingkungan seperti sedia kala karena Pemerintah Kabupaten Timor Tengan Utara RPJPD 2005-2025 keanekaragaman hayati akan berkurang bahkan ada yang punah. Oleh karena itu, kesanggupan mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup penting karena kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sehingga diperlukan komitmen bersama agar meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan dan bila terjadi kerusakan, maka perlu pengelolaan lingkungan yang tepat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk generasi saat ini maupun generasi selanjutnya.

4. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Kemiskinan dan rendahnya produktivitas ekonomi berimplikasi pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten TTU karena dengan pendapatan tersebut masyarakat tidak mampu memperoleh pendidikan formal yang baik sehingga SDM masyarakat masih rendah dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk. Sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTU. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran standar yang ditetapkan PBB untuk mengetahui tingkat kualitas hidup di suatu daerah, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan oleh usia harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, dan dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh pengeluaran per- kapita.Nilai IPM Kabupaten TTU meningkat dari 62,4 pada tahun 2005 menjadi 66,53 pada tahun 2008. Meskipun mengalami peningkatan, namun dalam urutan kabupaten/kota berada pada urutan 402 dari 440 kabupaten/kota se-Indonesia. Rendahnya IPM tersebut karena rendahnya akses terhadap pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, masih minimnya nuansa akademik pada setiap level pendidikan. Sedangkan aspek kesehatan berkaitan dengan permasalahan kekurangan prasarana dan sarana kesehatan serta kurangnya tenaga paramedis. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh rendahnya pola hidup sehat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan mutu pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dampak selanjutnya yang ditimbulkan adalah mampu menggerakkan perekonomian pada berbagai sektor, bahkan menghasilkan massa yang kritis sehingga keberhasilan pembangunan menjadi lebih terwujud.

5. Rendahnya Kualitas Infrastruktur

Kabupaten TTU sebagai kabupaten yang berada di pusat pulau Timor, seharusnya dapat dijangkau dari berbagai tempat yang bertetangga baik darat, laut maupun udara. Namun akses antar daerah umumnya hanya melalui transportasi darat. Sedangkan transportasi laut belum dimanfaatkan, bila ingin menggunakan transportasi laut, masyarakat menggunakan pelabuhan Tenau atau Bolok di Kupang, pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu. Padahal wilayah Alor, Flores Timur, Lembata, Kepulauan Maluku dapat dijangkau melalui pelabuhan Wini. Kondisi yang sama terjadi bila masyarakat ingin menggunakan angkutan udara. Padahal permintaan akan fasilitas penerbagangan udara cukup tinggi. Prasarana dan sarana transportasi antar wilayah di Kabupaten TTU belum tersedia baik sehingga akses masyarakat antar kota-kota, desa-kota atau sebaliknya kurang sinergis. Hal tersebut, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *Multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi akan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian di TTU dan sekitarnya. Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum menjangkau seluruh rumahtangga. Selain itu, minimnya jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi mengakibatkan masyarakat semakin terbelakang karena tidak dapat mengakses informasi publik.

6. Tingkat Kerawanan PanganWilayah

Adanya potensi rawan pangan wilayah di Kabupaten TTU perlu diantisipasi karena:

1) produksi dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah
2) belum optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi pertanian
3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk perikanan, dan
4) diduga terjadi tingginya tingkat pengangguran tertutup di sektor pertanian.

7. Pelanggaran HAM dan Kesetaraan Gender

Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten TTU, seperti kasus pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi terhadap anak. Kasus pembunuhan di polsek Nunpene, kasus pembunuhan kepala SDK Tes, dan kasus pembunuhan lainnya yang belum terungkap menunjukkan bahwa Kabupaten TTU cukup rawan. Kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya mengorbankan wanita dan anak-anak, serta eksploitasi terhadap anak merupakan keadaan yang kerap terjadi di Kabupaten TTU, padahal seharusnya anak-anak dan ibu memperoleh harkat dan martabat yang setara. Selain itu, terjadinya ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan mengakibatkan wanita semakin termarginalkan. Persoalan ini tidak hanya terjadi karena faktor kultur tetapi juga karena faktor governability. Sebuah contoh kecil, belum adanya ruang publik yang cukup tersedia untuk ibu menyusui pada ruang publik menunjukkan kebijakan publik yang belum berperspektif gender.

8. Rendahnya Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang kurang optimal yang diindikasikan dengan kurang transparannya arus informasi sehingga dapat menimbulkan terjadinya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikasi adanya praktek tersebut terjadi pada perizinan tambang, perekrutan tenaga kontak daerah, dan masih ada praktek lainnya yang mengindikasikan hal dimaksud. Kondisi tersebut diakibatkan oleh fungsi lembaga pemerintah yang belum berperan optimal, sehubungan dengan tumpang-tindihnya tugas, pokok dan fungsi. Selain itu, masih rendahnya sumberdaya aparatur mengakibatkan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk meningkatkan kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Padahal good governance juga diindikasikan dengan adanya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

9. Belum berkembangnya kawasan strategis daerah

Setiap kabupaten dapat menentukan kawasan strategis daerah untuk kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wilayah Kabupaten TTU memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan. Keunikan tersebut berkaitan dengan letak kota Kefamenanu yang strategis, Kabupaten TTU berbatasan dengan Timor Leste, wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan yang tersedia. Selain itu, Suaka Alam Pegunungan Mutis dan DAS Benenain sebagaimana ditetapkan dalam PERDA Kabupaten TTU Nomor 19 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten TTU tahun 2008-2028.

a. Lemahnya Penataan Ruang Kota Kefamenanu

Kota Kefamenanu yang berada tepat di tengah pulau Timor, namun belum dikembangkan dengan baik sehingga belum menjadi salah satu kota terkemuka yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik bagi orang untuk transit. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tertatanya aspek fisik perkotaan yang meliputi: pemukiman penduduk, belum optimalnya utilitas lingkungan perkotaan. Aspek sosial yang belum tersentuh adalah adanya polarisasi penduduk berdasarkan etnis sehingga mudah menyulut konflik sosial. Selain itu, perekonomian di kota kefamenanu yang dikuasai oleh etnis tertentu mengakibatkan masyarakat TTU dan juga masyarakat pendatang tidak nyaman untuk transit di Kota Kefamenanu. Kondisi lain yang semakin membuat Kota Kefamenanu kurang nyaman adalah karena tidak adanya ruang publik untuk berekspresi sehingga masyarakat memilih berekspresi pada berbagai tempat sesuai dengan keinginan.

b. Lemahnya Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut

Kabupaten TTU memiliki garis pantai sepanjang 50 Km yang berada di pantai utara. Kawasan pesisir tersebut berbatasan dengan Kabupaten Belu dan wilayah Timor Leste. Kawasan pesisir memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan pertemuan antara ekosistem laut dan ekosistem darat sehingga memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan segala kompleksitas yang ada. Apalagi wilayah pesisir tersebut selalu dilintasi oleh masyarakat Timor Leste baik melalui darat, laut, maupun udara. Namun, belum ada perencanaan secara terpadu yang dapat mengoptimalkan

pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Perencanan terpadu selama ini, dilakukan khusus Wini sebagai Kota Satelit, padahal wilayah pesisir mencakup tiga Kecamatan, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu.

c. Lemahnya Akses di Wilayah Perbatasan

Batas darat wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste secara keseluruhan sepanjang 268,8 km. Perbatasan darat ini terdiri atas batas sektor timur yakni Kabupaten Belu dengan district Covalima (153,8 km) sedangkan sektor barat yang berbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan district Oekusi (115 km) yang merupakan wilayah enclave karena berada di antara wilayah Indonesia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat pada 6 kecamatan yang berbatasan darat, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Ni'lulat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi. Panjang lintas batas antara Kabupaten TTU dengan Timor Leste adalah sepanjang 104,5 km. Adapun batas administratif Timor Leste dengan Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Perbatasan darat tersebut, pada 6 (enam) titik yang ada penyelesian. Sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi Kabupaten TTU adalah terjadinya high costeconomic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya: pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Hal ini selanjutnya menimbulkan black market di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi wilayah perbatasan, baik oleh rumahtangga petani, pedagang di kota maupun pihak lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup maupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan memperdagangkan produknya ke tempat lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian untuk dapat mengatur pergerakan arus (lalulintas) orang dan barang antar negara yang dapat menguntungkan kedua negara tanpa mengabaikan hukum internasional dan budaya lokal.

d. Lemahnya Pengelolaan Keseimbangan Ekosistem

Secara Terpadu Pegunungan Mutis merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai suaka alam karena pegunungan tersebut memiliki keanekaragaman

plasmanutfah dan tersedia sumber air dengan debit besar dan mengairi DAS Benenain, Kabupaten TTS, TTU, Belu dan DAS Noelmina yang mengairi Kabupaten Kupang, dan juga mengairi wilayah District Enclave Oekusi. Apabila Suaka Alam Pegunungan Mutis tidak dikelola secara terpadu maka akan menyebabkan kelimpahan air pada wilayah DAS pada musim hujan yang selanjutnya akan mengakibatkan banjir baik di wilayah hulu, tengah, maupun hilir. Oleh karena itu, pengelolaan secara terpadu terhadap Suaka Alam Mutis perlu dipadukan dengan wilayah DAS Benenain yang melintasi Kabupaten TTS (hulu), Kabupaten TTU (tengah), Kabupaten Belu (hilir).

4.2.7. Isu Strategis RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021– 2026

Berdasarkan analisis permasalahan maka isu strategis Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut ini :

1. **Penanggulangan Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi**

   Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten TTU terjadi karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan memiliki produktivitas ekonomi yang rendah. Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Tahun 2020 berjumlah 259.829 jiwa, dengan penduduk miskin berjumlah 56.980 jiwa atau 22,28 %. Angka kemiskinan tersebut masih berada diatas angka kemiskina Provinsi NTT dan nasional. Kemiskinan terbesar berada pada wilayag pedesaan. Hal yang sama terjadi pada prosentase partumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastic dari tahun 2019 sebesar 4,90% menjadi -0,55%, hal ini disebabkan karena adanya Pandemic Covid-19 yang sedang melanda dunia. Dengan indicator tersebut masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal sehingga Pemerintah daerah akan berupaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2026 menjadi 21,03% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,09-7,04 pada tahun 2026. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten TTU, seperti sektor UKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah, ataupun

penyalur output karena produksi pertanian yang tidak mencapai kapasitas untuk dikomersilkan. Kondisi tersebut, berdampak pada minimnya belanja masyarakat untuk sektor jasa sehingga sektor pariwisata menjadi tidak berkembang. Oleh karena itu dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui Sektor pertanian yang merupakan sektor primodona di kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun.

2. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Salah satu Permasalahan Kabupten Timor tengah Utara yang dapat dengan mudah diidentifikasi adalah kualitas lingkungan yang belum optimal. Kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat setempat.

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 baru mencapai 50%. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kabupaten Timor Tengah Utara.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kabupaten Timor Tengah Utara karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30% dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Timor Tengah Utara.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pembangunan, dapat menjadi beban pembangunan maupun sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Namun demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal, harus secara kontinyu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019 adalah 63,34 dan tahun 2020 meningkat menjadi 63,53. Meskipun IPM Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut berada pada posisi atau urutan ke-14 dari 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur dan masih berada di bawah IPM Provinsi NTT dan nasional. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari :

1) Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di Kabupaten TTU di bidang pendidikan adalah a) Belum optimalnya harapan lama sekolah, pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah pada posisi 13,43 tahun; b) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah berada pada posisi 7,50 tahun;

Harapan lama sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal.

Sejalan dengan kondisi harapan lama sekolah yang belum optimal maka rata-rata lama sekolah pun belum optimal. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara sampai di kelas 7 atau belum lulus SMP. Tentunya kondisi ini pun juga diakibatkan oleh kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang masih harus terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan kebijakan membuka

dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang kompeten.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi covid-19 sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumberdaya kesehatan sedang berfokus ke pandemi, dan karena kekhawatiran masyarakat sehingga penderita penyakit kronis tidak mendapatkan penanganan yang optimal sehingga dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif, termasuk Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara pun telah melaksanakannya, tetapi derajat kesehatan masyarakat belum dapat optimal. Upaya preventif yang telah dilakukan, diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara ini, ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2018 sebesar 66,45 Tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 66,90 tahun. Walaupun UHH kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan namun masih berada dibawah UHH Provinsi NTT dan Nasional. Seharusnya UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita serta prevalensi balita stunting. Angka kesakitan di Kabupaten TTU masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat harus menjadi prioritas

Bila dicermati lebih detail, maka belum optimalnya derajat kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara, dikarenakan beberapa hal, yaitu: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2020 AKI masih bernilai 131,14 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2020 AKB masih bernilai 05,06 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya gizi buruk, tahun 2020 bernilai 0,15 dan d) Prevalensi Balita Stunting berada pada posisi 28,06.

Masih tingginya AKI Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil, pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB juga menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi COVID-19.

Masih rendahnya bantuan kesehatan non BPJS di Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tahun 2020 bantuan bagi masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) baru mencapai 12.671 jiwa dari 56.980 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah akan mengupayakan jaminan dan

keterjangkauan akses pelayanan kesehatan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara non peserta BPJS dengan menunjukkan KTP Nasional.

4. Pemenuhan Perumahan Layak Huni

Penyediaan perumahan layak huni merupakan urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar dimana pemerintah harus mewujudkan perumahan layak huni selain sebagai tempat tinggal juga tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pada tahun 2020 Rasio Rumah layak huni baru mencapai 0,12 %.

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan maupun universal akses yang telah ditetapkan pemerintah salah satu target adalah untuk perwujudan rumah layak huni disertai dengan pemenuhan 100% air minum, 100% akses sanitasi dan 0% kawasan permukiman kumuh.

5. Peningkatan Infrastruktur

Kabupaten TTU sebagai kabupaten yang berada di pusat pulau Timor, seharusnya dapat dijangkau dari berbagai tempat yang bertetangga baik darat, laut maupun udara. Namun akses antar daerah umumnya hanya melalui transportasi darat. Sedangkan transportasi laut belum dimanfaatkan, bila ingin menggunakan transportasi laut, masyarakat menggunakan pelabuhan Tenau atau Bolok di Kupang, pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu. Padahal wilayah Alor, Flores Timur, Lembata, Kepulauan Maluku dapat dijangkau melalui pelabuhan Wini. Kualitas infrastruktur yang belum ditata dengan baik menyebabkan konektifitas antar wilayah terganggu. Masih ditemukannya jalan rusak sepanjang jalan Kabupaten TTU, jalan yang tidak memiliki drainase baik.Pada tahun 2020 Jalan Kabupaten dalam kondisi baik berada pada posisi 35,43%. Hal tersebut menyebabkan akses masyarakat antar kota-kota, desa-kota atau sebaliknya kurang sinergis sehingga, berakibat pada minimnya informasi pasar produk pertanian yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan, maupun sebaliknya produk-produk dari sektor industri yang umumnya dihasilkan oleh masyarakat perkotaan. Padahal *Multiplier effect* dapat ditimbulkan dengan tersedianya konektifitas antar wilayah yang baik akan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian di TTU dan sekitarnya. Permasalahan lain yang berkaitan dengan infrastruktur adalah kurang optimalnya utilitas lingkungan, seperti jaringan air bersih yang belum

menjangkau seluruh rumahtangga. Pada tahun 2020 prosentase penduduk berakses air minum sebesar 83,12% hal ini perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, irigasi yang belum memadai. Pada tahun 2020 presentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 65,74. Oleh karena itu perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten TTU untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan harus dilakukan upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 sebesar 44,54 (C) oleh karena itu harus ditingkatkan demi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,14. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 78,73% (B); Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP sebesar 48,92 (C). Meskipun nilai SAKIP belum menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun oleh karena itu harus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan masih memperoleh Opini BPK dengan kategori WDP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan diharapkan dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola

pemerintahan akan meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

7. Belum berkembangnya kawasan strategis daerah

Setiap kabupaten dapat menentukan kawasan strategis daerah untuk kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wilayah Kabupaten TTU memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan. Keunikan tersebut berkaitan dengan letak kota Kefamenanu yang strategis, Kabupaten TTU berbatasan dengan Timor Leste, wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan yang tersedia sebagaimana ditetapkan dalam PERDA Kabupaten TTU Nomor 19 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten TTU tahun 2008-2028.

a. Lemahnya Penataan Ruang Kota Kefamenanu

Kota Kefamenanu yang berada tepat di tengah pulau Timor dan juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum dikembangkan dengan baik sehingga belum menjadi salah satu kota terkemuka yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik bagi orang untuk transit. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tertatanya aspek fisik perkotaan yang meliputi: pemukiman penduduk, belum optimalnya utilitas lingkungan perkotaan. Kondisi lain yang membuat Kota Kefamenanu kurang nyaman adalah karena tidak adanya ruang publik untuk berekspresi sehingga masyarakat memilih berekspresi pada berbagai tempat sesuai dengan keinginan.

b. Lemahnya Pengembangan Kawasan Pantai Utara

Kabupaten TTU memiliki garis pantai sepanjang 50 Km yang berada di pantai utara. Kawasan pesisir tersebut berbatasan dengan Kabupaten Belu dan wilayah Timor Leste. Kawasan pesisir memiliki kekhasan tersendiri

karena merupakan pertemuan antara ekosistem laut dan ekosistem darat sehingga memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan segala kompleksitas yang ada. Apalagi wilayah pesisir tersebut selalu dilintasi oleh masyarakat Timor Leste baik melalui darat, laut, maupun udara. Namun, belum ada perencanaan secara terpadu yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Perencanan terpadu selama ini, dilakukan khusus Wini sebagai Kota Satelit, padahal wilayah pesisir mencakup tiga Kecamatan, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu.

c. Lemahnya Akses di Wilayah Perbatasan

Batas darat wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste secara keseluruhan sepanjang 268,8 km. Perbatasan darat ini terdiri atas batas sektor timur yakni Kabupaten Belu dengan district Covalima (153,8 km) sedangkan sektor barat yang berbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan district Oekusi (115 km) yang merupakan wilayah enclave karena berada di antara wilayah Indonesia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat pada 6 kecamatan yang berbatasan darat, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Ni'lulat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi. Panjang lintas batas antara Kabupaten TTU dengan Timor Leste adalah sepanjang 104,5 km. Adapun batas administratif Timor Leste dengan Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Perbatasan darat tersebut, pada 6 (enam) titik yang ada penyelesian. Sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi Kabupaten TTU adalah terjadinya high costeconomic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya: pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Hal ini selanjutnya menimbulkan black market di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi wilayah perbatasan, baik oleh rumahtangga petani, pedagang di kota maupun pihak lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup maupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan memperdagangkan produknya ke tempat lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian untuk dapat mengatur pergerakan arus (lalulintas) orang dan barang antar negara yang dapat

menguntungkan kedua negara tanpa mengabaikan hukum internasional dan budaya lokal.

4.2.8. Isu-isu strategis kewilayahan

4.2.8.1. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten TTU Tahun 2008-2028 kawasan strategis daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah adalah :

1. Kawasan yang diprioritaskan untuk kawasan sentra pertanian
2. Kawasan yang diprioritaskan untuk keseimbangan pengembangan wilayah
3. Kawasan yang diprioritaskan untuk keseimbangan ekosistem dan plasmanutfah
4. Kawasan yang diprioritaskan untuk keamanan wilayah perbatasan antar daerah dan antar negara

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud diatas alokasi kegaiatan berada pada :

a. Kawasan strategis sebagai prioritas pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah kawasan sentra pertanian hortikultura (sayur mayur dan buah-buahan) meliputi kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi dan Bikomi Nilulat sedangkan lahan basah dan kering berada di Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Utara, Biboki Tanpah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti Biboki Anleu dan Biboki Moenleu
b. Kawasan strategis untuk pengembangan wilayah adalah kawasan strategis kabupaten yaitu Kota Kefamenanu dan Kota Wini
c. Kawasan strategis untuk pengembangan keseimbangan ekosistem dan plasmanutfah yang berfungsi sebagai suaka alam adalah pegunungan mutis di Kecamatan Mutis dan daerah Aliran Sungai (DAS) Benenain meliputi Kecamatan Biboki Feotleu dan Kecamatan Biboki Utara

d. Kawasan strategis yang termasuk wilayah perbatasan antar daerah dan Negara meliputi 7 (tujuh) Kecamatan. Untuk pengamanan kawasan perbatasan yang diprioritaskan pada daerah sepanjang garis batas Negara yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Musi, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu dan Insana Utara. Untuk teknis kondisi diuraikan dibawah ini :

1. Pengembangan kawasan buffer di wilayah sekitar perbatasan District Oecuse. Rencana pengembangan buffer dengan memberikan batasan wilayah dengan menggunakan tanaman tahunan sebagai buffer Negara dengan lebaran kawasan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yag berlaku
2. Penempatan pos-pos perbatasan dan pengamanan kawasan disesuaikan dengan kondisi wilayah
3. Peningkatan pengembangan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan secara proporsional dengan kondisi lokal.

4.2.8.2. Pengembangan Komoditi Unggulan Kabupaten Timor Tengah Utara

Optimalisasi pengembangan komoditi unggulan Kabupaten Timor Tengah Utara berbasis potensi pengembangan kawasan antara lain :

1. Komoditi pertanian : Padi Lokasi pengembangan di Kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Noemuti, Noemuti Timur, Bikomi Selatan, Biboki Utara, Biboki Moenleu, Biboki Anleu, Insana, Insana Utara dan Biboki tanpah. Jagung lokasi pengembangan di 24 Kecamatan, Bawang Putih Lokal di Kecamatan Miomaffo Barat dan Mutis, Kacang Tanah Lurik lokasi pengembangan di Kecamatan Insana, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Insana Barat, Musi, Miomaffo Timur, Bikomi Utara dan Naibenu, Porang lokasi pengembangan di 24 Kecamatan.
2. Peternakan : Populasi sapi lokasi pengembangan di 24 Kecamatan

4.2.9. Indikator TPB yang Membutuhkan Upaya Tambahan

Bagian ini menganalisis 91 indikator-indikator TPB hasil proyeksi yang membutuhkan upaya tambahan karena terdapat celah negatif antara target dan realisasi. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah menentukan target-target tahunan yang dijadikan sebagai patokan atau bingkai bagi pemerintah daerah dan semua komponen terkait guna menentukan pilihan kebijakan yang paling memungkinkan dalam pencapaian target.

Tabel 4. 5.

Target Pencapaian Indikator TPB Kab. TTU Tahun 2021-2026

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
1	1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,45	7,5	20,96	19,46	17,97	16,47	14,98	13,48	7,5	TPB PRIORITAS DAERAH
2	1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	0,82	22,3	2,97	5,12	7,26	9,41	11,56	13,71	22,3	TPB PRIORITAS DAERAH
3	1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	86,39	100	87,75	89,11	90,47	91,83	93,2	94,56	100	TPB PRIORITAS DAERAH
4	1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	30,87	77,4	35,52	40,18	44,83	49,48	54,14	58,79	77,4	TPB PRIORITAS DAERAH
5	1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	38	158,56	50,06	62,11	74,17	86,22	98,28	110,34	158,56	TPB PRIORITAS DAERAH
6	1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	8,3	87,55	16,22	24,15	32,07	40	47,92	55,85	87,55	TPB PRIORITAS DAERAH
7	1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	132,4	118,6	131,02	129,64	128,26	126,88	125,5	124,12	118,6	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
8	1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	-	0	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
9	2	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	6,99	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
10	2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	24,76	17	23,98	23,21	22,43	21,66	20,88	20,1	17	TPB PRIORITAS DAERAH
11	2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	28,86	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
12	3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	123	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
13	3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	77,6	95	79,34	81,08	82,82	84,56	86,3	88,04	95	TPB PRIORITAS DAERAH
14	3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	95,6	245	110,54	125,48	140,42	155,36	170,3	185,24	245	TPB PRIORITAS DAERAH
15	3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	71,3	5,4	64,71	58,12	51,53	44,94	38,35	31,76	5,4	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
16	3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	16,93	15,4	16,78	16,62	16,47	16,32	16,17	16,01	15,4	TPB PRIORITAS DAERAH
17	3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	7,73	2,28	7,19	6,64	6,1	5,55	5,01	4,46	2,28	TPB PRIORITAS DAERAH
18	3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	31,59	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
19	3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
20	3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
21	3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH
22	4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	22,18	77,2	27,68	33,18	38,69	44,19	49,69	55,19	77,2	TPB PRIORITAS DAERAH
23	4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
24	5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	-	20,48	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
25	5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1	35	4,4	7,8	11,2	14,6	18	21,4	35	TPB NON PRIORITAS DAERAH
26	5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	10	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
27	5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
28	5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
29	6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	86,39	100	87,75	89,11	90,47	91,83	93,2	94,56	100	TPB PRIORITAS DAERAH
30	6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0,222	0,444	0,24	0,27	0,29	0,31	0,33	0,36	0,44	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
31	6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	86,39	100	87,75	89,11	90,47	91,83	93,2	94,56	100	TPB PRIORITAS DAERAH
32	6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	-	100	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
33	6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	5,155	53,62	10	14,85	19,69	24,54	29,39	34,23	53,62	TPB PRIORITAS DAERAH
34	6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	18,6	85,21	25,26	31,92	38,58	45,25	51,91	58,57	85,21	TPB PRIORITAS DAERAH
35	6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
36	6	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	-	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
37	6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
38	6	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Tidak terlaksana	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	TPB PRIORITAS DAERAH
39	8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	43518000	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
40	8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	4,9	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
41	8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	14787217	50000000	18308495	21829774	25351052	28872330	32393609	35914887	50000000	TPB PRIORITAS DAERAH
42	8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
43	8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
44	8	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1,65	8	2,29	2,92	3,56	4,19	4,83	5,46	8	TPB PRIORITAS DAERAH
45	8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	-	20000000	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
46	8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	30,52	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
47	8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	-	51	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
48	9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
49	9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
50	9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
51	9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
52	9	9.4.1*	Rasio Emisi CO_2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	-	0	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
53	9	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
54	10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,45	7	20,91	19,36	17,82	16,27	14,73	13,18	7	TPB NON PRIORITAS DAERAH
55	10	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	0	161	16,1	32,2	48,3	64,4	80,5	96,6	161	TPB NON PRIORITAS DAERAH
56	10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	TPB NON PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
57	10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	0,82	22,3	2,97	5,12	7,26	9,41	11,56	13,71	22,3	TPB NON PRIORITAS DAERAH
58	10	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	-	Meningkat menjadi 87	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
59	11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	29875	57572	32644,7	35414,4	38184,1	40953,8	43723,5	46493,2	57572	TPB PRIORITAS DAERAH
60	11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	27,8	80	33,02	38,24	43,46	48,68	53,9	59,12	80	TPB PRIORITAS DAERAH
61	11	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	4,03	0	3,63	3,22	2,82	2,42	2,02	1,61	0	TPB PRIORITAS DAERAH
62	11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	-	30	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	TPB PRIORITAS DAERAH
63	12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
64	12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	-	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
65	12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	-	20 ton per hari (skala nasional)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
66	14	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	70,5	80	71,45	72,4	73,35	74,3	75,25	76,2	80	TPB NON PRIORITAS DAERAH
67	15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,026478	2,887139	0,31	0,6	0,88	1,17	1,46	1,74	2,89	TPB PRIORITAS DAERAH
68	15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	0,350035	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
69	15	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	TPB PRIORITAS DAERAH
70	15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB PRIORITAS DAERAH
71	16	16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.	4	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
72	16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	9	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
73	16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
74	16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	82,75	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
75	16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	TPB NON PRIORITAS DAERAH
76	16	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota	0	80	8	16	24	32	40	48	80	TPB NON PRIORITAS DAERAH
77	16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	6,666667	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
78	16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	10,92	85	18,33	25,74	33,14	40,55	47,96	55,37	85	TPB NON PRIORITAS DAERAH
79	16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	TPB NON PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
80	16	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota	44,54	45	44,59	44,63	44,68	44,72	44,77	44,82	45	TPB NON PRIORITAS DAERAH
81	16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
82	16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
83	16	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
84	16	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	-	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH
85	16	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	4	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	TPB NON PRIORITAS DAERAH

NO	NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN AKHIR	TARGET CAPAIAN	UT 2021	UT 2022	UT 2023	UT 2024	UT 2025	UT 2026	UT 2030	KET.
86	17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	27,6724	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
87	17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,045	12	1,24	2,44	3,63	4,83	6,02	7,22	12	TPB NON PRIORITAS DAERAH
88	17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5,21	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
89	17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	31,82	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
90	17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	-	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH
91	17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	-	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	TPB NON PRIORITAS DAERAH

Sumber : Dokumen DDDTLH Tahun 2020, dalam Dokumen KLHS RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Amanat di dalam pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Undang- Undang tersebut memberi penegasan bahwa saat ini daerah memiliki kewenangan lebih untuk mengatur daerahnya, tanpa meninggalkan sinergitas dengan program-program pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Disamping mengacu pada regulasi diatas, sistematika pembahasan visi dan misi dalam bab ini juga merujuk pada Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang di inginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun dalam setiap periodenya, visi mempunyai rentang waktu pencapaian selama 5 tahun. Hal ini berarti bahwa visi Kabupaten Timor Tengah Utara yang tercantum dalam RPJMD harus dicapai pada tahun 2026. Tujuan visi untuk mengarahkan dan mendorong semua *stakeholder* (pemerintah dan non pemerintah) agar berkontribusi dalam pencapaiannya. Visi dan misi juga bersifat menjadi inspirasi, arah, dan posisi Kabupaten Timor Tengah Utara di masa depan.

Pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi ,dan program dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 ini tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun juga dilakukan beberapa proses penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu kada). Visi Bupati dan Wakil Bupati menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah: ***Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam***.

"Sejahtera" mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

"Adil" memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. "Adil" juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

"Demokratis" mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

"Mandiri" menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

"Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam" mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

5.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.**

   Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sector pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai

lokomotif yang mampu menggerakkan sector-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup melalui Spirit Paradigma **"DESA SEJAHTERA"**.

2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.**

   Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. **Meningkatkan aksebilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.**

   Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan public yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.**

   Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan system kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(*e-government*). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. **Pengembangan kawasan strategis daerah**

   Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah*(SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasandan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan

daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Pertanian dan sector ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : **Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Meningkatnya produksi potensi pertanian unggulan, peternakan dan perikanan
   b. Meningkatnya kompetensi Koperasi, UKM dan IKM
   c. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata
   d. Terwujudnya kedaulatan dan ketahanan pangan
   e. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas angkatan kerja

   dan tujuan pembangunan : ***Meningkatkan Kelestarian Lingkunga Hidup*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas tutupan lahan
   b. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Air
   c. Terlaksananya Peningkatan Indeks Kualitas Udara
2. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan Rakyat,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Meningkatnya derajat pendidikan.
   b. Meningkatnya derajat kesehatan.

   dan tujuan pembangunan : ***Meningkatkan pembangunan rumah layak huni*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Meningkatnya jumlah rumah layak huni
3. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Meningkatnya kualitas infrastruktur*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Meningkatnya layanan transportasi
   b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih
   c. Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi yang dapat diakses masyarakat.
4. Dalam rangka mencapai misi : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang professional, transparan, akuntabel dan responsive*** dengan sasaran pembangunannya adalah :

a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
c. Meningkatnya kualitas layanan public *(Smart Governance)*
d. Optimalisasi implementasi system pemerintahan berbasis elektronik *(Smart Governance)*
e. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
f. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)

5. Dalam rangka mencapai misi : **Mengembangkan kawasan strategis daerah,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut : ***Meningkatnya pegembangan kawasan strategis daerah*** dengan sasaran pembangunannya adalah :
   a. Meningkatnya pengembangan kota kefamenanu sebagai ibu kota kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
   b. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai utara
   c. Meningkatnya pengembangan kawasan perbatasan

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 5 (lima) tahun kedepan yang dijabarkan pada tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	***Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)***			***-0.55***	***4.0-5.4***	***5.4-5.9***	***5.9-6.4***	***6.4-6.9***	***6.9-7.4***	***6.9-7.4***
			1.1. Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
				Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
			1.2. Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1:13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.23	1.23
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	5:51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.56
				Persentasi Koperasi Aktif (%)	86.49	89.19	91.89	94.59	97.3	100	100

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
			1.3. Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Kunjungan Wisata (%)	24.80	26.70	48:00:00	68:00:00	88:00:00	100	100
			1.4. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	89	91.2	93.4	95.6	97.8	100	100
			1.5. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.33	3.3	3.27	3.25	3.22	3.19	3.19
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	78.13	78.17	78.22	78.25	78.28	78.31	78.31
	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***			***38.33***	***50.66***	***62.99***	***75.32***	***87.65***	***99.98***	***99.98***
			2.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50	55	60	65	70	75	75
			2.2. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	15	16	17	18	19	20	20
			2.3. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	50	51	52	53	54	55	55
			2.4. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	0	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***			***63.53***	***64.04***	***64.74***	***65.44***	***66.14***	***66.84***	***66.84***
			3.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	94.37	95.5	96.63	97.76	98.89	100	100
				Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.5	7.75	8	8.25	8.5	9	9
			3.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	66.9	67.4	67.9	68.4	68.9	69.4	69.4
				Prevalensi Stunting (%)	28.9	23	18	14	12	11	11
	4. Meningkatkan rumah yang layak huni	***Persentase Perumahan yang layak huni (%)***			***0.12***	***0.24***	***0.37***	***0.5***	***0.63***	***0.76***	***0.76***
			4.1. Meningkatnya Rumah Layak Huni	Penambahan rumah layak huni (Unit)	31340	31745	32150	32555	32960	33365	33365
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur	5. Meningkatknya kualitas infrastruktur	***Persentase layanan sarpras***			***54.39***	***63.51***	***72.63***	***81.75***	***90.87***	***100***	***100***
			5.1. Meningkatnya layanan transportasi	persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35.43	36.61	37.78	38.96	40.14	41.32	41.32
			5.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
			5.3. Meningkatnya kapasitasJaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	9.96	10.956	11.952	12.948	13.944	14.94	14.94
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif	6. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	***Indeks Reformasi Birokrasi***			***44.54 (C)***	***51.63 (CC)***	***58.72 (CC)***	***65.81 (B)***	***72.9 (BB)***	***80 (BB)***	***80 (BB)***
			6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
			6.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			6.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
			6.4.Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
			6.5. Meningkatnya kualitas	Indeks Merit Sistem (skor)	2	3	3	3	4	4	4

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
			manajemen ASN								
			6.6. Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5
Mengembangkan kawasan stretegis daerah	7. Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	***Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah***			***21.45***	***28.1***	***35.93***	***43.76***	***51.6***	***59.43***	***59.43***
			7.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang *Sehat Aman Rindang dan Indah* (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	30.145	26.51	32.38	38.25	44.12	50	50
			7.2. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	19.91	20.21	20.51	20.81	21.11	21.41	21.41
				Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	2.76	2.77	2.78	2.79	2.8	2.81	2.81
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1.13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.23	1.23

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
				Kunjungan Wisata pada Kawasan Pantai Utara (%)	12.4	29.92	47.44	64.96	82.48	100	100
				Cakupan pengembangan KTM Ponu (%)	25	40	55	70	85	100	100
			7.3. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam kondisi baik (%)	67.88	74.3	80.72	87.14	93.56	99.98	99.98
				Kunjungan Wisata pada Kawasan Perbatasan (%)	12.4	29.92	47.44	64.96	82.48	100	100

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara pada tahun 2026. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel 5.2

Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan					
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	***Pertumbuhan Ekonomi***				
		1.1. Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Produksi pertanian (Padi, Jagung, kacang tanah lurik, bawang putih lokal, porang dan sapi)	Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Dinas Perikanan
		1.2. Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Pertumbuhan Industri	Dinas Perindag
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	Nilai ekspor perdagangan	Dinas Perindag
			Persentase koperasi aktif	Nilai Modal usaha UMKM dari Koperasi (Rp. Juta)	Dinas Koperasi dan UKM
				Jumlah Koperasi Aktif	
				Jumlah Pra Koperasi	
		1.3. Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.4. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	Skor PPH Konsumsi	Dinas Pangan
				Pertumbuhan ketersediaan pangan	Dinas Pangan
		1.5. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Nakertrans

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
2. Melestarikan Kualitas Lingkungan Hidup	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup***				
		2.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persentase Ruag Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	Persentase baku mutu air	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	Indeks standar pencemar udara	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat					
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***				
		3.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan tenaga pendidik dan kependidikan	Dinas PKO
			Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
		3.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	Persentase capaian SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan dan RSUD Kefamenanu
			Prevalensi Stunting (%)		
4. Meningkatkan perumahan yang layak huni	***Persentase Perumahan yang layak huni (%)***				
		4.1. Meningkatnya Rumah Layak Huni	Penambahan rumah layak huni (Unit)	Persentase Capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Persentase jumlah rumah layak huni	Dinas PRKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur					
5. Meningkatknya kualitas infrastruktur	***Persentase layanan sarpras***				
		5.1. Meningkatnya layanan transportasi	persentase keterhubungan jalan (%)	Persentase Capaian SPM Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang serta Persentase jalan kabupaten dalam keadaan mantap	Dinas PUPR
		5.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	Cakupan layanan air bersih (perpipaan)	Dinas PUPR
		5.3. Meningkatnya kapasitasJaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	Cakupan ketersediaan irigasi	Dinas PUPR
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif					
6. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	***Indeks Reformasi Birokrasi***				
		6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	Persentase hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Bapelitbangda
				Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	
				Nilai SAKIP PD	Semua PD
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Setda
				Indeks LPPD	
				Indeks Pengadaan Barang dan Jasa	
		6.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	BKAD
				Persentase kenaikan PAD	Bapenda dan Perangkat Daerah penerima PAD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
		6.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase Capaian SPM Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan Persentase korban bencana yang ditangani	BPBD
				Indeks pengawasan kearsipan tingkat Kabupaten (ANRI)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Nilai tingka kegemaran membaca masyarakat	
				Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Dinas Dukcapil
				Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Sekretariat DPRD
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Dinas PKO
				Prestasi olahraga tingkat Kabupaten	
				Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Dinas PMD
				Tertib hukum lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Capaian SPM Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan ketertiban umum	Satpol PP
				Kinerja unit pelayanan informasi public	Dinas Kominfotik
				Nilai IKM PD	Semua PD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
				Persentase Capaian SPM Sosial dan Nilai Kepatuhan terhadap Standar pelayanan public sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	Dinas PMPTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, Dinas Lingkungan Hidup Dinas PKO, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, PUPR, PRKPP dan Bapenda
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Indeks domain Kebijakan, Tatakelola dan Layanan SPBE	Semua PD
				Tingkat kematangan data layanan terbuka	Dinas Kominfotik
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem	Indeks profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
		Meningkatnya PD yang membangun zona integritas	Jumlah PD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)	Inspektorat
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	
				Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas	Semua PD
Mengembangkan kawasan stretegis daerah					
7. Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	***Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah***				
		7.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang *Sehat Aman Rindang dan Indah* (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Persentase pemenuhan sarana dan prasaran utilitas umum perkotaan (%)	Cakupan jalan kabupaten, jembatan dan jalan lingkungan serta lampu penerangan dalam kota dalam kondisi mantap (%)	Dinas PUPR dan Dinas PRKPP
				Cakupan layanan pengelolaan persampahan (%)	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase ruamg terbuka hijau (%)	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
		7.2. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	Pertumbuhan nilai produksi perikanan (tangkap dan budidaya) pada Kawasan Pantai Utara	Dinas Perikanan
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	Nilai ekspor perdagangan pada kawasan Pantai Utara	Dinas Perindag
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	Pertumbuhan industri pada Kawasan Pantai Utara	Dinas Perindag
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	Tingkat kunjungan wisata pada Kawasan Pantai Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase pengembangan KTM Ponu	Cakupan pengembangan KTM Ponu	Dinas Nakertrans
		7.3. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	persentase keterhubungan jalan Kabupaten pada Kawasan perbatasan dalam kondisi mantap (%)(%)	Persentase jalan kabupaten dalam keadaan mantap pada Kawasan perbatasan	Dinas PUPR
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada kawasan perbatasan	Tingkat kunjungan wisata pada Kawasan Perbatasan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan adanya rumusan strategi dan arah kebijakan yang tepat, maka pelaksanaan program prioritas pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam lima tahun kedepan diharapkan akan memiliki fokus yang jelas, terarah dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

6.1. Strategi

Strategi pembangunan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berbagai strategi yang disusun menggambarkan kesiapan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*valueadded*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*), strategi dirumuskan berupa pernyataan yang menjelaskan cara mencapai tujuan dan sasaran yang diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk kurun waktu 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan strategi yang akan dikembangkan sebagai langkah taktis dan efektif, untuk menjamin hasil secara maksimal dari pelaksanaan berbagai program pembangunan yang merupakan strategi terpadu yang melibatkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara garis besar, strategi terpadu yang di kembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026 dengan prinsip:

1. Menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah

Keterkaitan visi, misi, tujuan , sasaran dan strategi selengkapnya dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1.

visi, misi, tujuan , sasaran dan Stragegi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2022	2023	2024	2025	2026
MISI I	Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan hidup							
1.1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	1.1.1. Meningkatnya produksi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Peingkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.	Inovasi dan penerapan teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan					
			Penguatan sistem pemasaran					
	1.1.2. Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	Mendorong kemandirian koperasi dan memfasilitasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi, UKM Dan IKM					
			Penguatan Kemitraan Koperasi, UKM dan IKM					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	1.1.3. Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Peningkatan daya tarik pariwisata yang berdaya saing	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dengan Skema 5A (Atraksi, Akomodasi, Aksesibilitas, Ammenity dan Activities)					
			Penguatan Sistem Informasi/ Promosi Wisata					
	1.1.4. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Meningkatkan produksi, memperlancar distribusi dan diversifikasi pangan	Peningkatan ketersediaan pangan					
			Peningkatan keterjangkauan pangan					
			Pengembangan food estate					
	1.1.5. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Memfasilitasi tumbuh kembangnya wirausaha pemula dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK)	Perluasan lapangan pekerjaan					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja					
1.2. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	1.2.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang					
	1.2.2. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas air		Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan					
	1.2.3. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas udara		Menurunkan tingkat pencemaran udara					
	1.2.4. Menrunnya Emisi Gas Rumah Kaca		Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
MISI II	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat**							
2.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	2.1.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	Menjamin aksesibillitas dan kualitas pelayanan dasar pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan					
	2.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Menjamin aksesibillitas dan kualitas pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan					
2.2. Meningkatkan pembangunan rumah layak huni	2.2.1. Meningkatnya Rumah Layak Huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni melalui program Terima Kunci Rumah Layak Huni *(PROGRAM TEKUN MELAYANI)*	Pembangunan rumah layak huni yang dilengkapi dengan perabot					
			Peningkatan utilitas lingkungan					
MISI III	**Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur**							
3.1. Meningkatknya kualitas infrastruktur	3.1.1. Meningkatnya layanan transportasi	Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat	Optimalisasi Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	3.1.3. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam mewujudkan peningkatan pelayanan	Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air Baku					
	3.1.4. Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi					
MISI IV	**Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif**							
4.1. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	4.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur					
	4.1.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan		Peningkatan kompetensi ASN					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	4.1.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE					
			Pengembangan Inovasi Daerah					
	4.1.4. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)		Penataan kelembagaan perangkat daerah					
	4.1.5. Meningkatnya kualitas manajemen ASN		Peningkatan kesejahteraan ASN yang disertai dengan penguatan implementasi reward and punishment					
			Peningkatan Kesejahteraan ASN pada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
			Penataan Regulasi daerah					
	4.1.6. Meningkatnya PD yang membangun zona integritas		Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat					
			Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa					
MISI V	**Mengembangkan kawasan stretegis daerah**							
5.1. Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	5.1.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi di Kota Kefamenanu	Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan Barang / Jasa dan Transportasi					
			Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pendorong Pertumbuhan Daerah Lain					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**					
				2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	5.1.2. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Peningkatan cakupan pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Pantai Utara	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Berbasis Potensi Unggulan					
	5.1.3. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Peningkatan cakupan kualitas infrastruktur perhubungan darat dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kawasan Perbatasan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi di Kawasan Perbatasan antar Negara					

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada strategi diatas, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan arah kebijakan yang komprehensif. Arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut:

Gambar 6.1.

Arah Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah provinsi NTT dan Arah Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Tahun 2022-2026

Arahan RPJMN 2020-2024 Mewujudkan masyarakatIndonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melaluiPercepatan pembangunan di berbagai bidang dengan Menekankan terbangunnya struktur perekonomian Yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di Berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas Dan berdaya saing	***Visi RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 "NTT Bangkit Mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".***

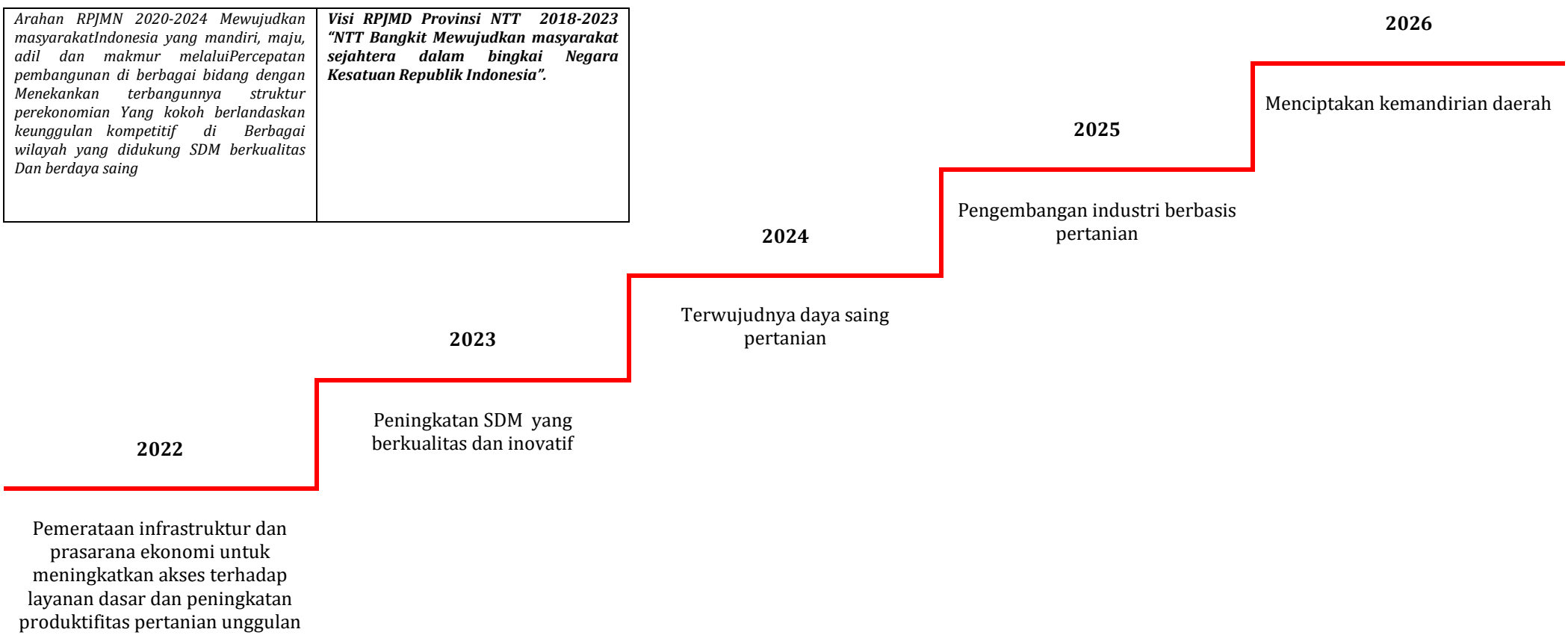

Tabel 6.2.

Arah kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH				
2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Pemerataan infrastruktur dan prasarana ekonomi untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan produktifitas pertanian unggulan	Peningkatan SDM yang berkualitas dan inovatif	Terwujudnya daya saing pertanian	Pengembangan industri berbasis pertanian	Menciptakan kemandirian daerah
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal	Penanganan pasca panen dengan manajemen mutu sesuai permintaan pasar	Mengembangkan sektor ekonomi berbasis pertanian	Peningkatan kualitas hidup masyarakat
Mewujudkan konektivitas antar wiayah pengembangan terutama pada kawasan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan perbatasan	Penerapan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Penataan tata niaga pertanian	Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat
Penataan kelembagaan dan tata kelola koperasi, UKM dan IKM dan Bumdes	Menciptakan wirausahawan pertanian			Penurunan angka kemiskinan yang signifikan
Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada potensi desa berbasis pertanian				Terwujudnya pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah
Peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok pertanian				

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah, dimana secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan rumusan permasalahan maka disusun program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan. Perhitungan pagu program di lakukan dengan menentukan output dari setiap kegiatan pada program, menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program selanjutnya menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	MISI I	**Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan**														
	1.1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat															
	1.1.1.Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan															
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				198,699,808		200,686,806		202,693,674		204,720,611		206,767,817		206,767,817	**DINAS PERTANIAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB*	39.82	39.85		39.88		39.91		39.94		39.97		39.97		
		Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB	24.50	24.53		24.56		24.59		24.62		24.65		24.65		
		Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB	0.036	0.068	1,606,807,449	0.098	1,622,875,523	0.128	1,639,104,279	0.158	1,655,495,322	0.188	1,672,050,275	0.188	1,672,050,275	
		Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	98.83	98.86		98.89		98.92		98.95		98.98		98.98		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	100	100	129,998,527	100	131,298,512	100	132,611,497	100	133,937,612	100	135,276,988	100	135,276,988	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani*	100	100	3,659,279,278	100	3,695,872,071	100	3,732,830,791	100	3,770,159,099	100	3,807,860,690	100	3,807,860,690	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Penyediaan benih/bibit ternak melalui pengadaan ternak sapi*	136.659	825	6,250,000,000	848	6,450,000,000	825	6,264,655,559.00	1350	10,024,655,559.00	3260	24,783,371,816.00	3260	24,783,371,816.00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian*			-	100	200,000,000.00	100	160,000,000.00	100	240,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	**DINAS PETERNAKAN**
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak*	55	60	663,479,353	65	670,114,147	70	676,815,288	75	683,583,441	80	690,419,275	80	690,419,275	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	*Meningkatnya Produksi perikanan*	90.38	100	416,453,596	100	420,618,132	100	424,824,313	100	429,072,556	100	433,363,282	100	433,363,282	**DINAS PERIKANAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Cakupan bina kelompok nelayan	40.54	52.43		64.32		76.21		88.10		100		100		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya*	50	60	377,124,283	70	380,895,526	*80*	384,704,481	90	388,551,526	100	392,437,041	100	392,437,041	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Meningkatnya Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikkanan*	100	100	244,880,191	100	247,328,993	100	249,802,283	100	252,300,306	100	254,823,309	100	254,823,309	
		Meningkatnya Produksi perikanan kelompok nelayan	91.08	0		100		100		100		100		100		
	1.1.2.Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM															
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	*Meningkatnya pemeriksaan koperasi*	100	100	69,654,458	100	70,351,003	100	71,054,513	100	71,765,058	100	72,482,708	100	72,482,708	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	*Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi*	100	100	77,809,425	100	78,587,519	100	79,373,394	100	80,167,128	100	80,968,800	100	80,968,800	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	*Meningkatnya Pendidikan dan latihan perkoperasian*	86.49	89.19	327,891,166	91.89	331,170,078	*94.59*	334,481,778	97.30	337,826,596	100.00	341,204,862	100.00	341,204,862	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	*Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi*	100	100	79,239,392	100	80,031,786	100	80,832,104	100	81,640,425	100	82,456,829	100	82,456,829	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	*Meningkatnya Persentase Usaha Mikro dan Kecil*	100	100	79,148,675	100	79,940,162	100	80,739,563	100	81,546,959	100	82,362,429	100	82,362,429	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	*Meningkatnya pengembangan UKM*	100	100	413,216,589	100	417,348,755	100	421,522,242	100	425,737,465	100	429,994,840	100	429,994,840	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal*	100	100	186,000,000	100	187,860,000	100	189,738,600	100	191,635,986	100	193,552,346	100	193,552,346	**DINAS PMPTSP**
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya promosi penanaman modal*	100	100	143,000,000	100	144,430,000	100	145,874,300	100	147,333,043	100	148,806,373	100	148,806,373	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pelayanan penanaman modal*	100	100	114,500,000	100	115,645,000	100	116,801,450	100	117,969,465	100	119,149,159	100	119,149,159	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal*	100	100	442,223,000	100	446,645,230	100	451,111,682	100	455,622,799	100	460,179,027	100	460,179,027	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pengelolaan data sistem informasi penanaman modal*	100	100	10,000,000	100	10,100,000	100	10,201,000	100	10,303,010	100	10,406,040	100	10,406,040	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok pengrajin*	25	30	1,280,048,000	36	1,292,848,480	41	1,305,776,965	52	1,318,834,734	58	1,332,023,082	58	1,332,023,082	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabuaten / Kota*	100	100	255,000,000	100	257,550,000	100	260,125,500	100	262,726,755		265,354,023	100	265,354,023	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	*Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri Nasional*	100	100	125,000,000	100	126,250,000	100	127,512,500	100	128,787,625	100	130,075,501	100	130,075,501	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	*Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan*	100	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,040	100	41,624,160	100	41,624,160	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal*	19.30	16.40	347,000,000	16.70	350,470,000	16.95	353,974,700	17.17	357,514,447	17.36	361,089,591	17.36	361,089,591	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	*Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*	100	100	160,000,000	100	161,600,000	100	163,216,000	100	164,848,160	100	166,496,642	100	166,496,642	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	*Meningkatnya pengembangan ekspor*	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	15,609,060	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	*Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen*	100	100	95,000,000	100	95,950,000	100	96,909,500	100	97,878,595	100	98,857,381	100	98,857,381	
	1.1.3.Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata															

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Meningkatnya dayatarik destinasi pariwisata*	100	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	1,352,785,213	100	1,352,785,213	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Meningkatnya pemasaran pariwisata*	100	100	225,000,000	100	227,250,000	100	229,522,500	100	231,817,725	100	234,135,902	100	234,135,902	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif*	100	100	52,500,000	100	53,025,000	100	53,555,250	100	54,090,803	100	54,631,711	100	54,631,711	
	1.1.4.Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan															
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				291,300,000		294,213,000		297,155,130		300,126,681		303,127,948		303,127,948	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Meningkatnya Ketersediaan pangan utama*	68.77	69.86	560,000,000	70.23	565,600,000	71.24	571,256,000	73.50	576,968,560	75.85	582,738,246	75.85	582,738,246	
		Meningkatnya Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,125	4,025		4,130		4,135		4,160		4,200		4,200		
			76.30	97.60		99.85		102.1		104.35		106.6		106.6		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				367,750,000		371,427,500		375,141,775		378,893,193		382,682,125		382,682,125	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				150,000,000		151,500,000		153,015,000		154,545,150		156,090,602		156,090,602	
	1.1.5.Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja															
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	*Meningkatnya Presentasi Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan*	11.94	*13.06*	90,000,000	*14.93*	90,900,000	18.66	91,809,000	20.52	92,727,090	22.39	93,654,361	22.39	93,654,361	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	*Peninkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan*	40.51	44.30	560,000,000	50.63	565,600,000	56.96	571,256,000	63.29	576,968,560	69.62	582,738,246	69.62	582,738,246	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	*Meningkatnya penempatan tenaga kerja*	100	100	1,091,326,104	100	1,102,239,365	100	1,113,261,759	100	1,124,394,376	100	1,135,638,320	100	1,135,638,320	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	*Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan*	100	100	155,000,000	100	156,550,000	100	158,115,500	100	159,696,655	100	161,293,622	100	161,293,622	
		Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	29.09	31.82		36.36		40.91		45.45		50.00		50.00		
	1.2. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup															
	1.2.1.Terlaksanaan ya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan															**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	*Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota*	-	-		Ada		-		-		-		-		
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota	-	-	-	-	150,000,000	Ada	150,000,000	-	-	-	400,000,000	-	400,000,000	
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten / kota	Ada	-		-		-		-		Ada		Ada		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	*Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)*	100	100	1,394,567,100	100	1,408,512,771	100	1,422,597,899	100	1,436,823,878	100	1,451,192,116	100	1,451,192,116	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)*	100	100	112,972,550	100	114,102,276	100	115,243,298	100	116,395,731	100	117,559,689	100	117,559,689	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	*Meningkatnya fasilitasi pendampingan pengakuan MHA*	0	0		2		4		6		8		8		
		Meningkatnya verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	32	64	20,000,000	96	20,200,000	128	20,402,000	160	20,606,020	192	20,812,080	192	20,812,080	
		Meningkatnya verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	32	64		96		128		160		192		192		
		Meningkatnya penetapan hak MHA	-	0		2		4		6		8		8		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup*	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	15,609,060	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	*Meningkatnya timbulan yang ditangani*	1.38	11.38	2,232,262,897	21.38	2,254,585,526	31.38	2,277,131,381	41.38	2,299,902,695	51.38	2,322,901,722	51.38	2,322,901,722	
		Meningkatnya persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.028	10.028		20.028		30.028		40.028		50.028		50.028		
		Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani	28.08	38.08		48.08		58.08		68.08		78.08		78.08		
	1.2.2.Terlaksananya peningkatan indeks kualitas air															
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas air*	15	16	1,377,635,475	17	1,391,411,830	18	1,405,325,948	19	1,419,379,208	20	1,433,573,000	20	1,433,573,000	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas udara	50	51		52		53		54		55		55		
		Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	50	55		60		65		70		75		75		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	*Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)*	100	100	42,000,000	100	42,420,000	100	42,844,200	100	43,272,642	100	43,705,368	100	43,705,368	
	1.2.3.Terlaksananya peningkatan indeks udara															
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat*	100	100	141,523,289	100	142,938,522	100	144,367,907	100	145,811,586	100	147,269,702	100	147,269,702	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pemberian pennghargaan lingkungan hidup*	Ada	ada	65,000,000	Ada	65,650,000	ada	66,306,500	ada	66,969,565	ada	67,639,261	ada	67,639,261	
	MISI II	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat**														
	2.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas															**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
	2.1.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan															
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SD,/Mi/Paket A)*	985.40	985.45	87,872,820,780	986.50	88,751,548,988	987.00	89,639,064,478	987.50	90,535,455,122	990.00	91,440,809,674	990.00	91,440,809,674	
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SMP/MTs/Paket B)	982.50	983.30		985.50		987.00		988.5		990.00		990.00		
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.54	98.59		98.65		98.70		98.75		99.00		99.00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) (SMP/MTs/Paket B)	98.25	98.30		98.50		98.70		98.85		99.00		99.00		
		Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92.60	94.00		96.00		97.50		98.5		99.00		99.00		
		Menurunnya Angka Putus Sekolah (SD,/Mi/Paket A)	0.82	0.70		0.60		0.50		0.4		0.30		0.30		
		Menurunnya Angka Putus Sekolah (SMP/MTs/Paket B)	2.37	2.30		2.20		2.10		2		1.90		1.90		
		Meningkatnya Angka Kelulusan (SD,/Mi/Paket A)	99.65	99.70		99.75		99.80		99.85		99.90		99.90		
		Meningkatnya Angka Kelulusan (SMP/MTs/Paket B)	99.70	99.80		99.84		99.88		99.92		99.96		99.96		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SD,/Mi/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	99.33	99.35		99.37		99.39		99.41		99.43		99.43		
		Meningkatnya Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	68.97	70.97		72.97		74.97		76.97		78.97		78.97		
		Meningkatnya Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	73.11	75.11		77.11		78.11		80.11		82.11		82.11		
		Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	0.69	0.70		0.71		0.72		0.73		0.74		0.74		
		Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	935.49	936.98		937.86		939.72		940.61		941.49		941.49		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Per kelas rata - rata sekolah dasar	93.55	93.69		93.79		93.97		94.86		94.15		94.15		
		Meningkatnya Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98.85	98.87		98.89		98.91		98.93		98.95		98.95		
		Meningkatnya usia › 15 Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	94.37	94.40		94.43		94.46		94.49		94.52		94.52		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	*Cakupan pemenuhan SPM pendidikan*	100	100	210,000,000	100	212,100,000	100	214,221,000	100	216,363,210	100	218,526,842	100	218,526,842	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV*	82.74	82.92	400,000,000	82.94	404,000,000	82.95	408,040,000	83.03	412,120,400	83.51	416,241,604	83.51	416,241,604	
	2.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan															

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup*	8.24	8.00		7.70		7.50		7.00		7.00				
		Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi	991.76	992.00		992.30		992.50		992.80		993.00		993.00		
		Menurunnya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9.92	9.82	106,247,800,042	9.50	469,581,425,882.84	9.00	90,477,240,142	8.50	91,382,012,543	8.00	92,295,832,669	8.00	92,295,832,669	**DINAS KESEHATAN**
		Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	131.14	130.00		128.00		126.00		124.00		122.00		122.00		
		Meningkatnya Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0.00077397	0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		
		Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2.90	2.70		2.60		2.55		2.50		2.45		2.45		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Proporsi jumlah penduduk usia 15 sd 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	2.50	3.40		4.40		6.30		7.90		9.80		9.80		
		Meningkatnya cakupan puskesmas	108.30	116.60		125.00		125.00		125.00		125.00		125.00		
		Menurunya prevalensi balita stunting	28.90	23.00		18.00		14.00		10.00		8.00		8.00		
		Menurunya persentase balita gizi buruk	0.15	0.14		0.13		0.12		0.11		0.10		0.10		
		Meningkatnya prevalensi balita gizi kurang	5.29	5.00		4.90		4.80		4.70		4.60		4.60		
		Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular	63.70	70.90		78.20		85.48		9.74		100.00		100.00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Menurunnya prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	81.93	79.33		77.39		75.46		73.52		71.59		71.59		
		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	44.30	58.22		71.22		84.22		96.22		100.00		100.00		
		Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	23.24	30.72		40.13		50.25		60.43		70.03		70.03		
		Meningkatnya akreditasi puskesmas status madya dan pari purna	15.38	30.77		46.15		61.54		76.92		100.00		100.00		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.27	0.36		0.45		0.54		0.63		0.72		0.72		
		Meningkatnya posyandu aktif	81.25	84.96		88.09		92.38		96.09		100.00		100.00		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	100	100	158,200,000	100	159,782,000	100	161,379,820	100	162,993,618	100	164,623,554	100	164,623,554	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	*Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman*	100	100	972,584,000	100	982,309,840	100	992,132,938	100	1,002,054,268	100	1,012,074,810	100	1,012,074,810	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	100	100	514,777,133	100	519,924,904	100	525,124,153	100	530,375,395	100	535,679,149	100	535,679,149	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	*Dependency Ratio*	64	63	1,019,476,639	63	1,029,671,405	62	1,039,968,119	61	1,050,367,801	61	1,060,871,479	61	1,060,871,479	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk*	0.896	7.00		7.25		7.50		7.75		8.00		8.00		
		Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	0.385	1.00	971,598,364	1.25	981,314,348	1.25	991,127,491	1.50	1,001,038,766	1.50	1,011,049,154	1.50	1,011,049,154	DUKCAPIL
		Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah														
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Meningkatnya Ketersediaan pangan utama*	68.77	69.86	560,000,000	70.23	565,600,000	71.24	571,256,000	73.50	576,968,560	75.85	582,738,246	75.85	582,738,246	DINAS PANGAN
		Meningkatnya Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,125	4,025		4,130		4,135		4,160		4,200		4,200		
			76.30	97.60		99.85		102.1		104.35		106.6		106.6		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	*Meningkatnya Produksi perikanan*	90.38	100	416,453,596	100	420,618,132	100	424,824,313	100	429,072,556	100	433,363,282	100	433,363,282	DINAS PERIKANAN
		Meningkatnya Cakupan bina kelompok nelayan	40.54	52.43		64.32		76.21		88.10		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SD,/Mi/Paket A)*	985.40	985.45		986.50		987.00		987.50		990.00		990.00		
		Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SMP/MTs/Paket B)	982.50	983.30		985.50		987.00		988.5		990.00		990.00		
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.54	98.59		98.65		98.70		98.75		99.00		99.00		
		Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) (SMP/MTs/Paket B)	98.25	98.30		98.50		98.70		98.85		99.00		99.00		
		Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92.60	94.00		96.00		97.50		98.5		99.00		99.00		
		Menurunnyna Angka Putus Sekolah (SD,/Mi/Paket A)	0.82	0.70		0.60		0.50		0.4		0.30		0.30		
					87,872,820,780		88,751,548,988		89,639,064,478		90,535,455,122		91,440,809,674		91,440,809,674	**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Menurunnyna Angka Putus Sekolah (SMP/MTs/Paket B)	2.37	2.30		2.20		2.10		2		1.90		1.90		
		Meningkatnya Angka Kelulusan (SD,/Mi/Paket A)	99.65	99.70		99.75		99.80		99.85		99.90		99.90		
		Meningkatnya Angka Kelulusan (SMP/MTs/Paket B)	99.70	99.80		99.84		99.88		99.92		99.96		99.96		
		Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SD,/Mi/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	99.33	99.35		99.37		99.39		99.41		99.43		99.43		
		Meningkatnya Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	68.97	70.97		72.97		74.97		76.97		78.97		78.97		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	73.11	75.11		77.11		78.11		80.11		82.11		82.11		
		Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	0.69	0.70		0.71		0.72		0.73		0.74		0.74		
		Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	935.49	936.98		937.86		939.72		940.61		941.49		941.49		
		Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Per kelas rata - rata sekolah dasar	93.55	93.69		93.79		93.97		94.86		94.15		94.15		
		Meningkatnya Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98.85	98.87		98.89		98.91		98.93		98.95		98.95		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya usia › 15 Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	94.37	94.40		94.43		94.46		94.49		94.52		94.52		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	*Meningkatnya kualitas keluarga*	100	100	230,000,000	100	232,300,000	100	234,623,000	100	236,969,230	100	239,338,922	100	239,338,922	DP3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	*Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*	100	100	39,400,000	100	39,794,000	100	40,191,940	100	40,593,859	100	40,999,798	100	40,999,798	DINAS SOSIAL
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	*Meningkatnya informasi dan komunikasi publik*	100	100	667,000,000	100	673,670,000	100	680,406,700	100	687,210,767	100	694,082,875	100	694,082,875	KOMINFOTIK
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)*	3.20	3.20	6,716,600,000	3.20	6,783,766,000	3.20	6,851,603,660	3.20	6,920,119,697	3.20	6,989,320,894	3.20	6,989,320,894	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6.40	6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya persentase LSM aktif	0.30	0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		
		Meningkatnya persentase PKK aktif	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Meningkatnya persentase posyandu aktif	89.00	89.00		92.00		92.00		92.00		92.00		92.00		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				250,000,000		252,500,000		255,025,000		257,575,250		260,151,003		260,151,003	**BAPELITBANGDA**
	2.2. Meningkatkan pembangunan rumah layak huni															
	2.2.1.Meningkatnya Rumah Layak Huni															
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	*Meningkatnya rasio rumah layak huni*	0.12	0.24	35,077,520,230	0.37	41,450,096,249	0.50	35,782,578,386.62	0.63	46,726,616,845.64	0.76	63,220,743,856.92	0.76	63,220,743,856.92	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
		Meningkatnya rasio permukiman layak huni	0.58	1.17		1.77		2.38		3.00		3.63		3.63		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	11	11.70		12.6		13.5		14.4		15.3		15.3		
		Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	26.96	28.67		30.82		33.02		35.27		37.57		37.57		
	MISI III	**Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur**														
	3.1. Meningkatknya kualitas infrastruktur															
	3.1.1. Meningkatnya layanan transportasi															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*	603.48	613.48	38,810,753,850	623.48	44,198,861,389	633.48	44,640,850,003	643.48	45,087,258,503	653.48	45,538,131,087.95	653.48	45,538,131,088	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
		Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0.003	0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	70.09	72.27		73.44		74.62		75.08		76.98		76.98		
	3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih															
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	*Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum*	83.12	85.87	5,000,000,000	88.63	5,050,000,000	91.38	5,100,500,000	94.14	5,151,505,000	96.89	5,203,020,050	96.89	5,203,020,050	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	83.12	85.87		88.63		91.38		94.14		96.89		96.89		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	3.1.3. Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat															
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	*Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor*	20	22	8,367,150,682	24	10,350,822,189	26	10,454,330,411	28	10,558,873,715	30	10,664,462,452	30	10,664,462,452	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
		Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	65.74	72.34		78.88		85.46		92.03		96.61		96.61		
		Meningkatnya rasio jaringan irigasi	9.96	10.96		11.95		12.95		13.94		14.94		14.94		
	MISI IV	**Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif**														

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4.1. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif															
	4.1.1. Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah															
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				128,000,000		300,000,000		303,000,000		306,030,000		309,090,300		309,090,300	**BAPELITBANGDA**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	6,478,934,974.30	100	6,543,724,324	100	6,609,161,567	100	6,675,253,183	100	6,742,005,715	100	6,742,005,715	**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100												

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	17,461,816,883.00	100	17,636,435,052	100	17,812,799,402	100	17,990,927,396	100	18,170,836,670	100	18,170,836,670	**DINAS KESEHATAN / RSUD**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	6,666,301,270.00	100	1,732,964,283	100	1,750,293,926	100	1,767,796,865	100	1,785,474,834	100	1,785,474,834	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur ***(Pembangunan gedung kantor thn 2022 Rp. 5 M)***	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	982,414,879.00	100	992,239,028	100	1,002,161,418	100	1,012,183,032	100	1,022,304,863	100	1,022,304,863	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	339,808,105	100	343,206,186	100	346,638,248	100	350,104,630	100	353,605,677	100	353,605,677	**POL.PP**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	852,677,101	100	861,203,872	100	869,815,911	100	878,514,070	100	887,299,211	100	887,299,211	**BPBD**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	896,584,916.00	100	905,550,765	100	914,606,273	100	923,752,336	100	932,989,859	100	932,989,859	**DINAS SOSIAL**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	802,000,000	100	810,020,000	100	818,120,200	100	826,301,402	100	834,564,416	100	756,519,115	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	464,615,903.00		469,262,062		473,954,683		478,694,229		483,481,172		483,481,172	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100												

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	663,298,014	100	669,930,994	100	676,630,304	100	683,396,607	100	690,230,573	100	690,230,573	**DINAS PANGAN**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	905,100,000.00	100	914,151,000	100	923,292,510	100	932,525,435	100	941,850,689	100	941,850,689	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,026,625,287	100	1,036,891,540	100	1,047,260,455	100	1,057,733,060	100	1,068,310,390	100	1,068,310,390	**DUKCAPIL**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	1,405,097,077.00	100	1,419,148,048	100	1,433,339,528	100	1,447,672,924	100	1,462,149,653	100	1,462,149,653	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	649,461,374.00	100	655,955,988	100	662,515,548	100	669,140,703	100	675,832,110	100	675,832,110	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	706,119,459.00	100	713,180,654	100	720,312,460	100	727,515,585	100	734,790,741	100	734,790,741	DINAS PERHUBUNGAN
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	641,750,000	100	648,167,500	100	654,649,175	100	661,195,667	100	667,807,623	100	667,807,623	KOMINFOTIK

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	822,453,950	100	830,678,490	100	838,985,274	100	847,375,127	100	855,848,878	100	855,848,878	**DINAS KOPERASI DAN UKM**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	608,470,346	100	614,555,049	100	620,700,600	100	626,907,606	100	633,176,682	100	633,176,682	**DINAS PMPTSP**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	599,710,118	100	605,707,219	100	611,764,291	100	617,881,934	100	624,060,754	100	624,060,754	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur ***(Pembangunan gedung kantor thn 2022 Rp. 4 M)***	100	100	4,980,414,432	100	990,218,576	100	1,000,120,762	100	1,010,121,970	100	1,020,223,189	100	1,020,223,189	**DINAS PERIKANAN**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	777,823,400	100	785,601,634	100	793,457,650	100	801,392,227	100	809,406,149	100	809,406,149	
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		**DINAS KEBIUDAYAAN DAN PARIWISATA**
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	777,823,400	100	785,601,634	100	793,457,650	100	801,392,227	100	809,406,149	100	809,406,149	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	2,031,214,938	100	2,051,527,087	100	2,072,042,358	100	2,092,762,782	100	2,113,690,410	100	2,113,690,410	**DINAS PERTANIAN**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	819,657,414	100	827,853,988	100	836,132,528	100	844,493,853	100	852,938,792	100	852,938,792	**DINAS PETERNAKAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	493,725,555	100	498,662,810.55	100	503,649,438.66	100	2,648,685,933.04	100	513,772,792.37	100	513,772,792.37	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	14,618,643,216.62	100	14,764,829,648.79	100	14,912,477,945	100	15,061,602,725	100	15,212,218,752	100	15,212,218,752	**SEKRETARIAT DAERAH**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	3,411,305,454	100	3,445,418,509	100	3,479,872,694	100	3,514,671,421	100	3,549,818,135	100	3,549,818,135	**SEKWAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,366,500,000	100	1,380,165,000	100	1,393,966,650	100	1,407,906,317	100	1,421,985,380	100	1,421,985,380	**BAPELITBANGDA**
		Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	3,624,033,065	100	3,660,273,396	100	3,696,876,130	100	3,733,844,891	100	3,771,183,340	100	3,771,183,340	**BKA**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,027,501,837	100	1,037,776,855	100	1,048,154,624	100	1,058,636,170	100	1,082,539,732.00	100	1,069,222,532	**BAPENDA**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	905,534,040	100	907,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	751,022,447.00	100	758,532,671	100	766,117,998	100	773,779,178	100	781,516,970	100	781,516,970	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,268,699,743	100	1,280,846,740	100	1,293,655,207	100	1,306,591,759	100	1,319,657,677	100	1,319,657,677	**INSPEKTORAT**
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	9,181,485,009.56	100	9,273,299,859.66	100	9,366,032,858.25	100	9,459,693,186.83	100	9,554,290,118.70	100	9,554,290,118.70	**KECAMATAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	438,605,000	100	389,765,000	100	393,662,650	100	397,599,277	100	401,575,269	100	401,575,269	KESBANGPOL
		tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	4.1.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan															
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	*Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah*	100	100	8,305,522,653		8,388,577,880		8,472,463,658.33		8,557,188,295		8,642,760,178		8,642,760,178	BKA
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	*Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah*	100	100	1,173,223,944		1,184,956,183		1,196,805,745		1,208,773,803		1,220,861,541		1,220,861,541	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	*Meningkatnya Pendapatan Daera*	100	100	1,615,693,008		1,631,849,938.08		1,648,168,437		1,664,650,122		1,667,979,423		1,667,979,423	BAPENDA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	*Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan*	59.89	62		64		66		68		70		70		
		Menurunnya Persentase pelanggaran pegawai	0.42	0.4	1,510,000,000	0.3	1,525,100,000	0.2	1,540,351,000	0.1	1,555,754,510	0.00	1,571,312,055	0.00	1,571,312,055	INSPEKTORAT
		Menurunnya Jumlah temuan BPK	698	0		0		0		0		0		0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	*Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi*	100	100	239,300,257	100	242,233,260	100	244,655,593	100	247,102,149	100	249,573,170	100	249,573,170	
	4.1.3. Meningkatnya kualitas layanan publik *(smart governance)*															
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Meningkatnya Penanggulangan Bencana*	100	100	220,000,000	100	220,022,000	100	220,044,002	100	220,066,006.60	100	220,088,013.20	100	220,088,013	**BPBD**
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	*Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun*	2.02	2.21	634,049,255	2.40	640,389,748	2.59	646,793,645	2.79	653,261,581	2.98	659,794,197	2.98	659,794,197	**PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**
		Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.84	38.89		38.95		38.99		39.04		39.08		39.08		
		Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.82	1.83		1.84		1.85		1.86		1.87		1.87		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	5,217	5,717		6,217		6,717		7,217		7,717		7,717		
		Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	24,148	25,398		26,648		27,898		29,148		30,398		30,398		
		Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	7.00	25.71		31.42		37.14		42.85		58.57		58.57		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	*Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku*	36.84	49.12	172,000,000	61.40	173,720,000	73.68	175,457,200	85.96	177,211,772	100	178,983,890	100	178,983,890	
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	3		4		5		6		7		7		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk*	89.62	8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		DINAS DUKCAPIL
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	2,628,691,088	sudah	2,654,977,999	sudah	2,681,527,779	sudah	2,708,343,057	sudah	2,735,426,487	sudah	2,735,426,487	
		Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran	49.81	400		425		450		475		500		500		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk*	0.896	7.00		7.25		7.50		7.75		8.00		8.00		
		Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	0.385	1.00	971,598,364	1.25	981,314,348	1.25	991,127,491	1.50	1,001,038,766	1.50	1,011,049,154	1.50	1,011,049,154	
		Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah														

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	*Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota*	Ada	Ada	7,100,411,235	Ada	7,101,121,276.27	Ada	7,278,649,308	Ada	7,460,615,541	Ada	7,647,130,929	Ada	7,647,130,929	**SEKWAN**
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	*Meningkatnya Persentasi Organisasi Pemuda yang aktif*	11.35	11.36	715,800,220	11.38	722,958,222	11.39	730,187,804	11.41	737,489,682	11.42	744,864,579	11.42	744,864,579	**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
		Meningkatnya Persentasi Wirausaha Muda	38.27	38.28		38.3		38.35		38.45		38.5		38.5		
		Meningkatnya Cakupan pelatih yang bersertifikasi	50	55		60		65		95		98		98		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	*Meningkatnya Cakupan Pembinaan Olahraga*	41	42	1,612,000,000	44	101,628,120,000	46	1,644,401,200	50	1,660,845,212	55	1,677,453,664	55	1,677,453,664	
		Meningkatnya Jumlah atlit yang berprestasi Olahraga	223	250		252		253		255		300		300		
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya adminasi pemerintah desa*	100	100	221,495,096,001	100	223,710,046,961	100	225,947,147,431	100	228,206,618,905	100	230,488,685,094	100	230,488,685,094	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)*	3.20	3.20	6,716,600,000	3.20	6,783,766,000	3.20	6,851,603,660	3.20	6,920,119,697	3.20	6,989,320,894	3.20	6,989,320,894	
		Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6.40	6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		
		Meningkatnya persentase LSM aktif	0.30	0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya persentase PKK aktif	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
		Meningkatnya persentase posyandu aktif	89.00	89.00		92.00		92.00		92.00		92.00		92.00		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	*Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota*	-	-		Ada		-		-		-		-		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota	-	-	-	-	150,000,000	Ada	150,000,000	-	-	-	400,000,000	-	400,000,000	
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten / kota	Ada	-		-		-		-		Ada		Ada		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas air*	15	16	1,377,635,475	17	1,391,411,830	18	1,405,325,948	19	1,419,379,208	20	1,433,573,000	20	1,433,573,000	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas udara	50	51		52		53		54		55		55		
		Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	50	55		60		65		70		75		75		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)*	100	100	112,972,550	100	114,102,276	100	115,243,298	100	116,395,731	100	117,559,689	100	117,559,689	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat*	100	100	141,523,289	100	142,938,522	100	144,367,907	100	145,811,586	100	147,269,702	100	147,269,702	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pemberian pennghargaan lingkungan hidup*	Ada	ada	65,000,000	Ada	65,650,000	Ada	66,306,500	ada	66,969,565	ada	67,639,261	ada	67,639,261	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*	100	100	1,162,400,000	100	1,162,690,600	100	1,191,757,865	100	1,221,551,812	100	1,252,090,607	100	1,252,090,607	**SATPOL PP**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan piblik*	100	100	1,174,254,327	100	1,185,996,870	100	1,197,856,839	100	1,209,835,407	100	1,221,933,761	100	1,221,933,761	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	100	100	5,156,232,994	100	5,207,795,324	100	5,259,873,277	100	5,312,472,010	100	5,365,596,730	100	5,365,596,730	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum*	100	100	302,987,554	100	306,017,430	100	309,077,604	100	312,168,380	100	315,290,064	100	315,290,064	**KECAMATAN**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	100	100	895,589,743	100	904,545,640	100	913,591,097	100	922,727,008	100	931,954,278	100	931,954,278	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	100	100	1,974,227,287	100	1,993,969,560	100	2,013,909,255	100	2,034,048,348	100	2,054,388,832	100	2,054,388,832	
	4.1.4. Optimalisasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik *(Smart Govenance)*															
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	*Meningkatnya informasi dan komunikasi publik*	100	100	667,000,000	100	673,670,000	100	680,406,700	100	687,210,767	100	694,082,875	100	694,082,875	**KOMINFOTIK**
	4.1.5. Meningkatnya Kaulitas Manajemen ASN															
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	*Meningkatnya rata-rata lama peawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan*	90 hari	90 hari	4,835,989,697	90 hari	4,921,468,128.22	90 hari	4,976,632,744	90 hari	4,922,014,313	90 hari	4,971,234,456	90 hari	4,971,234,456	**KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.17	16		21		26		31		36		36		
		Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	18.15	156		166		176		186		196		196		
		Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33 orang	39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		
		Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2767 orang	2777 orang		2787 orang		2797 orang		2807 orang		2817 orang		2817 orang		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2123 orang	2223 orang		2323 orang		2423 orang		2523 orang		2623 orang		2623 orang		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	*Telaksanannya kegiatan pegebangan kompetensi teknis*	100	100	56,250,000	100	256,812,500.00	100	259,380,625.00	100	261,974,431.25	100	264,594,175.56	100	264,594,176	
	4.1.6. Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan)															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	*Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan*	59.89	62		64		66		68		70		70		
		Menurunnya Persentase pelanggaran pegawai	0.42	0.4	1,510,000,000	0.3	1,525,100,000	0.2	1,540,351,000	0.1	1,555,754,510	0.00	1,571,312,055	0.00	1,571,312,055	**INSPEKTORAT**
		Menurunnya Jumlah temuan BPK	698	0		0		0		0		0		0		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	*Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi*	100	100	239,300,257	100	242,233,260	100	244,655,593	100	247,102,149	100	249,573,170	100	249,573,170	
	MISI V	**Mengembangkan kawasan stretegis daerah**														
	5.1. Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah															
	5.1.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten dan PKSN															
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	*Meningkatnya Presetase Penduduk Berakses Air Minum*	83,12	85,87	5,000,000,000	86,63	5,050,000,000	91,38	5,100,500,000	94,14	5,151,505,000	96,89	5,203,020,050	96,89	5,203,020,050	**DINAS PUPR**
		Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	83,12	85,87		86,63		91,38		94,14		96,89		96,89		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*	603.48	613.48	38,810,753,850	623.48	44,198,861,389	633.48	44,640,850,002.89	643.48	45,087,258,503	653.48	45,538,131,087.95	653.48	45,538,131,088	
		Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0.003	0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	70.09	72.27		73.44		74.62		75.08		76.98		76.98		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	*Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)*			15,525,834,750		12,681,093,098		12,807,904,028.98		12,935,983,069		13,065,342,900		13,065,342,900	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	*Meningkatnya timbulan yang ditangani*	1.38	11.38	2,232,262,897	21.38	2,254,585,526	31.38	2,277,131,381	41.38	2,299,902,695	51.38	2,322,901,722	51.38	2,322,901,722	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
		Meningkatnya persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.028	10.028		20.028		30.028		40.028		50.028		50.028		
		Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani	28.08	38.08		48.08		58.08		68.08		78.08		78.08		
	5.1.2. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara															
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Meningkatnya Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikkanan*	100	100	244,880,191	100	247,328,993	100	249,802,283	100	252,300,306	100	254,823,309	100	254,823,309	**DINAS PERIKANAN**
		Meningkatnya Produksi perikanan kelompok nelayan	91.08	0		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok pengrajin*	25	30	1,280,048,000	36	1,292,848,480	41	1,305,776,965	52	1,318,834,734	58	1,332,023,082	58	1,332,023,082	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	*Meningkatnya dayatarik destinasi pariwisata*	100	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	1,352,785,213	100	1,352,785,213	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja *(tujuan/ impact/ outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	DESTINASI PARIWISATA															
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Meningkatnya pemasaran pariwisata*	100	100	225,000,000	100	227,250,000	100	229,522,500	100	231,817,725	100	234,135,902	100	234,135,902	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi*	100	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,040	100	41,624,160	100	41,624,160	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*Cakupan pengembangan KTM Ponu*	25	35	950,000,000	50	25,250,000	65	25,502,500	80	25,757,525	100	26,015,100	100	26,015,100	
	5.1.3. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan															
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*	603.48	613.48	38,810,753,850	623.48	44,198,861,389	633.48	44,640,850,002.89	643.48	45,087,258,503	653.48	45,538,131,087.95	653.48	45,538,131,088	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
		Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0.003	0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		
		Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	70.09	72.27		73.44		74.62		75.08		76.98		76.98		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Meningkatnya dayatarik destinasi pariwisata*	100	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	1,352,785,213	100	1,352,785,213	**DINAS KEBIUDAYAAN DAN PARIWISATA**
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Meningkatnya pemasaran pariwisata*	100	100	225,000,000	100	227,250,000	100	229,522,500	100	231,817,725	100	234,135,902	100	234,135,902	
					881,558,427,516.74		**1,363,503,880,466.64**		**886,073,211,875.85**		**911,463,681,613.70**		**950,507,041,188.04**		**950,415,678,687.15**	

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Kajian Lingkunga Hidup strategis (KLHS) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, maka terdapat beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di dalam program pembangunan daerah pada Dokumen RPJMD dan program perangkat daerah/kegiatan/sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBD Kabupaten mengutamakan penggunaan konstruksi non kayu misalnya baja ringan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir penebangan pohon yang dapat berdampak pada konversi lahan, ketersediaan air dan emisi GRK.
2. Peningkatan penyediaan air untuk pertanian, penguatan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas SDM petani. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan.
3. Pengembangan ekonomi hijau dengan inovasi baru terutama pada aspek produksi, Pengembangan jaringan pasar dan industri pengolahan. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*growth, equity* dan *sustainability*)
4. Pemanfaatan teknologi penyediaan air bersih yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tujuannya untuk meningkatkan akses terhadap air bersih.
5. Pembangunan TPS 3R dan TPA Terpadu untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah.
6. Rehabilitasi lahan kritis dengan kegiatan penghijauan untuk mengoptimalkan fungsi lahan budidaya (pertanian) dan fungsi lindung (konservasi).
7. Pengembangan wisata perbatasan berbasis budaya dan berorientasi lingkungan hidup
8. Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) secara terpadu
9. Penguatan dan pemanfaatan BLK, untuk meningkatkan ketrampilan tenaga kerja dan memacu berkembangnya wirausahawan
10. Pengembangan inovasi pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas ketersediaan pangan
11. Membangun kerjasama pengkajian emisi Gas Rumah Kaca

12. Pengembangan ekonomi hijau dengan inovasi baru terutama pada aspek produksi, Pengembangan jaringan pasar dan industri pengolahan.
13. Menetapkan kebijakan penangkapan ikan dan perlindungan biota laut

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNANDAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

Kerangka pendanaan dalam konteks kemampuan pembiayaan pembangunan daerah berhubungan erat dengan kapasitas riil kemampuan keuangan. Kapasitas riil kemampuan keuangan adalah kemampuan belanja pembangunan yang telah disesuaikan dengan asumsi-asumsi pendapatan yang menjadi dasar proyeksi belanja, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pendanaan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026 selengkapnya disajikan pada tabel 7.1.

Keseluruhan program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program perangkat daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target dan perangkat daerah berdasarkan urusan selengkapnya disajikan pada tabel 7.2.

Tabel 7.1

Kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026

Kabupaten Timor Tengah Utara

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,035,851,226,998.00**	**1,116,128,118,156.14**	**1,607,440,055,597.00**	**1,189,423,492,610.35**	**1,242,742,407,968.90**	**1,303,152,715,751.25**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**63,713,279,488.00**	**73,204,069,835.84**	**82,354,578,565.32**	**94,707,765,350.12**	**111,281,624,286.39**	**133,537,949,143.67**
4.1.01	Pajak Daerah	9,153,700,086.00	12,271,170,782.26	13,805,067,130.04	15,875,827,199.55	18,654,096,959.47	22,384,916,351.37
4.1.02	Retribusi Daerah	4,628,985,564.00	7,285,500,968.33	8,196,188,589.37	9,425,616,877.78	11,075,099,831.39	13,290,119,797.67
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,600,000,000.00	19,125,000,000.00	21,515,625,000.00	24,742,968,750.00	29,072,988,281.25	34,887,585,937.50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	31,330,593,838.00	34,522,398,085.25	38,837,697,845.90	44,663,352,522.79	52,479,439,214.28	62,975,327,057.13
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**927,908,412,510.00**	**1,005,267,048,320.30**	**1,487,428,477,031.68**	**1,057,058,727,260.23**	**1,093,803,783,682.51**	**1,131,957,766,607.58**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	904,276,687,000.00	980,926,371,045.00	1,462,722,689,597.25	1,031,858,824,077.11	1,067,973,882,919.81	1,105,352,968,822.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,631,725,510.00	24,340,677,275.30	24,705,787,434.43	25,199,903,183.12	25,829,900,762.70	26,604,797,785.58
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**44,229,535,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**	**37,657,000,000.00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	6,572,535,000.00	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat						
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00	37,657,000,000.00

Kode Rekening	URAIAN	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**1,133,549,847,281.00**	**1,116,128,118,156.14**	**1,607,440,055,597.00**	**1,189,423,492,610.35**	**1,192,742,407,968.90**	**1,253,152,715,751.25**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**794,212,087,246.00**	**754,861,372,792.50**	**787,606,706,099.56**	**841,859,686,143.89**	**841,702,963,437.77**	**919,462,419,430.23**
5.1.01	Belanja Pegawai	442,184,707,184.00	446,671,686,334.15	465,007,840,077.11	467,186,406,533.57	478,866,066,696.91	490,837,718,364.33
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349,165,360,062.00	297,689,686,458.35	311,993,866,022.45	318,988,229,610.32	352,018,736,240.86	417,698,358,960.90
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	1,862,020,000.00	2,000,000,000.00	2,020,000,000.00	47,014,200,000.00	2,060,602,000.00	2,081,208,020.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00	8,500,000,000.00	8,585,000,000.00	8,670,850,000.00	8,757,558,500.00	8,845,134,085.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**112,517,014,416.00**	**136,281,258,744.14**	**592,598,008,011.74**	**118,056,111,565.91**	**119,236,672,681.57**	**99,569,496,752.96**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,217,733,187.00	15,596,176,516.68	15,754,158,281.85	15,911,699,864.67	16,070,816,863.31	16,231,525,031.95
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24,127,573,533.00	45,684,081,839.06	501,092,839,337.60	25,635,891,205.04	25,892,250,117.09	26,151,172,618.27
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	71,156,905,714.00	72,935,828,356.85	73,665,186,640.42	74,401,838,506.82	75,145,856,891.89	55,037,772,805.37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,014,801,982.00	2,065,172,031.55	2,085,823,751.87	2,106,681,989.38	2,127,748,809.28	2,149,026,297.37
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5,200,390,619.00**	**5,200,390,619.00**	**5,252,394,525.19**	**5,304,918,470.44**	**5,357,967,655.15**	**5,411,547,331.70**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,200,390,619.00	5,200,390,619.00	5,252,394,525.19	5,304,918,470.44	5,357,967,655.15	5,411,547,331.70
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**221,620,355,000.00**	**219,785,096,000.50**	**221,982,946,960.51**	**224,202,776,430.11**	**226,444,804,194.41**	**228,709,252,236.36**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221,620,355,000.00	219,785,096,000.50	221,982,946,960.51	224,202,776,430.11	226,444,804,194.41	228,709,252,236.36
6.0	**Pembiayan**	**Target 2021**	**Proyeksi 2022**	**Proyeksi 2023**	**Proyeksi 2024**	**Proyeksi 2025**	**Proyeksi 2026**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	77,857,529,283.00	-	-	-	-	-
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (6.1.01. s/d 6.1.06.)	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-					

6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-					
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (6.2.01. s/d 6.2.05.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**50,000,000,000.00**	**50,000,000,000.00**
	Pembiayaan Netto (6.1 - 6.2)	**77,857,529,283.00**	**-**	**-**	**-**	**(50,000,000,000.00)**	**(50,000,000,000.00)**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)				-		-

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2022-2026

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**															
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	6,478,934,974.30	100	6,543,724,324	100	6,609,161,567	100	6,675,253,183	100	6,742,005,715	100	6,742,005,715	***DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100												

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100												
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	199,173,489,232		209,132,163,693		219,588,771,878		230,568,210,472		242,096,620,995		242,096,620,995	
1	0 1	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	*Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SD,/Mi/Paket A)*	985.40	985.45	87,872,820,780	986.50	88,751,548,988	987.00	89,639,064,478	987.50	90,535,455,122	990.00	91,440,809,674	990.00	91,440,809,674	
				Meningkatnya angka partisipasi sekolah (SMP/MTs/Paket B)	982.50	983.30		985.50		987.00		988.5		990.00		990.00		
				Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.54	98.59		98.65		98.70		98.75		99.00		99.00		
				Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) (SMP/MTs/Paket B)	98.25	98.30		98.50		98.70		98.85		99.00		99.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92.60	94.00		96.00		97.50		98.5		99.00		99.00		
				Menurunnyna Angka Putus Sekolah (SD,/Mi/Paket A)	0.82	0.70		0.60		0.50		0.4		0.30		0.30		
				Menurunnyna Angka Putus Sekolah (SMP/MTs/Paket B)	2.37	2.30		2.20		2.10		2		1.90		1.90		
				Meningkatnya Angka Kelulusan (SD,/Mi/Paket A)	99.65	99.70		99.75		99.80		99.85		99.90		99.90		
				Meningkatnya Angka Kelulusan (SMP/MTs/Paket B)	99.70	99.80		99.84		99.88		99.92		99.96		99.96		
				Meningkatnya Angka Melanjutkan dari SD,/Mi/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	99.33	99.35		99.37		99.39		99.41		99.43		99.43		
				Meningkatnya Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	68.97	70.97		72.97		74.97		76.97		78.97		78.97		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	73.11	75.11		77.11		78.11		80.11		82.11		82.11		
				Meningkatnya Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	0.69	0.70		0.71		0.72		0.73		0.74		0.74		
				Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	935.49	936.98		937.86		939.72		940.61		941.49		941.49		
				Meningkatnya Rasio Guru/ Murid Per kelas rata - rata sekolah dasar	93.55	93.69		93.79		93.97		94.86		94.15		94.15		
				Meningkatnya Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	98.85	98.87		98.89		98.91		98.93		98.95		98.95		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya usia › 15 Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	94.37	94.40		94.43		94.46		94.49		94.52		94.52		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	*Cakupan pemenuhan SPM pendidikan*	100	100	210,000,000	100	212,100,000	100	214,221,000	100	216,363,210	100	218,526,842	100	218,526,842	
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	*Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV*	82.74	82.92	400,000,000	82.94	404,000,000	82.95	408,040,000	83.03	412,120,400	83.51	416,241,604	83.51	416,241,604	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	*Meningkatnya Persentasi Organisasi Pemuda yang aktif*	11.35	11.36	715,800,220	11.38	722,958,222	11.39	730,187,804	11.41	737,489,682	11.42	744,864,579	11.42	744,864,579	
				Meningkatnya Persentasi Wirausaha Muda	38.27	38.28		38.3		38.35		38.45		38.5		38.5		
				Meningkatnya Cakupan pelatih yang bersertifikasi	50	55		60		65		95		98		98		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	*Meningkatnya Cakupan Pembinaan Olahraga*	41	42	1,612,000,000	44	101,628,120,000	46	1,644,401,200	50	1,660,845,212	55	1,677,453,664	55	1,677,453,664	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Jumlah atlit yang berprestasi Olahraga	223	250		252		253		255		300		300		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	*Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*	1	1.00	100,000,000		101,000,000		102,010,000		103,030,100		104,060,401		104,060,401	
1	**0 2**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**															
1	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	17,461,816,883.00	100	17,636,435,052	100	17,812,799,402	100	17,990,927,396	100	18,170,836,670	100	18,170,836,670	***DINAS KESEHATAN / RSUD***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	55,999,345,740	100	58,799,313,027	100	61,739,278,679	100	64,826,242,613	100	68,067,554,743	100	68,067,554,743	
1	0 2	0 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup*	8.24	8.00		7.70		7.50		7.00		7.00				
				Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi	991.76	992.00		992.30		992.50		992.80		993.00		993.00		
				Menurunnya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9.92	9.82	106,247,800,042.11	9.50	469,581,425,882.84	9.00	90,477,240,141.97	8.50	91,382,012,543.39	8.00	92,295,832,668.82	8.00	92,295,832,669	
				Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	131.14	130.00		128.00		126.00		124.00		122.00		122.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0.00077397	0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		0.001161		
				Menurunnya Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2.90	2.70		2.60		2.55		2.50		2.45		2.45		
				Meningkatnya Proporsi jumlah penduduk usia 15 sd 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	2.50	3.40		4.40		6.30		7.90		9.80		9.80		
				Meningkatnya cakupan puskesmas	108.30	116.60		125.00		125.00		125.00		125.00		125.00		
				Menurunya prevalensi balita stunting	28.90	23.00		18.00		14.00		10.00		8.00		8.00		
				Menurunya persentase balita gizi buruk	0.15	0.14		0.13		0.12		0.11		0.10		0.10		
				Meningkatnya prevalensi balita gizi kurang	5.29	5.00		4.90		4.80		4.70		4.60		4.60		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular	63.70	70.90		78.20		85.48		9.74		100.00		100.00		
				Menurunnya prevalensi tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	81.93	79.33		77.39		75.46		73.52		71.59		71.59		
				Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin	44.30	58.22		71.22		84.22		96.22		100.00		100.00		
				Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	23.24	30.72		40.13		50.25		60.43		70.03		70.03		
				Meningkatnya akreditasi puskesmas status madya dan pari purna	15.38	30.77		46.15		61.54		76.92		100.00		100.00		
				Meningkatnya rasio tenaga medis per satuan penduduk	0.27	0.36		0.45		0.54		0.63		0.72		0.72		
				Meningkatnya posyandu aktif	81.25	84.96		88.09		92.38		96.09		100.00		100.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	*Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan*	100	100	158,200,000	100	159,782,000	100	161,379,820	100	162,993,618	100	164,623,554	100	164,623,554	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	*Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman*	100	100	972,584,000	100	982,309,840	100	992,132,938	100	1,002,054,268	100	1,012,074,810	100	1,012,074,810	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*	100	100	514,777,133	100	519,924,904	100	525,124,153	100	530,375,395	100	535,679,149	100	535,679,149	
1	**3**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**															***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG***
1	3	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	6,666,301,270.00	100	1,732,964,283	100	1,750,293,926	100	1,767,796,865	100	1,785,474,834	100	1,785,474,834	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur ***(Pembangunan gedung kantor thn 2022 Rp. 5 M)***	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	4,995,998,851.29	100	5,245,798,794	100	5,508,088,734	100	5,783,493,170	100	6,072,667,829	100	6,072,667,829	
1	3	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	*Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor*	20	22	8,367,150,682.00	24	10,350,822,189	26	10,454,330,411	28	10,558,873,715	30	10,664,462,452	30	10,664,462,452	
				Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	65.74	72.34		78.88		85.46		92.03		96.61		96.61		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya rasio jaringan irigasi	9.96	10.96		11.95		12.95		13.94		14.94		14.94		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	*Meningkatnya Presetase Penduduk Berakses Air Minum*	83,12	85,87		86,63		91,38		94,14		96,89		96,89		
				Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	83,12	85,87	5,000,000,000	86,63	5,050,000,000	91,38	5,100,500,000	94,14	5,151,505,000	96,89	5,203,020,050	96,89	5,203,020,050	
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	*Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik*	603.48	613.48		623.48		633.48		643.48		653.48		653.48		
				Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0.003	0.003	38,810,753,850	0.003	44,198,861,389	0.003	44,640,850,002.89	0.003	45,087,258,503	0.003	45,538,131,087.95	0.003	45,538,131,088	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	70.09	72.27		73.44		74.62		75.08		76.98		76.98		
1	3	1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	*Meningkatnya Pengembangan Jasa Kontruksi*	100	100	140,000,000	100	141,400,000	100	142,814,000	100	144,242,140	100	145,684,561	100	145,684,561	
1	3	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	*Meningkatnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan*	0.870	0.871	2,360,000,000	0.873	483,600,000	0.875	488,436,000	0.878	493,320,360	0.881	498,253,564	0.881	498,253,564	
				Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	83.82	83.82		85.50		87.70		89.50		90.00		90.00		
1	4		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**															***DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN***

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	982,414,879.00	100	992,239,028	100	1,002,161,418	100	1,012,183,032	100	1,022,304,863	100	1,022,304,863	
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	3,031,692,576	100	3,183,277,204	100	3,342,441,065	100	3,509,563,118	100	3,685,041,274	100	3,685,041,274	
1	4	03	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	*Meningkatnya rasio rumah layak huni*	0.12	0.24	35,077,520,230	0.37	41,450,096,249	0.50	35,782,578,386.62	0.63	46,726,616,845.64	0.76	63,220,743,856.92	0.76	63,220,743,856.92	
				Meningkatnya rasio permukiman layak huni	0.58	1.17		1.77		2.38		3.00		3.63		3.63		
				Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	11	11.70		12.6		13.5		14.4		15.3		15.3		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	26.96	28.67		30.82		33.02		35.27		37.57		37.57		
1	4	04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	*Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)*			15,525,834,750		12,681,093,098		12,807,904,028.98		12,935,983,069		13,065,342,900		13,065,342,900	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	*Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat*	11.48	21.48	302,267,529	21.48	305,290,204	31.48	308,343,106	41.48	311,426,537	51.48	314,540,803	51.48	314,540,803	
				Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara	60	72		72		78		82		85		85		
1			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	339,808,105	100	343,206,186	100	346,638,248	100	350,104,630	100	353,605,677	100	353,605,677	***POL.PP***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	3,828,505,668	100	4,019,930,952	100	4,220,927,499	100	4,431,973,874	100	4,653,572,568	100	4,653,572,568	
1	0 5	0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum*	100	100	1,256,000,000	100	1,256,125,600.00	100	1,268,878,935.20	100	1,281,759,823	100	1,294,769,538.82	100	1,294,769,538.82	
			PROGRAM PENCEGAHAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	*Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*	100	100	19,400,000		19,401,940.00		19,403,880.19		19,405,820.58		19,407,761.16		19,407,761.16	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	852,677,101	100	861,203,872	100	869,815,911	100	878,514,070	100	887,299,211	100	887,299,211	
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		***BPBD***
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,681,321,995	100	1,765,388,095	100	1,853,657,500	100	1,946,340,375	100	2,043,657,393	100	2,043,657,393	
1	0 5	0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Meningkatnya Penanggulangan Bencana*	100	100	220,000,000	100	220,022,000	100	220,044,002	100	220,066,006.60	100	220,088,013.20	100	220,088,013	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**															
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	896,584,916.00	100	905,550,765	100	914,606,273	100	923,752,336	100	932,989,859	100	932,989,859	***DINAS SOSIAL***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,845,045,087	100	1,937,297,341	100	2,034,162,208	100	2,135,870,319	100	2,242,663,835	100	2,242,663,835	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0 6	0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	*Meningkatnya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)*	100	10.53	999,117,860	26.32	1,009,109,039	47.37	1,019,200,129	73.68	1,029,392,130	100	1,039,686,052	100	1,039,686,052	
				Meningkatnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sosial	100	12.50		25.00		50.00		75.00		100		100		
				Meningkatnya persentase wahaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSN) yang menyediakan sarana dan prasarana sosial	100	20		40		60		80		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	*Meningkatnya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan*			-		-		-		-		-		-	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	*Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani*	65.22	72.18	522,981,070	79.13	528,210,881	86.09	533,492,990	93.05	538,827,919	100	544,216,199		544,216,199	
				Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	156.00	171		187		203		220		238		238		
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	*Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial*	100	100	39,400,000	100	39,794,000	100	40,191,940	100	40,593,859	100	40,999,798	100	40,999,798	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	*Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat*	5.017	5.017	554,064,753	5.017	559,605,401	5.017	565,201,455	5.017	570,853,469	25.085	576,562,004	25.085	576,562,004	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Menurunnya persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100.000	90.000		81.010		72.900		65.610		59.040		59.040		
1	0 6	0 7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	*Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan*			-		-		-		-		-		-	
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**0 7**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**															***DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI***
2	0 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	802,000,000	100	810,020,000	100	818,120,200	100	826,301,402	100	834,564,416	100	756,519,115	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,659,700,374	100	1,742,685,392	100	1,829,819,662	100	1,921,310,645	100	2,017,376,177	100	2,017,376,177	
2	0 7	0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	*Meningkatnya Presentasi Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan*	11.94	*13.06*	90,000,000	*14.93*	90,900,000	18.66	91,809,000	20.52	92,727,090	22.39	93,654,361	22.39	93,654,361	
2	0 7	0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	*Peninkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan*	40.51	44.30	560,000,000	50.63	565,600,000	56.96	571,256,000	63.29	576,968,560	69.62	582,738,246	69.62	582,738,246	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	*Meningkatnya penempatan tenaga kerja*	100	100	1,091,326,104	100	1,102,239,365	100	1,113,261,759	100	1,124,394,376	100	1,135,638,320	100	1,135,638,320	
2	07	04	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	*Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan*	100	100	155,000,000	100	156,550,000	100	158,115,500	100	159,696,655	100	161,293,622	100	161,293,622	
				Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	29.09	31.82		36.36		40.91		45.45		50.00		50.00		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi*	100	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,040	100	41,624,160	100	41,624,160	
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	*Cakupan pengembangan KTM Ponu*	25	35	950,000,000	50	25,250,000	65	25,502,500	80	25,757,525	100	26,015,100	100	26,015,100	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**0 8**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**															
2	0 8	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	464,615,903.00		469,262,062		473,954,683		478,694,229		483,481,172		483,481,172	***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100												
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100												
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,376,155,753		1,444,963,541		1,517,211,718		1,593,072,304		1,672,725,919		1,672,725,919	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	0 8	0 2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	*Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah*	4.30	4.60	35,000,000	4.80	35,350,000	5.00	35,703,500	5.20	36,060,535	5.40	36,421,140	5.40	36,421,140	
				Meningkatnya peroporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	0	0		0		30.00		30.00		30.00		30.00		
2	0 8	0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	*Menurunya Rasio KDRT*	0.07	0.06	896,651,919	0.05	905,618,438	0.04	914,674,623	0.03	923,821,369	0.02	933,059,582	0.02	933,059,582	
				Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	22.90	23.00		24.00		25.00		26.00		27.00		27.00		
				Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	69.50	70.00		72.00		74.00		76.00		78.00		78.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	31.30	32.00		34.00		36.00		38.00		40.00		40.00		
				Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0.76	1.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		
2	0 8	0 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	*Meningkatnya kualitas keluarga*	100	100	230,000,000	100	232,300,000	100	234,623,000	100	236,969,230	100	239,338,922	100	239,338,922	
2	0 8	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	*Meningkatnya pengelolaan sistem data gender dan anak*	100	100	45,000,000	100	45,450,000	100	45,904,500	100	46,363,545	100	46,827,180	100	46,827,180	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	*Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)*	100	100	215,000,000	100	217,150,000	100	219,321,500	100	221,514,715	100	223,729,862	100	223,729,862	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	*Meningkatnya perlindungan khusus anak*	100	100	200,957,000	100	202,966,570	100	204,996,236	100	207,046,198	100	209,116,660	100	209,116,660	
2	**9**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**															
2	9	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	663,298,014	100	669,930,994	100	676,630,304	100	683,396,607	100	690,230,573	100	690,230,573	***DINAS PANGAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,420,591,042		2,541,620,594		2,668,701,623		2,802,136,705		2,942,243,540		2,942,243,540	
2	9	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	*Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan*	100	100	291,300,000	100	294,213,000	100	297,155,130	100	300,126,681	100	303,127,948	100	303,127,948	
2	9	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	*Meningkatnya Ketersediaan pangan utama*	68.77	69.86	560,000,000	70.23	565,600,000	71.24	571,256,000	73.50	576,968,560	75.85	582,738,246	75.85	582,738,246	
				Meningkatnya Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,125	4,025		4,130		4,135		4,160		4,200		4,200		
					76.30	97.60		99.85		102.1		104.35		106.6		106.6		
2	9	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	*Tersedianya Penanganan Kerawanan Pangan*	100	100	367,750,000	100	371,427,500	100	375,141,775	100	378,893,193		382,682,125	100	382,682,125	
2	9	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		100	100	150,000,000	100	151,500,000	100	153,015,000	100	154,545,150		156,090,602	100	156,090,602	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**1 1**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**															***DINAS LINGKUNGAN HIDUP***
2	1 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	905,100,000.00	100	914,151,000	100	923,292,510	100	932,525,435	100	941,850,689	100	941,850,689	
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,598,706,783.00	100	1,678,642,122	100	1,762,574,228	100	1,850,702,940	100	1,943,238,087	100	1,943,238,087	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	*Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota*	-	-	-	Ada	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	400,000,000	-	400,000,000	
				Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota	-	-		-		Ada		-		-		-		
				Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten / kota	Ada	-		-		-		-		Ada		Ada		
2	1 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas air*	15	16	1,377,635,475	17	1,391,411,830	18	1,405,325,948	19	1,419,379,208	20	1,433,573,000	20	1,433,573,000	
				Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas udara	50	51		52		53		54		55		55		
				Meningkatnya hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	50	55		60		65		70		75		75		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	*Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)*	100	100	1,394,567,100	100	1,408,512,771	100	1,422,597,899	100	1,436,823,878	100	1,451,192,116	100	1,451,192,116	
2	1 1	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	*Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)*	100	100	42,000,000	100	42,420,000	100	42,844,200	100	43,272,642	100	43,705,368	100	43,705,368	
2	1 1	0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)*	100	100	112,972,550	100	114,102,276	100	115,243,298	100	116,395,731	100	117,559,689	100	117,559,689	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 1	0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	*Meningkatnya fasilitasi pendampingan pengakuan MHA*	-	0		2		4		6		8		8		
				Meningkatnya verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	32	64	20,000,000	96	20,200,000	128	20,402,000	160	20,606,020	192	20,812,080	192	20,812,080	
				Meningkatnya verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	32	64		96		128		160		192		192		
				Meningkatnya penetapan hak MHA	-	0		2		4		6		8		8		
2	1 1	0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat*	100	100	141,523,289	100	142,938,522	100	144,367,907	100	145,811,586	100	147,269,702	100	147,269,702	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 1	0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	*Terlaksananya pemberian pennghargaan lingkungan hidup*	Ada	ada	65,000,000	Ada	65,650,000	ada	66,306,500	ada	66,969,565	ada	67,639,261	ada	67,639,261	
2	1 1	1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	*Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup*	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	15,609,060	
2	1 1	1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	*Meningkatnya timbulan yang ditangani*	1.38	11.38	2,232,262,897	21.38	2,254,585,526	31.38	2,277,131,381	41.38	2,299,902,695	51.38	2,322,901,722	51.38	2,322,901,722	
				Meningkatnya persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.028	10.028		20.028		30.028		40.028		50.028		50.028		
				Meningkatnya persentase jumlah sampah yang tertangani	28.08	38.08		48.08		58.08		68.08		78.08		78.08		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	1,026,625,287	100	1,036,891,540	100	1,047,260,455	100	1,057,733,060	100	1,068,310,390	100	1,068,310,390	***DUKCAPIL***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,444,553,554.69	100	1,445,275,831	100	1,517,539,623	100	1,593,416,604	100	1,673,087,434	100	1,673,087,434	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	*Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk*	89.62	8.00	2,628,691,088	8.00	2,654,977,999	8.00	2,681,527,779	8.00	2,708,343,057	8.00	2,735,426,487	8.00	2,735,426,487	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
				Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran	49.81	400		425		450		475		500		500		
2	1 2	0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	*Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk*	0.896	7.00		7.25		7.50		7.75		8.00		8.00		
				Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	0.385	1.00	971,598,364	1.25	981,314,348	1.25	991,127,491	1.50	1,001,038,766	1.50	1,011,049,154	1.50	1,011,049,154	
				Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah														
2	1 2	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	*Meningkatnya ketersediaan database kependudukan skala provinsi*	Ada	ada	158,046,083	ada	159,626,544	ada	161,222,809	ada	162,835,037	ada	164,463,388	ada	164,463,388	
2	1 2	0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	*Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan*			-											

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	1,405,097,077.00	100	1,419,148,048	100	1,433,339,528	100	1,447,672,924	100	1,462,149,653	100	1,462,149,653	***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,459,052,054	100	2,582,004,656	100	2,711,104,889	100	2,846,660,134	100	2,988,993,140	100	2,988,993,140	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 3	0 2	PROGRAM PENATAAN DESA	*Meningkatnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik*	65	66	1,665,000,000	71	1,681,650,000	79	1,698,466,500	81	1,715,451,165	100	1,732,605,677	100	1,732,605,677	
2	1 3	0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya adminasi pemerintah desa*	100	100	221,495,096,001	100	223,710,046,961	100	225,947,147,431	100	228,206,618,905	100	230,488,685,094	100	230,488,685,094	
2	1 3	0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)*	3.20	3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		3.20		
				Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	6.40	6.40	6,716,600,000	6.40	6,783,766,000	6.40	6,851,603,660	6.40	6,920,119,697	6.40	6,989,320,894	6.40	6,989,320,894	
				Meningkatnya persentase LSM aktif	0.30	0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		
				Meningkatnya persentase PKK aktif	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya persentase posyandu aktif	89.00	89.00		92.00		92.00		92.00		92.00		92.00		
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**															
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	649,461,374.00	100	655,955,988	100	662,515,548	100	669,140,703	100	675,832,110	100	675,832,110	***DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,987,233,449	100	2,086,595,121	100	2,190,924,878	100	2,300,471,121	100	2,415,494,677	100	2,415,494,677	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 4	0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	*Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)*	1.16	1.15		1.14		1.12		1.12		1.12		1.12		
				menurunnya Fertility Rate (TFR)	3.22	3.13		3.03		2.96		2.87		2.87		2.87		
				Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69.51	72.23	179,873,996	74.95	181,672,736	77.67	183,489,463	80.39	185,324,358	80.39	187,177,602	80.39	187,177,602	
				menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14.45	14.20		13.83		13.58		13.36		13.36		13.36		
2	1 4	0 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	*menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)*	31.49	30.65	6,728,100,151	29.86	6,795,381,153	27.84	6,863,334,964	27.16	6,931,968,314	27.16	7,001,287,997	27.16	7,001,287,997	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	49.50	54.10		58.70		63.30		67.90		67.90		67.90		
2	14	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	*Dependency Ratio*	64	63	1,019,476,639	63	1,029,671,405	62	1,039,968,119	61	1,050,367,801	61	1,060,871,479	61	1,060,871,479	
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**															
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	706,119,459.00	100	713,180,654	100	720,312,460	100	727,515,585	100	734,790,741	100	734,790,741	***DINAS PERHUBUNGAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,153,878,032	100	2,261,571,933	100	2,374,650,530	100	2,493,383,056	100	2,618,052,209	100	2,618,052,209	
2	1 5	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	*Meningkatnya Jumlah arus penumpang angkutan umum*	0.52	0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		0.52		
				Meningkatnya Rasio ijin trayek	0.10	0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		
				Meningkatnya Jumlah uji kir angkutan umum	1,158	1250	2,139,146,226	1500	2,910,537,688.26	1500	2,182,143,065	1500	2,203,964,496	1500	2,226,004,140	1500	2,226,004,140	
				Meningkatnya Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1	1		1		1		1		1		1		
				Meningkatnya Persentase layanan angkutan darat	0.07	0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0.21	0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		0.21		
				Meningkatnya Pemasangan Rambu- rambu	42.40	47.25		54.54		64.24		76.37		100		100		
				Meningkatnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2.18	2.18		2.18		2.18		2.18		2.18		2.18		
				Meningkatnya Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	88,130	105,756		126,907		152,288		182,746		219,295		219,295		
				Meningkatnya Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	4,164	4,364		4,564		4,764		4,964		5,164		5,164		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1 6	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	641,750,000	100	648,167,500	100	654,649,175	100	661,195,667	100	667,807,623	100	667,807,623	***KOMINFOTIK***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,114,946,515.35	100	2,220,693,841.12	100	2,331,728,533.17	100	2,448,314,959.83	100	2,570,730,707.82	100	2,570,730,708	
2	1 6	0 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	*Meningkatnya informasi dan komunikasi publik*	100	100	667,000,000	100	673,670,000	100	680,406,700	100	687,210,767	100	694,082,875	100	694,082,875	
2	1 6	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	*Meningkatnya aplikasi informatika*	100	100	335,000,000	100	2,338,350,000	100	341,733,500	100	345,150,835	100	348,602,343	100	348,602,343	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2 1	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	*Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi*	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	15,609,060	
2	2 0	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	*Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral*	100	100	248,210,381	100	250,692,485	100	253,199,410	100	255,731,404	100	258,288,718	100	258,288,718	
																	0	
2	**1 7**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**															***DINAS KOPERASI DAN UKM***
2	1 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	822,453,950	100	830,678,490	100	838,985,274	100	847,375,127	100	855,848,878	100	855,848,878	
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,664,199,368.23		1,747,409,336.65		1,834,779,803.48		1,926,518,793.65		2,022,844,733.33		2,022,844,733	
2	1 7	0 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	*Meningkatnya pemeriksaan koperasi*	100	100	69,654,458	100	70,351,003	100	71,054,513	100	71,765,058	100	72,482,708	100	72,482,708	
2	1 7	0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	*Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi*	100	100	77,809,425	100	78,587,519	100	79,373,394	100	80,167,128	100	80,968,800	100	80,968,800	
2	1 7	0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	*Meningkatnya Pendidikan dan latihan perkoperasian*	86.49	89.19	327,891,166	91.89	331,170,078	*94.59*	334,481,778	97.30	337,826,596	100.00	341,204,862	100.00	341,204,862	
2	1 7	0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	*Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi*	100	100	79,239,392	100	80,031,786	100	80,832,104	100	81,640,425	100	82,456,829	100	82,456,829	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	*Meningkatnya Persentase Usaha Mikro dan Kecil*	100	100	79,148,675	100	79,940,162	100	80,739,563	100	81,546,959	100	82,362,429	100	82,362,429	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	*Meningkatnya pengembangan UKM*	100	100	413,216,589	100	417,348,755	100	421,522,242	100	425,737,465	100	429,994,840	100	429,994,840	
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**															
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	608,470,346	100	614,555,049	100	620,700,600	100	626,907,606	100	633,176,682	100	633,176,682	***DINAS PMPTSP***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,039,772,597.98	100	2,141,761,227.88	100	2,248,849,289.27	100	2,361,291,753.74	100	2,479,356,341.42	100	2,479,356,341.42	
2	1 8	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal*	100	100	186,000,000	100	187,860,000	100	189,738,600	100	191,635,986	100	193,552,346	100	193,552,346	
2	1 8	0 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya promosi penanaman modal*	100	100	143,000,000	100	144,430,000	100	145,874,300	100	147,333,043	100	148,806,373	100	148,806,373	
2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pelayanan penanaman modal*	100	100	114,500,000	100	115,645,000	100	116,801,450	100	117,969,465	100	119,149,159	100	119,149,159	
2	1 8	0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal*	100	100	442,223,000	100	446,645,230	100	451,111,682	100	455,622,799	100	460,179,027	100	460,179,027	
2	1 8	0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	*Meningkatnya pengelolaan data sistem informasi penanaman modal*	100	100	10,000,000	100	10,100,000	100	10,201,000	100	10,303,010	100	10,406,040	100	10,406,040	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	23		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**															
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	599,710,118	100	605,707,219.18	100	611,764,291	100	617,881,934	100	624,060,754	100	624,060,754	***PERPUSTAKAAN DAN ARSIP***
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,131,296,781.67		2,237,861,620.76		2,349,754,701.80		2,467,242,436.88		2,590,604,559		2,590,604,559	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	*Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun*	2.02	2.21	634,049,255	2.40	640,389,748	2.59	646,793,645	2.79	653,261,581	2.98	659,794,197	2.98	659,794,197	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38.84	38.89		38.95		38.99		39.04		39.08		39.08		
				Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.82	1.83		1.84		1.85		1.86		1.87		1.87		
				Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	5,217	5,717		6,217		6,717		7,217		7,717		7,717		
				Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	24,148	25,398		26,648		27,898		29,148		30,398		30,398		
				Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	7.00	25.71		31.42		37.14		42.85		58.57		58.57		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	*Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku*	36.84	49.12	172,000,000	61.40	173,720,000	73.68	175,457,200	85.96	177,211,772	100	178,983,890	100	178,983,890	
				Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	3		4		5		6		7		7		
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**															***DINAS PERIKANAN***
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	4,980,414,432	100	990,218,576	100	1,000,120,762	100	1,010,121,970	100	1,020,223,189	100	1,020,223,189	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur ***(Pembangunan gedung kantor thn 2022 Rp. 4 M)***	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,695,438,968.45	100	1,780,210,916.87	100	1,869,221,462.72	100	1,962,682,535.85	100	2,060,816,663	100	2,060,816,663	
3	2 5	0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	*Meningkatnya Produksi perikanan*	90.38	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya Cakupan bina kelompok nelayan	40.54	52.43	416,453,596	64.32	420,618,132	76.21	424,824,313	88.10	429,072,556	100	433,363,282	100	433,363,282	
3	2 5	0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya*	50	60	377,124,283	70	380,895,526	*80*	384,704,481	90	388,551,526	100	392,437,041	100	392,437,041	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	25	04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	*Meningkatnya Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikkanan*	100	100	244,880,191	100	247,328,993	100	249,802,283	100	252,300,306	100	254,823,309	100	254,823,309	
				Meningkatnya Produksi perikanan kelompok nelayan	91.08	0		100		100		100		100		100		
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**															
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	777,823,400	100	785,601,634	100	793,457,650	100	801,392,227	100	809,406,149	100	809,406,149	
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,220,029,808.29	100	2,331,031,298.70	100	2,447,582,863.64	100	2,569,962,006.82	100	2,698,460,107.16	100	2,698,460,107.16	
2	2 2	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	*Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan*	100	100	964,080,807	100	973,721,615	100	983,458,831	100	993,293,420	100	1,003,226,354	100	1,003,226,354	
2	2 2	0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	*Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional*	100	100	150,000,000	100	631,500,000	100	637,815,000	100	644,193,150	100	650,635,082	100	156,090,602	
2	2 2	0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	*Meningkatnya pembinaan sejarah*	100	100	172,544,567	100	174,270,013	100	176,012,713	100	177,772,840	100	179,550,568	100	179,550,568	
3	**2 6**		**URUSAN BIDANG PARIWISATA**															
3	2 6	0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	*Meningkatnya dayatarik destinasi pariwisata*	100	100	1,300,000,000	100	1,313,000,000	100	1,326,130,000	100	1,339,391,300	100	1,352,785,213	100	1,352,785,213	
3	2 6	0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	*Meningkatnya pemasaran pariwisata*	100	100	225,000,000	100	227,250,000	100	229,522,500	100	231,817,725	100	234,135,902	100	234,135,902	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	*Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif*	100	100	52,500,000	100	53,025,000	100	53,555,250	100	54,090,803	100	54,631,711	100	54,631,711	
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**															
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	2,031,214,938	100	2,051,527,087	100	2,072,042,358	100	2,092,762,782	100	2,113,690,410	100	2,113,690,410	***DINAS PERTANIAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	10,188,870,423.15		10,698,313,944.31		11,233,229,642		11,794,891,124		12,384,635,680		12,384,635,680	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100	100	198,699,808	100	200,686,806	100	202,693,674	100	204,720,611	100	206,767,817	100	206,767,817	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB*	39.82	39.85		39.88		39.91		39.94		39.97		39.97		
				Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB	24.50	24.53		24.56		24.59		24.62		24.65		24.65		
				Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB	0.036	0.068	1,606,807,449	0.098	1,622,875,523	0.128	1,639,104,279	0.158	1,655,495,322	0.188	1,672,050,275	0.188	1,672,050,275	
				Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB	100	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	98.83	98.86		98.89		98.92		98.95		98.98		98.98		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	*Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian*	100	100	129,998,527	100	131,298,512	100	132,611,497	100	133,937,612	100	135,276,988	100	135,276,988	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani*	100	100	3,659,279,278	100	3,695,872,071	100	3,732,830,791	100	3,770,159,099	100	3,807,860,690	100	3,807,860,690	
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	819,657,414	100	827,853,988	100	836,132,528	100	844,493,853	100	852,938,792	100	852,938,792	***DINAS PETERNAKAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	4,271,571,235		4,485,149,796.67		4,709,407,287		4,944,877,651		5,192,121,533		5,192,121,533	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian*	100	100	7,082,069,472	100	7,299,763,508.91	100	7,114,419,068.67	100	11,202,280,680.49	100	26,300,996,936.17	100	26,300,996,936.17	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian*			-	100	200,000,000.00	100	160,000,000.00	100	240,000,000.00	100	400,000,000.00	100	400,000,000.00	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak*	55	60	663,479,353	65	670,114,147	70	676,815,288	75	683,583,441	80	690,419,275	80	690,419,275	
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**															***DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN***
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	493,725,555	100	498,662,810.55	100	503,649,438.66	100	2,648,685,933.04	100	513,772,792.37	100	513,772,792.37	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,756,252,121.73		1,844,064,727.82		1,936,267,964		2,033,081,362		2,134,735,431		2,134,735,431	
3	3 1	0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok pengrajin*	25	30	1,280,048,000	36	1,292,848,480	41	1,305,776,965	52	1,318,834,734	58	1,332,023,082	58	1,332,023,082	
3	3 1	0 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	*Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabuaten / Kota*	100	100	255,000,000	100	257,550,000	100	260,125,500	100	262,726,755		265,354,023	100	265,354,023	
3	3 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	*Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri Nasional*	100	100	125,000,000	100	126,250,000	100	127,512,500	100	128,787,625	100	130,075,501	100	130,075,501	
3	**3 0**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**														-	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3 0	0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	*Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan*	100	100	40,000,000	100	40,400,000	100	40,804,000	100	41,212,040	100	41,624,160	100	41,624,160	
3	3 0	0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	*Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal*	19.30	16.40	347,000,000	16.70	350,470,000	16.95	353,974,700	17.17	357,514,447	17.36	361,089,591	17.36	361,089,591	
3	3 0	0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	*Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting*	100	100	160,000,000	100	161,600,000	100	163,216,000	100	164,848,160	100	166,496,642	100	166,496,642	
3	3 0	0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	*Meningkatnya pengembangan ekspor*	100	100	15,000,000	100	15,150,000	100	15,301,500	100	15,454,515	100	15,609,060	100	15,609,060	
3	3 0	0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	*Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen*	100	100	95,000,000	100	95,950,000	100	96,909,500	100	97,878,595	100	98,857,381	100	98,857,381	
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**															
4	**1**		**SEKRETARIAT DAERAH**															

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	14,618,643,216.62	100	14,764,829,648.79	100	14,912,477,945	100	15,061,602,725	100	15,212,218,752	100	15,212,218,752	
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		***SEKRETARIAT DAERAH***
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	7,748,063,613.15		8,135,466,793.81		8,542,240,133.50		8,969,352,140.17		9,417,819,747.18		9,417,819,747.18	
4	1	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	*Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*	100	100	3,186,650,000	100	3,218,516,500	100	3,250,701,665	100	3,283,208,682	100	3,316,040,768	100	3,316,040,768	
4	1	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	*Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan*	100	100	2,023,553,685	100	2,043,789,222	100	2,064,227,114	100	2,084,869,385	100	2,105,718,079	100	2,105,718,079	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	2		SEKRETARIAT DPRD															
4	0 2	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	3,411,305,454	100	3,445,418,509	100	3,479,872,694	100	3,514,671,421	100	3,549,818,135	100	3,549,818,135	***SEKWAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	16,269,097,579.49		17,082,552,458.46		17,936,680,081.39		18,833,514,085.46		19,775,189,789.73		19,775,189,789.73	
4	0 2	0 3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	*Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota*	Ada	Ada	7,100,411,235	Ada	7,101,121,276.27	Ada	7,278,649,308	Ada	7,460,615,541	Ada	7,647,130,929	Ada	7,647,130,929	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	0 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	1,366,500,000	100	1,380,165,000	100	1,393,966,650	100	1,407,906,317	100	1,421,985,380	100	1,421,985,380	***BAPELITBANGDA***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,245,656,888.67	100	2,357,939,733.10	100	2,475,836,719.75	100	2,599,628,556	100	2,729,609,984	100	2,729,609,984	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	*Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*	100	100	985,000,000	100	994,850,000	100	1,004,798,500	100	1,014,846,485	100	1,024,994,950	100	1,024,994,950	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	*Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah*	100	100	864,322,339	100	918,320,563	100	1,165,825,675	100	1,520,714,085	100	2,152,816,922.76	100	2,152,816,923	
5	**05**		**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	*Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Daerah*		-	128,000,000		300,000,000		303,000,000		306,030,000		309,090,300		312,181,203	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2		KEUANGAN															
5	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	3,624,033,065	100	3,660,273,396	100	3,696,876,130	100	3,733,844,891	100	3,771,183,340	100	3,771,183,340	***BKA***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	13,981,709,719	100	14,680,795,204.45	100	15,414,834,964.68	100	16,345,040,522.89	100	17,162,292,549.03	100	17,162,292,549	
5	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				8,305,522,653		8,388,577,880		8,472,463,658.33		8,557,188,295		8,642,760,178		8,642,760,178	
5	2	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,173,223,944		1,184,956,183		1,196,805,745		1,208,773,803		1,220,861,541		1,220,861,541	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	1,027,501,837	100	1,037,776,855	100	1,048,154,624	100	1,058,636,170	100	1,082,539,732.00	100	1,069,222,532	
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		***BAPENDA***
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	3,125,214,530	100	3,281,475,256.48	100	3,445,549,019.31	100	3,617,826,470.27	100	3,798,717,793.79	100	3,798,717,794	
5	2	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,615,693,008		1,631,849,938.08		1,648,168,437		1,664,650,122		1,667,979,423		1,667,979,423	
5	**2**		**KEPEGAWAIAN**															

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	905,534,040	100	907,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	100	908,539,040	***KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	2,129,755,389	100	2,236,243,158.58	100	2,348,055,316.51	100	2,465,458,082.33	100	2,588,730,986.45	100	2,588,730,986.45	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	*Meningkatnya rata-rata lama peawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan*	90 hari	90 hari	4,835,989,697	90 hari	4,921,468,128.22	90 hari	4,976,632,744	90 hari	4,922,014,313	90 hari	4,971,234,456	90 hari	4,971,234,456	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1.17	16		21		26		31		36		36		
				Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	18.15	156		166		176		186		196		196		
				Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33 orang	39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		39 orang		
				Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2767 orang	2777 orang		2787 orang		2797 orang		2807 orang		2817 orang		2817 orang		
				Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2123 orang	2223 orang		2323 orang		2423 orang		2523 orang		2623 orang		2623 orang		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	0 4	0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	*Telaksanannya kegiatan pegebangan kompetensi teknis*	100	100	1,790,874,000	100	1,978,714,546.15	100	2,000,627,147.51	100	2,134,103,567.83	100	2,164,529,993.91	100	2,164,529,994	
5	**7**		**PENGELOAAN PERBATASAN**															
5	7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100		100		100		100		100		100		***BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100	751,022,447.00	100	758,532,671	100	766,117,998	100	773,779,178	100	781,516,970	100	781,516,970	
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	776,518,612.09	100	815,344,542.70	100	856,111,769.83	100	898,917,358.32	100	943,863,226.24	100	943,863,226.24	
5	7	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	*TerlasananyaPengeloaanperbatasan*	100	100	442,200,000	100	446,622,000	100	451,088,220	100	455,599,102	100	460,155,093	100	460,155,093	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	1,268,699,743	100	1,280,846,740	100	1,293,655,207	100	1,306,591,759	100	1,319,657,677	100	1,319,657,677	***INSPEKTORAT***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	3,495,779,491.23	100	3,670,568,465.79	100	3,854,096,889	100	4,046,801,734	100	4,249,141,820	100	4,249,141,820	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	*Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan*	59.89	62	1,510,000,000	64	1,525,100,000	66	1,540,351,000	68	1,555,754,510	70	1,571,312,055	70	1,571,312,055	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Menurunnya Persentase pelanggaran pegawai	0.42	0.4		0.3		0.2		0.1		0.00		0.00		
				Menurunnya Jumlah temuan BPK	698	0		0		0		0		0		0		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	*Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi*	100	100	239,300,257	100	242,233,260	100	244,655,593	100	247,102,149	100	249,573,170	100	249,573,170	
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**															
7	**01**		**KECAMATAN**															
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	9,181,485,009.56	100	9,273,299,859.66	100	9,366,032,858.25	100	9,459,693,186.83	100	9,554,290,118.70	100	9,554,290,118.70	***KECAMATAN***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	30,853,959,609.50	100	32,396,657,589.97	100	34,016,490,469.47	100	35,717,314,992.94	100	37,503,180,743	100	37,503,180,743	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	*Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan piblik*	100	100	1,174,254,327	100	1,185,996,870	100	1,197,856,839	100	1,209,835,407	100	1,221,933,761	100	1,221,933,761	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*	100	100	5,156,232,994	100	5,207,795,324	100	5,259,873,277	100	5,312,472,010	100	5,365,596,730	100	5,365,596,730	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	*Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum*	100	100	302,987,554	100	306,017,430	100	309,077,604	100	312,168,380	100	315,290,064	100	315,290,064	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	*meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum*	100	100	895,589,743	100	904,545,640	100	913,591,097	100	922,727,008	100	931,954,278	100	931,954,278	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	*Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa*	100	100	1,974,227,287	100	1,993,969,560	100	2,013,909,255	100	2,034,048,348	100	2,054,388,832	100	2,054,388,832	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**															
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	*Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas*	100	100	438,605,000	100	389,765,000	100	393,662,650	100	397,599,277	100	401,575,269	100	401,575,269	***KESBANGPOL***
				Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	100		100		100		100		100		100		
				tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100	100		100		100		100		100		100		
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	100	1,776,926,331		1,865,772,648		1,959,061,280		2,057,014,344		2,159,865,061		2,159,865,061	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	*Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	100	100	120,555,000	100	75,000,000	100	75,750,000	100	76,507,500	100	77,272,575	100	77,272,575	

KODE REKENING			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			KARAKTER KEBANGSAAN															
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	*Meningkatnya Peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik*	100	100	776,690,000	100	881,235,000	100	43,782,750,565	100	898,947,824	100	907,937,302	100	907,937,302	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	*Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyrakatan*	100	100	28,250,000	100	28,150,000	100	28,431,500	100	28,715,815	100	29,002,973	100	29,002,973	
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	*Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya*	100	100	46,900,000	100	48,850,000	100	49,338,500	100	49,831,885	100	50,330,204	100	50,330,204	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	*Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial*	100	100	89,000,000	100	92,000,000	100	92,920,000	100	93,849,200	100	94,787,692	100	94,787,692	
																	0	
							1,116,128,118,156.14		**1,607,440,055,597.00**		**1,189,423,492,610.35**		**1,192,742,407,968.90**		**1,253,152,715,751.25**		**1,253,152,715,751.25**	

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah khusunya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

8.1. Indikator Kinerja Utama

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, disajikan dalam tabel 8.1.

Tabel. 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Indikator	KondisiKinerja Pada Awal Periode RPJMD	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Akhir Pada Akhir Periode RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Misi I Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan							
Pertumbuhan Ekonomi	-0.55	4.0-5.4	5.4-5.9	5.9-6.4	6.4-6.9	6.9-7.4	6.9-7.4
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1:13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.23	1.23
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	5:51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.56
Persentasi Koperasi Aktif (%)	86.49	89.19	91.89	94.59	97.3	100	100
Kunjungan Wisata (%)	24.80	26.70	48:00:00	68:00:00	88:00:00	100	100
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	89	91.2	93.4	95.6	97.8	100	100
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.33	3.3	3.27	3.25	3.22	3.19	3.19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	78.13	78.17	78.22	78.25	78.28	78.31	78.31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38.33	50.66	62.99	75.32	87.65	99.98	99.98
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50	55	60	65	70	75	75
Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	15	16	17	18	19	20	20
Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	50	51	52	53	54	55	55

Indikator	KondisiKinerja Pada Awal Periode RPJMD	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Akhir Pada Akhir Periode RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	0	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68	784,037.68
Misi II Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat							
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63.53	64.04	64.74	65.44	66.14	66.84	66.84
Angka Melek Huruf (%)	94.37	95.5	96.63	97.76	98.89	100	100
Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.5	7.75	8	8.25	8.5	9	9
Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	66.9	67.4	67.9	68.4	68.9	69.4	69.4
Prevalensi Stunting (%)	28.9	23	18	14	12	11	11
Persentase Perumahan yang layak huni (%)	0.12	0.24	0.37	0.5	0.63	0.76	0.76
Penambahan rumah layak huni (Unit)	31340	31745	32150	32555	32960	33365	33365
Misi III Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur							
Persentase layanan sarpras	54.39	63.51	72.63	81.75	90.87	100	100
persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35.43	36.61	37.78	38.96	40.14	41.32	41.32
Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89
Rasio Jaringan Irigasi (%)	9.96	10.956	11.952	12.948	13.944	14.94	14.94
Misi IV Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif							
Indeks Reformasi Birokrasi	44.54 (C)	51.63 (CC)	58.72 (CC)	65.81 (B)	72.9 (BB)	80 (BB)	80 (BB)
Nilai SAKIP (Skor)	50.22 (CC)	56	62	68	74	80	70
Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15

Indikator	KondisiKinerja Pada Awal Periode RPJMD	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja Akhir Pada Akhir Periode RPJMD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
Indeks Merit Sistem (skor)	2	3	3	3	4	4	4
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5
Misi V Mengembangkan kawasan stretegis daerah							
Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah	21.45	28.1	35.93	43.76	51.6	59.43	59.43
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	30.145	26.51	32.38	38.25	44.12	50	50
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	19.91	20.21	20.51	20.81	21.11	21.41	21.41
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	2.76	2.77	2.78	2.79	2.8	2.81	2.81
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1.13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.23	1.23
Kunjungan Wisata pada Kawasan Pantai Utara (%)	12.4	29.92	47.44	64.96	82.48	100	100
Cakupan pengembangan KTM Ponu (%)	25	40	55	70	85	100	100
Persentase jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam kondisi baik (%)	67.88	74.3	80.72	87.14	93.56	99.98	99.98
Kunjungan Wisata pada Kawasan Perbatasan (%)	12.4	29.92	47.44	64.96	82.48	100	100

Sumber : Olahan Tim Perumus RPJMD, 2021

8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan capaian kinerja urusan pemerintahan yang meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu : Aspek kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Penetapan indicator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel 8.2 dibawah ini.

Tabel 8.2

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB (%)	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	-0.55	6.33-6.90	6.7-7.3	7.07-7.64	7.44-8.01	7.81-8.38	7.81-8.38
2	Laju Inflasi		0.83	3.0-3.2	3.0-3.2	2.8-3.0	2.8-3.0	2.8-3.0	2.8-3.0
3	PDRB Perkapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	4.087	4.088	4.089	4.090	4.091	4.092	4.092

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Nilai Investasi (Milyard Rupiah)		37,88	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
5	Indeks Gini		0,36	0,35-0,34	0,35-0,33	0,34-0,32	0,34-0,31	0,33-0,30	0,33-0,30
6	Persentase kemiskinan (%)	$IPM = {}^{1}/_{3}\ [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$	22.28	22.03	21.78	21.53	21.28	21.03	21.03

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	$Po = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{Z - Yi}{Z}\right]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak Indeks $X_{(i)} = X_{(i)} - X_{(i)min} / [X_{(i)maks} - X_{(i)min}]$ Dimana: $X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) $X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah $X_{(i)}$ $X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah $X_{(i)}$ Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	63.30	64.00	64.70	65.40	66.10	66.80	66.80
8	Indeks Pembangunan Gender	PG = IPM perempuan / IPM laki-laki	95.55	96.44	97.33	98.22	99.11	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Angka melek huruf (%)	$LIT^{t}_{15+}=\frac{L^{t}_{15+}}{P^{t}_{15+}} \times 100\%$ Dimana: LIT^{t}_{15+} = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun L^{t}_{15+} = Jumlah penduduk (usia 15 yahun diatas) yan P^{t}_{15+} = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Indikator Komponen IPM (=X(I)) / Nilai maksimum / Nilai Minimum / Catatan Angka Harapan Hidup / 85 / 25 / Sesuai standar global (UNDP) Angka Melek Huruf / 100 / 0 / Sesuai standar global (UNDP) Rata-rata lama sekolah / 15 / 0 / Sesuai standar global (UNDP) Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 / 732.720 a) / 300.000 b) / UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	94.37	95.5	96.63	97.76	98.89	100	100
10	Angka rata-rata lama sekolah (%)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	7.50	9.00	10.50	12.00	13.50	15.00	15.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Angka usia harapan hidup (%)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	66.90	67.32	67.74	68.16	68.58	69.00	69.00
12	Persentase balita gizi buruk (%)	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10
13	Prevalensi balita gizi kurang (%)	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	5.29	5.00	4.90	4.80	4.70	4.60	4.60
14	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang di bentuk}} \times 100\%$	75	80	85	90	95	100	100
15	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	78.13	78.17	78.22	78.25	78.28	78.31	78.31
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	3.33	3.30	3.27	3.25	3.22	3.19	3.19

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Rasio penduduk yang bekerja (%)	$\text{Rasio Penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$	95.74	95.77	95.81	95.85	95.88	95.92	95.92

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana: $\frac{\text{Jumlah penduduk angkata kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15–64 tahun)}} \times 100\%$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$	4.48	5.04	6.34	7.49	7.93	8.39	8.39
	Rasio PAD	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Pendapatan Daerah	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
15	Opini BPK (Opini)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) X Bobot masing-masing kelompok pangan	89	91,20	93,40	95,60	97,80	100	100
17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan" /"Jumlah PDRB" "×100%"	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
18	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dn perikana " /"Jumlah PDRB" "×100%"	39.82	40.12	40.42	40.72	41.02	41.32	41.32
19	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan " /"Jumlah PDRB" "×100%"	5.51	5.52	5.53	5.54	5.55	5.56	5.56

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	1.13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.23	1.23
21	Prevelensi Balita Stunting (%)	$\frac{\text{Jumlah balita stunting (pendek/sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	28.90	23.00	18.00	14.00	10.00	8.00	8.00
22	Presentasi Balita Gizi Buruk (%)	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10
23	Prevelensi Balita Gizi Kurang (%)	$\frac{\text{Prevalensi balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	5.29	5.00	4.90	4.80	4.70	4.60	4.60
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$	0.06	0.25	0.44	0.63	0.82	1.00	1.00
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{Jumlah anak usia 4–6 tahun}} \times 100\%$	92.6	94	96	97.5	98.5	99	100
1.4	Angka Partisipasi Murni:								
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7–12 tahun dijenjang SD/MI/PAket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompokm usia 7–12 tahun}} \times 100\%$	98.54	98.59	98.65	98.7	98.75	99	100
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13–15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket } B}{\textit{Jumlah penduduk kelompok } 13-15 \textit{ Tahun}} \times 100\%$	98.25	98.30	98.50	98.70	98.85	99	100
1.5	Angka partisipasi sekolah								
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	$APS_{7\text{-}12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$	985.40	985.09	986.50	987.00	987.50	990.00	1000

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	$APS_{7\text{-}12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13 – 15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$	982.5	983.30	985.50	987.00	988.50	990.00	1000
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0.82	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.30
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	2.37	2.30	2.20	2.10	2.00	1.90	1.90
1.7.	Angka Kelulusan:								
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99.65	99.70	99.75	99.80	99.85	99.90	99.90

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99.70	99.80	99.84	99.88	99.92	99.96	99.96
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):								
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	99.33	99.35	99.37	99.39	99.41	99.43	99.50
1.9.	Fasilitas Pendidikan:								
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	68.97	70.97	72.97	74.97	76.97	78.97	78.97
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik}}{\text{Jumlah sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	73.11	75.11	77.11	78.11	80.11	82.11	82.11

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn+(13 s.d 15)thn}} \times 10.000$	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.74
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$	935.49	936.98	937.86	939.72	940.61	941.49	941.49
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (%)	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$	93.55	93.69	93.79	93.97	94.86	94.15	94.15
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$	98.85	98.87	98.89	98.91	98.93	98.95	98.95
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	94.37	94.4	94.43	94.46	94.49	94.52	94.52

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	$\frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	82.74	82.92	82.94	82.95	83.03	83.51	83.51
1.20.	Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%)	$\frac{\text{Jumlah Guru Paud S1}}{\text{Total Guru Padu}} \times 100\%$	52.8	71.96	77.07	82.18	87.29	92.4	100
1.21.	Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%)	$\frac{\text{Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi}}{\text{Total lembaga PAUD}} \times 100\%$	15.31	16.38	20.19	24.00	27.81	31.62	31.62
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0 \le 1\,th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: $D_{0-\le 1th}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 ta $\sum$Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tal	8.24	8.00	7.70	7.50	7.20	7.00	7.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	$AKB=\frac{D_{0\leq 1\ th}}{\sum \text{Lahir Hidup}}\times 1000$ AKHB=(1-AKB) Dimana: 1 = per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (D0–≤1th = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tal	991.76	992.00	992.30	992.50	992.80	993.00	993.00
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$AKB=\frac{D_{0\leq 5\ th}}{\sum \text{Lahir Hidup}}\times 1000$ Dimana: $D_{0-\leq 5th}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 ta ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tal	9.92	9.82	9.50	9.00	8.50	8.00	8.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	131.14	130.00	128.00	126.00	124.00	122.00	122.00
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$	0.00077397	0.001161	0.001161	0.001161	0.001161	0.001161	0.001160955
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.72
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	$\frac{\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	2.90	2.70	2.60	2.75	2.70	2.50	2.50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahhuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun disatu wilayah pada waktu yang sama}} \times 100\%$	2.50	3.40	4.40	6.30	7.90	9.80	9.80
2.35.	Cakupan puskesmas (%)	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$	108.30	116.60	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2.36	Prevelensi penyakit tidak menular (%)	$\frac{\text{Jumlah penyakit tidak menular dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Penduduk diatas 15 tahun (< 15 tahun) dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	63.7	70.9	78.2	85.48	92.74	100	100
2.37	Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%)	$\frac{\text{Banyak kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	81.93	79.33	77.39	75.46	73.52	71.59	71.59

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin}} \times 100\%$	44.3	58.22	71.22	84.22	96.22	100	100
2.39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	$\frac{\text{Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan strata 3}}{\text{Jumlah penduk Miskin di kab/kota}} \times 100\%$	23.24	30.72	40.13	50.25	60.43	70.03	70.05
2.40	Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	■("Jlh puskesmas dengan status " @"akreditasi madya dan paripurna ")/"Jumlah seluruh puskesmas di kab/kota " ×100%	15.38	30.77	46.15	61.54	76.92	100	100
2.41	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (%)	"Jumlah rumah sakit " /"Jumlah penduduk " ×100%	0.27	0,36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.72

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.42	Posyandu Aktif	"Jumlah posyandu aktif " /"jumlah posyandu di kab/kota "	81.25	84.96	88.09	92.38	96.09	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	603,48	613,48	623,48	633,48	643,48	653,48	653,48
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten didaerah tersebut}} \times 100\%$	70,09	72,27	73,44	74,62	75,08	76,98	76,98

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$	20%	22%	24%	26%	28%	30%	30%
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	65,74	72,34	78,88	85,46	92,03	96,61	96,61
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	9,96	10,956	11,952	12,948	13,944	14,94	14,94
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89
3.2.	Penataan Ruang:								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}} \times 100\%$	0,870	0,871	0,873	0,875	0,878	0,881	0,881
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0.12	0.24	0.37	0.5	0.63	0.76	0.76
4.2.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas pemukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah pemukiman}}$	0.58	1.17	1.77	2.38	3	3.63	3.63
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	11	11.7	12.6	13.5	14.4	15.3	15.3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	26.96	28.67	30.82	33.02	35.27	37.57	37.57
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	$\frac{\text{100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{\text{1 Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100\ \%$	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan daerah pemekaran baru}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\ \%$	78%	84%	85%	87%	88%	89%	89%
5.5.	Persentase Penegakan PERDA (%)	"Jumlah penyelesai penegakan PERDA" /"Jumlah pelanggaran PERDA" x 100 %	47%	52.94%	58.82%	64.70%	70.58%	76.47%	76.47%
6.	Sosial								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani (%)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	65.22	72.18	79.13	86.09	93.05	100	100
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyakarat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi pesertaprogram pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama massa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \times 100\%$	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	25.09
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar		$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$							
1.	**Tenaga Kerja**								
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	"Jumlah sangketa pengusaha pekerja" /"Jumlah perusahaan" "×1000"	141.41	131.31	121.21	111.11	101.01	90.91	90.91
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	(∑"Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama")/(∑"Kasus yang dicatatkan") "×100%"	92.86	100	100	100	100	100	100
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	(∑"pencari kerja yang ditempatkan")/(∑"pencari kerja yang terdaftar") "×100%"	11.94	13.06	14.93	18.66	20.52	22.39	22.39

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Keselamatan dan perlindungan (%)	∑("Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun n")/∑("Jumlah perusahaan diwilayah kabupaten pada Tahun n") "x100%"	9.09	13.13	17.17	21.21	24.24	27.27	27.27
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	("Pekerja/buruh JAMSOSTEK")/("Pekerja/buruh") "x100%"	26.09	26.69	27.37	28.06	28.74	29.43	29.43
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	∑("Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n"	100	100	100	100	100	100	100
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	("tenaga kerja yang dilatih")/("pendaftar pelatihan berbasis kompetensi") "x100%"	40.51	44.30	50.63	56.96	63.29	69.62	69.62
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	("tenaga kerja yang dilatih")/("pedaftar pelatihan berbasis masyarakat") "x100%"	29.09	31.82	36.36	40.91	45.45	50.00	50.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	"Jumlah lulusan S1/S2/S3" /"Jumlah penduduk" "×100%"	5.82	5.99	6.18	6.37	6.56	6.74	6.74
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	4.3	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.4
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$	0	-	-	30%	30%	30%	30%
2.4.	Rasio KDRT (%)	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	0.07	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	22.90	23	24	25	26	27	27

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100\%$	69.5	70	72	74	76	78	78
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$	31.30	32	34	36	38	40	40
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$	0.76	1	2	2	2	2	2

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah perempuan yang diberdayakan secara ekonomi	Jumlah ril perempuan yang diberdayakan secara ekonomi	22	24	30	35	40	45	45
3.	**Pangan**								
3.1.	Ketersediaan pangan utama (%)	$\frac{\text{Rata-rata ketersediaaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	68.77	69.86	70.23	71.24	73.5	75.85	75.85
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	$\frac{\text{Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)}}{\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan Kalori X BDD}}{100}} \times 100\%$	3125	2225	2330	2335	2360	2400	2400
		$\frac{\text{Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):}}{\frac{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan kalori X BDD}}{100}} \times 100\%$	76.30	55.00	57.25	59.50	62.30	63.00	63.00

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	■("Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi" @"di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar" @"yang berlaku dalam kurun waktu tertentu")/■("Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan " @"pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran " @"yang telah ditetapkan dalm kurun waktu tertentu") "×100%"	90	60	70	80	90	100	100
4.	Pertanahan								
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	$\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$	11,48	21,48	31,48	41,48	51,48	61,48	61,48
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	60	72	78	82	85	87	88
5.	Lingkungan Hidup								
Kabupaten/Kota									
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	-	-	Ada	-	-	-	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	-	-	-	Ada	-	-	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	-	-	-	-	Ada	Ada
5.29.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air (Peningkatan Indeks Kualitas Air)		15	16	17	18	19	20	20
5.30.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	50	51	52	53	54	55	56

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.31.	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	50	55	60	65	70	75	80
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	Tida Ada	-	2	4	6	8	10
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	32	64	96	128	160	192	224
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	32	64	96	128	160	192	224
5.37.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	Tida Ada	-	2	4	6	8	10
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada	Tida Ada
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$	1.38	11.38	21.38	31.38	41.38	51.38	61.38
5.44.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	0.028	10.028	20.028	30.028	40.028	50.028	60.028
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	"Jumlah sampah yang tertangani (ton)" /■("total jumlah timbulan sampah" @"di kabupaten/kota (ton)") "×100%"	28,08	38,08	48,08	58,08	68,08	78,08	78,08
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ atau telah menikah}}$	0.8962	0.91	0.92	0.93	0.94	0.96	0.96
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$	0.39	0.39	0.40	0.41	0.43	0.45	0.45
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	0.43	0.44	0.45	0.47	0.49	0.52	0.52
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	89.62	90.64	91.75	92.88	94.03	95.21	95.21
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	49.81	58.7	62.0	64.0	67.0	69.7	69.7
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$	65	66	71	79	81	100	100
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.	Persentase LSM aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
7.5.	Persentase LPM Berprestasi (%)	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
7.6.	Persentase PKK aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah PKK berprestasi}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	89	89	92	92	92	92	92
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r=\{(\frac{P_t}{P_0})\times(\frac{1}{t})-1\}\times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 $Pt=Po+(B-D)+(Mi-Mo)$ Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	1.16	1.15	1.14	1.12	1.12	1.12	1.12

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{Pif} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompol p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i p pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19 i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelom umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000	3.22	3.13	3.03	2.96	2.87	2.87	2.87
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	69.51	72.23	74.95	77.67	80.39	80.39	80.39

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) (%)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kemlompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$	31.49	30.65	29.86	27.84	27.26	27.26	27.26
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	14.45	14.2	13.83	13.58	13.36	13.36	13.36
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	$\frac{\text{Jumlah aseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah aseptor KB}} \times 100\%$	49.5	54.1	58.7	63.3	67.9	67.9	67.9

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dependency Ratio (%)	$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} x100$ Dimana: - DR = rasio beban tanggungan (dependency ratio) - P_{0-14} = jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun - P_{15-64} = jumlah penduduk usia 15-64 tahun - P_{65+} = jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas	64	63	63	62	61	61	61
9.	Perhubungan								
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	2,6
9.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	1.158	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	7.250
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	1	1	1	1	1	5
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (%)	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,35
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \times 100\%$	22,8	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,05

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.7.	Pemasangan Rambu- rambu (%)	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	42,40	47,25	54,54	64,24	76,37	100	342,56
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\%$	2,40	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	10,9
9.9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	88.130,00	105.756,00	126.907,20	152.288,64	182.746,37	219.295,64	786.993,85
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	4.164	4.364	4.564	4.764	4.964	5.164	19.890
10.	Komunikasi dan Informatika								
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\ \%$	37,50 %	37,50 %	54,17 %	7,83 %	87,50 %	100%	100%
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$	86,66 %	86,66 %	90,00 %	93,34 %	96,68 %	100%	100%

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	53,00 %	56,25 %	62,5%	68,75%	68,75 %	75,00 %	75,00%
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00%	5,00 %	75,00%
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	75,00 %
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
11.1.	Persentase koperasi aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	86.49	89.19	91.89	94.59	97.30	100	100
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	**Penanaman Modal**								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	32	1	1	1	1	1	5
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	124,473	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	1 M
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	50	50	50	50	50	50	250
13.	Kepemudaan dan Olah Raga								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$	11.35	11.36	11.38	11.39	11.41	11.42	11.42

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.2.	Persentase wirausaha muda (%)	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	38.27	38.28	38.30	38.35	38.45	38.50	38.50
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	41	42	44	46	50	55	55
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$	50	55	60	65	95	98	98
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100\%$	180	200	201	203	210	250	250
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.	223	250	252	253	255	300	300
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	16 Cabang Olahraga	17	17	20	20	22	22
14.	Statistik								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Persandian								
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100\ \%$	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52	1.52
16.	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	3	4	5	6	7	7
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	3	4	5	6	7	
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	4	5	6	7	8	8

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$	2.02	2.21	2.4	2.59	2.79	2.98	2.98
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}$	38,84	38,89	38,95	38,99	39,04	39,08	39,08
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	1,82	1,83	1,84	1,85	1,86	1,87	1,87
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	5217	5717	6217	6717	7217	7717	7717
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	24148	25398	26648	27898	29148	30398	30398

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$	7	25,71	31,42	37,14	42,85	58,57	58,57
18.	Kearsipan								
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	36,84%	49,12	61,40	73,68	85,96	100	100
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	3	4	5	6	7	7
Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pariwisata								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Kunjungan wisata (%)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja Kunjungan wisata se – kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kabupaten dan kota}} \times 100\%$	24.80	26.70	48.00	68.00	88.00	100.00	100
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	3	4	4	4	4	4	4
1.3.	PAD sektor pariwisata (%)	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	1	1.1	1.3	1.54	1.81	2.14	2.14
2.	**Pertanian**								
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	39.82	39.85	39.88	39.91	39.94	39.97	39.97

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontibusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	24.50	24.53	24.56	24.59	24.62	24.65	24.65
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	0.036	0.068	0.098	0.128	0.158	0.188	0.188
2.4.	Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	98.83	98.86	98.89	98.92	98.95	98.98	98.98

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan bina kelompok peternak (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok peternak yang mendapatkan bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok Peternak}} \times 100\%$	55	60	65	70	75	80	80
5.	Perdagangan								
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	9.30	16.40	16.70	16.95	17.17	17.36	17.36
6.	Perindustrian								
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$	25	30	36	41	52	58	58

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	**Transmigrasi**								
7.2.	Cakupan Penanganan KTM Ponu (%)	$\frac{\text{Realisasi Penanganan KTM Ponu}}{\text{Jumlah keseluruhan Penanganan KTM Ponu}} \times 100\%$	25.00	40.00	55.00	70.00	85.00	100.00	100.00
8.	**Kelautan dan Perikanan**								
8.1.	Produksi perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	90.38	100	100	100	100	100	100
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100\%$	40.54	52.43	64.32	76.21	88.10	100	100
8.3.	Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok Perikanan Budidaya yang mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya}} \times 100\%$	50	60	70	80	90	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$	91.08	100	100	100	100	100	100
Penunjang Urusan									
1.	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	$\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruangan}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
2.	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.	Persentase SILPA (%)	"Total SILPA" /"Total APBD" "×100%"	7.8	0	0	0	0	0	0
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	"Total SILPA" /"Total APBD" "×100%"	7.8	0	0	0	0	0	0
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	■("Jumlah program dalam APBD yang" @"tidak dilaksanakan")/"Total program APBD"	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		■("Jumlah Kegiatan dalam APBD yang" @"tidak dilaksanakan")/"Total Kegiatan dalam APBD" "×100%"	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	"Jumlah Belanja bidang urusan pendidikan" /"Total APBD" "×100%"	21.45	21.45	21.45	21.45	21.45	21.45	21.45

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%) (%)	"Jumlah Belanja bidang urusan kesehatan" /"Total APBD" "×100%"	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$	1.17	16	21	26	31	36	41
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$	18.15	156	166	176	186	196	206

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		33 orang	39	39	39	39	39	39
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		2767	2777	2787	2797	2807	2817	2827
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2123 orang	2223	2323	2423	2523	2623	2723
5.	Pengawasan								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100\,\%$	59.89%	62%	64%	66%	68%	70%	70%
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai (%)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\,\%$	0.42%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%
5.3.	Jumlah temuan BPK		698 temuan rekomendasi	708	718	728	738	748	748
6.	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX

PENUTUP

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dan program Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2019-2024. Dokumen ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan yang menjadi penyelaras antara dokumen rencana jangka panjang sekaligus penghubung dengan jangka pendek dibawahnya sehingga terdapat keselarasan dan kesinambungan diantara dokumen yang ada yang menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat berjalan dan terjaga secara terarah, terpadu dan berkelanjutan

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2026-2031 dengan mempedomani RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2027;
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2027, masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

3) Selanjutnya RKPD Tahun 2027 merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 akan dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2022 hingga tahun 2026 berpedoman pada RPJMD ini sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan RPJMD ini;
4. Perangkat Daerah (PD) serta masyarakat (*Civil Society*) termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
5. PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, berkewajiban menyusun Renstra-PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-PD dengan mempedomani RPJMD ini;
6. Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD;
7. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara berkewajiban melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPJMD dan dokumen tahunan lainnya.

9.3. Perubahan RPJMD

a. Perubahan RPJMD ini hanya dapat dilakukan apabila:
   1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017;
   3. Terjadi perubahan yang mendasar.

b. Dalam rangka efektifitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan 2 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.

c. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

d. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

RPJMD ini merupakan dokumen pembangunan daerah yang harus dipedomani bersama agar percepatan pembangunan di daerah ini dapat terlaksana dengan baik.

Kefamenanu, 23 Agustus 2021

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

DRS. JUANDI DAVID